



Editor: Muhamad Hisyam

❧

❧

# Pasar Minggu

## *Tempo Doeloe*

*Dinamika Sosial Ekonomi Petani Buah  
1921-1966*

❧

❧ Asep Suryana ❧

❧

# PASAR MINGGU TEMPO DOELOE



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pengantar:  
Dr. Muhamad Hisyam

---

# PASAR MINGGU TEMPO DOELOE

---

Dinamika Sosial Ekonomi Petani Buah  
1921–1966

---

Asep Suryana



LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2012 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pasar Minggu Tempo Doeloe: Dinamika Sosial Ekonomi Petani Buah 1921–  
1966/Asep Suryana. – Jakarta: LIPI Press, 2012.  
xviii + 191 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-712-0 (cetak)  
978-602-496-299-9 (e-book)

1. Petani buah  
2. Sosial  
3. Ekonomi  
4. Pasar Minggu

634.094

Editor : Muhamad Hisyam  
Kopieditor : Fadly Suhendra  
Penata Isi : Fadly Suhendra dan Andri Setiawan  
Desainer Sampul : Junaedi Mulawardana

Cetakan Pertama : Oktober 2012



Diterbitkan oleh:  
LIPI Press, anggota Ikapi  
Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350  
Telp. (021) 314 0228, 314 6942. Faks. (021) 314 4591  
E-mail: [bmlipi@centrin.net.id](mailto:bmlipi@centrin.net.id)  
[lipipress@centrin.net.id](mailto:lipipress@centrin.net.id)  
[press@mail.lipi.go.id](mailto:press@mail.lipi.go.id)

Atas kerja sama:  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI)  
dengan  
Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD)

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi  
Pengetahuan Lokal Tahun 2021 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press),  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi  
Internasional Creative Commons  
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

# Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih.....	ix
Pengantar Editor.....	xi

## **BAB I**

### PENDAHULUAN: PINGGIRAN KOTA SEBAGAI KAJIAN

SEJARAH .....	1
A. Arti Penting Pinggiran Kota.....	1
B. Hubungan Pusat Kota dengan Daerah Pinggiran .....	7
C. Data dan Informasi .....	12
D. Sistematika Buku .....	15

## **BAB II**

### DARI TANAH PARTIKULIR KE TANAH GUBERNEMEN: DENYUT KOMERSIALISASI BUAH-BUAHAN DI AKHIR

MASA KOLONIAL .....	17
A. Di Bawah Bayang-bayang Tanah Partikulir .....	20
B. Setelah Menjadi Tanah Gubernemen .....	32

## **BAB III**

### PERUBAHAN STATUS, INFRASTRUKTUR, DAN

PERTANIAN SAWAH .....	47
A. Dualisme Budidaya dan Pasar Buah .....	48
B. Antara Jalan Tanah, Stasiun, dan Rel Kereta Api.....	59
C. Peralihan Status, Pulang-Pasar, dan Pertanian Sawah .....	64

## **BAB IV**

### ANTARA HIDUP DAN MATI: DAYA TAHAN PETANI BUAH

PASAR MINGGU DI TENGAH MOBILISASI DAN REVOLUSI .....	83
A. Mobilisasi dan Tersudutkannya Pertanian Buah.....	87
B. Geliat Komersialisasi Buah di Ujung Revolusi.....	99

**BAB V**

DEKOLONISASI DAN TERWUJUDNYA TATA SOSIAL BARU ..... 105

- A. Menjadi Pinggiran Jakarta ..... 106
- B. Eksperimen Administratif Permukiman ..... 113
- C. Indonesianisasi Kebun Percobaan Buah-buahan..... 118

**BAB VI**

ERA JAYA BUAH-BUAHAN..... 129

- A. Struktur Kependudukan Pasar Minggu ..... 130
- B. Meluasnya Pertanian Buah..... 140
- C. Monetisasi dan Individualisasi Petani Buah ..... 152
- D. Era Baru..... 159

**BAB VII**

PENUTUP ..... 163

DAFTAR PUSTAKA ..... 181

LAMPIRAN ..... 189

## Ucapan Terima Kasih

Pasar Minggu saya kenang sebagai nostalgia. Di Pasar Minggu, saya pernah tinggal selama empat tahun, tidak jauh dari Lembaga Hortikultura, lembaga yang juga menjadi fokus riset ini. Tidak ada yang mengusik saya untuk tahu lebih dalam lokasi tempat saya tinggal ini. Semuanya biasa saja. Saban hari saya menyusuri wilayah ini untuk kuliah ke kampus Universitas Indonesia yang terletak di Depok. Ternyata, lebih 10 tahun kemudian saya berkesempatan melakukan riset sejarah sosial ekonomi di sepanjang wilayah, antara terminal Pasar Minggu hingga Pondok Cina, yang dahulu setiap hari saya lewati. Syukurlah, melalui riset ini, saya mengetahui bahwa Pasar Minggu ternyata memiliki pernik-pernik sejarah yang istimewa.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pelatihan penelitian sejarah Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) dan *Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie* (NIOD), di mana riset ini bernaung. Kepada Bapak Prof. Dr. Taufik Abdullah yang telah bersedia menjadi pembimbing utama seluruh kegiatan pelatihan penelitian sejarah lokal ini. Kepada Bapak Prof. Dr. AB Lopian yang memberikan komentar mendasar dan saran-saran yang sangat berharga untuk diperbaiki pada *Workshop* pertama di Padang pada Agustus 2005. Terlebih lagi, kepada Bapak Dr. Muhamad Hisyam dan Ibu Els Bogaerts, M.A. yang telah menyediakan waktu untuk

membaca naskah hasil riset ini dan pelbagai komentarnya sehingga tersaji seperti sekarang ini. Atas kebaikan dari Bapak Hisyam dan Ibu Els, saya ucapkan terima kasih.

Kepada Bapak Sukri Abdurrachman, S.H., atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti praktik pelatihan penelitian sejarah untuk kali kedua, dan atas kemahirannya dalam mengelola pelatihan penelitian ini. Hal yang sama saya tujukan kepada tim pengelola pelatihan. Kepada Bapak Charsum dan Mas Joko (Mas Joko selalu mengingatkan saya atas tanggung jawab akademis penelitian ini). Kepada Mbak Yuli, Mbak Ana, dan Mbak Mensi yang selalu mengingatkan saya untuk menepati jadwal yang telah ditetapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sesama pelaku riset sejarah lokal, dari Medan hingga Jember. Kepada kawan-kawan lainnya yang dengan cara sendiri telah membantu saya dalam riset ini. Kepada Afandi, J.J. Rizal, dan Didik Prajogo saya mengucapkan terima kasih. Terakhir kepada istri saya (Eva Latifah) dan anak saya (Ashar Ilyasa Hakim) yang dalam usia empat tahun telah memberikan kehangatan di rumah sehingga proses pengerjaan riset ini penuh dengan suasana menyenangkan.

Asep Suryana

Buku ini tidak diperjualbelikan.

## Pengantar Editor

**B**uku yang hadir di hadapan sidang pembaca sekalian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan Sdr. Asep Suryana, M.Si. ketika yang bersangkutan mengikuti program pelatihan penelitian sejarah bagi sejarawan muda yang diselenggarakan atas kerja sama antara Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) dengan Nederlands Instituut voor Oorlog Documentatie (NIOD). Walaupun formalnya dinamakan “pelatihan”, tetapi para peserta melakukannya secara serius sebagaimana layaknya seorang peneliti profesional. Pelatihan itu berlangsung selama dua tahun, mulai 2003–2005, diikuti oleh sarjana-sarjana sejarah dan ilmu sosial/humaniora dari berbagai universitas dan lembaga penelitian. Sdr. Asep Suryana sendiri adalah sarjana sosiologi lulusan FISIP-UI. Tema proyek pelatihan ini adalah *Indonesia Across Orders, Reorganization of Indonesian Society 1930–1960*. Jadi, periode yang diliput mencakup masa 30 tahun yang di dalamnya ada peristiwa penting, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ ada proses dekolonisasi, yang meliputi banyak sekali aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Karena itu, pilihan topik penelitian oleh peserta juga menjadi beragam.

Sebelum “terjun ke lapangan” para peserta dibekali teori dan metodologi sejarah melalui kursus intensif selama tujuh minggu, dan memasuki tahun kedua ditambah lagi dua minggu dengan penekanan pada materi-materi yang dianggap masih lemah menurut

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pengalaman praktik selama satu tahun. Materi-materi kursus diberikan oleh para pakar yang mempunyai reputasi keilmuan, baik nasional maupun internasional, bukan saja dari Indonesia dan Belanda, melainkan juga dari Australia, Jepang, dan Singapura. Dalam melaksanakan penelitian para peserta dibimbing secara intensif oleh pakar sejarah dari Belanda dan Indonesia, dan secara periodik dilakukan “konsolidasi keilmuan” melalui *workshop-workshop* dengan menghadirkan *reviewer* dari berbagai universitas dan lembaga penelitian, di samping para pembimbing itu sendiri. Dari 14 peserta dipilih laporan penelitian yang dinilai baik oleh para pembimbing dan *reviewer*, untuk kemudian diterbitkan. Ketika itu saya (editor buku ini) adalah “*director*” program ini.

Sekalipun bukan sesuatu yang baru, pendekatan kombinasi sejarah dan sosiologi, atau boleh juga disebut *historical sociology*—yang dipakai penulis buku ini—menunjukkan sifat distingtif dari kebanyakan studi sejarah pada umumnya. Dengan pendekatan itu, penulis merekonstruksi dinamika petani buah di Pasar Minggu periode 1930–1960 dengan menggunakan konsep *peripheralization* yang menempatkan Pasar Minggu sebagai daerah pinggiran kota dan hubungannya dengan pusat kota. Hubungan itu direkonstruksi sebagai “penyangga” dalam arti Pasar Minggu menjadi pemasok kebutuhan hasil pertanian untuk Kota Jakarta dan melalui Jakarta hasil pertanian Pasar Minggu dijadikan komoditas ekspor ke mancanegara. Hubungan semacam ini, menurut penulis, ternyata telah berlangsung sejak lama, yaitu sejak jaman VOC, ketika daerah-daerah sekitar Batavia masih disebut *ommelanden Batavia*. Pada awal abad ke-19, Batavia menciptakan sistem hari pasaran, dan menetapkan pasar hari Minggu di tempat yang selanjutnya menjadi Pasar Minggu, di samping hari-hari pasar lainnya seperti hari Senin, menjadi Pasar Senin, hari Rabu menjadi Pasar Rebo dan seterusnya. Dengan ini pula Pasar Minggu mulai terintegrasi dengan Kota Batavia. Memasuki masa kemerdekaan, hubungan semacam itu terus berlangsung hingga tahun 1970-an. Dalam pada itu, Pasar Minggu yang dahulunya mengalami perkembangan tersendiri sebagai ping-

giran kota berubah terserap ke dalam dinamika Kota Jakarta setelah Gubernur Ali Sadikin menjadikan daerah ini sebagai penyangga pemukiman kota. Walaupun demikian, citra Pasar Minggu sebagai daerah penghasil buah-buahan, masih ada sisanya hingga sekarang.

Kehadiran buku ini mempunyai nilai baru dalam studi sejarah. Kebanyakan studi tentang kota menfokuskan diri pada kota sebagai inti pembahasan. Buku ini menjadikan pinggir kota sebagai inti kajian. Dengan demikian, dapat disimak secara cermat bagaimana proses transformasi berlangsung dari daerah pinggiran kota menjadi terintegrasi ke dalam kota. Transformasi itu tidak hanya menyangkut aspek sosial, pemerintahan dan ekonomi, tetapi bersamaan dengan itu pula status tanah juga mengalami perubahan. Untuk memasok kebutuhan pangan Kota Batavia, VOC dulu menjadikan daerah pinggiran sebagai tanah partikular, di mana tuan-tuan tanah bukan saja menguasai tanah miliknya, tetapi sekaligus memerintah penduduk di atas tanah partikular itu menurut sistemnya sendiri. Para tuan tanah itu bukan sekadar mengusahakan pertanian dan buah-buahan untuk memenuhi pasokan pangan dan buah penduduk kota, tuan-tuan tanah itu juga mengusahakan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sebagai komoditas ekspor, seperti karet dan minyak sereh.

Pada masa itu, wilayah Pasar Minggu memasuki abad ke-20 pemerintah kolonial Belanda membeli sebagian besar tanah partikular di wilayah Pasar Minggu sehingga statusnya menjadi tanah gubernemen. Dengan perubahan status tanah tersebut, para petani menjadi “merdeka” dari himpitan tuan tanah, dan mempunyai kebebasan dalam menjalankan pertaniannya. Dengan itu pula pemerintah Hindia Belanda lebih leluasa menjalankan rencananya sendiri terhadap tanah gubernemen. Di wilayah ini diterapkan sistem pemerintahan desa, menggantikan sistem lama yang dikenal sebagai “kemandoran”. Pasar Minggu dijadikan pusat pengembangan pertanian. Di Pasar Minggu pemerintah mendirikan laboratorium penelitian tanaman pangan dan buah-buahan dengan sistem modern. Kegiatan kantor ini melakukan penelitian dan rekayasa bibit unggul berbagai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jenis tanaman buah untuk kemudian disebar luaskan ke para petani. Dengan cara itu Pasar Minggu berkembang menjadi sentra penghasil pertanian, seperti buah-buahan, sayuran, dan susu.

Memasuki tahun 1950, setelah revolusi berakhir, suasana relatif aman, dan kedaulatan telah sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintahan Indonesia, kantor-kantor yang dahulunya didirikan dan dikendalikan oleh Belanda diambil alih oleh orang-orang Indonesia sendiri. Maka berdirilah Jawatan Pertanian Rakyat dan Kebun Percobaan Pasar Minggu. Perlahan-lahan geliat Pasar Minggu memulihkan citranya sebagai penghasil buah-buahan, setelah stagnan selama pendudukan Jepang dan masa revolusi. Sekalipun para pemimpin Jawatan Pertanian Rakyat dan kantor-kantor di bawahnya hanyalah lulusan *Middelbare Landbaukschool*, sekolah menengah pertanian di Bogor, ternyata mereka mempunyai keahlian dalam pertanian dan manajerial yang memadai. Sebagai contoh, Harsono Hardjo-hoetomo yang menjadi kepala Pusat Jawatan Pertanian Rakyat Bagian Teknologi Makanan adalah seorang pakar dengan reputasi internasional dalam bidang teknologi pangan. Berkat kinerja kantor pertanian Pasar Minggu di bawah pemerintahan Indonesia ini Pasar Minggu kembali meraih kejayaannya sebagai penghasil buah-buahan. Pada masa jayanya itu, buah-buahan hasil Pasar Minggu seperti jambu, dukuh, mangga, pepaya, pisang, sawo, macam-macam buah jeruk, rambutan dan sebagainya telah berhasil memenuhi sebagian besar kebutuhan akan buah-buahan penduduk Kota Jakarta.

Yang juga tampak baru dalam buku ini adalah penggunaan metode sejarah lisan. Dalam metode sejarah konvensional dikenal “rumus: tidak ada dokumen tidak ada sejarah”. Belakangan berkembang metode baru dalam rekonstruksi sejarah, yaitu apa yang disebut sebagai *oral history* atau sejarah lisan. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi sejarah terhadap peristiwa-peristiwa kecil, orang kecil, bahkan tingkat individual pun dapat dilakukan. Dengan sejarah lisan masa lalu Indonesia yang begitu kaya dan belum terdokumentasikan dapat “disejarahkan”. Ini merupakan alternatif penulisan sejarah yang menguntungkan bagi Indonesia yang luas

wilayahnya dengan penduduk dan tradisi yang begitu plural. Apalagi jika diingat bahwa tradisi lisan di Indonesia lebih berkembang dari pada “tradisi tulis” yang untuk sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan hal baru. Bukankah bagi kebanyakan orang tua dari generasi kita sekarang lebih banyak yang buta huruf daripada yang melek huruf. Ini menyebabkan dokumen tulis atau teks yang benar-benar asli milik masyarakat Indonesia masa lalu sangat minim. Jika kita tetap berpegang pada “syarat-rukun” sejarah konvensional, yakni tidak ada dokumen maka tidak ada sejarah, maka bahan sejarah mengenai masyarakat lapis bawah Indonesia sangat sedikit, kalau bukan malahan tidak ada. Apa yang ada merupakan sejarah kaum lapis atas, justru yang merupakan minoritas. Sejarah orang biasa atau sejarah masyarakat bawah menjadi tidak ada karena tidak ada dokumennya. Karena itu, sejarah lisan merupakan metode sangat penting untuk Indonesia masa kini dan masa depan karena dengan metode ini sejarah orang kebanyakan di banyak tempat dapat ditulis, termasuk sejarah petani buah di Pasar Minggu.

Program *Indonesia Across Orders* memang sengaja menjadikan metode sejarah lisan dipentingkan, selain karena temanya menyangkut periode yang memungkinkan dilakukan wawancara sejarah lisan, subjek penelitiannya juga sangat beragam. Ketika kursus, untuk mengisi materi sejarah lisan ini didatangkan pakar dari KITLV Leiden yang dikenal menguasai metode ini karena telah mengonsentrasikan studi pada subjek ini dan menerbitkan sejumlah karya dengan pendekatan ini, yaitu Dr. Fridus Steijlen. Dalam memberi pelajaran dalam kursus tersebut, ia tidak hanya berceramah di kelas, tetapi juga mengutamakan diskusi dan praktik wawancara di lapangan. Dan setelah itu, dalam praktik penelitian, wawancara sejarah lisan dipakai sebagai metode utama, walaupun tidak berarti mengabaikan metode konvensional, yakni penelusuran dokumen.

Dengan sejarah lisan ini dapat dibayangkan bahwa hasil penelitian peserta program *Indonesia Across Orders* memiliki keunggulan komparatif dengan karya sejarah lainnya karena dapat mengungkap sisi-sisi gelap yang tidak banyak memperoleh perhatian, tetapi justru

memiliki signifikansi yang tinggi dalam rekonstruksi sejarah yang menjadi topik pilihan peneliti. Dengan metode sejarah lisan penulis buku ini dapat mengungkap pengalaman dan kesaksian orang kecil, seperti penjual buah di stasiun, tentang kekejaman orang Jepang sewaktu pendudukan. Misalnya, hanya karena kesalahpahaman kecil, soal bahasa yang tidak nyambung, seorang pedagang dukuh digampari sampai hampir pingsan. Juga kesaksian orang kecil tentang patroli-patroli tentara Belanda dan pos polisi di dekat Stasiun Pasar Minggu yang dijadikan markas pasukan Belanda. Dari pos ini mereka ke pelosok-pelosok untuk mempersempit ruang gerak tentara Republik dan Laskar Banteng Merah. Suatu kali, patroli tentara Belanda ini menembak mati seorang anggota Badan Keamanan Rakyat yang juga sedang berpatroli. Dapat ditambahkan bahwa di bagian selatan Pasar Minggu pada masa revolusi merupakan daerah “kekuasaan” Laskar Banteng Merah, laskar rakyat yang berafiliasi pada Komunis, dan sebagian besar anggotanya adalah penduduk Desa Jagakarsa.

Perilaku pedagang buah yang sebagian besar masuk dalam kategori “orang kecil” itu dapat diungkap secara detail. Misalnya, bagaimana pedagang buah itu sejak pagi-pagi sekali memikul dagangannya ke stasiun-stasiun kereta api, seperti Pasar Minggu dan Tanjung Barat, naik kereta api menuju Kota atau pasar Jatinegara, dan yang lainnya memikul dagangannya berjalan kaki berombongan menuju Manggarai atau Kampung melayu. Dari keuntungan yang kecil mereka belanjakan untuk membeli kebutuhan keseharian, seperti beras, ikan asin, garam, dan tembakau.

Pendek kata, penggunaan metode sejarah lisan hasil penelitian proyek *Indonesia Across Orders*, termasuk buku ini, telah ikut mengisi kekosongan sejarah, yakni sejarah “orang kecil”. Dengan metode ini, sejarah orang biasa (*history from below*) dapat dibuat. Selama ini sejarah selalu dikaitkan dengan struktur, perubahan merupakan persinggungan satu struktur dengan struktur yang lain, sedangkan individu dan orang biasa tidak tampak dalam sejarah konvensional.

Saya ingin mengakhiri pengantar pendek ini dengan apresiasi yang tinggi terhadap karya Sdr. Asep Suryana khususnya dan usaha penulisan sejarah lokal pada umumnya, mengingat sejarah genre ini masih terbilang sedikit dilakukan oleh sejarawan kita. Apalagi sejarah pinggiran kota, lokalitas yang lebih khusus ini rupanya memperlihatkan perkembangan yang dinamis yang tidak saja terkait dengan dinamik kota sebagai pusatnya, tetapi juga dengan dunia global pada umumnya. Memahami sejarah di tingkat lokal seperti ini merupakan bagian penting dari semangat desentralisasi yang sejak reformasi digulirkan. Secara umum, kesadaran sejarah penting ditumbuhkan dalam masyarakat manapun, termasuk masyarakat Pasar Minggu karena sejarah merupakan cermin yang dapat menimbulkan kearifan dalam menatap dan merencanakan masa depan.

*Wa Allahu Alam bis-Shawab*

Dr. Muhamad Hisyam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

# BAB I

## Pendahuluan: Pinggiran Kota Sebagai Kajian Sejarah

### A. ARTI PENTING PINGGIRAN KOTA

Dekolonisasi pinggiran kota, khususnya di ibu kota negara, ternyata memiliki problematika tersendiri. Sebagai suatu wilayah kota yang disandingkan dengan pusat kota, dan telah berakarnya sistem kolonialisme di wilayah ini, kajian pinggiran kota cenderung diabaikan dalam historiografi Indonesia. Padahal, setidaknya terdapat tiga fenomena menarik yang sebenarnya terjadi di wilayah pinggiran kota.

*Pertama*, pinggiran kota dipertalikan dengan pusat kota karena keduanya berada dalam kerangka sistem pembagian kerja (*division of labour*) tertentu. Pinggiran Kota Jakarta hingga tahun 1970-an misalnya, dibutuhkan sebagai pemasok komoditas pertanian, baik untuk kepentingan penduduk kota maupun untuk diekspor. Pasar Minggu, Pasar Rebo, Tanjung Barat, dan Lenteng Agung yang merupakan *Ommelanden* Batavia (daerah sekitar Batavia) bagian selatan, berfungsi sebagai pemasok buah-buahan, selain pemasok ikan mas, tawes, dan gurame. Sementara itu, kebutuhan beras dibebankan kepada bagian barat, Cengkareng, bagian timur, Klender, dan bagian utara Tanjung Priok, mendampingi bagian utara Jakarta yang memasok ikan laut dan ikan empang.<sup>1</sup> Jadi, pinggiran kota memiliki keterkaitan ekonomi yang spesifik dengan pusat kota, sungguhpun masyarakat

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kotapradja Djakarta, *Djakarta Raja*, 1953, Djakarta: Van Dorp, hlm. 42, dan 104.

pinggiran kota dihantui semacam keterbelahan sosial karena mereka merasa bukan sebagai warga kota.<sup>2</sup>

*Kedua*, ide bahwa pinggiran kota berfungsi sebagai pemasok kebutuhan pertanian pusat kota atau keduanya diikat oleh sistem pembagian kerja tertentu dapat dikatakan terbentuk sejak lama, bahkan sejak era VOC. Hal tersebut dapat dijumpai dalam konsep yang disebut sebagai *Ommelanden* Batavia, konsep pembagian wilayah kolonial yang memiliki fungsi sebagai pemasok atau penyangga Batavia. Konsep ini pada awalnya mengacu kepada wilayah “tak bertuan” antara kastil Batavia dengan pemukiman Pribumi. Setelah *Ommelanden* menjadi wilayah aman dan dapat dikelola, konsep tadi lebih diacu dalam fungsi sosial ekonominya, dan agar makin produktif, dibentuklah pelbagai lembaga sosial ekonomi terkait, seperti tanah partikulier dan lain sebagainya, supaya fungsi sosial ekonomi wilayah pinggiran semakin meningkat.<sup>3</sup> Ide ini terus berlanjut bahkan dapat dijumpai secara eksplisit pada dokumen resmi pemerintah Jakarta pada tahun 1972. Secara resmi, dokumen resmi pemerintah Jakarta menyebut wilayah pinggiran sebagai pedusunan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bahkan sampai hari ini pun, peran daerah selatan Jakarta sebagai pemasok kebutuhan buah masih terus berlanjut. Hal tersebut, umpamanya, terlihat dari pasar buah-buahan harian di areal stasiun Citayam, salah satu stasiun kereta api antara jalur Jakarta-Bogor. Pasar buah harian tersebut telah berfungsi sejak dini hari hingga pagi. Setiap hari, petani buah dari pelosok Citayam memasarkan hasil kebunnya itu ke pasar ini dengan berjalan kaki. Di Pasar itu, mereka menjualnya ke pedagang perantara dengan sistem paket pikulan. Kemudian, pedagang perantara itu yang membawa hasil kebun para petani ke pasar-pasar di Jakarta. Bisa juga, petani buah memanfaatkan kendaraan bak terbuka dengan bayaran tertentu, tergantung berat pikulannya dan jarak tempuh mereka. Untuk informasi bahwa penduduk pinggiran Jakarta merasa bukan bagian dari warga kota, lihat Amri Marzali, “Development and Urbanization in Condet”, *Berita Antropologi* No. 45, Depok: Jurusan Antropologi FISIP UI, 1989.

<sup>3</sup> Remco Raben, “Round about Batavia: Ethnicity and Authority in the *Ommelanden* 1650–1800”, dalam Kees Grijns and Peter J. M. Nas, *Jakarta: Socio-Cultural Essays*, Leiden: KITLV Press, 2000.

<sup>4</sup> Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, *Jakarta Membangun*, Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, 1972, hlm. 16, 24, 33; dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, *Some Data about Djakarta*, Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota, 1972, hlm. 9, 82–83.

*Ketiga*, dari segi fungsi pemerintahan, kegiatan pemerintahan untuk wilayah ini bagaikan kabupaten, meski wilayah pinggiran ini berstatus resmi sebagai bagian dari kota. Pemerintah kotapraja Jakarta misalnya, pada tahun 1950-an banyak sekali melakukan program pertanian agar produksi pertanian di wilayah pinggiran semakin meningkat. Pada sisi lain, pengaruh pemerintah kotapraja Jakarta di wilayah ini tidak sekuat pengaruhnya untuk wilayah pusat kota. Meminjam kata-kata The Liang Gie: “[t]erasa sekali bahwa pemerintahan daerah itu hanya berlangsung di daerah perkotaan sadja, sedang di daerah-daerah pinggiran ... belum terasa pengaruh Pemerintah Daerah Kotapradja”.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dinamika salah satu wilayah pinggiran Kota Jakarta, yakni Kecamatan Pasar Minggu dalam waktu yang berlainan, mulai dari era Batavia (Pemerintah Hindia Belanda) hingga Jakarta (pasca proklamasi kemerdekaan) antara 1921–1966. Sebagai wilayah penghasil buah-buahan, sistem ekonomi kebun buah memang sangat terkait ekonomi uang. Buah-buahan yang bukan makanan pokok harus dijual terlebih dahulu agar para petani kebun itu dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka. Sebaliknya, uang hasil penjualan buah-buahan itu juga memainkan peran yang penting bagi dinamika sosial ekonomi lokal di wilayah tersebut. Jadi, melalui kebun buah-buahan komunitas petani telah mengalami proses monetisasi. Demikianlah salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang dilakukan oleh Siswantari,<sup>6</sup> Koentjaraningrat,<sup>7</sup> maupun penelitian yang

---

<sup>5</sup> The Liang Gie, *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta*, Djakarta: Kotapradja Djakarta Raja, 1958, hlm. 190.

<sup>6</sup> Siswantari, *Pembangunan Kota Baru Kebayoran sebagai Kawasan Pemukiman Penduduk (1948–1953)*, Depok: Skripsi Sarjana Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1989.

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, “Ciracas dan Cilangkap, Dua Desa di Pasar Rebo, Selatan Jakarta”, dalam Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Desa di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 355–456.

dilakukan oleh Boedhisantosa<sup>8</sup> di Desa Jagakarsa yang termasuk Kecamatan Pasar Minggu pada tahun 1960.<sup>9</sup>

Bila dirunut ke belakang, fungsi sosial ekonomi wilayah Kecamatan Pasar Minggu sebagai penghasil buah-buahan dan dinamika hubungan pinggiran-pusat yang terbentuk, merupakan hasil dari kebijakan wilayah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pada tahap yang paling awal, kebijakan wilayah tersebut terkait dengan pembentukan tanah partikular di masa VOC. Keterkaitan sosial ekonomi tanah-tanah partikular ini makin menguat ketika jalan yang menghubungkan Meester Cornelis, Pasar Minggu, Jagakarsa, Srengseng, Depok, Citayam, terus sampai ke Buitenzorg dibangun pada awal abad ke-19. Bahkan fungsi sosial ekonomi wilayah ini lebih menguat lagi ketika sistem transportasi kereta api Batavia-Buitenzorg telah beroperasi pada tahun 1873, sistem transportasi massal yang mampu mengangkut komoditas pertanian secara lebih mudah, lebih murah, dan dengan jumlah yang lebih besar ke pusat kota.<sup>10</sup> Akibat keberadaan sistem transportasi ini, wilayah Pasar Minggu bertransformasi menjadi penyangga Batavia, dan secara sosial ekonomi pun, wilayah pinggiran ini semakin terintegrasi dengan Batavia.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Soeboer Boedhisantosa, "Djakarsa: Desa Kebun Buah-buahan Dekat Djakarta", dalam Koentjaraningrat (ed.) *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1962, hlm. 94–114.

<sup>9</sup> Abdul Aziz, *Pengusuran Mengakibatkan Terjadinya Migrasi Lokal di Jakarta 1966–1977*, Skripsi Sarjana Sejarah. Depok: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2002, bab 3.

<sup>10</sup> Adhitya Hatmawan, *Perkembangan Transportasi Kereta Api di Jakarta 1870–1925*, Skripsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 2002, bab 3.

<sup>11</sup> Meski secara sosial ekonomi, wilayah Pasar Minggu telah terintegrasi dengan Batavia, tetapi secara administratif wilayah Pasar Minggu bukan wilayah resmi Batavia. Wilayah Pasar Minggu resmi menjadi bagian formal Jakarta terjadi pada tahun 1950, melalui Keputusan Presiden RIS No. 125 Tahun 1950. Lihat The Liang Gie, *op-cit.* dan Tawaludin Haris, *Jakarta Masa Hindia Belanda*, Laporan Penelitian Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995, Lampiran peta 1 dan peta 2.

Pada tanggal 1 April 1921, pemerintah kolonial membangun laboratorium pertanian berupa kebun percobaan buah-buahan setelah wilayah Pasar Minggu (kecuali tanah partikular Lenteng Agung) dibeli pemerintah, hingga tidak lagi menjadi tanah partikular melainkan berstatus tanah gubernemen.<sup>12</sup> Pendirian lembaga penelitian modern ini pada dasarnya merupakan akomodasi kelembagaan atas gejala makin menguatnya komersialisasi buah-buahan yang dilakukan petani setempat sejak awal abad ke-20. Jadi, bila kemudian wilayah Pasar Minggu dikenal sebagai penghasil buah-buahan, hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan lembaga penelitian modern ini yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Fungsi kawasan Pasar Minggu sebagai penghasil buah-buahan semakin meluas pada tahun 1950-an.<sup>13</sup> Desa-desa belahan selatan Kecamatan Pasar Minggu yang pada era kolonial merupakan desa pertanian padi beralih mata pencaharian menjadi pertanian buah. Alih jenis pertanian ini bertalian erat dengan rusaknya sistem irigasi di wilayah selatan Pasar Minggu pada masa Pendudukan Jepang. Bahkan pasokan air makin surut karena danau-danau lokal yang berfungsi sebagai penyimpanan dan pemasok air di selatan Pasar Minggu makin menciut. Menciutnya luas danau beriringan dengan didudukinya perkebunan buah-buahan oleh tentara Angkatan Darat

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfoedi, “Pekerjaan di Balai Penyelidikan Perkebunan”, dalam *Pertanian* No.4 Tahun ke-7, 1951, hlm. 12–19; Abd. Manap, “Pasar Minggu Meramaikan 1 April”, dalam *Pertanian* No. 6 Tahun ke-8, 1957, hlm. 123–131; Boedhisantosa, *op. cit.*, hlm. 94–114. Lihat juga Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemerintah DKI Jakarta, *Sejarah Pimpinan Jakarta Sepanjang Tiga Abad 1620–1942*, Jakarta, 2002, hlm. 162, 186–188.

<sup>13</sup> Bahkan sampai akhir tahun 1980-an, jawatan kereta api mengoperasikan kereta khusus yang ditujukan sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil kebun itu di jalur kereta api Jakarta-Bogor. Kereta khusus itu dikenal dengan Kereta Langsam, terdiri atas beberapa gerbong dengan ruang luas untuk mengangkut hasil buah-buahan. Kereta Langsam yang berhenti di setiap stasiun itu, menjadi andalan transportasi para petani-buah atau pedagang buah dalam rangka memasarkan hasil kebunnya itu, mulai dari Bogor, Cilebut, Bojongsgede, Citayam, Depok Lama, Depok Baru, Pondok Cina, dan Lenteng Agung. Buah-buahan itu mereka pasarkan secara individual atau dijual kepada penjual buah-buahan di Pasar Minggu hingga stasiun Jakarta Kota.

yang membutuhkan kompleks kantor dan permukiman dengan alasan demi memberantas gerombolan Banteng Merah, bekas milisi perang kemerdekaan yang mengacau pada awal tahun 1950-an.

Meluasnya pertanian buah di atas juga difasilitasi oleh keberadaan Kantor Perkebunan Rakyat dan Kebun Percobaan Pasar Minggu. Kantor ini berfungsi menyediakan bibit unggul buah-buahan secara murah untuk petani setempat. Selain itu, Kantor Perkebunan yang memiliki banyak areal kebun buah yang luas di Kecamatan Pasar Minggu, ternyata menjadi teladan hidup bagi praktik sistem penanaman buah-buahan secara modern. Petani setempat dapat menyaksikan sendiri suatu sistem penanaman buah-buahan modern yang mampu meningkatkan produktivitas kebun mereka.

Meluasnya areal kebun buah di atas semakin mendinamiskan pasar buah Jakarta. Pada sisi lain, jumlah petani buah yang semakin banyak tersebut menandai semakin dominannya peran petani buah dibandingkan perkebunan buah-buahan milik pemerintah sebagaimana terekam dalam lagu Bing Slamet yang terkenal pada tahun 1962. Jumlah hasil perkebunan buah-buahan milik pemerintah pun relatif mengecil, karena arealnya di selatan Pasar Minggu justru dijadikan markas Yon Zipur dan kompleks permukiman untuk kesatuan angkatan darat ini.

Sampai tahun 1965, Kecamatan Pasar Minggu merupakan pinggiran Jakarta.<sup>14</sup> Peta resmi Pemerintah Jakarta pun mendefinisikan wilayah ini sebagai pedusunan. Selanjutnya, pada era Gubernur Ali Sadikin, Pasar Minggu dirancang menjadi penyangga permukiman (lihat Lampiran Peta Resmi 1972). Di sini ada unsur diskontinuitas. Kebijakan resmi Sadikin hanya bertumpu pada kebutuhan pusat kota. Dengan demikian, pinggiran kota yang sesungguhnya memiliki dinamikanya sendiri tidak dilihatnya sebagai sebuah entitas tersen-

---

<sup>14</sup> Gagasan bahwa wilayah Pasar Minggu merupakan pinggiran Jakarta dapat dilihat dari memoar kepala daerah Jakarta dari Suwirjo (kepala daerah pertama) hingga Soemarno Sosroatmodjo (yang memerintah hingga tahun 1966). Untuk lengkapnya lihat Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta, *Karya Jaya: Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945–1966*, Jakarta: Pangeran Djayakarta Offset, 1977.

diri, apalagi dilanjutkan serta diakomodasi dalam kebijakan wilayah pemerintah Jakarta. Dengan perkataan lain, pembangunan pemerintah untuk Pasar Minggu tidak dirancang untuk memenuhi apa yang ada di Pasar Minggu sebagai sebuah entitas wilayah, tetapi dirancang sebagai pendamping dan melayani kebutuhan pusat kota.<sup>15</sup>

## B. HUBUNGAN PUSAT KOTA DENGAN DAERAH PINGGIRAN

Sejauh ini studi sejarah tentang hubungan pusat kota dengan daerah pinggirannya relatif sedikit dilakukan. Sebagian besar studi tentang hal tersebut mengambil sudut pandang pusat kota, dan belum pernah dilakukan studi dari sudut pandang wilayah pinggiran sendiri. Somantri<sup>16</sup>, Surjomihardjo<sup>17</sup>, dan Siswanti<sup>18</sup> merupakan contoh studi yang mengambil sudut pandang dari pusat kota tersebut. Pelbagai permukiman yang tumbuh di pinggiran Jakarta itu dilihat sebagai titik awal perluasan kota, dan kelak akan dianeksasi sebagai bagian dari kota tersebut. Karena itu, hubungan antara pinggiran dengan pusat kota kurang digambarkan dan dianalisis secara terperinci.

---

<sup>15</sup> Selain alasan diskontinuitas desain wilayah, terdapat dua alasan lain yang membatasi riset pada era Gubernur Ali Sadikin. Pertama, pada era Ali Sadikin atau setelah tahun 1966, wilayah Pasar Minggu kebanjiran migran lokal, yakni banyaknya penduduk Betawi yang pindah ke sana karena adanya pelbagai pengusuran. Lihat Abdul Aziz, *op-cit.* Kedua, konteks kebijakan ekonomi nasional yang menjadi setting dinamika lokal Kecamatan Pasar Minggu pun berubah. Era Ali Sadikin merupakan era liberalisasi ekonomi, antitesis pada era sebelumnya terutama era demokrasi terpimpinnya Soekarno. Untuk argumen betapa kebijakan liberalisasi ekonomi Orde Baru berpengaruh terhadap dinamika masyarakat dalam Kota Jakarta, lihat Gumilar Rusliwa Somantri, *Migration within City: A Study of Socioeconomic Processes and Intra-City Migration in Jakarta*, Breitenbach: Saarbruecken and Port Laudea, 2000. Sedangkan untuk argumen tentang konvensi akademik khususnya pemisahan masa kepemimpinan Ali Sadikin dengan Gubernur Jakarta sebelumnya dalam historiografi Kota Jakarta, lihat Susan Abeyasekera, *Jakarta: A History*, Revised Edition, Oxford: Oxford University Press, 1989.

<sup>16</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, *op-cit.*

<sup>17</sup> Abdurahman Surjomihardjo, *Pemekaran Kota Jakarta*, Jakarta: Jambatan, 1977.

<sup>18</sup> Siswanti, *op-cit.*

Studi Marzali<sup>19</sup> adalah yang mendekati riset ini. Meski ia melacak hubungan antara pinggiran dengan pusat kota dalam konteks kontemporer pada awal tahun 1980-an, gagasan utama studi tersebut dapat diterapkan untuk penelitian ini. Ia menganalisis perubahan sosial ekonomi Condet (termasuk wilayah selatan Jakarta) diawali dari membaiknya infrastruktur transportasi dari Jakarta ke Condet, lalu jumlah dan komposisi (secara etnis) bertambah dan berubah, akhirnya menggeser pertanian menjadi sektor pekerjaan baru. Pelbagai perubahan tersebut dilihatnya dalam kerangka ekspansi pusat Kota Jakarta. Studi Marzali ini banyak memberikan inspirasi. Sedangkan studi Aziz,<sup>20</sup> meski informasinya banyak membantu dalam memfokuskan penelitian ini, dikerjakan kurang mendalam dan kurang sistematis. Data yang disajikan kurang kuat, bahkan ada kesan unsur interpretasi Aziz sendiri justru lebih menonjol.

Acuan konseptual utama yang digunakan dalam riset ini ialah konsep *peripheralization* sebagaimana diungkapkan oleh Smith.<sup>21</sup> Konsep *peripheralization* (diindonesiakan menjadi periferalisasi) merujuk pada dua gejala yang terjadi secara bersamaan, bagaikan dua sisi dari satu mata uang. *Pertama*, ia merujuk pada semakin terintegrasinya wilayah ini ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas (Pasar Minggu terhadap Batavia atau Jakarta, Jakarta terhadap sistem ekonomi global). Proses periferalisasi ini telah menempatkan wilayah Pasar Minggu sebagai pinggiran. Jadi, apa yang dihasilkan oleh wilayah Pasar Minggu amat terkait dengan posisi pinggirannya itu dalam kesatuan ekonomi yang lebih luas. Komoditas pertanian, khususnya buah-buahan, yang dihasilkan oleh wilayah ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terbentuk di Batavia dan atau pasar buah-buahan di negara yang lain.

*Kedua*, struktur wilayah Pasar Minggu, baik secara tata guna lahan maupun secara sosial ekonomi mengalami transformasi sosial

<sup>19</sup> Amri Marzali, *op-cit.*

<sup>20</sup> Abdul Aziz, *op-cit.*

<sup>21</sup> David A. Smith, *Third World Cities in Global Perspective: The Political Economy of Uneven Urbanization*, Colorado: Westview Pres, 1996, hlm. 19.

yang intensif. Transformasi tersebut merupakan konsekuensi logis dari periferalisasi. Maka, tatkala wilayah Pasar Minggu secara intensif dijadikan sebagai sentra pertanian untuk memasok pasar yang tumbuh, khususnya di Batavia, kita pun menjumpai tumbuhnya struktur penggunaan lahan dan tata sosial ekonomi yang baru. Struktur yang baru terbentuk itu berintikan dualisme sosial ekonomi yang kontras. Pada satu sisi, periferalisasi telah menumbuhkan struktur yang relatif modern—baik dari segi fisik (misalnya bentuk bangunan) dan aktivitasnya. Pada sisi lain, kita pun menjumpai struktur tradisional yang tetap saja tidak beranjak dari bentuk lama. Dua struktur tersebut terpisah secara tajam. Tidak ada kaitan yang satu dengan yang lain, meski berada dalam satu wilayah geografis yang sama.<sup>22</sup>

Dengan demikian, kemunculan Onderdistrik Pasar Minggu sebagai penghasil buah-buahan—yang dimotori oleh penduduk pribumi setempat (sebagai produk ekonomi pekarangan mereka) dan perkebunan buah-buahan dan kebun percobaan buah-buahan milik pemerintah kolonial—bertalian erat dengan tumbuhnya pasar buah-buahan di Batavia, di wilayah lain di Pulau Jawa, bahkan di luar negeri khususnya di Singapura. Pasar Minggu pun hadir sebagai pemasok buah-buahan dalam rangka memasok tiga pasar buah-buahan tadi. Tentu saja, sebagaimana juga diungkapkan oleh Smith,<sup>23</sup> proses periferalisasi ini difasilitasi oleh sarana perhubungan, terutama jaringan rel kereta api. Kereta api dan truk mampu mengangkut sejumlah buah-buahan secara banyak. Sarana perhubungan ini pula yang melahirkan pusat distribusi buah-buahan (*marketplace*) di sekitar stasiun kereta api Pasar Minggu.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> J.H. Boeke, “Dualism in Colonial Societies”, dalam Hans Dieter Evers (editors), *Sociology of South-East Asia: Readings on Social Change and Development*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1980, hlm. 26–37. Bandingkan dengan Hans Dieter Evers dan Rudiger Korff, *Southeast Asia Urbanism: The Meaning and Power of Social Space*, Hamburg: LIT Verlag, 2000.

<sup>23</sup> Smit, *op-cit.*

<sup>24</sup> Lihat juga Asep Suryana, “Bagai di Simpang Jalan: Perubahan Strategi Pembangunan dan Transformasi Sosial Ekonomi Komunitas Baduy-Luar, Banten Selatan”, *Jurnal*

Secara administratif, proses periferalisasi di atas ditandai oleh dijadikannya wilayah Pasar Minggu sebagai tanah gubernemen, status tanah di era kolonial yang mampu memfasilitasi menguatnya peran penduduk pribumi setempat menjadi petani buah. Ruang gerak (*public sphere*) penduduk pribumi pun relatif lebih luas. Secara perseorangan mereka pun beralih menjadi petani pemilik, bukan lagi petani penggarap seperti di era tanah partikular. Dibentuk pula sistem pemerintahan desa, yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan lokal yang bertumpu pada kebutuhan mereka sendiri. Perubahan di tingkat kelembagaan sosial tersebut sangat memungkinkan para petani setempat merealisasikan strategi meningkatkan taraf kesejahteraan dengan bertumpu—meminjam konsepsi Berger dan Luckmann<sup>25</sup>—sistem pengetahuan sehari-hari yang berfungsi bagaikan resep praktis yang dapat menyediakan spektrum pilihan bertindak agar petani setempat dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan hidupnya.<sup>26</sup>

Pada era pendudukan Jepang, dinamika produksi buah-buahan di Pasar Minggu bagaikan mati suri. Pemerintah militer Jepang mengabaikan produksi buah-buahan, karena tidak berkaitan langsung dengan upaya pemenangan perang. Beberapa kebun pembibitan dan perkebunan buah-buahan diganti dengan tanaman sayur-mayur untuk tentara Jepang. Perkebunan buah-buahan di selatan Pasar Minggu terlantar, dibiarkan begitu saja seolah-olah tidak ada pemiliknya. Bahkan perkebunan atau *landbouw* jeruk dan durian di utara Pasar Minggu justru ditebang. Pemerintah Jepang pun mendorong para petani sekitarnya untuk menggarap perkebunan buah-buahan yang ditelantarkan tersebut seolah-olah milik mereka sendiri.

---

*Komunitas No. 2*. Jakarta: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, 2006.

<sup>25</sup> Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York: Anchor Books, 1966, hlm. 19–34.

<sup>26</sup> Lihat juga James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, terjemahan Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1981.

Sambil melakukan penetrasi terhadap tata sosial masyarakat pedesaan atas nama terbentuknya masyarakat *Jawa Baroe*, Pemerintah Jepang menarik habis-habisan sumber daya pertanian dan sumber daya manusia masyarakat Pasar Minggu. Akibatnya, infrastruktur pertanian di wilayah Pasar Minggu menjadi hancur. Irigasi rusak karena tidak dirawat. Sawah dan kebun tidak dikelola karena sumber daya manusia produktifnya diangkut untuk romusha. Cukai padi amat berat. Setiap lima ikat padi, satunya diambil pemerintah. Dalam situasi seperti ini, penduduk wilayah ini tidak dapat bertani secara maksimal. Orientasi sekaligus strateginya hanya bertahan hidup.<sup>27</sup>

Tahun 1950-an, ternyata dekolonisasi kelembagaan mampu memfasilitasi meluasnya kebun buah di Kecamatan Pasar Minggu. Dekolonisasi kelembagaan yang dimotori Pemerintah Republik merupakan upaya menggantikan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang mengabaikan penduduk pribumi dengan menempatkan penduduk tersebut sebagai subjek utama orientasi kebijakan Pemerintah Jakarta.<sup>28</sup> Pada sisi lain, proses tersebut merupakan salah satu upaya untuk memodernkan sistem pertanian Indonesia demi mengurangi senjangnya antara sistem pertanian tradisional dan sistem pertanian modern.<sup>29</sup>

Kecamatan Pasar Minggu—yang sejak 24 Maret 1950 secara resmi menjadi pinggiran Jakarta—menjadi subjek program pengembangan pertanian dari Dinas Pertanian Kotapraja Jakarta, suatu kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Sistem administrasi di wilayah Pasar Minggu pun diseragamkan. Kantor Perkebunan Rakyat dan Kebun Percobaan Pasar Minggu pun aktif meningkatkan produktivitas dan

---

<sup>27</sup> Lihat juga Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942–1945*, alih bahasa Hermawan Sulistiyo, Jakarta: Grasindo, 1993.

<sup>28</sup> Untuk pengertian yang serupa dengan konsep dekolonisasi ini, lihat Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin, *Key Concepts in Post-Colonial Studies*, London: Routledge, 2004, hlm. 63.

<sup>29</sup> B.G. Go, “Modernisasi Pertanian Indonesia”, *Pertanian No. 7–8 Tabun ke-19*, 1970, hlm. 9–13.

kualitas kebun masyarakat setempat, baik melalui penyediaan bibit unggul buah-buahan dengan harga murah-bersubsidi, mengadakan pelbagai perlombaan dalam rangka meningkatkan kemampuan bertani modern penduduk setempat, maupun menumbuhkan rasa kepemilikan penduduk atas lembaga pertanian pemerintah ini.<sup>30</sup>

### C. DATA DAN INFORMASI

Pembahasan pada buku ini berdasarkan hasil penelitian berkategori sejarah lokal. Dari namanya, fokus penelitian ini mengungkap proses atau dinamika yang terjadi di wilayah Pasar Minggu. Mengikuti orientasi utama penulisan sejarah lokal yang secara tersirat dikemukakan Abdullah,<sup>31</sup> penelitian ini secara bergantian dan kadangkala bertumpang tindih, menggunakan kedua orientasi tersebut. Dua orientasi utama yang bersifat tipe ideal tadi ialah (1) peristiwa lokal ditempatkan sebagai media untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih utuh dan konkrit tentang peristiwa yang lebih luas (regional dan nasional), dan (2) peristiwa lokal amat terkait—untuk tidak menyatakan dipengaruhi—oleh peristiwa yang lebih besar. Jadi, ibarat jendela, peristiwa lokal ini akan mampu memberikan informasi lain yang turut membentuk dan mbingkainya. Atau, meminjam kalimat dari Abdullah dari halaman yang berbeda, corak penelitian ini adalah:

“..., ‘peristiwa’ atau *event* tidaklah terutama dilihat dari sudut mata-rantai peristiwa (*chain of events*), tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan struktural”.<sup>32</sup>

“penulisan sejarah ...[lokal-AS] tidak berhenti pada kisah dan proses tetapi melanjutkan pada uraian tentang struktur; tidak sekedar terpaku pada peristiwa dan tokoh besar tetapi mencoba ‘menangkap’ hal kecil dan orang kecil; tidak hanya romantika

---

<sup>30</sup> Abd. Manap, *Loc. Cit.*, hlm. 112 dan 123.

<sup>31</sup> Taufik Abdullah, “Ke Arah Penulisan Sejarah Nasional di Tingkat Lokal”, dalam Taufik Abdullah (editor), *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (edisi keempat), 1986, hlm. 310–323.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 314.

kehidupan yang kualitatif, tetapi juga data yang bisa dihitung secara tepat.”

Dengan demikian, diperlukan dua tipe data untuk penulisan sejarah ini. Pertama, data yang sifatnya lebih luas, baik bersifat regional Jakarta maupun informasi sejarah nasional; dan kedua data yang bersifat lokal yang terjadi di sepanjang wilayah Pasar Minggu sendiri. Demi kepentingan rekonstruksi sejarah lokal dan seperti halnya dikemukakan Abdullah,<sup>33</sup> meski sama pentingnya, kedua tipe data tersebut ditempatkan secara berlainan, dan justru lantaran posisi yang berlainan itulah keduanya bersifat saling melengkapi.

Keseluruhan data lokal tentang wilayah Pasar Minggu dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi jalinan peristiwa. Yang dimaksud data di sini bukan semata-mata *event*, melainkan juga perasaan pelaku sejarah tentang situasi yang melingkupinya itu. Sementara, data yang lebih luas (baik di tingkat Jakarta maupun nasional) ditempatkan sebagai bingkai atau panggung (*stage*); dan sebagai “bingkai”, data terakhir ini mampu mengarahkan sekaligus menjadi alat analisis untuk memilah mana data lokal yang penting dan mana yang tidak. Selanjutnya, “bingkai” tersebut mampu membantu dalam menginterpretasi data lokal sehingga lebih bermakna.

Data bingkai diperoleh melalui dua sumber berikut. Pertama, sumber-sumber informasi sezaman, khususnya koleksi yang dimiliki Perpustakaan Nasional Jakarta dan *kebazanah* arsip di Arsip Nasional. Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan tentang arti pentingnya majalah *Kotapradja* terbitan Djawatan Penerangan Kotapradja Djakarta Raja yang terbit dari tahun 1950 sampai 1959. Majalah ini berisikan informasi program kerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Jakarta dan juga menyediakan informasi tentang sudut pandang atau persepsi Pemerintah Jakarta tentang pelbagai problem yang tumbuh, khususnya yang terkait dengan wilayah Pasar Minggu. Selain itu, buku terbitan sezaman pun menjadi sumber data, misalnya buku The Liang Gie tentang *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta*; meski

---

<sup>33</sup> *Ibid*

buku tersebut tidak memfokuskan diri pada wilayah Pasar Minggu periode 1921–1966.

Sumber kedua adalah informasi yang telah diolah baik dalam bentuk buku, artikel koran, majalah maupun jurnal yang terbit di luar periode 1921–1966. Sepanjang yang dapat dilacak, sebagian besar studi tersebut bertumpu pada tesis pemekaran atau perluasan Kota Jakarta. Hal tersebut misalnya tampak dari studi Abeyasekere dan Surjomihardjo, dua karya yang sering dikutip oleh pengkaji Jakarta. Selain itu, buku-buku hasil riset Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta pun dijadikan sumber data, khususnya Uka Tjandrasasmita et.al.<sup>34</sup> dan Sagimun.<sup>35</sup>

Dua sumber di atas sering menjadi sumber informasi untuk data lokal. Selain itu, sebagai ancangan awal untuk memperoleh data lebih lanjut yang lebih terfokus dan spesifik, sering pula digunakan teknik analisis terhadap artefak fisik maupun artefak sosial yang terdapat di wilayah Pasar Minggu. Artefak fisik—seperti struktur lahan dan sungai yang telah tidak berfungsi dan sejak awal abad ke-20 berfungsi sebagai mata rantai sistem irigasi yang memasok air di persawahan Pasar Minggu—digunakan untuk menghidupkan imajinasi historis sehingga memunculkan pertanyaan yang lebih spesifik, untuk kemudian ditelusuri lebih mendalam melalui wawancara maupun sumber tertulis. Fungsi yang sama juga dilakukan terhadap artefak sosial. Nama jalan misalnya—yang merupakan kenangan kolektif tentang suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu—dapat membantu memunculkan pertanyaan yang lebih spesifik tentang apa yang terjadi pada masa lalu di areal tersebut. Dugaan tersebut kemudian dicarikan informasinya lebih lanjut melalui teknik wawancara maupun penelusuran sumber tertulis.

---

<sup>34</sup> Tjandrasasmita, Leirissa, dan Nana Nurliana, *Sejarah Perkembangan Kota Jakarta*, Jakarta: Dinas Museum dan Pemugaran Pemerintah Propinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta, 2000.

<sup>35</sup> Sagimun M.D., *Jakarta: Dari Tepian Air ke Kota Proklamasi*. Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta, 1980.

Wawancara merupakan sumber terakhir untuk memperoleh data lokal. Teknik ini ditujukan terhadap pelaku sejarah yang hidup antara tahun 1921–1966. Atau, mereka yang belum lahir pada periode itu, tetapi mengetahui suatu peristiwa tertentu baik dari cerita orang tuanya, sumber lisan yang lain, maupun sumber tertulis.

#### **D. SISTEMATIKA BUKU**

Buku ini terdiri atas enam bab. Bab pertama berisikan fokus riset dan acuan konseptual yang digunakan. Bab kedua berisikan proses periferalisasi wilayah Pasar Minggu dalam sistem ekonomi yang lebih luas, baik periferalisasi tahap awal maupun periferalisasi yang lebih lanjut, sedangkan bab ketiga menguraikan kaitan proses periferalisasi yang didiskusikan pada bab dua dengan fenomena lainnya. Bahwa proses periferalisasi Pasar Minggu terkait erat dengan tumbuhnya pasar buah-buahan dan membaiknya sarana perhubungan massal, dan bahwa proses periferalisasi itu juga telah melahirkan tata sosial ekonomi yang relatif baru.

Era peralihan diuraikan dalam bab empat. Bab ini tertuju untuk menelusuri perubahan dan keberlanjutan yang terkait dengan produksi buah-buahan di era Jepang dan perang kemerdekaan. Rusaknya infrastruktur pertanian di wilayah Pasar Minggu pada era Jepang justru menjadi *blessing in disguise* bagi meluasnya kebun buah pada era kemerdekaan. Dekolonisasi kelembagaan merupakan fokus yang dibahas dalam bab lima. Proses dekolonisasi yang dimotori Pemerintah Republik dan merupakan upaya untuk mewujudkan konsepsi nasionalisme daulat rakyat terlihat dalam fenomena berikut.

Setelah resmi menjadi wilayah Jakarta, Kecamatan Pasar Minggu menjadi subjek program pengembangan pertanian dari Dinas Pertanian Kotapraja Jakarta. Sistem administrasi permukiman di wilayah Pasar Minggu diseragamkan. Akhirnya, Kantor Perkebunan Rakyat dan Kebun Percobaan Pasar Minggu pun aktif meningkatkan produktivitas dan kualitas kebun buah petani setempat. Sementara, bagaimana dinamika petani buah Pasar Minggu di era kemerdekaan akan diskusikan dalam bab enam.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

## BAB II

# Dari Tanah Partikular ke Tanah Gubernemen: Denyut Komersialisasi Buah-Buahan di Akhir Masa Kolonial

Bab ini menguraikan proses periferalisasi wilayah Pasar Minggu dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Pada tahap yang lebih awal, periferalisasi—yang ditandai oleh makin terintegrasinya onderdistrik Pasar Minggu terhadap Batavia—merupakan dampak sosial ekonomi akibat muncul dan menguatnya sistem tanah partikular di wilayah ini. Pelbagai tanah partikular yang terdapat di Onderdistrik Pasar Minggu, seperti Tanah Partikular Tanjung *West*, Tanah Partikular Jagakarsa, Tanah Partikular Lenteng Agung, Tanah Partikular Srengseng, dan Tanah Partikular Ragunan merupakan lembaga kepemilikan lahan sekaligus lembaga sosial ekonomi kolonial pertama yang telah mendorong wilayah ini menjadi areal “produktif” dalam skala luas, sebagai pemasok komoditas pertanian, berposisi periferi, dan akhirnya berintegrasi terhadap sistem ekonomi yang lebih luas.

Integrasi Onderdistrik Pasar Minggu terhadap Batavia makin menguat setelah dibangun sarana jalan dan kemudian jaringan rel kereta api yang menghubungkan wilayah ini dengan Batavia dan Buitenzorg (Bogor). Tahun 1830, dibangun jalan, berupa jalan tanah, yang menghubungkan wilayah ini dengan Batavia. Keberadaan sarana jalan ini mulai menggeser sistem transportasi yang bertumpu pada Sungai Ciliwung. Tahun 1873, jalur kereta api Batavia-Buitenzorg beroperasi. Untuk wilayah Pasar Minggu sendiri, integrasi sosial ekonomi wilayah ini dengan Batavia dan Buitenzorg terjadi melalui tiga stasiun, yakni Stasiun Pasar Minggu dimana kereta api dapat lansir, Stasiun Lenteng Agung, dan Perhentian Tanjung *West*.

Periferalisasi lebih lanjut terjadi tatkala pemerintah mendirikan kebun percobaan buah-buahan di Ragunan pada tahun 1921. Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah pun berhasil membeli hampir seluruh tanah partikular di wilayah Pasar Minggu (kecuali tanah partikular Lenteng Agung), sehingga berstatus “tanah Gubernemen”.<sup>1</sup> Maka dua kebijakan tadi pun bermetamorfosis menjadi semacam kebijakan wilayah untuk Pasar Minggu. Kebun percobaan yang memang dirancang untuk menghasilkan bibit buah-buahan unggul, menandai langkah pemerintah Hindia Belanda untuk mengomersialisasikan buah-buahan secara sistematis, dan merupakan pelembagaan kegiatan ekonomi yang jauh sebelumnya telah dilakukan oleh penduduk setempat, sebagai tanaman tegalan atau pekarangan di wilayah ini.<sup>2</sup>

Pada sisi lain, pemerintah pun memperoleh “warisan” areal perkebunan semasa tanah partikular. Gayung pun bersambut. Sebagian hasil penelitian kebun percobaan yang diperkirakan memiliki nilai jual tinggi, dibudidayakan sendiri oleh pemerintah di areal perkebunan bekas tanah partikular—yang oleh penduduk setempat disebut sebagai *landbouw* (pertanian). Demikianlah, maka kebun di Jati Padang ditanami jeruk, kebun di Rawa Minyak ditanami jambu biji dan pisang, di kebun Ragunan ditanami jeruk besar, sawo, rambutan, macam-macam jeruk manis dan jeruk keprok; kebun di Kampung Kandang ditanami alpukat dan pisang; dan kebun di Tanjung *West* ditanami jeruk siem, jeruk jepun, jeruk tejakula, dan jeruk kara. Sementara itu, di beberapa kebun pemerintah yang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Haji Mada, 73 tahun, 5 September 2005 di Kukusan Depok; *Panji Pustaka* No. 7 Tahun ke-5, 1927, hlm. 99–100; *Panji Poestaka* No. 42 Tahun ke-5, 1927, hlm. 709; Partijunianti, *Pola Sosialisasi Anak dalam Keluarga Orang Betawi d Desa Ragunan*, Tesis Pasca Sarjana Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1984, hlm. 54–61); dan Pemerintah Kotapradja Djakarta Raja, *Djakarta Raja*, Van Dorp, 1953, hlm. 52–53.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Nani, pensiunan peneliti Direktorat Tanaman Pangan Pasar Minggu, 1 September 2005; *Panji Poestaka* No. 7 Tahun ke-5, 1927; hlm. 99–100; Moh Mahfoedi, “Pekerjaan di Balai Penyelidikan Perkebunan”, dalam *Pertanian* No.4 Tahun ke-7, 1951, hlm. 12–19.

terletak di sekitar Srengseng ditanami pohon sereh, petai, jeruk, dan jambu mede.<sup>3</sup>

Untuk memperlihatkan proses integrasi sosial ekonomi sebagaimana telah diungkapkan di atas, bab ini dibagi dua bagian. Bagian pertama berisikan periferalisasi tahap awal, tatkala wilayah Pasar Minggu—dan wilayah *Ommelanden* (daerah sekitar) Batavia yang lain—menjadi tanah partikular. Meskipun tanah partikular merupakan sistem pengolahan lahan yang bersifat eksploitatif yang berporoskan pada diri tuan tanah, tetapi pada tahap tertentu, lembaga sosial ekonomi ini telah turut menumbuhkan benih komersialisasi buah-buahan, walau tidak sebesar pada tahap periferalisasi lebih lanjut (setelah tanah partikular tadi dibeli oleh pemerintah atau beralih status menjadi tanah gubernemen).

Bagian kedua, berisikan periferalisasi lebih lanjut tatkala tanah partikular telah dibeli oleh pemerintah. Dengan statusnya sebagai tanah gubernemen, terdapat keleluasan bergerak bagi petani setempat untuk mengolah lahannya secara lebih mandiri. Apalagi tatkala pemerintah kemudian membangun sistem pemerintahan desa di pelbagai permukiman yang terdapat di bekas areal tanah partikular, maka suatu sistem kemasyarakatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan oleh dan untuk petani setempat dapat dilakukan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, sebagian petani di wilayah ini telah berupaya

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfoedi, *ibid.*, hlm. 17 dan 18; Wawancara dengan Pak Risin, 1 Oktober 2005 di Srengseng Sawah.

<sup>4</sup> Sebagai contoh, pelbagai permukiman penduduk yang dahulunya termasuk wilayah tanah partikular Tanjung *West*, dibangun sistem pemerintahan desa, dengan nama Desa Tanjung *West*. Begitu pula di bekas tanah partikular Jagakarsa juga dibangun sistem pemerintahan yang sama dengan nama Desa Jagakarsa. Meski demikian, sistem kemandoran—satuan administratif terkecil warisan era tanah partikular—masih tetap dipertahankan. Informasi tentang keberadaan tanah partikular Tanjung *West* diperoleh dari Peta wilayah Depok tahun 1924, koleksi Perpustakaan Nasional Lantai 2 nomor katalog PT. Jaw 15 (18). Sedangkan untuk informasi berdirinya sistem pemerintahan desa Jagakarsa setelah tanah partikular di wilayah ini dibeli oleh Pemerintah, lihat Soeboer Bhoedisantosa, “Djakarsa: Desa Kebun Buah-buahan Dekat Djakarta”. Dalam Koentjaraningrat (Penghimpun). *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*. Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1962.

mengomersialisasikan buah-buahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sendiri.

## **A. DI BAWAH BAYANG-BAYANG TANAH PARTIKULIR**

Wilayah Pasar Minggu atau yang secara resmi disebut sebagai Onderdistrik Pasar Minggu merupakan salah satu *Ommelanden* Batavia. Letaknya berada di bagian selatan, kurang lebih 15 km dari Weltevreden. Pada tahun 1930-an, Pasar Minggu berstatus onderdistrik atau kurang lebih setingkat kecamatan sekarang. Onderdistrik Pasar Minggu ini berada di bawah Distrik Keramat Jati, dan selanjutnya di bawah *Regentschap* Meester Cornelis. Kemudian, bersama-sama dengan Gemeente Batavia dan Gemeente Meester Cornelis, *Regentschap* ini berada di bawah naungan sistem administrasi *Residentie Batavia*. Ini merupakan perubahan status administratif terakhir pada masa penjajahan Belanda, setelah sebelumnya wilayah Pasar Minggu berada di bawah distrik Meester Cornelis, di bawah Afdeeling Meester Cornelis, Residensi Batavia.

Di era Hindia Belanda, Onderdistrik Pasar Minggu bersama-sama dengan wilayah Meester Cornelis lainnya seperti Tangerang, Pasar Rebo, dan Pulo Gadung secara populer dikenal sebagai *Ommelanden* Batavia. Sebagai konsep pembagian wilayah, *Ommelanden* terbentuk tidak lama setelah VOC berhasil menghancurkan kota pantai Jayakarta, mengacu pada wilayah kosong tak-bertuan antara kastil Batavia dengan pemukiman pribumi, yang belum dapat ditaklukan oleh VOC.<sup>5</sup>

Selanjutnya, fungsi sosial ekonomi *Ommelanden* makin menguat. VOC mendirikan perkampungan berdasarkan etnis—sekelompok

---

<sup>5</sup> Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*, terjemahan Hasan Basari, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990, hlm. 30–33; Remco Raben, "Round about Batavia: Ethnicity and Authority in the *Ommelanden* 1650-1800". Dalam Kees Grijns and Peter J. M. Nas. *Jakarta: Socio-Cultural Essays*. Leiden: KITLV Press, 2000; Adolf Heuken, *Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta*, Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1997; dan *Mingguan Djaja No. 74*, 1963, hlm. 30–35

orang taklukan dari kerajaan lokal Nusantara—yang ditata di bawah pengendaliannya dalam kerangka meningkatkan keamanan sekaligus memudahkan mobilisasi prajurit sipil (karena itu kepala komunitasnya diberi gelar militer, Kapiten). Sewaktu dibutuhkan berperang, mereka bertindak sebagai prajurit VOC. Selebihnya, mereka adalah petani biasa, yang mengolah tanah pertanian di lingkungan tempat tinggal mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Inilah sistem administrasi yang amat sederhana, efisien, efektif, sekaligus menguntungkan. VOC tidak perlu mengeluarkan energi dan biaya besar untuk memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan. Energi yang dikeluarkan hanya sebatas memelihara loyalitas para Kapiten. Selanjutnya, melalui jalur patronase, warga komunitas etnis tersebut dengan sendirinya dapat dimobilisasikan untuk kepentingan VOC.<sup>6</sup>

Fungsi sosial ekonomi pun makin menguat menjelang abad ke-18 setelah *Ommelanden* menjadi wilayah yang aman. Wilayah *Ommelanden* menjadi incaran penduduk lapis atas Batavia. Suatu migrasi dari pusat kota ke pinggiran demi kenyamanan hidup mulai menggejala saat itu. Lapis atas penduduk Batavia berusaha menikmati hidup dengan rumah bergaya vila, luas, dan berhalaman bagaikan istana. Jumlah penduduk *Ommelanden* pun meningkat pesat bahkan melebihi jumlah penduduk di dalam kota Benteng Batavia.<sup>7</sup> Lebih jauh Blussé<sup>8</sup> juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan *Ommelanden* yang pesat itu tidak terkait atau tidak disesuaikan dengan pertumbuhan dan kebutuhan Batavia. Rupanya, pesatnya *Ommelanden* yang menyumbang besar terhadap rusaknya sistem ekologi kota Benteng Batavia itu, didorong oleh tuntutan yang besar dari petinggi VOC untuk sebesar-besarnya mengeksport gula dan kopi.

---

<sup>6</sup> Remco Raben, *op-cit.*; Peter J. M. Nas dan Kees Grijns, “*A Sample of Current Socio-Historical Research*”, dalam Kees Grijns and Peter J. M. Nas, *Jakarta: Socio-Cultural Essays*. Leiden: KITLV Press, 2000.

<sup>7</sup> Leonard Blussé, *Strange Company: Chinese Settlers, Mestizo Women, and the Dutch in VOC Batavia*, Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1986, hlm. 18–19.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 26–34.

Gejala migrasi lapis atas penduduk Batavia ke *Ommelanden* memunculkan sistem tanah partikular yang makin menghidupkan fungsi sosial ekonomi kawasan ini. Sebagai contoh, begitu wilayah Weltevreden menjadi aman, secara cepat ia menjadi daerah pertanian yang berfungsi memasok kebutuhan penduduk Kota Batavia dan sebagian lagi untuk diekspor. Orang-orang Tionghoa menjadikan areal sekitar Weltevreden sebagai perkebunan tebu sekaligus pabrik gula. Eksperimen lain pun dilakukan oleh Cornelis Chastelein, seorang bekas petinggi VOC. Ia mencoba menanam kopi di sekitar Weltevreden atau di sekitar lapangan Banteng sekarang. Olah tani Chastelein ini menuai hasil. Ia mampu mentransformasikan tanah partikularnya itu menjadi areal pertanian, bahkan menjadi komoditas yang laku di pasar dunia.

Pada tahun 1706, Chastelein pula yang berusaha mencoba peruntungan dengan membeli tanah yang luas di Seringsing bagian selatan onderdistrik Pasar Minggu yang sekarang dikenal sebagai Srengseng Sawah. Bidang tanah di wilayah ini ia beli bersama-sama dengan tanah yang sama di wilayah Depok. Keduanya Chastelein beli setelah ia merasa sukses mengelola perkebunan kopi di wilayah Weltevreden.<sup>9</sup>

Pada awal abad ke-20, sebagian besar tanah partikular di Onderdistrik Pasar Minggu beralih status dan kepemilikan, menjadi tanah gubernemen (tanah milik pemerintah). Transformasi kepemilikan lahan tersebut mengakibatkan tanah partikular yang berstatus hak *eigendom* hanya tersisa satu, yakni di Lenteng Agung. Sebagai contoh, tanah partikular dengan status hak *eigendom* di Srengseng yang pernah dimiliki oleh Chastelein dijual kembali setelah tahun 1868. Proses penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran dan penaksiran di depan umum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Adolf Heuken, *op-cit.*, hlm. 141

<sup>10</sup> Prita Wulandari, *Kerusuhan Tambun 3 April 1869*, Skripsi Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indoensia, tidak diterbitkan, 1987, hlm. 15; lihat juga *Encyclopaedi van Nederlandsch Indië*, 1921, hlm. 345 dan 347.

Demikian pula dengan tanah partikular Ragunan, sebuah perkampungan yang dipercaya sebagai kampung yang didirikan oleh Pangeran Wiraguna, seorang pangeran yang berasal dari Demak (sekarang satu kabupaten di Jawa Tengah). Pangeran Demak yang datang ke Sunda Kalapa pada tahun 1527 untuk membantu Fatahilah dalam rangka mengusir orang-orang Portugis ini kemudian ditugaskan oleh Fatahilah untuk memperluas wilayah kekuasaannya di hutan selatan Jakarta.

Maka, Wiraguna dan pengikutnya pun mendirikan permukiman yang sekarang dikenal sebagai Ragunan. Menurut Partijunianti<sup>11</sup>, permukiman Ragunan (yang lebih luas dari batas administrasi saat ini) dirancang sebagai permukiman yang mandiri dan berfungsi sebagai penghasil kayu jati yang dijual ke kota pantai Jakarta. Komunitas ini membuka perkebunan jati yang diselang-seling untuk peternakan sapi dan kuda. Untuk menopang kegiatan ini, komunitas tersebut kemudian membangun fungsi lainnya yang kemudian menjadi kampung tersendiri. Sebagai contoh, komunitas tersebut membangun tempat pengumpulan kayu sebelum dikirim ke tempat pemasaran (kemudian berdiri Kampung Pekayon yang artinya tempat kayu-kayu), dibangun pula areal khusus untuk memenuhi pasokan air secara besar (Kampung Bendungan), areal khusus untuk pohon-pohon perdu yang menyerupai hutan (Kampung Utan). Demikian pula terdapat areal khusus untuk tanaman pisang (disebut Kampung Pisangan), kandang hewan (Kampung Kandang), dan pohon jati (Kampung Pajaten).

Meski terlihat amat spekulatif, Partijunianti juga menguraikan proses terbentuknya tanah partikular Ragunan, yang tanpa disebut tahunnya telah dimiliki oleh orang Cina bernama Po Gwan.

---

<sup>11</sup> Partijunianti, Endang, *Pola Sosialisasi Anak dalam Keluarga Orang Betawi di Desa Ragunan*, Tesis Pasca Sarjana Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1984, hlm. 54–58. Dalam merekonstruksi tata sosial komunitas Ragunan ini, Partijunianti tidak menggunakan sumber tertulis, melainkan ia sangat mengandalkan sejarah lisan, melalui wawancara dengan sesepuh, memahami artefak maupun asal-usul nama kampung sekitar Ragunan sekarang.

Menurut antropolog Universitas Indonesia yang melacak situasi tanah partikular Ragunan ini, Po Gwan memperoleh status tanah partikular karena banyak penduduk Ragunan yang berutang kepadanya. Lantaran tidak dapat membayar, Po Gwan akhirnya menyita secara paksa lahan milik penduduk setempat. Demikian seterusnya sehingga Po Gwan memiliki tanah yang luas, dan pemilik lahan asal kemudian dijadikan sebagai pekerja di tanah partikularnya itu.

“... untuk pengawasi pelaksanaannya ditunjuklah beberapa orang mandor yang dibantu oleh beberapa petugas. Mandor-mandor ini dipilih dari setiap kampung, dan ditunjuk orang-orang yang paling ditakuti (istilah mereka [orang kampung—AS] ‘jagoan’), bahkan kadang-kadang dipilih orang-orang berperangai kasar, kejam, dan sebangsanya. Setiap mandor bertanggung-jawab atas daerah kekuasaannya, termasuk dalam hal mengawasi penduduk setempat yang melanggar peraturan tuan tanah yang dianggap sebagai raja kecil, untuk kemudian mengadukannya untuk mendapatkan suatu hukuman”.<sup>12</sup>

Lazimnya situasi di tanah partikular, penduduk setempat pun diwajibkan bekerja tanpa upah untuk tuan tanah. Penduduk lokal Ragunan menamakan kerja paksa ini dengan *kena kumpeni*. Penduduk setempat pun akan dihukum bila tidak mengerjakan lahannya sesuai dengan kemauan tuan tanah. Lagi-lagi mereka pun akan dihukum bila tertangkap menebang pohon. Menurut data yang berhasil dikumpulkan oleh Partjijunianti<sup>13</sup>, ketentuan maupun pelaksanaan hukuman tersebut dilakukan atas kerja sama antara tuan tanah dan pemerintah Belanda.

Pada tahun 1906, Pemerintah Belanda membeli tanah partikular Ragunan ini dan mengalihkan statusnya menjadi tanah gubernemen. Setelah tanah partikular dibeli pemerintah kerja *kumpenian* ini semakin melunak. Meski tidak besar, penduduk setempat yang kena sistem *kumpenian* memperoleh upah, sekitar 0,5 hingga satu sen. Pada

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 60.

saat itu, tuan tanah sendiri telah menanam lahannya itu dengan buah-buahan seperti rambutan, jeruk, dan sawo untuk dijual. Tuan tanah pun masih membudidayakan pohon jati.<sup>14</sup>

Kasus yang sama terjadi di Jagakarsa, sebuah desa seluas kurang lebih 588 ha dan berada enam kilometer selatan pusat pertumbuhan Pasar Minggu, yang juga merupakan areal bekas tanah partikular. Tanah partikular ini dimiliki oleh tuan tanah yang bernama Volmacht, yang oleh penduduk setempat dikenal dengan panggilan Tuan Polmak. Seperti tuan tanah yang lain, tuan tanah ini pun melakukan investasi intensif agar wilayah Jagakarsa memberikan keuntungan kepadanya. Tahun 1830, tuan tanah di wilayah ini berhasil membangun saluran irigasi yang sangat baik.<sup>15</sup> Sampai tahun 1930, tuan tanah tersebut hanya menyediakan tanahnya bagi orang-orang yang mau mengerjakan tanahnya itu sebagai sawah, seluas 250,767 ha sawah atau hampir setengah dari luas wilayah Jagakarsa. Sementara tanah yang tidak terjangkau oleh sistem irigasi dan kemudian diolah sebagai kebun, seluas 326,545 ha. Di samping itu, terdapat pula hutan pohon buah-buahan yang sangat terlarang untuk ditebang dan dibuka.<sup>16</sup>

Sungguh pun amat eksploitatif, dua kasus di atas menunjukkan bahwa keberadaan tanah partikular ini memberikan implikasi sosial ekonomi yang relatif signifikan. *Pertama*, terjadi transformasi fungsi tanah. Tanah telah menjadi modal. Sebelum adanya tanah partikular, tanah tersebut dikelola tanpa ada pretensi bahwa ia ditanami oleh tanaman komoditas yang laku secara besar-besaran. Keberadaan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Dari Peta wilayah Pasar Minggu yang dibuat tahun 1897 (koleksi Perpustakaan Nasional No. Katalog PT. Jaw 37 (2) diperoleh informasi bahwa struktur irigasi di wilayah ini telah mapan. Pasokan air tersebut berasal dari Bogor dan setu yang banyak terdapat di sana. Menurut Afandi keberadaan sistem irigasi terkait dengan para tuan tanah. Setelah wilayah ini menjadi tanah gubernemen, maka tanggung jawabnya kemudian beralih ke pemerintah. Lihat Afandi, *Perkampungan Budaya Betawi sebagai Representasi Identitas Kebetawian*, Depok: Tesis Megister Program Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unveritas Indonesia, 2005, hlm. 95–107.

<sup>16</sup> Boedisantosa, *Op. Cit.*, hlm. 95–96

tanah partikelir mengubah hal tersebut. Secara sengaja pemilik tanah harus berpikir dan berusaha keras agar investasinya itu menguntungkan. Oleh karena itu, mereka mencoba bereksperimen menanam tanaman yang bernilai komersial, laku dijual sehingga memperoleh keuntungan.

*Kedua*, keberadaan tanah partikular mengubah jumlah dan komposisi penduduk wilayah tersebut. Tentu saja, agar tanah partikular yang luas itu dapat dikelola dengan baik, maka dibutuhkan sejumlah tenaga kerja. Di tanah partikular Jagakarsa misalnya, tuan tanah secara sengaja mendatangkan penduduk wilayah Bogor ke areal ini, agar areal persawahan yang subur tersebut dapat dikelola. Tahun 1870, tercatat kurang lebih 17 rumah dengan 50–60 jiwa. Jumlah rumah tersebut meningkat menjadi 120 pada tahun 1930.<sup>17</sup>

Begitu pula dengan tanah partikular Lenteng Agung yang luasnya sekitar 49 ha. Agar tanah partikular tersebut dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan, tuan tanah juga secara sengaja mendatangkan sejumlah tenaga kerja dari daerah lain. Didatangkannya sejumlah tenaga kerja tersebut, karena sebelum abad ke-19, penduduk Onderdistrik Pasar Minggu ini jumlahnya sangat sedikit.

Meski uraian di atas memperlihatkan bahwa tanah partikular amat menyumbang terhadap peningkatan jumlah penduduk di wilayah Pasar Minggu, namun terdapat pelbagai bukti bahwa sebelum ada tanah partikular, wilayah Pasar Minggu—khususnya sebagaimana terlihat dalam kasus keturunan Wiraguna di Ragunan—telah berpenduduk. Mereka bukan berasal dari migran yang datang karena terkait sebagai tenaga kerja tanah partikular, dan bukan pula bekas budak Batavia yang lari ke wilayah ini karena satu dan lain hal sebagaimana dikonstruksikan oleh Castles.<sup>18</sup>

Bahkan, berdasarkan benda-benda peninggalan yang pernah ditemukan, baik temuan di permukaan tanah maupun hasil eskavasi arkeologi, wilayah Onderdistrik Pasar Minggu rupanya telah dihuni,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 96

<sup>18</sup> Lance Castles, “The Ethnic Profile of Djakarta”, dalam *Indonesia Vol. 1* (April), Itacha: Modern Indonesian Project Cornell University, 1967.

malah telah menjadi permukiman yang relatif mapan sejak masa Neolitik atau sekitar 3000–1000 tahun sebelum Masehi. Alat-alat batu yang ditemukan pada masa itu ialah kapak persegi, beliung, gurdi, dan pahat yang terbuat dari batu-batuan jenis batu api, *chalcodon*, *agaat*, *yaspis*, dan lain sebagainya. Lokasi alat-alat batu tersebut ditemukan di beberapa tempat di tepi Sungai Ciliwung sekitar Pasar Minggu, Lenteng Agung, dan Kelapa Dua. Alat-alat dari zaman batu baru atau neolitikum tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat pada masa itu telah bertempat tinggal secara menetap, sudah memproduksi makanan sendiri (dengan pertanian dan peternakan sederhana), mengenal sistem religi tertentu atau kepercayaan terhadap ruh nenek moyang, sudah berkesenian, bahkan telah memiliki organisasi kemasyarakatan semacam kampung atau desa, yang dipimpin oleh seorang kepala atau ketua kampung.<sup>19</sup>

Di Kelapa Dua, Lenteng Agung, Tanjung Barat, dan Pasar Minggu ditemukan juga benda-benda arkeologis dari zaman perunggu-besi. Benda-benda tersebut ialah kapak sepatu atau kapak corong, tombak, bahkan cor-coran besi atau sisa-sisa besi. Jadi, komunitas yang tinggal di situ telah memiliki sistem pengetahuan teknologi pembuatan alat-alat dari logam. Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta<sup>20</sup> kemudian membangun spekulasi bahwa peninggalan perunggu-besi tersebut mengindikasikan bahwa struktur kemasyarakatan telah mengenal strata sosial. Paling tidak telah ada kelompok sosial para pandai besi dan perunggu yang memiliki status sosial yang relatif tinggi. Selain pandai besi, masyarakat kala itu telah pula memiliki para pembuat gerabah, pedagang, dan tukang-tukang lainnya. Bahkan Danasasmita<sup>21</sup> menunjukkan ada-

<sup>19</sup> Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi DKI Jakarta, *Jakarta Kota Joang*, Jakarta, 2003, hlm. 6; Tjandrasasmita *et-al.*, *Sejarah Perkembangan Kota Jakarta*. Jakarta: Dinas Museum dan Pemugaran Pemerintah Propinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta, 2000, hlm. 7–8; Sagimun MD, *Jakarta: dari Tepian Air ke Kota Proklamasi*. Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta, 1980, hlm. 1–27.

<sup>20</sup> Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta, *Jakarta Kota Joang*, 2003, hlm. 7.

<sup>21</sup> Saleh Danasasmita, *Sejarah Bogor: Bagian I*, Bogor: Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Bogor, 1983.

nya permukiman yang relatif mapan dan telah memiliki struktur kekuasaan yang kuat di pinggir Sungai Ciliwung sekitar wilayah Tanjung Barat sekarang. Menurut sejarawan Universitas Pajajaran ini, permukiman tersebut berbentuk kerajaan lokal, mungkin bawahan Pajajaran, yang hidup dari perdagangan Sungai antara Pakuan, ibukota Pajajaran (di hulu Ciliwung) dengan pelabuhan Sunda Kelapa di muara Ciliwung.

*Ketiga*, keberadaan sejumlah tenaga kerja ini melahirkan tata sosial khas tanah pertikular. Tenaga kerja tersebut diorganisasi dalam kerangka sistem produksi tanah partikular yang cenderung eksploitatif. Mereka tinggal di kampung-kampung yang dipimpin oleh seorang Mandor, kepala kampung yang secara berjenjang bertanggung jawab kepada tuan tanah. Mandor bertanggung jawab kepada Bek, dan secara berjenjang Bek pun bertanggung jawab kepada tuan tanah. Jadi, sistem sosial di tanah partikular juga bertumpu pada pola birokrasi lokal yang khas, di mana tuan tanah berada di puncak hirarki kekuasaan.<sup>22</sup>

Untuk memperjelas tata sosial dimaksud, patut diberi ilustrasi tentang Tanah Partikular Pondok Cina, tetangga bagian selatan wilayah Pasar Minggu.<sup>23</sup> Tanah partikular Pondok Cina ini dimiliki oleh seorang etnis Cina secara turun temurun, berada di luar wilayah Residensi Batavia, dan termasuk wilayah Residensi Buitenzorg. Penduduk yang tinggal di tanah partikular Pondok Cina ini terbagi dua, yakni penduduk menetap yang harus membayar sewa tanah dan pekerja yang mengelola perkebunan khususnya karet. Tipe pertama ini harus membayar sewa tanah setiap tahunnya. Selain itu, ia juga diwajibkan *kemit*, yakni kewajiban bekerja tanpa upah untuk tuan tanah. Penduduk Kukusan misalnya, setiap rumah tangga

---

<sup>22</sup> Asep Suryana, “Transformasi Sosial Pribumi Depok Tahun 1930–1960”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya* No.2, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004 dan Andi Sopandi *et-al.*, *Profil Budaya Masyarakat di Kota Bekasi*, Bekasi: Dinas Pariwisata Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi, 2005.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Haji Mada 1 Oktober 2005, penduduk Kukusan Depok yang lahir tahun 1931.

diwajibkan mengarit rumput dan menyetorkannya ke rumah tuan tanah Pondok Cina. Rumput tersebut digunakan untuk memberi makan kuda milik tuan tanah. Oleh karena itu, penduduk tersebut diorganisasi sedemikian rupa oleh kepala kampung yang bergelar Mandor, agar setiap harinya ada saja penduduk yang menyetorkan rumput ke rumah tuan tanah.

Selain membayar sewa tanah setiap tahunnya, penduduk setempat juga dibebani pajak tanaman. Padi misalnya, setiap lima ikat padi hasil panen, satu ikatnya disetorkan ke tuan tanah. Pemilik sawah sendiri yang harus mengantarkannya ke rumah tuan tanah. Sisanya tidak langsung dinikmati oleh pemilik sawah. Ia hanya memperoleh tiga ikat karena yang satu ikat diberikan kepada yang turut membantu panen, sebagai bentuk upah atas hasil kerjanya itu. Di samping itu, penduduk setempat juga diwajibkan bekerja bakti, misalnya untuk merawat jalan desa. Sementara itu, penduduk yang bekerja di perkebunan tuan tanah, dikelola langsung oleh tuan tanah. Ia berfungsi seperti pekerja, di bawah satu pengawasan tertentu aparat tuan tanah Pondok Cina.

Jadi, di mata tuan tanah, keberadaan penduduk yang tinggal di tanah miliknya baik di kampung maupun di perkebunan, dilihat sebagai salah satu faktor produksi yang harus memberikan keuntungan bagi dirinya. Oleh karena itu, permukiman di tanah partikular ini diorganisir dalam satuan sosial tertentu. Satuan sosial tersebut ialah kemandoran dengan Mandor sebagai kepala kampungnya. Kemandoran Kukusan misalnya—lokasi kampus Universitas Indonesia sekarang—terdiri atas Kampung Serdang, Kampung Kukusan, dan Kampung Bambon. Penduduknya ini diorganisasi oleh seorang Mandor, yang tidak lain adalah aparat birokrasi lokal tanah partikular yang paling bawah. Mandor bertugas mengorganisasi penduduk tersebut agar menjalankan pola-pola eksploitasi yang telah ditetapkan oleh tuan tanah: mengatur *kemit* harian agar ada pasokan tetap rumput untuk makanan kuda tuan tanah, merawat jalan, dan mengawasi jalannya pelaksanaan cukai atau pajak atas hasil tanaman penduduk. Di atas Mandor ada Kumintir, Pencalang bahkan ada

Camat. Karena posisinya sebagai perantara (*intermediary*), maka kepatuhan dan kekuasaan fisik menjadi syarat terpilihnya seorang Mandor. Mandor haruslah seorang Jawara. Ia ditakuti karena bisa melakukan kekerasan. Karena persyaratan kejawaraannya ini, maka posisi Mandor tidaklah turun temurun, tetapi berpindah-pindah menurut siapa yang paling “jago” saat itu.

Agar memudahkan proses produksi dan eksploitasi tanah partikulir Pondok Cina, maka satuan administratif (yang terdiri atas beberapa kampung setiap kemandorannya) dihubungkan oleh jalan desa yang memang sengaja dibangun oleh tuan tanah. Begitulah, tuan tanah Pondok Cina membangun jaringan jalan desa—yang belum dikeraskan itu—menjangkau setiap kemandoran atau sekurang-kurangnya kampung yang dianggap sebagai pusat kemandoran tersebut. Dari rumah tuan tanah Pondok Cina di jalan Margonda sekarang, dibuatlah jalan yang menyusuri kampung Bambon (dalam areal kampus Universitas Indonesia sekarang), membelah Kampung Kukusan dan Kampung Serdang, ke Kampung Tanah Baru, Kampung Krukut hingga ke Kampung Limo yang memiliki kemandorannya sendiri. Keberadaan jaringan jalan ini mempercepat konsolidasi sistem administrasi kemandoran, dan pada sisi lain juga memudahkan penarikan surplus petani untuk tuan tanah Pondok Cina.

*Keempat*, keberadaan tanah partikulir ini menandakan fase awal periferalisasi wilayah Onderdistrik Pasar Minggu terhadap Batavia. Tanah partikulir pula yang secara sengaja mempertalikan Pasar Minggu dengan Batavia. Apa yang ditanam di Pasar Minggu memiliki kaitan dengan Batavia. Umumnya, tanaman yang dibudidayakan diorientasikan untuk diekspor. Komoditas pertanian tersebut dikirim melalui Batavia untuk dijual di pasar dunia.

Jika Chastelein secara sengaja mencetak sawah di Seringsing agar jumlah padi yang dihasilkan meningkat, tidak demikian halnya dengan tuan tanah Krengel, tuan tanah Lenteng Agung, dan tuan tanah Ragunan (sebagaimana telah didiskusikan di muka). Tuan

tanah Krengel (berdomisili di areal yang sekarang menjadi kampus Universitas Pancasila) dan tuan tanah Lenteng Agung membangun pabrik minyak serih. Untuk menopang pabriknya itu, keduanya bertanam serih di seluruh tanah partikulier miliknya dengan bantuan “aparatus” lokalnya.<sup>24</sup> Mereka menjadikan tanah partikulier untuk menghasilkan minyak serih, karena sejak awal abad ke-20, minyak serih telah menjadi komoditas yang laku, baik di pasar domestik maupun pasar manca negara.

Untuk menggambarkan daya serap terhadap produksi minyak serih di atas, berikut diberi ilustrasi tentang pasar minyak serih yang relevan. *Pandji Pustaka* edisi tahun 1930-an memberitakan pasar minyak serih domestik dalam rubrik “Kabar Perniagaan”. Diungkapkan oleh majalah mingguan milik Pemerintah ini, bahwa harga minyak serih berkisar antara f.1,55 sampai f.1,45 setiap kilogramnya.<sup>25</sup> Dalam jumlah yang relatif besar, minyak serih rupanya diserap oleh pasar manca negara. Sebagai contoh, sekitar 57,5% kebutuhan minyak serih Amerika Serikat di pasok oleh produsen minyak serih dari Hindia Belanda. Pada tahun 1938 misalnya, Hindia Belanda mengeksport 1.156.000 pon minyak serih ke Amerika Serikat atau senilai \$364.000. Kebutuhan minyak serih Amerika Serikat pada waktu itu adalah 2.010.000 pon. Sisanya diimpor dari Siam (766.000 pon) dan Guatemala (876.000 pon).<sup>26</sup> Jadi, tingginya permintaan minyak serih baik di pasar dalam maupun luar negeri inilah yang membuat kedua tuan tanah di atas memfokuskan usaha di atas tanah partikulirnya untuk memproduksi minyak tersebut.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 1 Oktober 2005.

<sup>25</sup> Untuk harga minyak serih di Pasar Batavia lihat *Pandji Pustaka* No. 5 1938, hlm. 39 dan *Pandji Pustaka* No. 55 1933, hlm. 936

<sup>26</sup> Sujono, “Kedudukan Minyak Serih di Pasar Dunia Sesudah Perang Dunia II Sampai Permulaan tahun 1954” dalam *Pertanian* No. 1 Tahun ke-6, 1955, hlm. 24–25.

## B. SETELAH MENJADI TANAH GUBERNEMEN

Sebenarnya, keberadaan tanah partikular yang mendorong proses periferalisasi pada tahap awal di *Ommelanden* Batavia di atas tidak hanya dialami oleh Onderdistrik Pasar Minggu. Hampir seluruh tanah di *Regentschap Meester Cornelis* adalah tanah partikular.<sup>27</sup> Jadi, sebagaimana yang terjadi di Onderdistrik Pasar Minggu, situasi sosial ekonomi di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan tanah partikular. Tanah ditransformasikan sebagai penghasil komoditas, jumlah dan komposisi penduduk bergeser, muncul pola-pola kehidupan baru mendampingi pola kehidupan sebelumnya yang telah mapan. Lebih dari itu, wilayah ini pun terintegrasi ke Batavia, melalui sistem sosial ekonomi tanah partikular ini.

Akan tetapi, sungguh pun peran tanah partikular dalam proses periferalisasi tahap awal ini relatif besar, pada tahap yang lebih lanjut, Pemerintah Hindia Belanda menganggap keberadaan sistem sosial ekonomi tanah partikular justru sebagai penghalang. Pelbagai arsip pemerintah Hindia Belanda menunjukkan bahwa situasi sosial ekonomi di tanah partikular sangat buruk, banyak eksploitasi ekonomi di luar batas, perkembangan infrastruktur jalan yang relatif tidak bertambah, pertumbuhan ekonomi wilayah yang juga lambat, sampai sulitnya pemerintah menata wilayah tersebut karena aparat birokrasi pemerintah tidak dapat mengaksesnya.

Sebagai contoh, Residen Batavia mengeluhkan berbagai segi keberadaan tanah partikular ini. Residen Hoek dalam memoarnya tertanggal 20 Agustus 1934<sup>28</sup>, melaporkan betapa buruknya usaha sekolah di tanah partikular, padahal usaha sekolah di Karesidenan Batavia secara keseluruhan dapat dikatakan baik sekali. Begitu pula pertumbuhan infrastuktur jalan sangat rendah. Jalan yang terbentuk hanya yang terkait langsung dengan kepentingan tuan tanah.

---

<sup>27</sup> Lihat memoar serah jabatan Williemse, 26 Oktober 1931 dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memori Serah Jabatan 1931–1940 Jawa Barat (1)*, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 11, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1980, hlm. cxxii.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. cxxxviii dan cxl.

Karena begitu banyaknya persoalan yang terkait dengan keberadaan tanah partikular, rencananya pemerintah Karesidenan Batavia akan membeli tanah-tanah partikular tersebut.<sup>29</sup> Tetapi hasrat yang menggebu untuk membeli kembali tanah partikelir tidak tercapai seluruhnya. Menteri Jajahan hanya mampu menyediakan biaya sebesar f.500.000,- saja. Oleh Pemerintah Karesidenan Batavia, sebagian dana diperuntukan bagi pembelian kembali tanah partikular di Tangerang, dalam rangka pembangunan irigasi.<sup>30</sup> Oleh karena itu, ketika Residen Willems<sup>31</sup> berhasil membeli tanah partikular di wilayahnya, ia begitu bangga atas prestasinya itu. Ia juga melaporkan seusa pembelian, ia sedang merintis membangun sistem pemerintahan desa di dua distrik bekas tanah partikular tersebut.

Pada era jayanya tanah partikular di atas, komersialisasi buah-buahan di selatan Pasar Minggu belum terjadi secara luas. Tuan tanah belum menjadikan buah-buahan sebagai komoditas unggulan. Para tuan tanah di Serengeng, Jagakarsa, dan Lenteng Agung malah lebih mengedepankan padi-sawah dan minyak sereh sebagai komoditas unggulannya. Mereka tetap membiarkan buah-buahan menjadi tanaman yang terdapat di hutan-hutan “larangan”. Begitu pula lahan-lahan kosong tertentu justru difungsikan sebagai areal penggembalaan ternak dalam rangka menambah penghasilan penduduk wilayah tanah partikular.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Bahkan keluhan tentang keberadaan status tanah ini juga diungkapkan dalam dokumen resmi Pemerintah Kotapraja Jakarta yang dipublikasikan pada tahun 1953. Sampai tahun 1953, Pemerintah Kotapraja telah membeli 16 tanah partikular seluas 16.599 ha, dan pada tahun itu pula direncanakan akan membeli 10 tanah partikular lain seluas 1.887 ha. Dalam publikasi resmi Pemerintah kotapraja tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat telah membeli, diantaranya, tanah partikular di Lenteng Agung seluas 49 ha. Lihat Pemerintah Kotapradja Djakarta, *op-cit.*, hlm. 52 dan 53.

<sup>30</sup> Memoar serah jabatan Residen Batavia J.D. Hunger, tertanggal 3 Maret 1922 dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memoar Serah Jabatan 1921–1930 (Java Barat)*, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 8, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1976, hlm. xxxi.

<sup>31</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia, 1980.

<sup>32</sup> Boedisantosa, *op-cit.*, hlm. 95–96.

Benih-benih komersialisasi di selatan Pasar Minggu justru dirintis oleh penduduk setempat setelah tanah partikular ini dibeli oleh Pemerintah. Boedisantosa<sup>33</sup> mencatat bahwa pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda mengadakan pengukuran atas tanah-tanah partikular tersebut. Pada tahun itu pula tanah partikular tersebut dibagikan kepada para penggarapnya, yang mampu membeli hak milik atas tanah tersebut. Terdapat kurang lebih 800 pemilik tanah yang mampu membeli hak milik atas tanah di antara para penggarap setempat.

Rupanya penduduk yang telah memiliki hak milik tersebut tidak pula menjadikan buah-buahan sebagai penghasilan utama mereka. Mereka mengusahakan secara maksimal tanah-tanah mereka yang dapat diairi oleh irigasi setempat sebagai sawah, dan menempatkan bertani padi sawah sebagai mata pencaharian pokok. Dalam kaitannya dengan buah-buahan Boedhisantosa<sup>34</sup> menguraikan (tanpa perubahan ejaan):

“Penanaman palawidja dan pohon buah-buahan waktu itu, hanja merupakan pekerdjaan sambilan jang dilakukan diatas tanah-tanah pekarangan rumah jang terbatas.<sup>35</sup> Terpengaruh oleh

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 97–98. Lihat juga Sudjud, “Riwayat Djambu-Klutuk-Sukun (Djambu Bidji) (Seedles Guava) di Kebun Pembibitan Buah-buahan Tohudan (Solo)”, dalam *Pertanian No. 10-12*, Tahun ke-12, 1953, hlm. 57–59.

<sup>35</sup> Dalam ilmu ekonomi pertanian, pekarangan sungguhpun relatif kecil, tetapi tetap diperhitungkan sebagai salah satu sumber mata pencaharian para petani. Secara definitif, Garnadi (halaman 17) mendefinisikan pekarangan sebagai “... sebidang tanah disekitar rumah jang diberi batas dengan pagar serta penuh berisi tanaman beraneka-warna, jang berumur pandjang dan berumur pendek, jang mendjalar, jang memandjat, semak, pohon rendah, pohon tinggi”. Pada tahun 1937, pekarangan merupakan 18% atau 78.614 ha dari tanah produktif yang ada di Residensi Batavia. Luas lahan produktif waktu itu ialah 428.584 ha. Sisanya ialah tegalan seluas 94.045 (22%) dan sawah 255.925 ha (60%). Secara nasional, hasil pekarangan sebelum perang dunia ke-2 untuk seluruh Jawa dan Madura ditaksir f.100.000.000. Bila dirupiahkan pada tahun 1953 sekitar berjumlah 2.000.000.000 atau kurang lebih Rp1.600 per hektarnya. Bahkan pada tahun 1930, 1.697.244 kg buah-buahan, seperti mangga, kebembem, jeruk,

kenyataan bahwa pohon buah-buahan di hutan-hutan sekitar tempat tinggal mereka itu ternyata hidup subur, begitu pula setelah mereka mengusahakan penanaman di atas tanah-tanah pekarangan masing-masing dengan hasil baik, maka mereka dengan mudah mengganti tanaman pokok mereka dengan pohon-pohon buah-buahan, waktu dikemudian hari bersawah menjadi lebih sukar.”

Jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan buah-buahan ini tidak banyak. Penghasilan tersebut sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelengkap rumah tangga seperti minyak tanah, ikan asin, dan lain sebagainya. Dalam menjual buah-buahan para petani di wilayah ini amat berkalkulasi. Bila mereka menjual buah-buahan yang bernilai tinggi, mereka mengangkutnya dengan menggunakan kereta. Sementara bila yang dijualnya tidak bernilai tinggi seperti sayur-mayur, para petani tersebut menjualnya dengan berjalan kaki menuju Pasar Palmeriam di Meester Cornelis. Dengan dibantu lampu kecil, mereka berangkat secara berombongan pada dini hari.<sup>36</sup>

Meski penjualan buah-buahan merupakan nafkah tambahan, tetapi ia menyediakan uang kontan bagi para petani. Sisa untuk membeli kebutuhan pelengkap, mereka gunakan untuk membayar pelbagai pajak: pajak kepala maupun irigasi. Selebihnya, mereka gunakan pula untuk membayar tanah yang dibeli dari pemerintah. Menurut Pak Risin, para petani yang tidak mampu membayar pajak maupun membayar cicilan tersebut, tanahnya disita kembali oleh pemerintah.

Sejumlah kecil penduduk setempat ada pula yang berhasil mengakumulasi kekayaannya dari pekerjaan tambahan sebagai peda-

---

rambutan, dukuh, sawo, kesemek, dan manggis, diekspor ke Singapura atau senilai f.170.000. Pada tahun 1929, untuk memberikan ilustrasi lain, telah diekspor pisang ambon sebanyak 216.580 tandan pisang. Untuk jelasnya tentang sumbangan ekonomi pekarangan ini lihat Attila Garnadi, “Pekarangan sebagai Faktor Produksi dan Fungsi Sosial Pekarangan”, dalam *Pertanian No. 10* Tahun ke-8, 1953, hlm. 16–23.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 1 Oktober 2005

gang. Ayah Pak Risin, misalnya, mampu menambah luas tanahnya dari aktivitas berdagang. Tanahnya bertambah luas menjadi dua hektar. Dari hasil berdagang itu pula ayah Risin mampu membeli kerbau sebanyak tujuh ekor.

Berbeda dengan di wilayah selatan, proses komersialisasi buah-buahan di bagian utara Pasar Minggu telah berjalan terlebih dahulu. Pohon buah-buahan tidak lagi menjadi fenomena hutan sebagaimana yang terjadi di wilayah selatan Pasar Minggu. Pohon buah-buahan telah menjadi tanaman pekarangan dan tegalan yang secara sengaja ditanam agar memperoleh pendapatan. Pohon ini ditanam di tanah yang tidak dapat diairi oleh sistem irigasi yang terdapat di bagian utara Pasar Minggu.

Dekade pertama abad ke-20, banyak penduduk sekitar stasiun Pasar Minggu yang secara sengaja menanam buah-buahan yang hasilnya dijual sebagai produk pekarangan.<sup>37</sup>Jaraknya yang tidak jauh dari Batavia, akses perhubungan yang relatif baik (melalui jalan maupun kereta api), dan status areal ini sebagai tanah gubernemen turut mempercepat menguatnya komersialisasi buah-buahan di wilayah utara ini. Tidak heran bila kemudian muncul lembaga pemerintah, yakni *Dienst Tuinbouw* (Dinas Perkebunan), yang secara khusus bertugas melakukan penelitian mengenai hal-hal yang terkait dengan buah-buahan. Tahun 1914, *Dienst Tuinbouw* mulai mengumpulkan pohon induk terbaik dari setiap buah-buahan yang bernilai jual tinggi, utamanya jeruk dan mangga. Hal tersebut umumnya dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan kontes buah-buahan terbaik di pasar-pasar malam. Bila diperoleh buah terbaik, lalu pohon induknya itu diminta untuk diambil cabangnya agar dapat diperbanyak.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Haji Sarmada, sesepuh Kampung Jawa, Oktober 2005. Ia juga mengungkapkan bahwa pada awal abad ke-20, kakeknya telah menjual buah-buahan secara rutin ke Pasar Palmeriam di Meester Cornelis, suatu fenomena keseharian penduduk sekitar stasiun Pasar Minggu kala itu. Haji Sarmada sendiri lahir tahun 1930. Lihat juga Moh. Mahfoedi, *op-cit.*, hlm. 12.

Rupanya, berdirinya *Dienst Tuinbouw* ini terkait dengan menguatnya kebutuhan untuk menanam jenis buah-buahan tertentu secara besar-besaran, khususnya untuk perkebunan yang telah memiliki badan hukum. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan bibit jeruk dan mangga unggulan secara banyak, *Dienst* ini mengembangkan teknik okulasi sebagai pengganti cara konvensional, yaitu cangkok. Teknik okulasi dapat menghasilkan jauh lebih banyak dan lebih cepat daripada teknik cangkok. Dengan cara okulasi itu reproduksi tanaman bibit jeruk dan mangga unggulan dapat dilakukan dalam jumlah yang lebih banyak dan dalam waktu yang lebih singkat. Eksperimen untuk memperoleh bibit terbaik ini dilakukan dengan sistem percobaan berbaris (*rijenproef*), lalu digunakan pula sistem percobaan berpetak-petak menurut sistem Fisher.<sup>38</sup>

Pada tanggal 1 April 1921, secara resmi Pemerintah Hindia Belanda membangun Balai Pembibitan Buah-buahan di Ragunan. Lembaga ini pada dasarnya merupakan upaya untuk menyeleksi dan melakukan hibridasi terhadap bibit buah-buahan secara lebih sistematis sehingga buah-buahan tersebut diterima pasar dan bernilai jual lebih tinggi. Yang dimaksud dengan seleksi ialah

“[...] memilih dengan maksud memisahkan jang baik buat kebutuhan... bukanlah ditunjukkan semata-mata kepada hasil yang maksimum saja, tetapi juga kepada mutu (kwalitet) hasil, tahan penyakit, lekas dapat dipungut, dll”.

Sedangkan, yang dimaksud hibridasi ialah

“... pembasteran... penyatuan sifat-sifat baik yang terdapat dalam dua tanaman; misalnya: dari padi Latisail jang tidak peka mentek dan produksi tinggi sekali serta padi Tjina jang berbunga bukan menurut musim (*seizoenbloei*) diperoleh pada jang memiliki semua sifat-sifat jang tersebut di atas”.<sup>39</sup>

Bagaimana bentuk konkrit sekaligus pengharapan publik terhadap keberadaan kebun bibit yang menggunakan ilmu pertanian

---

<sup>38</sup> *Perekonomian Ra'jat No. 9 Tahun ke-1 1934*, hlm. 66; dan Mahfoedi, *op-cit.* hlm. 12–13

<sup>39</sup> *Pertanian No. 9 Tahun ke-8 1957*, hlm. 385

modern dan mempekerjakan lulusan sekolah pertanian *middelbare landbouwschool* ini, kiranya perlu dikutip satu laporan secara panjang tentang durian yang dimuat dalam majalah *Pandji Poestaka* 7 (V) yang terbit tanggal 25 Januari 1927, halaman 99–100.

“Pohon doerian jang boeahnja soengguh-soengguh énak rasanja, djarang benar. Kalau ada dalam salah soeatoe kampoeng, masjhoer kekampoeng-kampoeng jang lain. Orang ingin memperbanjak pohon jang énak boehnja itoe. Tetapi sajang, bidji doerian jang enak, kalau ditanam, boeahnja beloem tentoe seenak boeah jang dahoeloe ....

Djalan lain akan memperbanjak pohon itoe, orang dikampoeng beloem mengetahoei. Memboet tjangkoekan boléh djadi soedah ditjoba, tetapi beloem óemoem didjalankan orang.

Lagi poela pohon doerian itoe tingginya ada jang sampai lebih 20 M, djadi soekar sekali akan membikin tjangkokan.

Oléh sebab itoe pohon doerian jang enak boeahnja tetap djarang adanja.

Bagaimanakah sekarang ákalnya?

Hal itoe oléh Departemen Peroesahaan Tanah (Departement van landbouw) sedjak beberapa tahoen telah ditjari daja oepanja dikeboen kepoenjaan Goebnemén di Ragoenan, dekat Pasar Minggoe, Mr. Cornelis, dengan djalan éntén (oculeeren). Pertjobaan itoe hasilnja menjenangkan hati. Sekarang dikeboen Ragoenan orang bisa dapat bibit pohon doerian jang bagoes-bagoes seberapa soekanja, diéntén dari pohon-pohon jang soedah masjhoer énak rasanja.

Dengan djalan demikian tentoe diperoléh pohon, jang boeahnja énak rasanja, seroepa dengan boeah asalnja.

Orang boléh djoega meminta tolong boeat mengénténkan pohon doeriannja jang ingin diperbanjak, dengan membajar ongkos sedikit.

Keterangan-keterangan jang lebih landjoet boleh dipinta kepada Tuinbouwkundig-ambtenaar di Pasar Minggu, Mr. Cornelis.

Djadi sekarang karena pertjobaan di Ragoenan itoe terboeka djalan akan berkeboen doerian lebih teratoer dan lebih tentoe énak rasanja, dari pada dahoele?”

Ilustrasi lain tentang produk kebun percobaan di Pasar Minggu ini ialah jambu-klutuk-sukun, buah yang digemari hampir seluruh penduduk Jawa: manis rasanya, tetapi banyak orang enggan memakannya karena begitu banyaknya biji yang dikandung sehingga sangat mengganggu. Jambu-klutuk sukun ialah jambu yang benar-benar tidak berbiji. Tiadanya biji-bijian pada jenis jambu ini justru memperkuat aspek komersialnya. Jenis jambu yang kemudian dikenal sebagai jambu klutuk sukun ini membuat jambu tidak hanya sekedar konsumsi anak-anak dan kelelawar, melainkan telah menjadi santapan orang dewasa dengan memiliki prestis sosial yang relatif tinggi.

Kebun percobaan Pasar Minggu melakukan inovasi jambu klutuk ini pada tahun 1930-an. Kebun percobaan tingkat nasional ini telah mengirimkan bibit jambu-klutuk-sukun cangkokan ke seluruh kebun-kebun jawatan di Pulau Jawa. Pada tahun 1936, kebun Tohudan di Solo menerima kiriman empat cangkokan bibit jambu klutuk sukun dari Kebun Percobaan Pasar Minggu. Lantaran pengiriman bibit jambu jenis ini tidak disertai informasi apa pun, maka pekerja di kebun Tohudan menanam bibit ini di areal sekitar kantor kebun Tohudan.<sup>40</sup>

Sejak awal pendiriannya hingga tahun 1932, Kebun Percobaan Buah-buahan memfokuskan diri untuk meneliti bibit buah-buahan

---

<sup>40</sup> Pada tahun 1951, ketika Sudjud menulis artikel tentang riwayat jambu klutuk sukun ini, keempat bibit cangkokan yang dikirim dari Pasar Minggu telah berusia 15 tahun, masih hidup tanpa pernah terserang penyakit baik di tingkat batang maupun cabangnya. Bahkan pohon-pohon tersebut telah menjadi pohon induk, yang kemudian dikembangkan menjadi bibit-bibit jambu klutuk sukun turunan yang dibudidayakan di seluruh Surakarta dan daerah sekitarnya. Tahun 1941, keempat pohon tersebut berbuah. Para pegawai kebun Tohudan dapat membuktikan sendiri bahwa inovasi dari Pasar Minggu menunjukkan hasil nyata. Jenis jambu klutuk ini menghasilkan buah yang tidak berbiji. Setelah pembuktian ini, jambu klutuk sukun memperoleh perhatian yang lebih dari para pegawai kebun tersebut. Tahun 1950, setelah kebun Tohudan sering dikunjungi, jambu klutuk jenis ini atau *seedless guava* menjadi terkenal. Beribu-ribu bibit *seedless guava* ini kemudian dikirimkan ke berbagai daerah. Untuk jelasnya lihat Sudjud, *op-cit.*, hlm. 57–59. Di Pasar Minggu sendiri, jenis jambu klutuk ini menjadi komoditas unggulan rakyat petani pada tahun 1960-an, khususnya di desa Tanjung Barat.

secara teknis, dengan cara mengokulasi atau mengenten pohon induknya. Aspek yang dikaji kurang lebih berkisar: bagaimana pohon tersebut ditanam, berapa ketinggian tanah yang cocok, dan berapa jarak satu pohon sejenis dengan yang lain. Secara lebih rinci, Mahfoedi<sup>41</sup>, seorang peneliti buah-buahan yang terlibat dalam proses penelitian pada era ini, menguraikan beberapa aspek yang menjadi kajiannya itu: (1) pengaruh pohon induk terhadap pertumbuhan dan pembuahan, (2) terhadap waktunya berbunga, (3) pengaruh tanah dan iklim terhadap pertumbuhan dan pembuahan, dan kombinasi lainnya, (4) daya tahan pohon induk terhadap pelbagai penyakit.

Berkaitan dengan buah-buahan yang menjadi primadona dan bernilai jual saat itu, yakni jeruk dan mangga, pada tahun 1932, telah cukup diketahui pelbagai pohon induk yang dapat diolah menjadi jeruk dan mangga yang berkualitas. Kata Mahfoedi<sup>42</sup>, “... pohon Rough Lemon untuk bermacam-macam jeruk yang terbanjak, memberi hasil-hasil yang lebih baik dari Japanese citroen, meskipun okulasi-okulasi yang ditempelkan pada yang disebut belakangan ini berbuahnya lebih lekas.”

Pada tahun 1932–1940, orientasi penelitian buah-buahan bertambah kompleks. Selain diarahkan untuk mengetahui kondisi tanah yang cocok untuk tanaman tertentu, seperti keadaan air tanah dan tinggi tanah dari permukaan air laut, penelitian buah-buahan juga diarahkan untuk memperoleh teknik menyimpan, mengepak, dan mengirimkan buah-buahan tersebut. Secara lebih khusus, lembaga yang mengurus hal-hal percobaan ini ialah *Dienst Tuinbouw*, suatu bagian khusus dari *Dienst Landbouw* atau Departemen *Economische Zaken*.

Hasil inovasi bibit unggul *Dienst Tuinbouw* yang dijual murah itu umumnya digunakan oleh tiga lembaga, yakni perkebunan pemerintah (*landbouw*), kebun rakyat-pribumi dan pekarangan rumah, serta *kleinlandbouwers* (petani kecil bangsa Belanda). Menurut laporan

---

<sup>41</sup> Mahfoedi, *op-cit.*, hlm. 13–14.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Majalah Perekonimian Ra'yat No. 9 Tahun ke-1 yang terbit 6 Mei 1934, halaman 66–67, kualitas buah-buahan dari kebun rakyat, pekarangan, dan *kleinlandbouwers* bukan unggulan alias kualitasnya kurang baik. Bila dijual begitu saja maka harganya pun jatuh. Dalam kaitan inilah *Dienst Tuinbouw* membangun *Conserven Laboratorium*, agar buah-buahan yang terakhir ini bisa diolah menjadi pelbagai minuman dan makanan. Buah-buahan tersebut akan diolah sedemikian rupa sehingga layak dikonsumsi oleh penduduk Hindia Belanda sendiri. Rupanya, *Dienst Tuinbouw* dengan *Conserven Laboratoum*”nya” itu tengah membangun pasar hasil olah lanjut buah-buahan.<sup>43</sup>

Pelbagai hasil inovasi kebun percobaan Ragunan di atas juga menarik perhatian kalangan terkait. Pandji Pustaka<sup>44</sup> melaporkan bahwa enam pengelola perkebunan buah-buahan dari Lenteng Agung yang dipimpin oleh Soekardi, *Ajunct Tuinbouw-consulent* Lenteng Agung melakukan kunjungan kerja ke Kebun Percobaan Buah-buahan di Ragunan, Pasar Minggu. Keenam pengelola perkebunan pemerintah tersebut juga melihat-lihat dalam kebun dan kebun-kebun bibit. “Siapa lagi yang akan berkunjung ke sana? Ragunan itu memang disediakan bagi orang-orang berkebun, yang ingin mendalami pengetahuanya. Di situ boleh didapat pelajaran bagaimana orang berkebun yang sebaik-baiknya”.

Kebun Percobaan Buah-buahan Ragunan ini dikunjungi pula oleh peneliti sejenis dari luar negeri. Bulan September 1933, sebuah komisi yang tengah mempelajari soal perusahaan buah-buahan dari Mesir telah berkunjung ke Kebun Percobaan Buah-buahan Ragunan. Komisi dari Mesir tersebut terdiri atas M.T. Hefnawi (direktur sekolah tani menengah), Osman (guru besar ilmu buah-buahan dan sayur-mayur), dan Abd-El Ghani Sobhi, digambarkan oleh Pandji Pustaka<sup>45</sup> “... amat besar minatnya terhadap ... boeah

---

<sup>43</sup> Lihat juga *Perekonomian Ra'yat* No. 2 Tahun ke-1 1939; *Perekonomian Ra'yat* No. 6 Tahun ke-1 1939, hlm. 41–42; dan *Pandji Pustaka* No. 8, 1937.

<sup>44</sup> *Pandji Pustaka* No. 54 Tahun ke-11 1933, hlm. 986.

<sup>45</sup> *Pandji Pustaka* No. 77 Tahun ke-6 1933, hlm. 1203–1204

durian”. Setelahnya, komisi tersebut mengunjungi Surabaya, Pasuruan, dan Malang juga untuk mempelajari ihwal buah-buahan.

Kebun percobaan inilah yang menjadi tulang punggung maraknya perkebunan buah-buahan milik pemerintah di wilayah Pasar Minggu. Perkebunan merupakan perusahaan yang berbadan hukum, dan berbeda dengan tanah partikular yang berstatus milik perorangan meski memiliki hak *eigendom*. Maka, sebagai lembaga modern atau perusahaan yang jelas-jelas berorientasi keuntungan, perkebunan amat bergantung dan mempraktikkan sistem pertanian modern. Pola pertanian modern terbaru mereka terapkan agar produk pertaniannya menjadi lebih maksimal. Lebih jauh, keberadaan perkebunan ini memberikan corak baru terhadap sistem kolonialisme di Indonesia, termasuk untuk onderdistrik Pasar Minggu. Liberalisasi ekonomi pada tahun 1870 semakin mengukuhkan perkebunan sebagai primadona ekonomi Hindia Belanda.<sup>46</sup>

Di wilayah Pasar Minggu sendiri, terdapat dua jenis perkebunan buah-buahan. Pertama, perkebunan buah-buahan yang memiliki kaitan langsung dengan Kebun Percobaan, yakni yang terdapat di bagian utara. Jenis kedua ialah yang tidak terkait dengan Kebun Percobaan, dan terdapat di bagian selatan yang dipimpin oleh seorang *ajunct-landbouw consulent*. Dengan demikian, keberadaan kebun buah-buahan modern milik pemerintah tersebut, telah mendampingi keberadaan kebun buah-buahan milik penduduk setempat yang telah menjadi mata pencaharian mereka, khususnya di bagian utara dari wilayah ini.

Di selatan Pasar Minggu, perkebunan pemerintah terkonsentrasi di wilayah Srengseng. Perkebunan Srengseng Sawah misalnya, ditanami jeruk, pete, dan jambu mede. Areal perkebunan Sikon 13 ditanami jeruk, areal sikon 14 ditanami pete, dan areal spur 7 ditanami Jambu Mede. Hasil perkebunan tersebut bahkan dikirim dengan truk.<sup>47</sup> Sementara, di belahan utara Pasar Minggu, perkebunan

---

<sup>46</sup> Lihat Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Alih bahasa Hermawan Sulistiyono. Jakarta: Grasindo, 1993.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 2 September 2005.

tersebut tersebar dalam beberapa tempat: di Ragunan, Jatipadang, Rawaminyak, Kampung Kandang, dan Tanjung Barat.

Keberadaan perkebunan buah-buahan di onderdistrik Pasar Minggu amat membanggakan Residen Willemse. Buah-buahan dengan jumlah berarti dihasilkan melalui perkebunan ini. Dengan demikian, dinamika ekonomi di wilayah ini tumbuh dengan pesatnya. Onderdistrik Pasar Minggu memainkan peran baru sebagai penghasil buah-buahan dengan jumlah yang sangat berarti. Lebih dari itu, melalui buah-buahan dan perkebunan tersebut, onderdistrik ini mengalami periferalisasi yang lebih kuat di era liberalisasi ekonomi.

Residen Willemse<sup>48</sup> dalam memoarnya tertanggal 26 Oktober 1931 misalnya, juga menyebut Pasar Minggu—bersama-sama dengan Kebayoran dan Pasar Rebo—merupakan wilayah terbanyak menghasilkan buah-buahan di Residensi Batavia. Hasilnya cukup melimpah, tidak hanya dikonsumsi di dalam wilayah Karesidenan Batavia, tetapi juga dikirim ke luar wilayah keresidenan. Buah-buahan tersebut dikirim melalui stasiun Pasar Minggu, stasiun Kebayoran, dan stasiun Manggarai. Jumlah yang dikirim tersebut sekitar 6 juta kilogram atau senilai f.1.300.000,-. Sambil mengutip J.J Oche (seorang Ajung Inspektur bagian pertanian), Residen Willemse juga melaporkan bahwa pada tahun 1926 dan 1927, luas kebun buah di Pasar Minggu rata-rata adalah 304 RU<sup>2</sup>. Hasilnya seharga kurang lebih senilai f. 1.900.000. Pohon buah-buahan yang masih produktif tersebut, tertua berumur 23 tahun, dan termuda berumur 15 tahun; hal tersebut tidak termasuk pohon pisang.

Pengganti Willemse, yakni Van der Hoek<sup>49</sup> dalam memori serah jabatan tertanggal 20 Agustus 1934 juga menekankan arti penting perkebunan bagi penggerak dinamika ekonomi wilayah. Ia menyatakan bahwa di sekitar Batavia terdapat 200 perkebunan yang khusus menanam buah-buahan, dan hasilnya itu sangat berarti.

---

<sup>48</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia 1980, *op-cit.*, hlm. cxiv.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. cxxx.



Sumber: *Perekonomian Ra'yat* No. 12 Tahun ke-1 1939, hlm. 90.

Gambar 2.1 Saat musim sawo di sekitar stasiun Pasar Minggu. Beratus-ratus pikulan dibawa ke stasiun agar dapat diangkut oleh kereta listrik untuk didistribusikan ke tempat lain di Pulau Jawa

Tatkala Hoek menulis serah terima jabatan pada 20 Agustus 1934, harga buah-buahan saat itu sedang turun, meski masih tetap dijadikan sandaran yang baik bagi penduduk setempat.

Lebih jauh, Residen Hoek yang membawahi Onderdistrik Pasar Minggu juga melaporkan bahwa pasar buah-buahan tersebut tidak hanya di kota-kota besar di Jawa, tetapi juga di kota-kota besar di luar Jawa. Demi lancarnya pengiriman buah-buahan tersebut, pada tahun 1932, pihak perusahaan kereta api pemerintah menurunkan biaya angkutan kereta agar pengiriman buah-buahan tersebut semakin baik. Begitu pula, agar distribusi buah-buahan lancar, pada tahun 1934, pemerintah berusaha mendirikan pasar buah-buahan di sekitar areal Stasiun Pasar Minggu. Menurut Hoek, upaya mendirikan pasar tersebut belum berhasil.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selain itu, menurut laporan Willemse, perkebunan buah-buahan telah pula menjadi sandaran mata pencaharian penduduk setempat. Bahkan keberadaan perkebunan di sekitar stasiun Pasar Minggu telah turut mendorong penduduk setempat beralih menjadi petani kebun yang menghasilkan buah-buahan. Di awal tahun 1930-an, keberadaan perkebunan buah-buahan telah mentransformasikan wilayah sekitar stasiun Pasar Minggu menjadi penghasil buah-buahan yang memasok kebutuhan pasar buah.[]

Buku ini tidak diperjualbelikan.

## BAB III

# Perubahahan Status, Infrastruktur, dan Pertanian Sawah

Uraian dua tahap periferalisasi dalam bab dua mengindikasikan tiga hal. Pertama, periferalisasi yang dimotori oleh perkebunan buah-buahan milik pemerintah yang berstatus badan hukum dan penjualan perorangan petani setempat (sebagai produk ekonomi pekarangan mereka), terkait erat dengan tumbuhnya pasar buah. Pasar ini—dalam pengertian yang abstrak ilmu ekonomi—tidak saja tumbuh di Batavia, tetapi juga untuk diekspor, dan pasar yang tumbuh di daerah lain di Pulau Jawa. Dengan kata lain, perkebunan buah-buahan pemerintah ini mampu memasok tiga jenis pasar buah-buahan di atas.

Kedua, proses periferalisasi yang ditandai oleh komersialisasi dan penjualan buah-buahan secara besar-besaran tersebut difasilitasi oleh sarana perhubungan, terutama jaringan kereta. Sungguhpun wilayah Pasar Minggu tidak jauh dari Batavia, dan dapat dicapai dengan jalan kaki, keberadaan jaringan transportasi massal tersebut amatlah berperan. Kereta api dan truk mampu mengangkut buah-buahan secara banyak. Sarana perhubungan ini pula yang membuat lahirnya sentra distribusi buah-buahan (*marketplace*) di sekitar stasiun kereta api Pasar Minggu.

Ketiga, proses periferalisasi di muka juga mempengaruhi terbentuknya tata sosial ekonomi baru. Apa yang paling penting bagi penduduk lokal ialah dijadikannya wilayah Pasar Minggu ini sebagai tanah gubernemen. Di atas statusnya sebagai tanah gubernemen

ini, komunitas mereka itu kemudian ditata ulang, menjadi berstatus pemerintahan desa. Mereka pun secara perseorangan beralih status menjadi petani pemilik, bukan lagi petani penggarap seperti di era tanah partikular. Perubahan inilah yang mengawali komersialisasi buah-buahan. Berpadu dengan jaraknya yang tidak jauh dari Batavia, maka suatu dinamika sosial ekonomi tertentu yang bertumpu pada menguatnya aspek komersialisasi buah-buahan semakin tumbuh.

## A. DUALISME BUDI DAYA DAN PASAR BUAH

Jelas, keberadaan kebun percobaan di Pasar Minggu yang berfungsi dalam lingkup nasional di atas menandakan menguatnya aspek komersialisasi dari buah-buahan. Dengan bantuan ilmu pertanian modern dan tenaga ahli (orang Belanda lulusan sekolah pertanian di Negeri Belanda dan tenaga pribumi terdidik lulusan *Middelbare Landbouwschool* Bogor) dalam bidang pertanian, upaya menjadikan buah-buahan sebagai komoditas unggulan bukan lagi isapan jempol. Buah-buahan diupayakan sejajar nilainya dengan komoditas pertanian lain yang laku di pasar, seperti teh, karet, tembakau dan lain sebagainya. Begitu pula, Pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga khusus yang mengurus soal inovasi bibit buah-buahan—termasuk sayur mayur—yakni *Dienst Tuinbouw*, suatu bagian khusus dari *Dienst Landbouw* atau Departemen *Economische Zaken*. Sementara, agar buah-buahan tersebut dapat diolah secara modern dibentuk pula lembaga khusus untuk itu, yakni *Conserven Laboratorium*. Jadi, ujung dari upaya tersebut ialah bahwa perkebunan buah ini—yang merupakan upaya modernisasi pola tanam konvensional yang telah lama dikembangkan petani setempat—dirancang agar memiliki kualitas yang layak untuk ekspor, atau kelak akan diolah lanjut sehingga menghasilkan nilai tambah dan karena itu akan bernilai jual yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat *Perekonomian Ra'yat* No. 6 Tahun ke-1 1939, hlm. 41–42 dan *Perekonomian Ra'yat* No. 9 Tahun ke-10 1934, hlm. 66–67. Lihat juga *Pandji Pustaka* No. 8 1937.

Untuk memperlihatkan betapa upaya di atas terkait dengan tumbuhnya pasar buah-buahan, terlebih dahulu akan diungkap dinamika pasar buah-buahan di Singapura. *Pandji Pustaka* No. 55 tahun 1933, melaporkan dalam rubrik “Berita Pasar Singapoera” tertanggal 4 Juli, bahwa seminggu sebelumnya pasar buah di Singapura telah menerima kiriman jeruk keprok, jeruk manis, kesemek, dan nenas dari Palembang. Kiriman ini melengkapi import buah dari Thailand (jeruk siem dan jeruk bali), Cina (lengkeng, pruiemen, dan semangka), Australia, dan California (apel, *grapefruit*, sitroen, anggur, dan sinaasappel). Berita pasar buah tertanggal 4 Juli 1933 juga melaporkan (halaman 856) bahwa:

“Haroes diperingatkan, bahwa ada banjak sekali dikirimkan boeah doerian dari sekitar Singapoera dan Djohor, barangkali hingga 20 hari lamanya. Oléh karena itoe, barangkali lain-lain boeah-boeahan akan tá begitoe lakoe, melihat gemarnja pendoedoek pada doerian itoe. Boeah manggis dan tjempedak djoega banjak sekali didatangkan. Dari itoe, agaknya baik djika saudagar<sup>a</sup> *hati*<sup>2</sup> dengan *pengiriman djeroeek dengan consignatie*, ja<sup>3</sup>toe agak dikoerangi banjaknya; sebab soedah boleh diramalkan bahwa harganja akan toeroen”.

*Pandji Pustaka* No. 60 Tahun 1933 halaman 885 dalam beritanya tentang pasar buah Singapura mewartakan bahwa pada tanggal 10 Juli 1933 pengusaha Indonesia telah mengirimkan jeruk keprok, jeruk manis, jeruk siam, dan nenas Palembang. Artikel ini juga mengingatkan bahwa” [s]audagar<sup>2</sup> Indonesia lebih baik djangan menambahi kiriman boeah-boeahan, apalagi djeruk”, karena perediaan durian, pisang, manggis, rambutan, cempedak, dan menteng lebih dari cukup dan harganya pun sedang turun. Berita yang sama juga kembali diwartakan dalam *Pandji Pustaka* edisi No. 61 tahun 1933 halaman 953.

Tabel 3.1 memperlihatkan secara lengkap dinamika perdagangan buah di Pasar Singapura, baik dalam bentuk perdagangan besar maupun eceran. Tabel tersebut memperlihatkan fluktuasi harga yang relatif tajam karena tingkat penawaran semakin bertambah,

**Tabel 3.1** Berita Pasar Buah-buahan di Singapura Selama Juli 1933 (dalam \$ USA)

Buah	Daftar Harga 4 Juli		Daftar Harga 10 Juli		Daftar Harga 25 Juli	
	Per-dagangan Besar	Per-dagangan Kecil	Per-dagangan Besar	Per-dagangan Kecil	Per-dagangan Besar	Per-dagangan Kecil
Nanas Palembang (sebuah)	0.035	0.07	0.0325	0.07	0.0075	0.02
Jeruk (sekati)						
a. Sitrun (Jaffa dan California) sebuah	0.022	0.05	0.018	0.04	0.02	0.05
b. Sinaaspele (California dan Australia) sebuah						
c. Bali (siam) sebuah	0.055	0.09	0.065	0.09	0.069	0.09
d. Keprok (malang) sekati						
e. Manis (malang) sekati						
f. Nipis (sebuah)	0.045	0.07			0.02	0.03
g. Siem (Siam) sekati						
h. Grapefruit	0.11	0.18	0.10	0.16	0.08	0.14
i. Siam (Banjarmasin) sekati	0.07	0.14	0.05	0.08	0.04	0.08
	0.005	0.01			0.0025	0.005
	0.06	0.10				
	0.11	0.14				
			0.09	0.14	0.09	0.12
			0.05	0.12	0.05	0.10
Durian (sekati)	0.08	0.12	0.045	0.12	0.04	0.08
Mangga (Bombay) sebuah	0.12	0.20	0.10	0.20	0.07	0.12
Manggis (10 buah)	0.07	0.10	0.07	0.10	0.03	0.06
Rambutan (10 buah)	0.045	0.07	0.045	0.07	0.045	0.07
Sawo (10 buah)	0.08	0.18	0.07	0.18	0.04	0.12

Diolah dari *Pandji Pustaka* 55 1933, hlm. 856; *Pandji Pustaka* No. 60 1933, hlm. 885; dan *Pandji Pustaka* No. 61 1933, hlm. 953

Kurs 4 Juli 1933, \$1=f 0.98,5; 10 Juli 1933, \$ 1=f 0.96; 25 Juli 1933, \$1=f 0.97,5

sementara permintaan tidak menaik sekuat pertama. Menaikinya suplai ini, antara lain, karena semakin banyaknya negara, seperti Malaya yang juga berinvestasi relatif besar dalam bidang perkebunan buah-buahan. Kompetisi ini pada akhirnya sangat mengkhawatirkan ekspor buah-buahan dari Hindia Belanda yang memang amat mengandalkan komoditas buah-buahan andalannya, seperti

jeruk dari Malang dan Banjarmasin, serta nanas dari Palembang. Rentannya pasar buah Singapura bagi komoditas Hindia Belanda sangat tampak dari pelbagai pernyataan rubrik kabar perniagaan *Pandji Pustaka* untuk berhati-hati jika mengekspor buah-buahan ke pasar Singapura demi menghindari kerugian besar.<sup>2</sup>

Begitu pula dengan pisang, rupanya pengusaha pertanian non-pribumi telah lama mengekspor jenis pisang, seperti ambon putih, ambon ijo, songgrono. Ekspor pisang ini banyak dilakukan oleh Palembang, khususnya ke Singapura. Pada tahun 1900, sejumlah 90.000 tunden berhasil diekspor, jumlah ini meningkat 1,8 kali lipat menjadi 164.000 hanya dalam tujuh tahun (lihat Tabel 3.2).

**Tabel 3.2** Perkembangan Ekspor Pisang dari Hindia Belanda

Tahun	Jumlah Ekspor (dalam tunden)
1918	90.000
1919	114.000
1920	104.000
1921	125.000
1922	130.000
1923	119.000
1924	138.000
1925	164.000

Diolah dari *Pertanian* No. 4 Tahun ke-7 1951, hlm. 26

Dibandingkan dengan pasar internasional, sesungguhnya tingkat permintaan buah-buahan untuk pasar domestik jauh lebih besar. Tumbuhnya pasar buah ini terkait dengan membesarnya kota-kota

<sup>2</sup> Pada tahun 1930 tercatat bahwa buah-buahan yang diekspor ke Singapura berjumlah 1.697.244 kilogram, seharga kurang lebih f. 170.000. Buah-buahan yang diekspor tersebut terdiri dari mangga, kebembem, macam-macam jenis jeruk, rambutan, dukuh, sawo, kesemek, dan manggis. Untuk jelasnya lihat Attilia Garnadi, "Pekarangan sebagai Faktor Produksi dan Fungsi Sosial Pekarangan", dalam *Pertanian No. 10* Tahun ke-8, 1953, hlm. 22–23.

di Indonesia yang ditandai oleh meningkatnya jumlah penduduk kota pascaliberalisasi ekonomi 1870. Batavia, misalnya, pangsa pasar buah-buahan dari wilayah Pasar Minggu, juga tumbuh dengan sangat pesat pada dekade pertama abad ke-20. Hering<sup>3</sup> menggambarkan tentang pelbagai segi yang turut mendorong semakin dinamikannya kehidupan sosial ekonomi Batavia pada peralihan abad ke-20. Terbukanya terusan Suez (1869) yang membuat perjalanan laut lebih cepat dan beroperasinya pelabuhan Tanjung Priok mempercepat peningkatan jumlah penduduk Belanda yang mencari penghidupan di Hindia Belanda, khususnya di Batavia. Semua itu mempercepat pertumbuhan ekonomi lantaran swasta pun secara leluasa diperbolehkan berusaha di Hindia Belanda.

Dekade kedua abad ke-20, struktur sosial ekonomi dan demografis Batavia semakin berkembang. Jumlah penduduk Batavia meningkat tajam. Tahun 1930 jumlah penduduknya naik 3,75 kali lipat dari tahun 1900, menjadi 435.184 jiwa, padahal pada tahun 1900 jumlah penduduk Batavia berjumlah 115.887.<sup>4</sup> Tahun 1905, jumlah penduduk Batavia meningkat 1,2 kali lipat dari tahun 1900. Jumlah ini meningkat dua kali lipat pada tahun 1920 dibandingkan tahun 1900.

Tabel 3.4 memperlihatkan komposisi etnis hasil sensus 1930 dibandingkan dengan komposisi etnis hasil sensus tahun 1920. Baris ke bawah memperlihatkan persentase masing-masing etnis, baik di Batavia maupun di Meester Cornelis tahun 1920 dan 1930. Sementara, kolom ke samping kanan, menunjukkan proporsi kenaikan jumlah penduduk secara keseluruhan, antar masing-masing etnis Batavia 1930 dengan Batavia 1920 atau antara Meester Cornelis 1930 dengan hal yang sama pada tahun 1920. Tampak bahwa jum-

---

<sup>3</sup> Bob Hering, *M. H. Thamrin: Membangun Nasionalisme Indonesia*, terjemahan Harsono Sutejo, Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hlm. 1–20.

<sup>4</sup> Tawaludin Haris, *Jakarta Masa Hindia Belanda*. Laporan Penelitian Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995, Apendiks Tabel 1 dan Tabel 2; lihat juga Susan Abeyasekera, *Jakarta: A History*. Revised Edition. Oxford: Oxford University Press. 1989, hlm. 88–91.

lah penduduk pribumi (baik di Batavia maupun di Meester Cornelis) naik secara signifikan. Kelompok sosial ini berjumlah paling besar di masing-masing wilayah administratif tersebut. Sedangkan, kelompok sosial lainnya juga naik secara relatif signifikan, kurang lebih rata-rata 1,5 kali lipat.

**Tabel 3.3** Jumlah penduduk Batavia 1900–1930 <sup>1</sup>

Tahun	Jumlah	Kenaikan
1900	115.887	
1905	138.547	1,2
1917	231.463	1,7
1920	253.818	1,1
1930	435.184	1,9

Diolah dari Tawaludin Haris, *Jakarta Masa Hindia Belanda*. Laporan Penelitian Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995, Apendiks Tabel 1.

**Tabel 3.4** Komposisi penduduk Kota Batavia tahun 1920 dan 1930\*

Kelompok Etnis	1920		1930	
	GB	MC	GB	MC
Pribumi	186.836 (73,6%)	42.819 (81,6%)	325.978 (1,75x) (74,9%)	83.677 (1,95 x) (85,5%)
Eropa	24.540 (9,7%)	4.833 (9,2%)	31.130 (1,3x) (7,15%)	5.940 (1,2 x) (6,1%)
Cina	38.978 (15,4%)	4.353 (8,3%)	71.688 (1,8x) (16,5%)	7.127 (1,6 x) (7,3%)
Asing lainnya	3.464 (1,4%)	468 (0,9%)	6.388 (1,9 x) (1,5%)	1.081 (2,3 x) (1,1%)
Jumlah	253.818 (100%)	52.473 (100%)	435.184 (1,7x) (100%)	97.831 (1,9x) (100%)

Keterangan: GB: Gemeente van Batavia; MC: Meester Cornelis; \*Tawaludin Haris, *loc-cit*.

<sup>1</sup> *Ibid.*

Meningkatnya jumlah penduduk di kedua wilayah administratif di atas, yang pada tahun 1935 disatukan itu, berimplikasi pada pertumbuhan sosial ekonomi yang lebih dinamik. Permintaan buah-buahan yang meningkat amat bertalian dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Eropa di Batavia.<sup>5</sup> Dalam struktur pola makan Eropa, buah-buahan merupakan bagian integral dari pola makan, sebagai makanan penutup (*dessert*) dalam rangka tambahan atau variasi gizi.

Dinamika sosial ekonomi yang tumbuh pesat ditunjukkan secara baik oleh Abeyasekere.<sup>6</sup> Ia menunjukkan pada tahun 1920-an, Batavia telah dihiasi oleh ratusan kendaraan bermotor (khususnya mobil), bahkan ribuan becak. Tumbuh pula pelbagai koran dan majalah yang menunjukkan adanya gejala komodifikasi terhadap informasi. Begitu pula dengan kegiatan kesenian, dalam tahap tertentu telah menunjukkan adanya komodifikasi dalam bidang ini. Pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda pada awal abad ke-20—yang terlihat dengan semakin meningkatnya konsentrasi penduduk daerah perkotaan—telah mendorong proses komersialisasi tanaman tertentu. Buah-buahan pun yang awalnya tak bernilai komersial kemudian memiliki nilai jual. Dalam konteks dinamikanya sosial ekonomi Kota Batavia tadi, pasar buah tumbuh dengan pesat.<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan dinamika ekonomi yang tumbuh pesat di Hindia Belanda pada tahun 1920-an di atas, pemerintah

---

<sup>5</sup> Lihat Susan Abeyasekere, *loc-cit.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 90–94.

<sup>7</sup> Sebagai perbandingan tentang terbentuknya harga suatu tanaman sehingga bernilai komoditas, adalah terjadi pada kasus tanaman iles atau bunga bangkai. Diberitakan pada tahun 1939, bahwa iles atau bunga bangkai telah tumbuh menjadi tanaman komersial yang memiliki pasar yang baik. “Tanaman ini tidak diperkeboenkan, melainkan toemboeh dengan sendirinja dihoetan-hoetan atau dikeboen-keboen dan dihalaman roemah”. Tatkala Jepang membutuhkan bahan mentah bunga bangkai ini untuk diolah lebih jauh, maka pasar iles pun tumbuh di Hindia Belanda. Harganya kurang lebih antara f 7,50-f 12,10 setiap 100 kilogramnya. Bahkan di Cimahi telah berdiri perusahaan yang menyediakan pasokan bagi pasar iles ini. Lihat *Perekonomian Ra'jat* No. 2 Tahun ke-1 1939.

mengemukakan rancangan untuk mengatur masuknya golongan Timur Asing. Jumlah orang Timur Asing yang masuk ke Hindia Belanda, yakni orang Tionghua, Arab, dan India menunjukkan kenaikan yang signifikan sepanjang tahun 1920-an. Pada tahun 1922 tercatat orang Timur Asing yang masuk berjumlah 38.138 jiwa, turun pada tahun 1924 menjadi 29.019 jiwa. Akan tetapi, pada tahun 1929 naik menjadi 30.176 jiwa, melonjak menjadi 52.955 pada tahun 1928, 49.684 pada tahun 1929, dan pada tahun 1930 relatif menurun pada menjadi 48.359. Pada tahun 1931 jumlah mereka turun drastis menjadi 28.298 jiwa.<sup>8</sup>

Mereka datang karena meningkatnya kemakmuran di Hindia Belanda. Mereka bukanlah orang kaya, dan bermigrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Sebagian mereka inilah dengan keahlian dan keuletannya, relatif berperan dalam meningkatkan dinamika ekonomi Batavia. Namun, setelah tahun 1930, tatkala depresi ekonomi melanda, kedatangan mereka ini dikhawatirkan justru dapat memperkeruh suasana ekonomi, karena kedatangan mereka dikhawatirkan dapat mencaplok peluang berusaha untuk kalangan yang lain.

Meski pasar buah di Batavia tumbuh dengan pesat, tetapi peningkatan permintaan itu ternyata tidak diimbangi oleh persediaan yang cukup. Hal ini dilaporkan oleh salah satu edisi majalah *Pandji Pustaka*.<sup>9</sup> Bahkan ada kecenderungan suplay tidak memenuhi permintaan pasar buah yang sebenarnya relatif tetap. Dalam keadaan demikian muncul upaya untuk meningkatkan produktivitas buah-buahan, baik di kalangan pengusaha kebun buah orang Belanda (*kleinlandbouwers*) maupun petani buah pribumi.

Sambil mengutip uraian dari majalah *Landbouw en Veeteelt, Pandji Pustaka*<sup>10</sup> edisi 59 tahun 1933 menunjukkan bahwa pola bertani buah-buahan yang selama ini dipraktikkan oleh pengusaha Belanda

---

<sup>8</sup> *Pandji Pustaka* No. 65 1933, hlm. 1008.

<sup>9</sup> *Pandji Pustaka* No. 59 1933, hlm. 912–913.

<sup>10</sup> Untuk lengkapnya, lihat majalah *Pandji Pustaka* No. 59 1933, hlm. 912–913.

adalah salah. Majalah orang Belanda tersebut mengingatkan kepada pengusaha Belanda bahwa pola bertani Belanda yang selama ini mengandalkan pada “koeli upahan” daripada “meréka sendiri jang bekerdja”, telah memanjakan mereka pada saat masa keemasan, dan tidak cocok lagi di era depresi ekonomi. Apalagi ada fakta bahwa “... djika lebih banjak orang jang hendak membeli, kekoerangan hasil keboen meréka itoe meréka tambah dengan hasil keboen anak negéri jang mereka beli”. Pola bertani tadi membuat banyak kalangan *kleinlandbouwers* jatuh bangkrut. Utamanya, karena mereka tidak tahu seluk beluk berusaha dalam bidang pertanian, apalagi di saat situasi saat itu karena “... persaingan lebih hébat dan orang tiada banjak mempoenyaī wang”.<sup>11</sup>

Dalam No. 59 Majalah *Pandji Pustaka*,<sup>12</sup> mengutip kembali majalah *Landbouw en Veteelt* menyatakan:

“Apabila seseorang Éropa beroesaha mentjahari pengetahoen tentang ... perkeboenan boeah-bochan ..., maka pastilah ia akan dapat mengadakan hasil jang dalam segala hal dapat bersaing dengan hasil peroesahaan bangsa Boemipoetera, selama meréka [Boemipoetera—AS] itoe beloem mendjalankan peroesahaan meréka sebaik-baiknja dan mengoempoelkan pengetahoean poela tentang salah satoe tanaman. Dalam hal jang terachir [bila bumiputera menjalakan perusahaan dengan baik dan memiliki pengetahuan yang memadai—AS] ini pastilah saingan itoe akan amat berat”.

Terinspirasi oleh nasihat majalah Belanda untuk orang Belanda itu, maka *Pandji Pustaka* edisi di atas juga memberikan nasihat senada. Di era depresi ekonomi, petani anak negeri dituntut untuk meningkatkan kemampuan bersaing khususnya dengan pengusaha *kleinlandbouwers*. *Pandji Poestaka* menyatakan bahwa kebun anak negeri berpeluang diperbesar hasilnya. Ia menyatakan bahwa seharusnya pohon jeruk siem yang berusia enam tahun di Pasar Minggu menghasilkan 1.800 sampai 2.000 buah jeruk siem setahunnya.

<sup>11</sup> *Pandji Pustaka* No. 59 1933, hlm. 912.

<sup>12</sup> Untuk lengkapnya, lihat majalah *Pandji Pustaka* No. 59 1933, hlm. 912–913.

Selama ini pohon jeruk di Pasar Minggu milik anak negeri itu hanya menghasilkan 200 sampai 300 buah setahunnya. “Itoelah sebabnja maka boeah-boehan ... agak mahal harganja. Hasilnja tiada berapa besar, sedangkan banjak jang hendak membeli boeah-boeahan jang baik”.<sup>13</sup>

*Pandji Pustaka* menyarankan agar petani bumiputera memperdalam pengetahuan seluk beluk ilmu pertanian yang relevan. “Kesempatan oentoek mendapat pengetahoen itoe ada oléh karena sekarang Pemerintah mempoenjaī keboen pertjobaan dan peroesahaan, jang menerima beberapa orang jang hendak beladjar sambil bekerdja”.

Dari segi kualitas pun, pasokan buah-buahan untuk pasar domestik maupun luar negeri dihadapkan pada bercampurnya buah-buahan yang berkualitas dengan yang tidak. *Perekonian Ra'yat*<sup>14</sup> melaporkan bahwa rata-rata buah-buahan yang dijual oleh pedagang buah-buahan kaki lima dari segi besar, warna, dan rasanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tentu saja harganya menjadi lebih rendah. “Lagi poela boeah-boeahan jang tidak sama warnanja dan tidak sama besarnja tidak dapat dijoeal dinegeri loearan, seperti di Singapoera...”. Kualitas rendah ini terkait dengan fakta bahwa buah-buahan adalah tanaman pekarangan atau halaman rumah. Ia juga terkait dengan fakta rendahnya kualitas bertani “keboen-keboen orang priboemi dan *kleinlandbouwers* (tani Bangsa Belanda).<sup>15</sup>

Jadi, keberadaan kebun percobaan buah-buahan untuk lingkup nasional di atas, pertama-tama adalah untuk memenuhi pasar buah-buahan dalam dan luar negeri yang tumbuh pesat pada awal-awal abad ke-20. Bahkan, di era depresi ekonomi, kebun percobaan ini menyediakan jasa konsultasi agar pasokan buah-buahan tetap stabil dan berkualitas. Dengan perkataan lain, tanpa mengubah status tanah partikulier yang terdapat di wilayah Pasar Minggu

<sup>13</sup> *Pandji Pustaka* No. 59 1933, hlm. 913.

<sup>14</sup> *Perekonian Ra'yat* No. 12 Tahun ke-1 1939, hlm. 90.

<sup>15</sup> *Perekonomian Ra'yat* No. 9 Tahun ke-1 1934, hlm. 67.

menjadi “tanah gubernemen”, pemerintah tidak dapat secara leluasa mewujudkan visi sosial ekonominya itu. Bila masih bertatus tanah partikular, pemerintah tidak dapat membuat rencana besar atas wilayah Pasar Minggu, karena dengan sendirinya terhalang oleh keberadaan tanah partikular. Tanah partikular seolah-olah berdaulat, seperti negara dalam negara. Maka, menjadikan tanah partikular menjadi “tanah gubernemen” adalah suatu keniscayaan dalam sudut pandang ini.



Sumber: *Perekonomian Ra'yat* No. 12 Tahun ke-1 1939, hlm. 91

**Gambar 2.** Pedagang Buah-buahan di Batavia

Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa proses periferalisasi yang dialami oleh Pasar Minggu sangat terkait dengan kebijakan Negara Hindia Belanda kala itu. Negara memainkan peran, khususnya dalam kebijakan wilayah dalam kerangka penyangga fungsi sosial ekonomi Batavia, sehingga wilayah ini bertransformasi menjadi pemasok komoditas buah-buahan. Dalam konteks tersebut, fungsi wilayah Pasar Minggu sebagai pemasok komoditas pertanian buah, terkait dengan dibangun dan semakin membaiknya sarana transportasi dari dan ke Batavia.

## B. ANTARA JALAN TANAH, STASIUN, DAN REL KERETA API

Proses periferalisasi di atas yang ditandai menguatnya komersialisasi pertanian buah, sangat terkait dengan tersedianya sarana perhubungan. Pada fase awal, Sungai Ciliwung turut memainkan peran sebagai sarana transportasi. Sungai inilah yang menjadi sarana transportasi utama wilayah Pasar Minggu dengan Batavia, sebelum akhirnya beralih ke jalan darat yang dibangun pada awal abad ke-19-an atau jaringan kereta api yang dibangun tahun 1873.

Jalan darat yang menghubungkan Batavia dengan onderdistrik sekitarnya dan terus hingga ke Depok dan Bogor, dibangun sekitar tahun 1830. Jalan ini dibangun agar transportasi menjadi lebih mudah, terlebih lagi dapat menggantikan peran Sungai Ciliwung yang relatif berbahaya.<sup>16</sup> Tahun 1897, jalan tanah dibangun di empat lokasi. Lokasi pertama berpusatkan di Stasiun Pasar Minggu, yang menandakan bahwa areal tersebut telah berkembang menjadi satu kawasan sosial ekonomi yang penting. Selain menghubungkan ke wilayah selatan (Tanjung *West*), lokasi ini juga memiliki percabangan ke wilayah Condet dengan melintasi Sungai Ciliwung.

Areal kedua adalah di Tanjung *West*. Percabangan jalan ini telah melingkari wilayah Tanjung *West* dan membuatnya dapat menjangkau pelosok wilayah ini hingga pinggir Sungai Ciliwung. Areal ketiga ialah yang menghubungkan jalan tanah ini dengan Kampung Kalapa Tiga terus hingga Kampung Jagakarsa. Sementara areal terakhir, ialah jalan yang menghubungkan kampung-kampung di sekitar Srengseng seperti Kalibata dan Situ Babakan dengan jalan Pasar Minggu-Depok tersebut.

Pada tahun 1938, jalan yang menghubungkan kawasan di sekitar Stasiun Pasar Minggu dengan pusat Kota Batavia melalui

---

<sup>16</sup> Pemerintah Kota Depok, *Peraturan Daerah Kota Depok No. 1/1999 tentang Hari Jadi dan Lambang Kota Depok*, Lembaran Daerah Kota Depok No. 3 Tahun 2001. Depok, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok; lihat juga Alwi Shahab, “Mudik di Jalan Daendels”. *Republika*, 13 November 2005, hlm. 15.

Manggarai telah diaspal. Jalan beraspal ini menghubungkan Stasiun Pasar Minggu hingga wilayah yang sekarang dikenal sebagai Mangga Besar, sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer. Selain jalan di atas, tidak ada jalan lain yang beraspal di Pasar Minggu. Jalan lainnya masih berkategori jalan desa, berbentuk tanah bahkan belum diperkeras—menurut klasifikasi laporan Residen Willemse.<sup>17</sup> Demikianlah, jaringan jalan yang menghubungkan Stasiun Pasar Minggu, Tanjung *West*, Lenteng Agung, Srengseng Sawah terus sampai ke Depok (yang sekarang dikenal dengan Jalan Margonda)—sejajar dengan rel kereta api Batavia-Buitenzorg—masih berbentuk jalan tanah. Jaringan jalan yang lain pun, yang menghubungkan Jeruk Purut, Cilandak Kulon, Kandang, Krukut hingga Setu, juga berkategori jalan tanah.

Sejak 31 Januari 1873, Pasar Minggu dihubungkan oleh jaringan kereta api ke dan dari Batavia. Sarana transportasi ini memiliki dua stasiun dan satu perhentian, yakni Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Lenteng Agung, dan Perhentian Tanjung-*West*. Jaringan kereta yang menggunakan lebar sepur 1.067 mm ini merupakan pembangunan tahap ke-3 yang menghubungkan Meester Cornelis Passer dengan Buitenzorg, dan mulai dibangun pada tahun 1872.<sup>18</sup>

Menurut Hatmawan<sup>19</sup> jaringan kereta api ini ditujukan untuk mempermudah sarana perhubungan antara Batavia dan Buitenzorg, setelah arti strategis kota terakhir ini terbentuk pada paruh pertama abad ke-19. Di Buitenzorg telah berdiri Departemen Pendidikan, Departemen Pertanian, Kebun Raya, Kebun Percobaan (*cultuurtuin*), dan fasilitas lainnya.<sup>20</sup> Oleh karena itu, pemerintah pusat memandang penting untuk meningkatkan sarana transportasi antara dua kota, demi efisiennya fungsi pemerintahan dan ekonomi antara dua

<sup>17</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia 1980, hlm. cxix.

<sup>18</sup> Adhitya Hatmawan, *Perkembangan Transportasi Kereta Api di Jakarta 1870–1925*. Skripsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia 2002, hlm. 38–39.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>20</sup> Lihat juga Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, *Dua Abad Penelitian Pertanian di Indonesia*, Jakarta: Departemen Pertanian, 2004, hlm. 3–10.

kota tersebut. Jadi, jalur kereta api ini dibangun demi meningkatnya sarana perhubungan setelah dibangunnya pelayanan telegraf (tahun 1856) dan pelayanan pos (1864).

Dengan keberadaan jaringan kereta api yang dapat digunakan pada tahun 1873, maka hasil-hasil pertanian dari tanah partikular dan perkebunan di Onderdistrik Pasar Minggu lebih mudah dikirimkan dan dipasarkan. Bahkan ketika Pelabuhan Internasional Tanjung Priok beroperasi pada 1886, hasil-hasil perkebunan tersebut semakin mudah diekspor, karena jaringan rel tersebut dirancang secara integratif hingga dapat sampai ke pelabuhan internasional tersebut. Apalagi ketika tahun 1925 sistem jaringan rel kereta api ini ditingkatkan menggunakan sistem listrik, ritme kereta pun lebih teratur dan tentu hal tersebut semakin memudahkan pengiriman hasil bumi dari wilayah Pasar Minggu, terutama pengiriman buah-buahan.

Untuk konteks lokal, keberadaan jaringan kereta api ini memberikan dampak sosial ekonomi bahkan politik yang sangat besar, baik pada fase pembangunan jaringan rel, maupun setelah jaringan kereta api tersebut beroperasi. Pembangunan relnya sendiri telah mampu menggerakkan dinamika ekonomi wilayah yang dilaluinya. Pembangunan jaringan rel kereta api selama empat tahun (1869–1873) telah menghabiskan biaya 3.193.700,- gulden, atau 43.600,- gulden perkilometer dan 5.000,- gulden untuk peralatannya. Perputaran uang sebesar itu dan selama empat tahun telah menumbuhkan konsentrasi penduduk, bahkan pusat pertumbuhan lokal di wilayah yang dilaluinya.

Tentu saja dalam pembangunan jaringan rel membutuhkan banyak tenaga kerja. Sebagian besar mereka berasal dari wilayah pedesaan di sekitar lokasi pembangunan atau di sekitar Residensi Batavia. Para pekerja ini membawa peralatan sendiri seperti pacul, keranjang, kapak, dan sebagian pekerja lain yang memerlukan keterampilan khusus seperti tukang kayu dan pandai besi.



Setelah beroperasi kereta api, dampak sosial ekonomi pun amat tampak. Berbeda dengan dampak jalan darat, dampak sosial ekonomi jaringan kereta terkonsentrasi di sekitar stasiun. Seperti halnya kasus Cikini yang diungkapkan oleh Hatmawan, pusat pertumbuhan lokal pun tumbuh di sekitar stasiun Pasar Minggu, areal sekitar Stasiun Lentang Agung, bahkan di sekitar Perhentian Tanjung West juga berkembang menjadi pusat pertumbuhan lokal dalam skala yang lebih kecil.

Di sekitar Stasiun Pasar Minggu tumbuh pasar. Pasar tidak saja berfungsi sebagai arena distribusi komoditas dari penduduk setempat, tetapi juga berfungsi sebagai arena masuknya komoditas dari luar wilayah. Di areal tersebut juga dibangun fasilitas untuk pemerintahan Onderdistrik Pasar Minggu. Begitu pula kantor polisi, yang oleh penduduk setempat dinamakan kantor opas, juga berada di areal ini. Wilayah ini, dengan perkataan lain, merupakan areal yang terintegrasi paling kuat dengan Batavia di antara wilayah lain di dalam onderdistrik Pasar Minggu.

Implikasi lebih jauh ialah terbangunnya jaringan jalan ke pelosok Onderdistrik Pasar Minggu yang bertitik tolak dari wilayah ini.<sup>22</sup> Areal sekitar Stasiun Pasar Minggu dihubungkan oleh jalan-jalan baru—sebagaimana tampak pada Peta tahun 1938—ke permukiman yang berada di pelosok. Maka, sekitar stasiun juga menjadi arena terkonsentrasinya pelbagai komoditas pertanian, termasuk buah-buahan, sebelum akhirnya diangkut oleh kereta ke tempat tujuan. Dari memori serah jabatan Residen Willemsse maupun Residen der

---

Cikini dalam sistem Kota Batavia. Cikini pun secara sosial dipersepsi sebagai pinggiran Batavia. Hal tersebut terjadi setelah di sekitar wilayah ini dibangun perumahan elite Menteng dan kebun binatang. Lihat Adhitya Hatmawan, *op-cit.*, hlm. 66–68. Untuk sejarah permukiman elite Menteng, lihat Adolf Heuken dan Grace Pamungkas, *Kota Taman' Pertama di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2001.

<sup>22</sup> Dalam kasus yang ditunjuk Hatmawan ialah dampak dari keberadaan stasiun Meester Cornelis Passer. Setelah adanya stasiun ini, sarana lalu lintas yang dahulunya hanyalah jalan tanah berkembang menjadi jalan-jalan baru yang menuju ke stasiun. Bahkan tak lama kemudian jalan tersebut diaspal. Lihat Adhitya Hatmawan, *op-cit.*, hlm. 69.

Hoek<sup>23</sup> dapat diketahui bahwa stasiun Pasar Minggu telah berfungsi sebagai sarana distribusi buah-buahan ke lokasi tujuan.

Walaupun jaringan kereta api berperan besar dalam pergerakan ekonomi di wilayah Pasar Minggu, tetapi di mata penduduk setempat, sistem angkutan kereta listrik dipandang diskriminatif. Setiap rangkaian kereta listrik terdiri atas tiga kelas (gerbong kelas satu, kelas dua, kelas tiga) dan gerbong barang. Kelas satu merupakan gerbong termahal: bersih dan kursinya menggunakan busa serta disusun seperti bus, berhadapan-hadapan. Tarif kelas dua lebih murah dari kelas pertama. Kursinya pun disusun seperti kelas satu, hanya terbuat dari rotan. Sementara kelas tiga adalah tarif termurah. Berbeda dengan dua yang pertama, struktur kursi gerbong ini berhadapan-hadapan mengikuti arah rel kereta api, seperti tempat angkutan kota sekarang. Tarif kelas tiga ini adalah empat sen, untuk sekali keberangkatan dari Pasar Minggu ke Manggarai. Bagi penduduk Srengseng dan Jagakarsa, tarif tersebut terasa amat mahal, senilai beberapa liter beras. Karena tarifnya terasa mahal, sebagian besar petani menjual hasil buah-buahan itu dengan berjalan kaki ke Manggarai, Boplo (sekitar Cikini sekarang), atau Senen menyusuri pinggiran rel atau jaringan jalan, dengan berangkat secara beramai-ramai sekitar pukul 00.00 atau 03.00 dini hari. Petani buah setempat akan menggunakan jasa kereta api (gerbong barang) listrik, manakala mereka membawa buah-buahan yang memiliki nilai jual tinggi.<sup>24</sup>

### **C. PERALIHAN STATUS, PULANG-PASAR, DAN PERTANIAN SAWAH**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa periferalisasi telah melahirkan dinamika sosial ekonomi yang baru. Pembelian tanah partikulir oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga mengubah status menjadi tanah gubernemen, memudahkan dimilikinya sebagian tanah tersebut

<sup>23</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia 1980.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 2 September 2005

oleh petani setempat, meski sebatas hanya mereka yang mampu membeli hak milik atas tanah tersebut. Dengan demikian, sistem bertani padi yang telah dirintis oleh tuan tanah dengan dukungan sistem irigasi yang relatif memadai, dilanjutkan oleh para petani secara perorangan. Komersialisasi buah-buahan pun telah semakin mantap, karena komoditas ini dapat dijual ke Batavia, baik dengan kereta api maupun dengan berjalan kaki.

Statusnya sebagai tanah gubernemen juga memungkinkan pemerintah membudidayakan buah-buahan secara sistematis, modern dan masal. Budi daya dengan cara modern ini pada dasarnya merupakan respons pemerintah terhadap menguatnya pasar buah-buahan. Tentu saja, bagi penduduk setempat yang sejak awal abad ke-20 telah menjual buah-buahan ke pasar-pasar di Batavia dengan berjalan kaki, keberadaan kebun percobaan dan perkebunan buah-buahan (yang oleh mereka disebut *landbouw* itu) menginspirasi mereka untuk terus mempergiat komersialisasi buah-buahan. Pada sisi lain, kita menjumpai bahwa antara perkebunan buah-buahan pemerintah dan petani buah setempat—meminjam istilah Boeke<sup>25</sup>—terpisah dalam pola dualisme ekonomi: “... tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Rakjat sekitarnya. Kedua pihak tidak tahu-menahu tentang nasib masing<sup>2</sup>: “lu—lu, gua—gua”, kata orang dengan logat Betawi. Atau mereka hidup berudjak-sentul”.<sup>26</sup>

Penduduk Kampung Jawa misalnya—yang berjarak sekitar 200 meter arah barat laut stasiun Pasar Minggu—telah menggantungkan diri pada buah-buahan sejak awal abad ke-20. Mereka memasarkan sendiri hasil buah-buahnya ke pasar Meester Cornelis dengan berjalan kaki beramai-ramai, menyusuri jalur rel atau terkadang jalan desa. Mata pencahariannya itu terkait dengan pola pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh penduduk Kampung Jawa. Hanya sedikit sawah di kampung ini, itu pun dikenal sebagai sawah darat karena

<sup>25</sup> J. H. Boeke, “Dualism in Colonial Societies”. Dalam Hans-Dieter Evers (editors). *Sociology of South-East Asia: Readings on Social Change and Development*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1980, hlm. 26–37.

<sup>26</sup> *Pertanian* No. 6 Tahun ke-8 1957, hlm. 112.

mengandalkan tadah hujan. Selebihnya kampung ini berlahanakan kebun, berisikan buah-buahan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Letak kampung Jawa yang berada tidak jauh dari stasiun atau pusat pertumbuhan Pasar Minggu pun telah turut berperan membuat buah-buahan lebih bermakna komoditas.<sup>27</sup>



**Gambar 3.** Kebun Buah milik Penduduk

Menurut Residen Batavia Hoek,<sup>28</sup> kebun buah-buahan ini telah menjadi penghasilan yang memadai bagi penduduk setempat. Selain itu, di era Hindia Belanda ini, pasar Minggu juga dikenal sebagai penghasil ikan gurame. Produksi ini ditekankan dalam memori serah jabatan Residen Willemse yang menyampaikan memoarnya itu pada 26 Oktober 1931.<sup>29</sup> Bahkan, karena banyak petani yang beternak ikan gurame, di era Hindia Belanda Pasar Minggu dikenal sebagai daerah yang berhasil melahirkan salah satu sistem pengembaang-

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Haji Sarmada, 70 tahun, penduduk asli Kampung Jawa, November 2005.

<sup>28</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia 1980, hlm. cxxx.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. cxvi.

biakan ikan gurame selain sistem Sukaratu (Tasikmalaya) dan sistem Tarogong (Garut). Hasil inovasi petani Pasar Minggu ini dikenal sebagai cara terbaik untuk menyiasati *baby box periodic*, masa ikan gurame bertelur hingga telur itu menetas. Meski demikian, sistem ini membutuhkan keahlian tinggi dan pengalaman yang lama. Hasilnya lebih memuaskan dari pada sistem Sukaratu maupun sistem Tarogong.<sup>30</sup>



Sumber: Pertanian No. 1 Tahun ke-6 1955, hlm. 20

**Gambar 4.** Pengembangbiakan Gurame Sistem Pasar Minggu

Meski wilayah utara Pasar Minggu telah berkembang menjadi penghasil buah-buahan sejak awal abad ke-20, buah-buahan bukanlah produk utama pertanian di wilayah selatan onderdistrik ini. Penduduk wilayah Pasar Minggu bagian selatan, seperti Tanjung West, Srengseng, dan Jagakarsa, bertumpu pada mata pencaharian padi-sawah dan masih mengandalkan penghasilan utamanya dari pertanian sawah ini. Jadi, sawahlah yang menjadi sandaran utama penghasilan mereka. Mereka bertanam padi di sawah setahun sekali,

---

<sup>30</sup> Untuk lengkapnya lihat *Pertanian* No.1 Tahun ke-2 1954, hlm. 1–3 dan *Pertanian* No. 1 Tahun ke-6 1955, hlm. 19–23.

dan di sela-sela dua musim tanam biasanya mereka menanaminya dengan palawija.<sup>31</sup>

Sebetulnya buah-buahan telah ada. Banyak sekali dijumpai dukuh, rambutan, dan durian. Meski banyak, hingga akhir masa pemerintahan Hindia Belanda buah-buahan tidak bermakna komoditas. Banyak petani yang membiarkan masa panen buah-buahan, berjatuh dan berserakan begitu saja tanpa diolah. Penduduk lain yang ingin mengambilnya dipersilahkan, asalkan buah-buahan tersebut telah jatuh dari pohon.

Meski berstatus sebagai penghasilan tambahan, ada saja penduduk yang menjualnya ke Batavia khususnya ke Boplo (sekarang Cikini), Senen, dan Palmeriem. Biasanya mereka menjual durian, bacang, dukuh, rambutan, melinjo, dan gandaria ke pasar-pasar di Batavia. Bila sedang tidak musim buah-buahan, mereka ini tetap memasarkan hasil pertanian di lokasi ini, menggantinya dengan membawa kacang tunggak, pucuk pepaya, genjer, pepaya muda, maupun sayuran yang lain. Harga yang terakhir ini jauh di bawah penjualan buah-buahan. Secara keseluruhan pendapatan dari penjualan buah-buahan ini—apalagi sayuran-sayuran tadi—“tidak seberapa”.<sup>32</sup>

Para petani yang menjual buah-buahan tersebut berangkat secara bersama-sama dari rumahnya pukul 03.00 pagi, bahkan ada

<sup>31</sup> Palawaja sebagai tanaman “antara” sesungguhnya memiliki dua fungsi. Pertama, sering dipahami bahwa fungsi tanaman “antara” palawija dapat membantu meningkatkan kesuburan sawah. Jadi, palawija berfungsi bagaikan pupuk alam setelah kesuburan tanah sawah diserap oleh padi, sekaligus sebagai persiapan untuk masa tanam selanjutnya agar hasilnya lebih maksimal. Kedua, fungsi palawija adalah juga sebagai pendapatan tambahan. Biasanya mereka menjual palawija ke pasar-pasar di Batavia dengan berjalan kaki, manakala buah-buahan belum panen atau tidak sedang masa petik buah-buahan. Lihat Boedisantosa, “Djakarsa: Desa Kebun Buah-buahan Dekat Djakarta”. Dalam Koentjaraningrat (Penghimpun). *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*. Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1962.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 2 September 2005. Pak Risin sendiri tidak mengalami kehidupan era kolonial karena dia lahir tahun 1930. Informasi yang dituturkannya itu ia peroleh dari kakak laki-lakinya yang memang mengalami menjual buah-buahan di akhir era Hindia Belanda.

yang berangkat pukul 00.00 tengah malam. Mereka membawa buah-buahan tersebut dengan sistem pikulan, yakni berisikan dua keranjang buah-buahan (atau sayur-mayur) dan menggunakan sebilah bambu yang telah diperhalus untuk memikul. Sistem pikulan ini adalah alat yang paling mungkin membawa buah-buahan dan sarana yang paling mungkin diakses oleh setiap penduduk setempat. Energi terbesar justru terletak pada orang yang membawanya. Dua keranjang yang dibawa dengan mengandalkan pundak memang berat, apalagi untuk perjalanan berjam-jam dari Lenteng Agung ke Cikini.<sup>33</sup>

Kadang mereka menyusuri rel kereta api dan kadang pula menyusuri jalan desa. Di Kalibata Duren Tiga, mereka berhenti. Rupanya lokasi tersebut telah disepakati secara sosial sebagai tempat untuk beristirahat. Hampir setiap pedagang yang berjalan kaki jauh sambil memikul sepasang keranjang buah-buahan, beristirahat di warung onde-onde, penjual makanan tradisional khas Betawi di Kalibata Duren Tiga. Biasanya para pedagang buah-buahan itu duduk-duduk di balai bambu yang telah disediakan, minum kopi sambil makan onde-onde. Setelah beristirahat, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Ada yang ke Boplo, Senen, dan ada pula yang ke Palmeriam.

Penduduk setempat menyebut upaya memasarkan buah-buahan tersebut sebagai “pulang pasar”, suatu istilah yang diambil dari bagian terakhir dari proses itu. Hasil dagangnya itu digunakan untuk menambah kehidupan sehari-hari, memperoleh keuntungan antara 10 hingga 25 sen. Sepulangannya dari pasar, mereka membelanjakan

---

<sup>33</sup> Dilihat dari sudut ketersediaan sarana jalan pun, sistem pikulan merupakan sarana angkutan buah yang paling mungkin. Pada tahun 1930-an, jaringan jalan di wilayah Pasar Minggu sangatlah terbatas. Hanya beberapa kilometer saja jalan yang telah diaspal, yakni di sekitar stasiun Pasar Minggu. Selebihnya jaringan jalan tersebut berupa jalan tanah dan belum diperkeras. Antar jalan atau antar permukiman dihubungkan oleh jalan setapak. Dalam situasi jalan yang demikian, kendaraan tradisional sekalipun seperti pedati relatif sulit melaluinya. Jadi, sarana angkutan buah yang paling mungkin dan yang paling mudah dijangkau oleh sebagian petani buah di onderdistrik Pasar Minggu adalah sistem pikulan.

hasil penjualannya itu dengan membeli beras (satu liter beras seharga empat sen), ikan asin, dan minyak tanah untuk lampu. Mereka memang membeli minyak tanah untuk penerangan, sebab untuk memasak mereka menggunakan kayu bakar yang saat itu mudah diperoleh.

Keberadaan uang kontan hasil pulang pasar tersebut, bahkan digunakan untuk membayar pembelian tanah ke pemerintah, membayar pajak kepala dan pajak irigasi. Lebih dari itu, uang pun di sana telah menjadi sarana akumulasi kekayaan bahkan sarana untuk menabung. Orang tua Pak Risin sendiri, misalnya, mampu memperluas tanah sehingga menjadi seluas dua hektare, dari usahanya berdagang. Orang tuanya itu berhasil menysikan penghasilannya dengan membeli sawah yang sekarang berada di sekitar Jalan Belimbing, kebun, dan tujuh ekor kerbau.<sup>34</sup>

Untuk menunjukkan bahwa mata pencaharian kebun buah bukanlah sumber utama nafkah penduduk wilayah selatan Pasar Minggu, kita akan melacak asal-usul dua kampung, yakni Kampung Kandang dan Kampung Kalibata.

Dari namanya, penamaan Kampung Kandang yang telah tertera dalam Peta tahun 1897 tidak memiliki kaitan dengan buah-buahan. Setiap rumah di Kampung Kandang pada sekurang-kurangnya memiliki sebuah kandang untuk memelihara kerbau, sapi atau ayam, atau kambing sebagai sumber pencaharian. Lantaran setiap rumah memiliki kandang, maka kampung tersebut dinamakan kampung Kandang.<sup>35</sup>

Peta tahun 1938 memperlihatkan bahwa areal Kampung Kandang sangat luas, terdiri atas tiga bagian: Kampung Kandang 1, Kampung Kandang 2, dan Kampung Kandang 3. Bagian utara

<sup>34</sup> Pak Risin mengilustrasikan meski mereka telah berkenalan dengan uang, tapi memperoleh uang waktu itu begitu susah. Pada sisi lain, karena sulitnya memperoleh uang kontan ada juga petani yang tidak mampu membayar pembelian tanahnya itu kepada pemerintah, sehingga tanahnya itu disita kembali oleh pemerintah. Wawancara dengan Pak Risin, 2 September 2005.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Pak Maan, 27 Agustus 2005.

dibatasi oleh Kampung Ragunan. Bagian selatan dibatasi oleh Kampung Setu, di bagian timur berbatasan dengan Kampung Jagakarsa, dan di bagian barat dibatasi oleh Kali Krukut. Kampung Kandang 1 dan 2 yang berbatasan langsung dengan *landbouw* terhubung dengan jalan desa.

Kalibata merupakan kampung yang terletak di bagian paling selatan wilayah Pasar Minggu dan telah tercatat pada Peta wilayah Pasar Minggu tahun 1897. Dalam pemahaman lokal penduduk setempat, Kalibata terdiri atas suku kata, kali dan bata, kurang lebih bermakna sungai yang telah diperkuat bagian tanggul kanan dan kirinya dengan tembok batu bata. Penamaan ini merupakan semacam ingatan kolektif untuk menggambarkan bagian tertentu dari jaringan irigasi yang ditembok oleh pemerintah Belanda, dan menurut Afandi penamaan tersebut masuk akal karena dari segi lokasi kampung ini berada persis terletak di sepanjang sungai kecil yang pada masa lalu memang pernah ditanggul dengan batu bata.<sup>36</sup>

Kalibata adalah kampung pertanian sawah yang subur. Pasokan air tersedia secara melimpah dan selalu membawa endapan lumpur untuk mengairi lahan persawahan yang diusahakan oleh penduduk setempat, yang biasanya terletak di lahan yang lebih rendah. Sementara, lahan yang tidak dapat diairi oleh irigasi, digunakan untuk areal kebun buah. Jadi, dapat dikatakan bahwa pembangunan dan perbaikan sistem irigasi pada era itu telah turut membentuk identitas Kampung Kalibata.

Peta tahun 1897 memperlihatkan bahwa sistem irigasi wilayah Pasar Minggu telah tertata dengan sangat baik dan menjadi urat nadi sistem ekonomi penduduk setempat. Sawah terhampar di kanan-kiri saluran primer yang dihubungkan melalui saluran sekunder, dan pada akhirnya disalurkan lebih jauh lagi oleh saluran tertier. Kebun-kebun bukan padi terdapat di areal yang tidak terjangkau

---

<sup>36</sup> Afandi, *Perkampungan Budaya Betawi sebagai Representasi Identitas Kebetawian*. Depok: Tesis Magister Program Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2005, hlm. 95.

oleh sistem irigasi ini. Jenis kebun lain ialah yang berada di areal yang lebih tinggi dari jaringan irigasi tersebut.

Sebagian pasokan air untuk sistem irigasi di wilayah ini berasal dari hulu di bagian selatan, yakni pintu air Katulampa di wilayah Ciawi Buitenzorg. Pasokan air ini mengalir melalui saluran primer, menyusuri Bojong Gede, Citayam, Vitara, Tanah Baru, lalu ke wilayah Onderdistrik Pasar Minggu: Cipedak, Kalibata, Setu, Srengseng Sawah, dan Jagakarsa. Saluran irigasi primer tersebut dipelihara oleh Pemerintah, bahkan sepanjang saluran primer antara kampung Kalibata hingga Setu Babakan, bibir tanggul salurannya ditembok dengan batu bata. Kemudian, sistem irigasi ini memanjang sejajar dengan rel kereta api, dari Kampung Srengseng, Kampung Babakan, Rawa Minyak hingga sekitar stasiun kereta api Pasar Minggu. Bahkan pada tahun 1911, pintu pembuangan air di Kampung Kebagusan dan Tanjung *West* akan diperbaiki. Saluran tersebut kian menyempit akibat didesak oleh para petani yang berolah tani di bibir tanggul.<sup>37</sup>

Sebagian lain pasokan air untuk irigasi di wilayah selatan Pasar Minggu bertumpu pada sistem penyimpanan air secara alamiah. Untuk Srengseng Sawah, Jagakarsa, dan Kalibata misalnya, pasokan air untuk sistem sawah mereka berasal dari banyak setu, yang ber-sumberkan mata air dari dalam tanah. Setu-setu tersebut terbentuk sebagai luapan dan mekanisme penyimpan air tanah, tatkala lahan sekitar yang ditumbuhi lebatnya pepohonan sudah tidak mampu menampung lagi.

Begitu pula ketika hujan, setu-setu tadi berfungsi sebagai penyimpan air hujan. Setu Babakan yang telah tertera pada Peta Tahun 1897 misalnya, merupakan setu yang berfungsi sebagai tempat “parkir” air hujan maupun air yang dikirim dari bagian hulu, walaupun ia memiliki sumber mata airnya sendiri. Situ tersebut

---

<sup>37</sup> *Verslag over de Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indie over Het Jaar 1911*, Batavia: Drukkerij Papyrus. 1914, hlm. 99–101. Diucapkan terima kasih kepada Ahmad Sunjayadi atas kesediaannya menerjemahkan sumber berbahasa Belanda ini.

amatlah luas. Pada tahun 1920-an, Pemerintah Belanda membangun tanggul dan pintu air masuk hingga mencapai kampung Babakan. Pembangunan tanggul dan pintu air tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekurangan air yang diperlukan untuk irigasi persawahan pada musim kemarau.<sup>38</sup>

Secara periodik, Pemerintah Kolonial mengatur dan merawat sistem irigasi tersebut. Untuk jaringan primer, pemerintah mengangkat petugas khusus untuk merawat irigasi dan mengatur penyaluran air ke sawah-sawah penduduk. Sementara, untuk merawat saluran sekunder dan tertier dibebankan kepada penduduk setempat melalui mekanisme kerja bakti—tanpa upah—setiap minggu sekali. Penduduk juga diwajibkan membayar pajak air kepada pemerintah melalui petugas pengairan yang ditunjuk.<sup>39</sup>

Bila kita menoleh ke hasil riset Boedisantoso, saluran air ini merupakan modernisasi dari saluran air yang pada pertengahan abad ke-19 telah ada. Boedisantosa sendiri menunjukkan bahwa tuan tanah yang ada di sekitar aliran irigasi ini secara sengaja mendatangkan penduduk dari Periang, yang memang mahir bertani sawah, agar areal tanah di sekitar saluran tersebut dapat dikelola dan menghasilkan padi.<sup>40</sup> Temuan Boedisantosa ini barang kali dapat diterima, karena terdapatnya gejala kemiripan kebudayaan antara masyarakat di sekitar Jagakarsa dengan masyarakat yang tinggal di Bogor sebagaimana yang ditunjukkan oleh Afandi.<sup>41</sup> Hal tersebut utamanya terlihat dari miripnya beberapa kosakata, cara mengolah sawah, dan jenis-jenis kesenian yang biasa dipertunjukkan.

Sistem irigasi yang baik di Onderdistrik Pasar Minggu dan Meester Cornelis pada umumnya, merupakan kebanggaan Pemerintah Karesidenan Batavia. Residen Willemse melaporkan hal tersebut dengan bangga pada memori serah jabatan tertanggal 26 Oktober

---

<sup>38</sup> Afandi, *op-cit.*, hlm. 106.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 95–96

<sup>40</sup> Boedisantosa, *op-cit.*, hlm. 96.

<sup>41</sup> Afandi, *op-cit.*, hlm. 105–106.

1931. Ia melaporkan bahwa sistem irigasi di Regentschap Meester Cornelis relatif lebih teratur. Bahwa sistem irigasi tersebut terdapat di sekitar apa yang ia sebut sebagai selokan timur dan selokan barat, serta mampu memasok air untuk areal seluas kurang lebih 4.580 bau. Sebagian besar sawah di Onderdistrik Pasar Rebo, Onderdistrik Pasar Minggu, dan Onderdistrik Meester Cornelis, dan Onderdistrik Kebayoran memperoleh pasokan air dari dua jaringan irigasi tadi.<sup>42</sup>

Menurut Willemse, pasokan air dari irigasi di atas dipergunakan khususnya ketika musim kemarau. Difasilitasi oleh keberadaan jaringan irigasi ini, sawah-sawah tersebut tetap dapat ditanami padi meski diterpa kemarau sekalipun. Ia menyebutkan bahwa ada pembagian tugas yang nyata antara pemerintah dan petani setempat dalam memelihara saluran irigasi ini. Saluran primer dan sekunder dipelihara oleh pengreh praja. Bahkan korp birokrasi ini lebih intens lagi memelihara wilayah yang sebelumnya tidak memiliki sistem irigasi. Korps pengreh praja ini memberikan perhatian yang lebih, karena pemerintah kolonial Belanda sendiri yang membangun sistem irigasi tersebut.

Bertumpu pada mata pencaharian sawah-padi, sampai berakhirnya era kolonial Belanda, kampung menjadi satuan komunitas terkecil. Pada kampunglah ikatan komunitas terbentuk dan mengkristal menjadi satu identitas (penduduk kampung tertentu) yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Secara sosial pula, satu kampung memiliki batas-batas teritorial yang tegas dengan kampung lain. Batas tersebut dapat berbentuk jalan maupun batas alam (sungai, sawah, dan lain sebagainya).

Struktur permukiman di Pasar Minggu tidak mengelompok, tetapi berpola menyebar. Setiap penduduk membangun rumahnya di tengah kebun, dan karena itu tata letak rumah di permukiman

---

<sup>42</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia 1980, hlm. cxvi.

wilayah Pasar Minggu tidak teratur.<sup>43</sup> Bahkan pola permukiman yang sama dapat dijumpai di Rawa Jati (Kalibata) terus sepanjang jalan ke Batavia hingga ke Bukit Duri (Manggarai). Di wilayah utara Pasar Minggu hingga termasuk wilayah administrasi Batavia tersebut sebagian besar rumah-rumah penduduk berada di dalam kebun sawo, sirih, nangka, salak, pepaya, dan lain-lain. Begitupun rumah penduduk di sekitar stasiun Bukit Duri juga berada di tengah-tengah kebun buah.<sup>44</sup>

Penduduknya pun masih jarang. Hampir setiap penduduk memiliki lahan tanah, meski gejala perburuhan dalam bidang pertanian telah ada di selatan Onderdistrik Pasar Minggu. Perburuhan dalam bidang pertanian dilakukan jika kelompok sosial ini telah selesai menggarap sawah dan kebun mereka. Mereka terpaksa bekerja kepada pemilik tanah yang lebih luas, karena penghasilan mereka tidak memadai bila hanya mengandalkan diri sepenuhnya pada hasil oleh tani di tanah miliknya itu. Dengan demikian, hasil kerja mereka kepada pemilik tanah yang lebih luas tadi ditempatkan sebagai tambahan, dalam rangka menambah penghasilan utama yang mereka peroleh dari olah tani di tanah miliknya itu.

Secara subjektif, penduduk Onderdistrik Pasar Minggu menyebut dirinya sebagai Betawi pinggir, sebutan untuk membedakan dirinya dengan penduduk yang tinggal di Batavia (disebut pula

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Pak Maan, 27 Agustus 2005. Lihat juga Boedisantosa, *op-cit.* dan Sirman, 1986. Bahkan tatkala Sirman melakukan penelitian pada tahun 1985 di Kampung Cipedak, Kelurahan Kalibata, ia pun masih menjumpai adanya pola pemukiman yang menyebar khususnya yang agak jauh dari jalan beraspal. Lihat Emiria Sirman, *Perubahan Mata Pencarian Petani Buah-buahan akibat Pembangunan STTN di Kampung Cipedak Kelurahan Srengseng Sawah*, Jakarta: Skripsi Sarjana Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak dipublikasikan, 1986, hlm. 18–24. Untuk contoh permukiman yang mengelompok, lihat Andrea Wilcox Palmer, “Situ-radja: Sebuah Desa di Priangan”, dalam Koentjaraningrat (Penghimpun), *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1962.

<sup>44</sup> Tan Makala, *Dari Penjara ke Penjara Bagian II*. Jakarta: Teplok Press, 2000, hlm. 296–297.

Betawi Tengah).<sup>45</sup> Identifikasi diri ini amat tampak dari folklor asal-usul penduduk setempat yang terkait dengan memori kolektif Setu Mangga Bolong. Ada utusan dari Luar Batang (sekarang wilayah Penjaringan Jakarta Utara) yang tengah memburu seorang pelarian. Ketika utusan tersebut bertemu dengan pelarian tadi, maka terjadilah perkelahian yang hebat. Sang utusan tidak juga dapat mengalahkannya, hingga akhirnya sang utusan meninju si pelarian dari balik sebuah pohon mangga. Ajaib, pelarian tadi tewas seketika. Setelah berhasil mengalahkan si pelarian, sang utusan tidak kembali ke wilayah asal. Malah ia kemudian tinggal di sana. Sang utusan dari Luar Batang diyakini sebagai asal muasal penduduk kampung-kampung di wilayah selatan onderdistrik Pasar Minggu. Areal tersebut akhirnya dinamakan Setu Mangga Bolong.<sup>46</sup>

Pada tahun 1938, onderdistrik Pasar Minggu memiliki 22 kampung induk yang kemudian beranak pinak menjadi apa yang disebut kampung babakan, cabang dari kampung induk tersebut (lihat Tabel III.5). Secara umum, ke-22 kampung tersebut dapat dibagi dua: kampung-kampung yang terletak di bagian utara, dan kampung-kampung yang terletak di bagian selatan. Selain itu terdapat pula permukiman non-kampung, yakni perkebunan (*landbouw*) dan Tanah Partikulir Lenteng Agung

---

<sup>45</sup> Dalam terminologi Inggris yang dimaksud tengah di sini ialah *core* atau pusat. Jadi penduduk setempat memandang dirinya sebagai pinggiran, lawan kata dari konsep *core*, yakni periperi. Konsep diri sebagai Betawi Pinggiran merupakan rujukan secara wilayah bahwa dirinya tidak berdomisili di pusat wilayah tetapi di pinggiran wilayah. Konsep ini juga merujuk pada status sosial. Bahwa dirinya secara kebudayaan berada dalam posisi pinggiran. Sementara penduduk Batavia adalah intinya. Wawancara dengan Engkong Riih, Juli 2004.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Engkong Riih, Juli 2004. Lihat juga Afandi, *o-cit.*, bab 2.

**Tabel 3.5** Nama-nama Kampung di onderdistrik Pasar Minggu Tahun 1938

No.	Nama Kampung Induk	Kampung Babakan
<b>Bagian Utara</b>		
1.	Pejaten	Pejaten 1, 2, dan 3
2.	Padurenan	
3.	Jatipadang	
4.	Pasar Minggu	
5.	Ragunan	
6.	Mangga Besar	
7.	Bambu Rarangan	
8.	Cilandak Kulon	
9.	Jeruk Purut	
10.	Kampung Jawa	
11.	Poncol	
<b>Bagian Selatan</b>		
12.	Rawamuncak	
13.	Tanjung West	
14.	Pisangan	
15.	Kandang	Kandang 1, 2, dan 3
16.	Kebagusan	Kebagusan 1 dan 2
17.	Kelapa Tiga	
18.	Lenteng Agung	
19.	Jagakarsa,	
20.	Setu	Setu 1, Setu 2, dan Setu 3
21.	Srengseng	
22.	Krukut,	

Diolah dari Peta Regentschap Meester Cornelis tahun 1938

Menarik untuk membicarakan satu permukiman yang bernama Kampung Jawa. Dari namanya kampung ini merupakan kampung tua, peninggalan VOC tatkala perusahaan dagang ini mempraktikkan sistem administrasi permukiman berdasarkan etnis. Lokasi Kampung ini diapit antara rel kereta listrik dan jalan Pasar Minggu-Depok pada satu sisi, dan Sungai Ciliwung pada sisi lain. Rupanya, pada fase yang paling awal, keberadaan Kampung Jawa ini amat bergantung pada Sungai Ciliwung. Sungai inilah yang menjadi sarana

transportasi utama ke dan dari Batavia, sebelum akhirnya beralih ke jalan darat yang dibangun pada awal abad ke-19 atau jaringan kereta yang beroperasi pada tahun 1873.

Sampai berakhirnya masa kolonialisme Belanda, kemandoran adalah sistem administrasi permukiman terkecil di wilayah Pasar Minggu. Kemandoran (dipimpin oleh seorang mandor) merupakan wilayah administrasi lokal yang khas *ommelanden* (daerah sekitar Batavia) dan amat lekat dengan sistem birokrasi lokal tanah partikular. Untuk kegiatan sehari-hari, mandor dibantu oleh seorang pancalang. Di atas mandor ialah kepala desa (biasa dipanggil lurah). Lurah dibantu oleh seorang juru tulis.

Sebagai contoh ialah kampung Srengseng yang pada akhir masa kolonial dipimpin oleh Mandor Niman, sedangkan Kampung Sawah dipimpin oleh Mandor Joni, Kampung Kalibata dipimpin oleh Mandor Kempot, dan kampung Cipedad dipimpin oleh Mandor Jasad.<sup>47</sup>

Jadi, sistem administrasi kemandoran tetap saja dipakai meski wilayah Onderdistrik Pasar Minggu telah beralih menjadi tanah gubernemen. Bahkan, sistem kemandoran ini disubordinasikan—sebagai satuan permukiman terkecil—ke dalam sistem pemerintahan desa. Pada sisi lain, berlanjutnya sistem kemandoran ini menandakan masih terikatnya sistem pemerintahan desa tersebut oleh struktur elit lama yang terbentuk semasa berstatus tanah partikular.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 2 September 2005. Pak Risin sendiri adalah menantu dari Mandor Niman, kepala kampung Srengseng. Ia mengenang bahwa mertuanya itu termasuk pemilik tanah luas di Srengseng.

<sup>48</sup> Lihat juga memori serah jabatan Residen Willemse dalam Arsip Nasional Republik Indonesia 1980, hlm. cxi dan cxii. Keberadaan sistem mandor dan desa di atas dapat dipahami secara lebih baik bila kita kontraskan dengan *nijk*. *Wijk* adalah permukiman yang umumnya terletak di Batavia, dan merupakan permukiman yang dipimpin oleh orang yang bergelar militer. Munculnya sistem administrasi permukiman ini terkait dengan kebijakan kolonial semasa VOC. Kapiten atau leutnant, atau kepala kampung diangkat oleh pemerintah kolonial. Meski mereka tidak diberi gaji, dan hanya diberi kompensasi kekuasaan seputar kampung tersebut, pada faktanya para kepala kampung ini adalah bagian dari sistem administrasi kolonial, khususnya jalur *inlandse*

Sungguhpun telah menjadi tanah gubernemen sehingga sebagian petani setempat menjadi pemilik lahan, rupanya wilayah ini diawasi secara ketat oleh Pemerintah Residensi Batavia. Pemerintah yang telah mendesain wilayah Pasar Minggu sebagai sentra penghasil buah-buahan, menerapkan kebijakannya itu kepada perkebunan buah atau *landbouw*. Bahkan, hal-ihwal yang terkait dengan perkembangan produksi buah-buahan diawasi secara khusus oleh pejabat setingkat ajung inspektur bidang pertanian. Dialah yang berwenang mengawasi pertumbuhan produksi buah-buahan dan implikasi ekonominya terhadap perkembangan onderdistrik ini. Selain itu, sebagai wilayah penyangga, onderdistrik ini secara sengaja dirancang untuk memiliki pasokan air agar komoditas pertanian lain juga dapat diproduksi di wilayah ini. Hal tersebut terlihat dari laporan Residen Batavia tentang irigasi dan pertumbuhan budidaya ikan gurame.

Ternyata, kebijakan wilayah ini dilaksanakan secara konsisten. Pemerintah melarang penduduk setempat menebang pohon meskipun pohon tersebut adalah miliknya sendiri. Maka, supaya kebijakan tersebut dipatuhi, opas (semacam polisi pamong praja) yang berkedudukan di pusat Onderdistrict Pasar Minggu (sekitar stasiun Pasar Minggu) berpatroli agar tidak ada penduduk yang menebang pohon secara sembarangan.

Begitulah, tatkala ayah Pak Risin menebang pohon kebembem, ia pun dikenakan sanksi hukuman, dipenjara selama sebulan di kantor Opas Pasar Minggu. Ayahnya memang menebang pohon kebembem demi suatu kebutuhan. Agar tidak terlihat, bekas tebangannya itu ditutupi oleh dedaunan. Rupanya, upaya ayah Risin ini tidak berhasil. Sebagai ujung tombak sistem administrasi lokal terbawah, kepala kampung setempat melaporkan apa yang dilakukan oleh

---

*binnenlands bestuur*. Untuk jelasnya jalur birokrasi *inlandse binnenlands bestuur* ini, lihat J.D Legge, *Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A Study in Local Government 1950–1960*, New York: Cornell University Press, 1961, bab 1. Lihat juga Lihat juga Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemerintah DKI Jakarta, *Sejarah Pimpinan Jakarta Sepanjang Tiga Abad 1620-1942*, hlm. 134–136 dan 159–162.

Ayah Risin ini kepada atasannya sehingga Opas di Pasar Minggu tahu.

Beberapa hari kemudian, datanglah sejumlah opas untuk mengecek kebenaran laporan tersebut. Opas datang menunggang kuda dan diiringi oleh anjing pelacak. Mulailah anjing pelacak bekerja, mengendus-ngendus tanah untuk mengetahui lokasi tebang. Meski Ayah Risin telah menutupi lokasi tebang, tak ayal pula anjing itu mengetahui keberadaan lokasi tersebut. Ayah Risin pun tak bisa mengelak setelah ditunjukkan lokasi tebang. Kemudian, ayah Risin dibawa ke kantor Opas di Pasar Minggu. Ia dikenakan sanksi denda atau kurungan selama sebulan. Tak mampu membayar denda, akhirnya ia memilih untuk dikurung di kantor Opas Pasar Minggu selama sebulan.

Walaupun wilayah Pasar Minggu yang berstatus gubernemen ini diawasi ketat, namun terdapat pula keleluasaan tertentu dalam hal mobilitas geografis maupun berusaha tani. Pada tahun 1930-an, terdapat seorang komuter atau penglaju yang telah bermukim di Kampung Kelapa Tiga. Penduduk setempat menyebutnya Tuan Salman, seorang muslim terpelajar yang mendapatkan pendidikan Belanda. Salman menjadi penglaju harian, dan bekerja di Boplo. Dari stasiun Lenteng Agung ia berangkat dengan kereta listrik sekitar pukul 7.00 pagi, dan pulang kembali sore hari sekitar pukul 16.00 dengan kereta listrik juga.

Selain bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor di wilayah Boplo, Tuan Salman juga bertani. Tentu saja karena latar belakangnya yang berpendidikan Belanda, orientasi bertaninya tidak semata-mata untuk dikonsumsi seperti lazimnya bertani di wilayah selatan Onderdistrik Pasar Minggu. Orientasi bertani Tuan Salam bersifat komersial. Ia akan bertanam buah yang memang sedang laku di pasar. Oleh karena itu, ketika para petani di selatan Pasar Minggu menempatkan buah-buahan sebagai tambahan penghasilan, Tuan Salman telah berkebun pepaya dan jeruk yang hasilnya dijual

ke Batavia. Selain bertanam pepaya dan jeruk, Tuan Salman pun beternak ayam. “Ayamnya banyak sekali”, kenang Pak Risin.

Pada sudut lain, keleluasaan relatif untuk bertani yang dimiliki oleh para petani yang tinggal di tanah gubernemen tidak dapat dimiliki oleh penduduk tanah partikular Lenteng Agung. Hal tersebut merupakan hasil atau perpaduan dari dua faktor berikut. Pertama, mereka hanyalah petani penggarap, dan oleh tuan tanah ditempatkan semata-mata sebagai faktor produksi tanah partikular. Sebagai penggarap, mereka harus membayar sewa tanah secara periodik. Selain itu, mereka pun harus bekerja atau menyerahkan hasil pertaniannya kepada tuan tanah dengan perhitungan tertentu. Petani pun harus bekerja tanpa upah untuk kepentingan tuan tanah, seperti memelihara jalan dan saluran air.

Kedua, kontrol tuan tanah atas kegiatan sehari-hari penduduk tanah partikular Lenteng Agung amatlah ketat. Sebagai areal yang memproduksi minyak sereh, seluruh penduduk tanah partikular tersebut diwajibkan menanam pohon sereh. Dari mereka, pabrik minyak sereh milik tuan tanah memperoleh bahan baku. Adapun proses pengendalian penanaman pohon sereh hingga siap diolah pabrik, dilakukan oleh aparat birokrasi lokal yang dipimpin oleh seorang bek.

Bek (kurang lebih setara dengan kepala desa di tanah gubernemen, tetangga tanah partikular ini) bertanggung jawab langsung kepada tuan tanah. Atas dasar otoritasnya itu, bek yang merupakan pemimpin seluruh penduduk yang tinggal di tanah partikular Lenteng Agung, mesti pandai-pandai mengorganisir seluruh penduduk agar proses produksi di tanah partikular Lenteng Agung, khususnya dalam menghasilkan minyak sereh, tercapai. Selain sebagai bawahan tuan tanah, secara berjenjang bek berada di bawah kekuasaan camat polisi atau camat tanah, yang wewenangnya sebanding dengan wilayah kecamatan sekarang. Seperti halnya tuan tanah, di mata para petani penggarap yang tinggal di tanah-tanah partikular, reputasi sosial bek ini sangat buruk. Sering dijumpai bahwa tindakan bek

melampaui batas-batas kemanusiaan terhadap para penggarap. Mereka begitu berkuasa. Selain bertalian dengan struktur kekuasaan tuan tanah, kekuasaan bek tersebut juga terkait dengan fakta bahwa sebagian mereka adalah jawara atau para jago. Yang paling terkenal dan paling ditakuti diantara bek-bek tanah partikular ini ialah Bek Siman (sekitar tahun 1928). Selain itu terdapat juga Bek Lias, dan Bek Sihun yang berkuasa pada akhir masa Hindia Belanda, dan Bek Milih yang berkuasa pada masa peralihan antara tahun 1945–1950.<sup>49</sup>

Jadi, karena begitu sempitnya ruang gerak bertani bagi para petani penggarap di tanah partikular Lenteng Agung ini, maka bibit komersialisasi buah-buahan di wilayah ini tidak berkembang seperti di wilayah lain yang berstatuskan tanah gubernemen. Surplus yang mereka hasilkan relatif habis dieksploitasi oleh tuan tanah melalui sistem penarikan surplus yang bertumpu pada perangkat lokal tanah partikular Lenteng Agung yang dipimpin oleh bek. Bahkan, kelak setelah tanah partikular seluas 49 ha ini dibeli oleh Pemerintah Kotapraja Jakarta pada pertengahan tahun 1950-an pun, wilayah Lenteng Agung tidak dikenal sebagai salah satu pusat penghasil buah-buahan, seperti halnya Desa Jagakarsa dan Desa Tanjung Barat.[]

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 2 September 2005.

## BAB IV

# Antara Hidup dan Mati: Daya Tahan Petani Buah Pasar Minggu di Tengah Mobilisasi dan Revolusi

Di era pendudukan Jepang, proses komersialisasi buah-buahan yang dilakukan Pemerintah di wilayah Pasar Minggu terhenti. Alih-alih menghidupkan pasar buah-buahan dan meningkatkan mutu serta jumlahnya sehingga layak ekspor sebagaimana dilakukan oleh *Dienst Tuinbouw*, Pemerintah Pendudukan Jepang mengerahkan segala sumber daya ekonomi dan manusia untuk memenangkan perang dengan Sekutu. Pemerintah Jepang malah menunjukkan apresiasi yang sangat rendah terhadap penyediaan buah-buahan karena tidak bertalian dengan upaya pemenangan perang.

Beberapa kebun pembibitan dan perkebunan buah-buahan diganti dengan tanaman sayur-mayur untuk tentara Jepang. Perkebunan buah-buahan bekas milik Belanda di selatan Pasar Minggu pun ditelantarkan, dibiarkan begitu saja seolah-olah tidak ada pemiliknya. Pemerintah Pendudukan Jepang kemudian mendorong para petani di sekitarnya untuk menggarap lahan tersebut seolah-olah milik mereka sendiri. Selanjutnya, perkebunan atau *landbouw* jeruk dan durian di utara Pasar Minggu justru ditebang. Daripada meningkatkan buah-buahan untuk konsumsi masyarakat luas, pohon-pohon buah-buahan itu dieksploitasi habis-habisan untuk kepentingan pemenangan perang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat *Pertanian* No. 10–12 1951, hlm. 57 dan Abdul Aziz, *Pengusuran Mengakibatkan Terjadinya Migrasi Lokal di Jakarta 1966–1977*. Skripsi Sarjana Sejarah. Depok: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2002.

Memudarnya peran pemerintah sebagai pemasok kebutuhan buah di pasar Batavia—menyusul hilangnya aktor petani buah dari kalangan petani Belanda—hanya menyisakan petani buah lokal saja sebagai pemasok buah-buahan. Maka, kebun buah petani setempat pun makin meluas, karena tuntutan permintaan buah-buahan pada satu sisi, dan tiadanya pemasok buah-buahan yang lain selain petani tersebut. Petani buah lokal pun menjadi pemasok tunggal buah-buahan, dan hal ini menandakan fase pertama (1942–1943) dinamika produksi buah-buahan petani setempat yang relatif tinggi di era pendudukan Jepang. Menurut kesaksian Tan Malaka tatkala mengasingkan dirinya di Rawajati, Kalibata, wilayah Pasar Minggu bagian utara antara 1942–1943, “[k]ereta api Bogor-Pasar Minggu-Jakarta selalu penuh dengan pedagang buah-buahan ... Tidak sedikit pula mereka yang memikul dagangannya dari Pasar Minggu ke Jakarta. Biasanya mereka masuk kampung keluar kampung memperdagangkan barangnya”.<sup>2</sup>

Akan tetapi, fase “keemasan” petani buah Pasar Minggu tidak berlangsung lama. Babak baru (1943–1945) yang buruk pun menghantui kehidupan mereka setelah Pemerintah Pendudukan Jepang melakukan penetrasi mendalam terhadap tata sosial masyarakat pinggiran Jakarta seperti Pasar Minggu, atas nama terbentuknya masyarakat Jawa Baroe. Pelbagai lembaga sosial lokal sebagai instrumennya kemudian dibangun dalam rangka menarik semua sumber daya alam maupun manusia bagi kepentingan perang, kebijakan yang lahir akibat terdesaknya Jepang dalam perangnya dengan Sekutu. Pemerintah memberikan wewenang yang sangat luas kepada kepala desa (*kucho*) dengan tugas-tugas yang hampir menyeluruh sebagai wakil pemerintah dalam lingkup masyarakat desa. Pemerintah desa diberi tugas untuk menarik cukai, memimpin *Keibodan*, memobilisasi *romusha*, dan pengelola distribusi barang kebutuhan; seolah-olah kepala desa adalah *guinkebau* mini yang mempraktik-

---

<sup>2</sup> Tan Malaka, Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara: Bagian Dua*. Jakarta: Teplok Press, 2000, hlm. 300–301.

kan fasisme di tingkat lokal. Akhirnya, proses tadi berujung pada hancurnya sendi-sendi ketertiban sosial (*sosial order*) masyarakat desa.

Begitu pula, dibentuk *tonarigumi*, kelembagaan lokal di tingkat komunitas sebagai alat—meminjam istilah Kurasawa<sup>3</sup>—mobilisasi dan kontrol. Pelbagai mobilisasi baik hasil pertanian maupun sumber daya manusianya telah menghancurkan infrastruktur pertanian wilayah Pasar Minggu. Irigasi rusak karena tidak dirawat. Sawah dan kebun tidak dikelola karena sumber daya manusia produktifnya diangkut untuk *romusha*. Oleh karena itu, komersialisasi buah-buahan pada fase kedua ini menjadi hanya fenomena marjinal. Justru sebaliknya: kelaparan menjadi hantu di siang bolong.

Meski kehidupan saat itu amat berat, tetapi gejala meluasnya ruang gerak (*public sphere*) pribumi muslim mulai terlihat. Banyak penduduk setempat yang mengenyam pengalaman semi militer. Mereka adalah sebagian penduduk wilayah Pasar Minggu yang menjadi anggota *Keibodan*, suatu lembaga kepolisian lokal bentukan pemerintah yang beroperasi dalam lingkup teritori tersebut.<sup>4</sup> Sungguh pun berada dalam situasi sulit, pelbagai kebijakan pemerintah pendudukan seperti program *Keibodan* di atas rupanya mampu melahirkan selapisan elite baru di wilayah ini.

Situasi sulit ini masih terus berlanjut, khususnya pada fase pertama gejolak perang kemerdekaan di sekitar Pasar Minggu. Gejolak revolusi ini membuat petani buah sulit sekali memasarkan hasil kebunnya. Pada tahap selanjutnya, pasar buah di Pasar Minggu kembali normal. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa Pasar Minggu bukanlah wilayah pertempuran kemerdekaan dalam skala besar sebagaimana yang terjadi di wilayah Timur Jakarta.<sup>5</sup> Malah penduduk Pasar Minggu yang turut berjuang dalam perang kemerdekaan,

---

<sup>3</sup> Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942–1945*. Alih bahasa Hermawan Sulistiyo. Jakarta: Grasindo. 1993.

<sup>4</sup> Untuk jelasnya lihat *Kan Po* No. 47 1943, hlm. 17–23.

<sup>5</sup> Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945–1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.

banyak yang bergabung dengan laskar Haji Darip dan bergerilya di sekitar Timur Jakarta.

Sungguh pun demikian, perlawanan terhadap kekuasaan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) di Pasar Minggu sering pula terjadi, baik yang dilakukan oleh tentara resmi republik maupun laskar rakyat, seperti Laskar Banteng Merah. NICA sendiri tidak berusaha menguasai seluruh teritori Pasar Minggu, tetapi hanya berusaha menguasai sepenuhnya pusat pertumbuhan lokal, seperti areal di sekitar stasiun Pasar Minggu. NICA hanya sekali-kali melakukan patroli ke wilayah Selatan. Dengan cara ini, NICA berhasil memulihkan ketertiban sosial.

Pada 9 Maret 1948, dibentuk pemerintahan *Voorlopige Federale Regering van Indonesia*' (Pemerintah Federal Sementara, atau lebih terkenal dengan sebutan Pemerintah Pre-Federal) di mana Pasar Minggu termasuk di dalamnya. Pembentukan wilayah yang dikukuhkan melalui *Staatblad* 178 tahun 1948 tanggal 11 Agustus 1948 tersebut direncanakan sebagai wilayah yang akan langsung di bawah pemerintah pusat atau pemerintah federal seluas 1.800 km<sup>2</sup>.<sup>6</sup> Dalam situasi tegaknya tertib sosial di atas, komersialisasi buah-buahan mulai bergeliat, setelah sebelumnya terhenti akibat gejolak revolusi kemerdekaan. Pasar buah sekitar stasiun Pasar Minggu mulai hidup, menerima penjualan buah-buahan dengan sistem pikulan dari petani setempat. Begitu pula jaringan kereta listrik mulai beroperasi dan mulai mengangkut buah-buahan untuk dipasarkan secara lebih luas. Penduduk setempat menyebut era ini sebagai era NICA.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> The Liang Gie, *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta*. Djakarta: Kotapradja Djakarta Raja, 1958. hlm. 120–122. Lihat juga Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, *Jakarta Membangun*, hlm. 15.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 1 Oktober 2005.

## A. MOBILISASI DAN TERSUDUTKANNYA PERTANIAN BUAH

Pada Maret 1942, Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Pada ranah kognitif, kejatuhan ini menghancurkan mitos negatif terhadap orang Jepang yang selama ini dibangun. Kelompok-kelompok sosial yang selama ini diuntungkan oleh sistem kolonialisme Belanda seperti penduduk Belanda dan Indo di Hindia Belanda menganggap bahwa orang Jepang adalah penderita rabun senja permanen, postur fisik dan kemampuan intelektualnya jauh di bawah orang Belanda atau Amerika. Orang Jepang dianggap hanya mampu meniru sehingga kualitas produknya sangat rendah. Kemampuan militer Jepang juga disepelekan karena postur tubuhnya yang kecil. Semua mitos tersebut merupakan kompensasi atas kegalauan psikis sekaligus sebagai bagian dari “optimisme palsu” bahwa mustahil orang Jepang mengalahkan orang Eropa.<sup>8</sup>

Tak lama setelah berhasil menduduki Pulau Jawa, Pemerintah Militer Jepang mengumumkan secara resmi nama sistem pemerintahan daerah yang akan dikelolanya. Secara substansial, sistem pemerintahan daerah ini melanjutkan begitu saja apa yang telah ada pada masa Hindia Belanda. Nama resminya saja yang diganti. *Residentie Batavia*, di mana di dalamnya Pasar Minggu berada, diganti menjadi Karesidenan Jakarta. Bahkan Gemeente Batavia pun diganti menjadi *Syuu* (kotapraja) Jakarta dengan sebuah Maklumat.<sup>9</sup>

“Makloemat Nama ‘Batavia’ diganti dengan ‘Djakarta’

Beberapa ratoes tahoen jang laloe, daerah ‘Batavia’ terkenal pada rakjat Nippon dengan nama “Djakarta’, tetapi nama itoe dioebah oleh Pemerintah Belanda dahocloe dengan ‘Batavia’

Sedjak Balatentara Dai Nippon mendarat di Djawa, soedah dioesahkan soepaja nama itoe diganti dan baroe-baroe ini dari Pemerintah Agoeng di Tokio soedah didapat izin oentoek mengubah nama ‘Batavia’ itoe.

<sup>8</sup> Elien Utrecht, *Melintasi Dua Jaman: Kenangan tentang Indonesia Sebelum dan Sesudah Perang*, penerjemah Ahmad Sunjayadi, Jakarta: Komunitas Bambu 2006, hlm. 47–51.

<sup>9</sup> *Kan Po* No 2 Tahun ke-1 1942, hlm. 7.

Berhubung dengan itoe, moelai tanggal 8 Desember jaitoe 'Hari Pembangunan Asia Raja', nama 'Batavia' diganti dengan 'Djakarta'.

Djakarta, tanggal 10, boelan 12  
tahoen 2602  
Gunseikanbu<sup>10</sup>

Status Pasar Minggu sendiri terus dilanjutkan. Nama onderdistrik diganti menjadi *Son* dengan ruang lingkup kewenangan yang sama namun dengan wilayah yang lebih luas. Ada tiga kemandoran (yaitu Kemandoran Pangadegan, Kemandoran Cikoko, dan Kemandoran Pancoran) yang tadinya termasuk wilayah Meester Cornelis *Son* (onderdistrik) digabungkan ke dalam Pasar Minggu Son. Pemin-dahan administratif terjadi karena Onderdistrik Meester Cornelis atau Meester Cornelis Son dihilangkan. Beberapa wilayahnya digabungkan ke dalam Batavia Tokubetu-Si (*stadsgemeente* luar biasa), satu-satunya *Tokubetu-Si* di Pulau Jawa hingga Jepang kalah perang.<sup>11</sup>

Ketiga kemandoran tersebut bersama-sama dengan Kemandoran Cawang, Desa Cipinang Melayu, Desa Kebonpala, dan Desa Kramatjati merupakan wilayah Meester Cornelis Son. Desember 1942, sistem administratif wilayah ini ditata ulang, dan melalui Maklumat Batavia Syuu No. 1, ketiga kemandoran tersebut menjadi wilayah Pasar Minggu Son.<sup>12</sup> Maklumat Batavia Syuu No. 1 ini juga

---

<sup>10</sup> *Kan Po* No. 9 Tahun ke-1 1942, hlm. 5.

<sup>11</sup> The Liang Gie, *op-cit.*, hlm. 91. Menurut kesaksian Tan Malaka, antara tahun 1942–1943, Pasar Minggu Son dipimpin oleh seorang asisten wedana yang masih muda dan terpelajar. Meski Tan Malaka memilih tinggal di Rawajati yang merupakan *wijke* dengan dinamika sosial ekonomi yang tinggi (*wijke* ini memiliki pabrik sepatu dengan 600 orang buruh dari pelbagai etnis, dan banyak penduduk asli Rawajati yang berlahan sedikit sehingga mesti juga hidup sebagai buruh tani dan penjaja buah-buahan), namun kontrol pemerintah Son Pasar Minggu terhadap penduduk asing tetap dilakukan dengan keras. Hal tersebut terjadi pada Tan Malaka sendiri. Rumah sewa Tan Malaka pun digeledah oleh Asisten Wedana, meski pejabat tersebut tidak menemukan bukti-bukti yang mencurigakan. Untuk lengkapnya lihat, Tan Malaka, *op-cit.* hlm. 296–297, 301, 306–307.

<sup>12</sup> Lihat *Kan Po* No. 8 Tahun ke-1 1942, hlm. 10–11.

memasukan Desa Mampang Prapatan-*Wijk* Mampang Tegalparang, *Wijk* Kuningan, dan *Wijk* Cililitan Rajawali-Kalibata (yang kemudian masing-masing dimekarkan menjadi kecamatan tersendiri setelah kemerdekaan) pada jaman Jepang termasuk wilayah Pasar Minggu Son.

Tabel 4.1 di bawah ini memperlihatkan bahwa stuktur administrasi Pasar-Minggoe Son terdiri atas tiga kategori, *wijk*, desa, kemandoran, dan kecamatan. Desa di Pasar Minggu Son yang berjumlah sepuluh itu merupakan kelanjutan era Hindia Belanda, dan dibentuk setelah wilayah Pasar Minggu menjadi tanah goebnemen. *Wijk* (diterjemahkan secara bebas sebagai kampung) merupakan permukiman yang di era Hindia Belanda adalah tanah partikulir. Jadi, bila dalam tanah partikulir yang di era Jepang dihapuskan itu hanya terdapat satu permukiman, maka permukiman tersebut kemudian diberi status *wijk*. Sementara itu, bila tanah partikulir yang lain memiliki beberapa kampung yang digabungkan secara administratif kewilayahan sebagai kemandoran, maka sistem kemandoran tersebut tetap digunakan pada zaman Jepang.

**Tabel 4.1** Struktur Permukiman Pasar Minggu Era Kolonial

No.	<i>Wijk</i>	Desa	Kemandoran	Kecamatan
1.	Lentengagung	Cilandak	Kalibata Duren III	Tanjung West
2	Kuningan	Bongka	Pangadegan	
3	Mampang Tegalparang	Ragunan	Cikoko	
4	Cililitan Rajawali	Pejaten	Pancoran	
5	Kalibata	Mampang Prapatan		
6		Jatipadang		
7		Pasar Minggu		
8		Jagakarsa		
9		Srengseng		
10		Ciganjur		

Diolah dari Maklumat Batavia Syuu No. 1. dalam Kan Po 8 (1) 1942: 10

*Wijk* Lenteng Agung misalnya, merupakan satuan permukiman yang berasal dari tanah partikular, satu-satunya tanah partikular yang ada di Pasar Minggu Son. Setelah lembaga sosial ekonomi ini dihapus melalui maklumat pemerintah yang berisikan penghapusan tanah partikular dalam rangka “penyoesoenan masjarakat baroe di Poelau Djawa”, dan diumumkan oleh Gunseikanbu di Jakarta September 1942, status Lenteng Agung berubah menjadi *wijk*. Kemudian, melalui Undang-Undang No. 17 1942 dinyatakan bahwa wilayah yang sebelumnya merupakan tanah partikular diubah menjadi tanah negara.<sup>13</sup> Mengikuti ketentuan ini, maka status Lenteng Agung yang semula berstatus *wijk* meningkat menjadi desa, Desa Lenteng Agung pada tahun 1944.

“Belum berselang lama pemerintah telah mengoemoemkan makloemat, jang maksoednja menerangkan, bahwa tanah-tanah partikoelir kepoenjaan bangsa asing, baik bangsa Barat maepoen bangsa Timoer, diambil oleh Pemerintah dan satoe kantor telah didirikan oentoek mengoeroes tanah-tanah itoe (Siyuti Kanri Koosha). Dahoeloe tanah<sup>2</sup> partikoelir mempoenjai berbagai-bagai hak dan kekoelasan jang pintjang, sehingga menimboelkan kedjadian<sup>2</sup> jang boeroek. Oentoek melenjapkan keadaan itoelah, maka Pemerintah mengambil poetoesan oentoek memiliki dan mengoeroes tanah-tanah partikoelir tersebut”.<sup>14</sup>

Meski terdapat perubahan status dari tanah partikular ke *wijk* dan kemudian ke pemerintah desa, namun sesungguhnya struktur elite yang berkuasa tetaplah sama. Penguasa lokal tetaplah elite lama yang terbentuk sejak era tanah partikular. Jika dahulu bek (*wijk meester*) merupakan bawahan langsung tuan tanah, maka tat-kala Lenteng Agung menjadi *wijk*, beklah yang menjadi penguasa lokal tertinggi. Ia kini tidak bertanggung jawab kepada tuan tanah melainkan kepada Pasar Minggu Son, struktur pemerintah yang ada di atasnya. Demikian pula ketika status *Wijk* Lenteng Agung menjadi desa pada tahun 1944, bek pula yang menjadi kepala desa. Jadi status bek setara dengan kepala desa atau lurah.

<sup>13</sup> *Kan Po* Nomor Istimewa, Maret 1943.

<sup>14</sup> *Kan Po* No 2 Tahun ke-1, September 1942, hlm. 9.

Sebegitu jauh Undang-Undang No. 17 tahun 1942 telah mengubah status tanah partikulier menjadi tanah negara, tetapi perubahan ini tidak berimplikasi terhadap meningkatnya kesejahteraan penduduk yang tinggal di dalam wilayah tersebut. Penduduk setempat tetap saja berstatus penyewa, bukan menjadi pemilik. "... [T]oentan mesti djoega melakoekan sekalian kewadajiban toean, seperti membajar sewa tanah atau melakoekan pekerdjaan rodi atau kerdja paksa. Tjoema sadja sekalian kewadajiban jang mesti dilakoekan itoe boekan boeat toean tanah jang dahoele, tetapi oentoek Pemerintah Dai Nippon".<sup>15</sup>

Keberlanjutan yang sama juga terjadi pada Wijk Rawajati-Kalibata. Pada era penjajahan Belanda, Rawajati-Kalibata memang berstatus *wijk*, dan status ini terus dilanjutkan pada era pendudukan Jepang. Di samping itu, struktur pemerintahan lokal juga melanjutkan begitu saja pola yang telah terbentuk di era penjajahan Belanda. Hanya nama resminya saja yang berganti. Kepala kampung Rawajati yang secara formal disebut *wijkmeester*, atau penduduk sekitar menyebutnya tuan bek, diberi nama baru (dengan istilah Jepang) *katyō*.<sup>16</sup>

Berbeda dengan wilayah selatan yang hampir seluruh penduduknya mengandalkan hidupnya dari pertanian, sumber mata pencaharian penduduk Rawajati lebih beragam. Rumah penduduk

---

<sup>15</sup> *Kan Po* Nomor Istimewa, Maret 1943: 27. Selanjutnya, untuk menjalankan segala hal yang berkaitan dengan bekas tanah partikulier (yang menjadi tanah Negara) sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 1942, dibentuk Kantor Urusan Tanah Partikoelir (*Siryooti Kanrikoosya*). Kantor ini dibentuk dan diumumkan melalui Osamu Seirei No 2, 30 Januari 1943. Kepada *Siryooti Kanrikoosya* inilah semua kewajiban petani penggarap, yang dahulu dilakukan untuk tuan tanah, ditunjukkan. Penduduk harus melakukan pekerjaan kompenian untuk *Kanrikoosya* (Pasal 18 Osamu Seirei No 2). Cukai diberikan kepada *Kanrikoosya* (Pasal 19 Osamu Seirei No 2). *Kanrikoosya* pun berwenang menghapuskan hak sewa petani bilamana yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya atau mengacau ketertiban umum (Pasal 20 Osamu Seirei No 2). Untuk lengkapnya mengenai Osamu Seirei No. 2 lihat *Kan Po* 12 Tahun ke-2, Februari 1943, hlm. 3–5. Untuk isi UU No. 17 1942 lihat *Kan Po* Nomor Istimewa, Maret 1943: 17; lihat juga *Pandji Pustaka* No. 48 1943, hlm. 173.

<sup>16</sup> Tan Malaka, *op-cit*, hlm. 306–307.

Rawajati yang berada di tengah kebun sawo, sirih, nangka, papaya dan salak, menandakan bahwa penghidupan mereka juga mengan- dalkan dari kebun buah tersebut. Memang ada sebagian penduduk *nijik* ini yang dapat dikatakan “berpunya” karena yang bersangkutan memiliki 10 pohon sawo. Ia bahkan bisa disebut lebih “berpunya” lagi manakala memiliki pohon kelapa, singkong, rambutan, atau nangka. Akan tetapi, menurut kesaksian Tan Malaka, sebagian besar penduduk Rawajati tidak memiliki lahan yang memadai dan sejum- lah tanaman buah produktif. Untuk menambah penghasilannya, sebagian mereka ada yang bekerja sebagai buruh, tetapi ada pula yang menjadi penjaja buah. Biasanya mereka membeli buah-buahan di sekitar wilayah Pasar Minggu, lalu dijualnya kembali ke pasar- pasar di Jakarta, sebagai borongan dengan sistem pikulan maupun dengan cara eceran. Sebagian mereka ada yang menjualnya ke Jakarta itu dengan menggunakan jasa angkutan kereta listrik, tetapi banyak pula yang memikul dagangannya berjalan kaki berjam-jam lamanya ke Jakarta, masuk kampung ke luar kampung menjajakan buah-buahannya itu.<sup>17</sup> Dengan dramatis, Tan Malaka menggambar- kan aspek modal dan laba yang diperoleh penjaja buah ini sebagai berikut:

“Biasanya dengan pokok f. 1,- mereka setelah petang hari dapat kembali dengan jumlah f. 1.25,- jadi dengan untung f. 025,- sehari. Kita baru mengerti nasibnya mereka, kalau diketahui pula, bahwa pedagang atau lebih tepat pemikul barang-barang ini harus membantu keluarganya dengan untung sedikit itu pula”<sup>18</sup>

Banyak pendatang yang tinggal di Rawajati, karena itu wilayah ini tidak hanya dihuni oleh penduduk asli, tetapi juga beragam etnis seperti orang Cirebon, Jawa Tengah, dan orang Tionghoa.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 296–297, 301.

<sup>18</sup> Tan Malaka menggambarkan kehidupan penjaja buah-buahan sekitar tahun 1942–1943, sewaktu situasi sosial ekonomi pada permulaan pendudukan Jepang ini “... belum berapa bedanya dengan di zaman Belanda. Harga uang Jepang pun belum berapa bedanya dengan uang Hindia Belanda”. Untuk jelasnya kesaksian Tan Malaka ini, lihat *ibid*, hlm. 300–301.

Kehadiran para pendatang untuk menetap di wilayah ini terkait dengan adanya pabrik sepatu Bata yang telah berdiri sejak zaman Hindia Belanda. Tan Malaka sendiri menaksir bahwa buruh pabrik sepatu Bata antara tahun 1942–1943 berjumlah 6.000 orang. Jumlah ini, kata Tan Malaka, konon jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah buruh yang bekerja di pabrik sepatu ini pada masa Hindia Belanda.<sup>19</sup>

Keberadaan sektor industri di wilayah ini dan dampak berganda (*multiplier effect*) lanjutannya telah membuat wilayah ini menjadi lebih dinamis secara sosial ekonomi. Sebagian penduduk Wijk Rawajati yang berlahan sempit dan tidak memiliki pohon buah dengan jumlah yang memadai, menyiasatinya dengan menjadi pemborong buah-buahan dan menjajakannya ke kampung-kampung di Jakarta. Begitu pula, sebagian yang lain telah membuat rumah sewaan untuk menambah pendapatan mereka. Tan Malaka sendiri menyewa satu ruang di jejeran rumah sewa yang diperuntukan bagi buruh pabrik sepatu Bata. Rumah yang disewa Tan Malaka tersebut berukuran panjangnya kurang lebih 5 meter dan lebarnya sekitar 3 meter. “Dindingnya *pelupub* dan atapnya sebagian genteng dan sebagian jalinan daun rumbia”.<sup>20</sup>

Pusat pemerintahannya (*Son-tyoo*) berada di Pasar Minggu. Secara administratif Pasar Minggu Son berada di bawah Jatinegara Gun (kemudian diganti menjadi Cawang-Jatinegara Gun yang berkedudukan di Cawang), bersama-sama Pondokgede Son, Pasar-rebo Son, dan Pulogadung Son. Cawang-Jatinegara Gun sendiri, bersama-sama dengan Bekasi Gun dan Cikarang Gun berada di bawah Jatinegara Ken. Selanjutnya, Jatinegara Ken dan Krawang Ken berada di bawah Batavia Syuu.<sup>21</sup> Berbeda dengan era Hindia Belanda, *syuu* atau karesidenan merupakan daerah otonom atau swatantra tertinggi. Provinsi dihilangkan.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Lihat Ibid, hlm. 296–297.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 296.

<sup>21</sup> Lihat Maklumat *Batavia Syuu* No. 1 dalam *Kan Po* No. 8 Tahun ke-1 1942, hlm. 10–11.

<sup>22</sup> The Liang Gie, *op-cit.*, hlm. 88–89.

Kecuali Bongka dan Mampang Prapatan, kedelapan desa yang merupakan lokasi penelitian ini menandakan adanya penguatan infiltrasi pemerintah terhadap kehidupan masyarakat setempat untuk memudahkan mobilisasi sumber daya ekonomi dan tenaga kerja. Pola mobilisasi yang bertumpu pada kemampuan kepala desa atau *kucho* dan loyalitasnya kepada pemerintah, telah membuat otonomi desa merosot tajam. *Kucho* adalah instrumen pemerintah seiring dengan menguatnya kontak langsung antara negara dengan desa.<sup>23</sup>

Agar semakin efektif dalam melakukan mobilisasi dan kontrol, pemerintah pun mendirikan organisasi di tingkat komunitas. Mengikuti pola mobilisasi di tingkat ketetanggaan yang telah diterapkan di Jepang sendiri—yang oleh Steiner<sup>24</sup> disebut sebagai “*wartime local government*”—Pemerintah Jepang mulai mengorganisir komunitas-komunitas spasial secara lebih sistematis dan berjenjang. Salah satu yang paling efektif untuk kasus Pasar Minggu Son ialah sistem *tonarigumi*.<sup>25</sup> Maka, mobilisasi pelbagai sumber daya lokal untuk pemenangan perang menjadi warna utama kehidupan sosial masyarakat Pasar Minggu Son. Pemerintah Desa sewilayah Pasar Minggu diberi wewenang untuk menarik pelbagai pajak pertanian. Setiap lima ikat padi, satunya merupakan cukai. Hal tersebut diambil oleh pihak desa. Meskipun begitu, desa pula yang menjadi ujung tombak mobilisasi, ketika penduduk setempat dimobilisasikan menjadi *keibodan* dan *romusha*.<sup>26</sup>

Oleh kepala desa pula, setiap *tonarigumi* diberi jatah untuk memobilisasi 10 orang *romusha*. Penduduk setempat menyebutnya sebagai *kemicho* dan tidak segan-segan memukul orang tersebut jika tidak bersedia menjadi *romusha*.<sup>27</sup> Oleh karena kuatnya unsur mobilisasi ini terdapat kecurigaan yang besar antara sesama tetangga, antara

---

<sup>23</sup> Aiko Kurasawa, *op-cit.*, hlm. 435–437.

<sup>24</sup> Kurt Steiner, *Local Government in Jepang*, Cornell: Cornell University Press, 1965.

<sup>25</sup> Aiko Kurasawa, *op-cit.*, hlm. xviii dan 195–207.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 2 September 2005.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 1 Oktober 2005.

penduduk biasa dengan *kemicho*, apalagi dengan *kucho* dan para aparatnya. Dengan demikian, mobilisasi sampai tingkat komunitas melalui *tonarigumi* dan kepala desa ini membuat sendi-sendi harmoni sosial masyarakat desa berantakan. Kolektivitas bertransformasi menjadi saling curiga.<sup>28</sup>

Begitu pula dengan sistem irigasi di belahan selatan Pasar Minggu Son juga terbengkalai. Tidak ada lagi sistem perawatan untuk jaringan irigasi primer sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda. Tidak ada pula petugas khusus yang bertugas membersihkan rumput di sekitar tanggul saluran air, mengeduk lumpur agar jalan air menjadi lancar, dan merawat pintu-pintu air, serta mengatur penyalurannya. Langkanya tenaga kerja maupun langkanya semen dan bahan bangunan lainnya diakui oleh Kepala Seksi Pertanian Pemerintah Militer yang membuat irigasi terbengkalai. Pada sisi lain, Pemerintah hanya merawat dan membangun irigasi-irigasi tertentu demi tontotan untuk diberitakan di koran-koran untuk tujuan propaganda. Dalam kaitan ini, Kurusawa<sup>29</sup> menyimpulkan bahwa pemerintah militer memang "... tidak pernah memikirkan perawatan puluhan ribu bangunan irigasi berskala kecil (seperti sistem irigasi di selatan Pasar Minggu—pen.), yang sesungguhnya lebih penting karena meliputi sawah yang luas".

---

<sup>28</sup> Di Jepang sendiri, asosiasi ketetangaan model *tonarigumi* ini dibentuk dalam rangka mengontrol dan memobilisasikan segenap komponen sosial dan ekonomi komunitas. *Tonarigumi* merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, dan bentuk persiapan perang Jepang yang paling intensif. Maka *tonarigumi* sejatinya bertujuan administratif dan politik sekaligus. Sebagai unit administratif, *tonarigumi* berfungsi untuk menyalurkan informasi dari pemerintah, mendistribusikan sandang pangan, mengumpulkan sumbangan, dan sejumlah lain pelayanan sejenis. Sebagai unit politik, *tonarigumi* menyediakan jaringan antara pemerintah dengan penduduk lokal, serta menumbuhkan simpati masyarakat terhadap pemerintah. Kurt Steiner, *op-cit.* Lihat juga Asep Suryana, "Otonomi Daerah dan Sistem Pemerintahan Daerah Jepang Pra-Perang Dunia II", dalam Hiroyoshi Kano dan Dody Prayoga, *Pelayanan Publik dan Otonomi Daerah: Studi Komparatif antara Jakarta dan Tokyo*, Depok: Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, (akan terbit).

<sup>29</sup> Aiko Kurusawa, *op-cit.*, hlm. 25.

Saluran sekunder dan tersier irigasi yang secara konvensional dirawat oleh petani sawah setempat juga tidak terpelihara. Selain karena langkanya bahan bangunan, mereka justru tidak merawatnya karena merasa tidak ada gunanya. Pasokan air dari hulu tidak ada. Untuk merawatnya, seperti menyiangi rumput di sekitar tanggul, mengeduk lumpur agar air yang mengalir itu lancar, dan merawat pintu-pintu air tentulah membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya dari petani tersebut. Kalkulasi rasional mereka menunjukkan bahwa pekerjaan tadi akan sia-sia. Toh tidak akan menghasilkan padi. Hal di atas ditambah beban pajak yang besar untuk panen padi, seperlima dari hasil panen. Setiap lima ikat panen padi, satunya ditarik pajak. Besarnya proporsi pajak padi ini membuat gairah bersawah penduduk setempat merosot.

Apalagi tenaga produktif penduduk setempat sangat berkurang. Setiap tenaga laki-laki produktif dipaksa untuk menjadi *romusha*. Tenaga kerja yang tersisa, khususnya perempuan dan anak-anak tidak dapat melanjutkan mata pencaharian bersawah mereka, apalagi mengolah dan menjual buah-buahan. Cukai amat berat. Pasokan air pun tersendat-sendat karena tidak dipelihara. Setiap karesidenan harus berswasembada. Memperoleh kiriman beras—misalnya—dari karesidenan lain bagaikan mengimpor dari negara lain. Dalam situasi seperti ini, penduduk wilayah ini tidak dapat bertani secara maksimal. Orientasi sekaligus strateginya hanya bertahan hidup.<sup>30</sup>

Meski demikian, dalam situasi sulit di akhir pendudukan Jepang ini, ada saja petani di selatan Pasar Minggu yang tetap dapat menjual buah-buahannya, khususnya ke Pasar Palmeriam (Jatinegara) dan Pasar Senen Jakarta. Begitu pula masih ada penjual buah-buahan di kereta api. Umumnya, para penjaja ini menawarkan buah dukuh. Ketika ada pegawai atau tentara Jepang yang ingin memakan dukuh dan bermaksud membelinya, tetapi pedagang dukuh tersebut tidak tanggap karena tidak mengerti bahasa yang

<sup>30</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 1 September 2005. Bahkan dalam wawancara tersebut, Pak Risin menyatakan bahwa kala itu “kepala ikan lebih berharga dari pada kepala manusia”.

diungkapkan oleh orang Jepang tadi, serta merta orang Jepang tersebut menggamparnya.<sup>31</sup>

Dalam konteks ini, sebagian besar karesidenan kekurangan makanan pokok. Karesidenan Jakarta atau Jakarta Syuu misalnya (di mana Pasar Minggu Son berada), yang pada tahun 1940 merupakan penghasil terbesar padi, produksi padinya turun tajam. Kurasawa<sup>32</sup> menunjukkan bahwa pada tahun 1940, Karesidenan Jakarta menghasilkan 813.100 ton padi atau senilai perkapitanya 258 kilogram per kepala. Produksi padi zaman Jepang sangat menurun. Hal tersebut terkait dengan kurangnya inovasi teknik, pupuk, dan terbengkalainya irigasi. Dengan demikian sistem penanaman konvensional tetap dilanjutkan.

Walaupun produksi padi terus merosot, dibandingkan dengan komoditas pertanian yang lain, padi dan sayuran lebih diutamakan karena bertalian dengan upaya pemenangan perang. Produksi buah-buahan malah diabaikan karena dianggap tidak ada hubungannya dengan upaya pemenangan perang. Segala kebun milik pemerintah dikerahkan untuk menghasilkan sayuran untuk tentara Jepang. Demikianlah, misalnya, kebun pembibitan buah-buahan Tohudan di Solo juga diubah menjadi kebun sayur-mayur. Buah-buahan dibiarkan tidak dipelihara. Bahkan pohon induk yang diperoleh dan dibesarkan dengan susah payah, tidak diperhatikan sama sekali meskipun tidak dilenyapkan. Hal inilah yang dialami oleh empat pohon induk jambu klutuk sukun yang dikirim dari kebun pembibitan Pasar Minggu. Bibit jambu ini berhasil dikembangkan; malah pada tahun 1941, pohon jambu yang tidak berbiji itu dan dianggap hal yang mustahil pada masa itu, telah berbuah masak. Akan tetapi, ketika temuan tersebut telah dianggap prestasi besar dalam bidang inovasi buah-buahan dan telah diberi perhatian oleh pekerja kebun pembibitan, perawatan dan pengembangan buah jambu ini terhalang

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 1 September 2005.

<sup>32</sup> Aiko Kurasawa, *op-cit.*, hlm. 6.

oleh kebijakan pertanian Pemerintah Militer Jepang yang tidak apresiatif terhadap pengembangan buah-buahan.<sup>33</sup>

Dalam kaitan ini, kebun Ragunan pun digunakan untuk dua kali latihan *Nomin Dojo* (di daerah lain disebut *hyakusbo dojo*), yang merupakan pusat pelatihan “... dalam sebuah kompleks asrama yang dikelilingi oleh ladang pertanian yang luas di mana para siswa tinggal, belajar, dan bekerja bersama selama periode tertentu”. *Nomin* maupun *hyakusbo* sendiri berarti petani, sementara *dojo* kurang lebih bermakna lembaga informal pendidikan yang agak bebas, mirip pesantren, dengan tekanan yang kuat melalui pengajaran moral dan teknik melalui hubungan personal antara guru dan murid.<sup>34</sup> Jadi, sistem *Nomin Dojo* ini diharapkan mampu mendidik etos kerja dan keterampilan teknis para pesertanya, sehingga ketika kembali ke daerah asal, dengan sendirinya dapat mengembangkan kebijakan pertanian Pemerintah Militer Jepang yang terkait dengan upaya pemenangan perang dan cenderung mengabaikan pengembangan buah-buahan di daerahnya.

*Nomin Dojo* pertama dibuka pada hari Jumat 27 Oktober 1942. Setiap kursus berlangsung selama tiga bulan dengan kurang lebih 200 peserta. Peserta pertama sendiri berjumlah 215 peserta dan ditempatkan dalam asrama sederhana dari bilik di kebun Ragunan. Mereka juga dituntut untuk mahir memelihara dan menunggang kuda, karena program pelatihan ini juga telah menyediakan 200 ekor kuda sebagai sarana latihan. Mengenai laporan jurnalistik pelatihan pertanian yang menurut Kurasawa<sup>35</sup> sangat berarti bagi mobilitas vertikal lapis menengah masyarakat pedesaan, *Pandji Pustaka* edisi 30–31 (31 Oktober 1942), halaman 1076 menuturkan:

“Pada tanggal 27 Oktober jang baroe laloe telah diboeka dengan resmi Latihan Pertanian di Pasar Minggoe. Latihan pertanian ini

---

<sup>33</sup> Lihat Sudjud, “Riwayat Djambu-Klutuk-Sukun (Djambu Bidji) (Seedles Guava) di Kebun Pembibitan Buah-buahan Tohudan (Solo)”, *Pertanian 10-12 (12)* 1953: 57–59.

<sup>34</sup> Aiko Kurasawa, *op-cit.*, hlm. 16–17.

<sup>35</sup> *Ibid.*

ialah koersoes tjepat tentang bertjotjok tanam bagi pemoeda-pemoeda dari desa-desa diseloeroeh tanah Djawa dan Madoera. Lamanja koersoes tiga beolan. Koersoes ini akan diadakan bertoeoet-toeroet, tiap-tiap tiga boelan diganti moerid-moerid baroe. Dengan djalan demikian diharapkan dalam beberapa tahoen akan mendapat orang-orang jang boleh diseboet ahli dalam pertanian diseloeroeh tanah Djawa. Tiap-tiap koersoes dikoenjoengi oleh kira-kira 200 anak-anak. Kepada anak-anak inilah kelak diserahkan kewadajiban memberi pimpinan dan didikan soal pertanian kepada pendoeoek desanja masing-masing”.

Juga diingatkan oleh Kolonel Nakayama (sebagai wakil Gunseikanbu) bahwa tujuan utama yang harus dipikul oleh peserta ialah “... memberi penerangan dan tjontoh bertjotjok tanam kepada kaoem tani kerabat kampoengnja”. Oleh karena itu, para peserta harus bekerja dan belajar dengan rajin. Kursus ini tidak ringan, kata Nakayama. “Seorang tjalon pemimpin haroes berani menanggung oedjian berat oentoeok dapat membentoeok semangat jang tegoeh dan rohani jang koeat”.

*Nomin Dojo* kedua diselenggarakan pada 28 Februari 1943. Berbeda dengan pelatihan pertanian pertama, secara resmi pelatihan kedua ini dirancang untuk tingkat nasional. Karena itu, pesertanya pun merupakan wakil terpilih dari daerahnya masing-masing dan dianggap mampu menjadi pelopor pengembangan pertanian—tentu sesuai dengan kebijakan pertanian pemerintah—di desanya masing-masing. Kecuali wakil dari Jawa Timur, jumlahnya menyusut hanya 130 orang, berusia 17–20 tahun. Lama pelatihan enam bulan, lebih lama tiga bulan dari yang pertama. Materi yang diajarkan ialah kajian sosial, latihan pertanian, dan pembukaan hutan.<sup>36</sup>

## **B. GELIAT KOMERSIALISASI BUAH DI UJUNG REVOLUSI**

Seperti halnya Jakarta, wilayah Pasar Minggu pun menjadi wilayah kekuasaan NICA karena terkait dengan strategi perjuangan Republik.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 17–18.

Meski harus dibayar dengan erosi ketaatan rakyat setempat kepada pemimpin Republik, Cribb<sup>37</sup> memperlihatkan fakta bahwa Jakarta memang dirancang oleh Republik sebagai kota diplomasi, suatu strategi perjuangan bermata dua bersama-sama dengan perjuangan militer. 14 November 1945, Pemerintah Republik mengangkat Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri, seorang tokoh pergerakan yang masih memiliki reputasi baik di kalangan Barat, dan karena itu Cribb<sup>38</sup> berkesimpulan bahwa pengangkatannya itu mengindikasikan bahwa Republik masih membutuhkan pengakuan dunia internasional melalui cara-cara diplomatik.

Harga dari strategi diplomasi di atas sangat mahal. Demi menjaga sikap baik Inggris dan agar Belanda bersedia diajak berunding, Republik harus menahan diri untuk tidak menyatakan perang terbuka di Jakarta. Akibatnya, akhir tahun 1945, Jakarta sepenuhnya dikuasai oleh Sekutu, meski Pemerintah Nasional Kota Djakarta masih bekerja di Balai Agung sampai agresi militer Belanda pertama pada Juli 1947. Dalam waktu yang relatif bersamaan Pasar Minggu—bersama-sama dengan Cililitan dan Kebayoran—jatuh ke tangan pasukan KNIL di bawah Mayor Jenderal Schilling. Dengan taktik bergerak terus-menerus hingga ke pelosok untuk mencari pasukan Republik, Belanda dapat mengungguli bentrokan senjata dengan para pemuda. Penguasaan Belanda atas wilayah selatan Jakarta mulai meningkat. Bahkan di Kebayoran, Belanda pun mulai dapat menyelenggarakan ketertiban dan penegakan hukum. Taktik ini pula yang membuat Belanda mampu mengontrol sepenuhnya wilayah Pasar Minggu. Dengan taktik ofensif hingga ke pelosok, pasukan Belanda mampu mempersempit ruang gerak tentara resmi Republik dan Laskar Banteng Merah yang beroperasi di selatan Pasar Minggu.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Robert Bridson Cribb, *op-cit.* hlm. 59–63.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 2 September 2005; Robert Bridson Cribb, *op-cit.* hlm. 20, 96 dan 81–82. Untuk aktivitas dan berakhirnya Pemerintah Nasional Kota Jakarta, lihat Soetopo Soesanto, *Djakarta Raja pada 'Masa Pemerintah Nasional Kota' 17*

Tidak seperti wilayah Timur Jakarta yang penuh dengan gejala, sistem administrasi Belanda telah relatif mantap di Jakarta dan Ommelanden selatannya sejak 1946, dan semakin kukuh setelah perjanjian Renville ditandatangani pada Januari 1948. Perjanjian Renville telah mengakhiri otoritas republik di Jakarta dan wilayah selatannya, meskipun Belanda tetap memperoleh perlawanan yang dimotori oleh elite lokal setempat.

Pos polisi di Stasiun Pasar Minggu menjadi markas pasukan Belanda. Dari sini, sekali-kali mereka berpatroli ke pelosok untuk mempersempit ruang gerak tentara resmi Republik dan Laskar Banteng Merah. Suatu kali, pasukan Belanda ini berhasil menyergap dan menembak seorang anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sedang berpatroli. Anggota tentara resmi Republik yang tidak sempat menghindar tersebut, gugur seketika. Di belahan selatan Pasar Minggu, juga merupakan areal kekuasaan *de facto* Laskar Banteng Merah, laskar yang berafiliasi ke Komunis, dan sebagian besar anggotanya adalah penduduk Desa Jagakarsa.<sup>40</sup>

Sebagaimana watak keanggotaan laskar yang diungkapkan oleh Cribb<sup>41</sup>, Laskar Banteng Merah berintikan jagoan setempat. Dalih perjuangan yang menjustifikasi laskar ini, sering pula digunakan untuk merampok penduduk yang kaya. Tujuannya ialah memperoleh sandang-pangan bagi anggotanya. Oleh karena itu, Laskar Banteng Merah yang bermarkas di bekas perkebunan buah-buahan di sekitar Srengseng, selalu berada dalam kondisi terjepit. Ia diburu oleh tentara resmi Republik maupun tentara Belanda.

Merasa telah menguasai sepenuhnya wilayah Jakarta dan sekitarnya, baik secara *de facto* maupun *de jure*, pada 9 Maret 1948, dibentuk pemerintahan *Voorlopige Federale Regering van Indonesia* (Pemerintah Federal Sementara, atau lebih terkenal dengan sebutan Pemerintah

---

*Agustus 1945–21 Djuli 1947*, Jakarta: Skripsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1971 dan The Liang Gie, *op-cit.*, hlm. 108–117.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 1 Oktober 2005.

<sup>41</sup> Robert Bridson Cribb, *op-cit.*

Pre-Federal) di mana Pasar Minggu termasuk di dalamnya. Pembentukan wilayah, sebagaimana termaktub dalam Staatblad 178 tahun 1948 tanggal 11 Agustus 1948 tersebut direncanakan sebagai wilayah yang akan langsung di bawah pemerintah pusat atau pemerintah federal seluas 1.800 km<sup>2</sup>, atau semacam ibu kota negara serikat yang akan dibentuk di kemudian hari. Menurut The Liang Gie<sup>42</sup>, Pemerintahan Pre-Federal ini tidak lain suatu badan yang diketuai oleh Letnan Gubernur Jendral dan beranggotakan kepala departemen terkait.<sup>43</sup>

Pada 1 Maret 1949, melalui Staatblad 63/1949 wilayah Pre-Federal ditata ulang dan secara resmi dinamakan *Gewest Batavia en Ommelanden* (Daerah Batavia dan Sekitarnya) Wilayah Pasar Minggu sebagaimana status administratifnya di era Hindia Belanda, masih berkedudukan sebagai onderdistrik. Hanya, posisinya tidak lagi berada di bawah distrik Meester Cornelis, tetapi berada di bawah distrik yang telah dimekarkan, yakni Distrik Kramatjati. Selanjutnya, bersama-sama dengan Distrik Tangerang Ilir, Distrik Tangerang Udik, Distrik Kebayoran, Distrik Depok, Distrik Bekasi, dan Distrik Cibinong, Distrik Kramatjati berada di bawah *Residentie Ommelanden van Batavia*. Sementara itu, *Residentie Ommelanden van Batavia* merupakan bagian dari *Gewest Batavia en Ommelanden* bersama-sama dengan *Stadsgemeente Batavia* dan Onderdistrict *Duizend-Einlanden* (Kepulauan Seribu). Pada era ini, beberapa wilayah onderdistrik Pasar Minggu pada zaman Jepang seperti Desa Mampang Prapatan dan *Wijk* Mampang Tegalarang menjadi wilayah onderdistrik tersendiri.<sup>44</sup>

Menguatnya secara relatif tertib sosial yang ditandai oleh mapannya sistem administrasi kewilayahan di atas, ternyata dapat menghidupkan kembali pasar buah-buahan di stasiun Pasar Minggu. Saat itu, kondisi bangunan pasar di Pasar Minggu ini masih sangat

---

<sup>42</sup> The Liang Gie, *op-cit.*, hlm. 120.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 120–122. Lihat juga Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta, *Jakarta Membangun*, hlm. 15.

<sup>44</sup> The Liang Gie, *op-cit.*, hlm. 126–130.

sederhana, terbuat dari *gedeg* dan beratapkan rumbia. Jumlah pedagangnya pun masih sedikit. Serdadu Belanda banyak yang berlalu langang di pasar ini. Pak Maan yang kini telah berusia 70 tahunan itu menyebutnya sebagai zaman NICA.<sup>45</sup>

Meski komersialisasi buah-buahan mulai bergeliat, dan pasar buah di sekitar stasiun Pasar Minggu pun mulai menerima penjualan buah-buahan dengan sistem pikulan dari petani setempat, sesungguhnya tidak banyak buah-buahan yang didistribusikan melalui Pasar Minggu. Pada era ini, sebenarnya pasar buah belum pulih seperti keadaan sebelum perang. Suasana revolusi membuat pangsa pasar buah-buahan ini sangat sedikit, dan kondisi ini membuat para petani buah Pasar Minggu tidak dapat berbuat banyak ketika masa panen. Tatkala pohon rambutan dukuh, dan durian berbuah, mereka membiarkan saja, lantaran nyaris tak bermakna sebagai komoditas. Buah-buahan tersebut dibiarkan berjatuhan dan berserakan begitu saja. Penduduk lain yang ingin mengambilnya dipersilahkan, asalkan buah-buahan tersebut telah jatuh dari pohon dan berserakan di sekitar di pohon tersebut.

Dalam situasi ini, hanya sedikit buah-buahan yang dijual dan dijadikan sandaran mata pencaharian penduduk wilayah Pasar Minggu. Meski begitu, ada saja petani yang berusaha memasarkan hasil buah-buahannya itu ke Pasar Minggu, mereka menjualnya secara borongan dengan sistem pikulan. Kampung Kandang misalnya, walaupun jaraknya tidak jauh dari stasiun Pasar Minggu, tetapi hanya sedikit penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani buah, apalagi sebagai pedagang buah-buahan. Ini berbeda dengan kampung yang langsung berdekatan dengan stasiun Pasar Minggu, seperti Kampung Jawa. Kampung-kampung ini masih dapat bertindak sebagai pemasok buah-buahan.

Tatkala ketertiban sosial semakin mantap, jaringan-jaringan kereta listrik pun mulai beroperasi kembali, para petani buah dapat

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Pak Maan, Penduduk Kampung Kandang (di sekitar Kebun Binatang Ragunan sekarang), 25 Agustus 2005.

mengangkut buah-buahan untuk dipasarkan secara lebih luas. Pak Risin, misalnya, di usianya yang belasan tahun ketika itu, telah menjadi penjual buah-buahan di kereta listrik selama perjalanan Bogor-Kota di tahun 1948. Ia mengikuti perjalanan kereta listrik tersebut sampai stasiun Kota, dan ia kembali dengan kereta yang sama.<sup>46</sup>

Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan bahwa begitu tidak tentunya suasana peralihan ini, namun secara umum peran petani buah lebih meningkat. Hal tersebut utamanya dipicu di era Jepang ketika perkebunan buah-buahan milik pemerintah mati suri dan pekebun orang Belanda (yang mengelola kebun buahnya itu dengan modal besar) telah lenyap. Petani buah pun menjadi pemasok tunggal meski pangsa pasar buah-buahan cenderung tidak meningkat. Kelak, tatkala situasi wilayah Pasar Minggu di akhir tahun 1950-an telah benar-benar aman, petani buah Pasar Minggu memasuki era kejayaan, suatu proses sosial ekonomi panjang yang potensinya telah terbentuk di era peralihan ini.[]

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 1 Oktober 2005.

## BAB V

# Dekolonisasi dan Terwujudnya Tata Sosial Baru

Pascaproklamasi kemerdekaan, dekolonisasi kelembagaan merupakan fenomena menonjol di Kecamatan Pasar Minggu. Dekolonisasi kelembagaan yang dimotori Pemerintah Republik dan berupaya mewujudkan konsepsi nasionalisme daulat rakyat, untuk sebagian-nya bertumpu pada posisi resmi Pasar Minggu sebagai wilayah Jakarta. *Pertama*, Kecamatan Pasar Minggu juga turut menjadi subjek program pengembangan pertanian dari Dinas Pertanian Kota-praja Jakarta, suatu kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, yang digambarkan sebagai rakyat yang menderita dan berada dalam strata terbawah dalam konsep nasionalisme rakyat di atas. Kebijakan ini merupakan antitesis kebijakan *gemeente* Batavia yang cenderung mengabaikan rakyat, karena senyatanya konsepsi Batavia pada ere kolonial—meminjam istilah Samsuridjal, Walikota kedua Jakarta—adalah “*westerse enclave*”.<sup>1</sup>

Penyeragaman sistem administrasi permukiman merupakan bentuk dekolonisasi kelembagaan yang *kedua* di Kecamatan Pasar Minggu. Dekolonisasi kelembagaan ini tidak lain adalah reaksi sistem administrasi wilayah pinggiran di era kolonial, yang secara tegas membedakan antara tanah gubernemen dengan tanah partikular. Senyatanya, perbedaan kedua sistem administrasi kolonial tersebut berimplikasi terhadap format dan penerapan kebijakan pemerintah yang berlainan. Sebaliknya, penyeragaman permukiman

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kotapradja Djakarta, *Djakarta Raja*, 1953, hlm. 6.

berkonsekuensi atas penerapan kebijakan wilayah pinggiran kota yang relatif sama.

*Ketiga*, dekolonisasi kelembagaan di Pasar Minggu ditandai oleh kuatnya simbolisme rakyat yang melekat pada Kantor Perkebunan Rakyat dan Kebun Percobaan Pasar Minggu. Akibatnya, kedua lembaga pertanian modern warisan pemerintah kolonial dan didirikan pada 1 April 1921 tersebut mengalami reorientasi baru. Simbolisasi rakyat tidak saja berimplikasi terhadap kebijakan yang berorientasi kerakyatan, melainkan juga berdampak terhadap usaha untuk memperkecil kesenjangan psikologis dan sosial-ekonomi antara kedua lembaga tersebut dengan penduduk setempat.<sup>2</sup>

Lembaga tersebut pun berfungsi sebagai penyedia bibit unggul buah-buahan dengan harga murah, bahkan di bawah biaya produksi karena negara menyubsidinya. Pada sisi lain, integrasi dengan penduduk petani setempat terus dipergiat. Kantor Perkebunan Rakyat mengadakan pelbagai perlombaan dalam rangka meningkatkan kemampuan bertani modern bagi penduduk setempat, sambil coba menumbuhkan rasa memiliki penduduk atas lembaga pertanian pemerintah ini. Kantor tersebut juga membantu menyediakan sarana pendidikan dasar dan menengah, bahkan menyelenggarakan secara khusus sejenis kursus pertanian modern praktis bagi pemuda-pemudi Pasar Minggu yang dinamakan sebagai program Pondok Bakti.<sup>3</sup>

## A. MENJADI PINGGIRAN JAKARTA

Pada tanggal 24 Maret 1950, secara formal Pasar Minggu yang merupakan wilayah perbatasan dengan Bogor dan memiliki luas 45 km<sup>2</sup>, menjadi wilayah administratif Jakarta. Masuknya Pasar Minggu sebagai wilayah Jakarta merupakan perluasan wilayah—dan perluasan kedua setelah Gemeente Meester Cornelis digabungkan dalam Batavia pada tahun 1935—melalui Keputusan Presiden Republik

<sup>2</sup> Abd. Manap, *Loc. Cit.*, hlm. 112 dan 123.

<sup>3</sup> *Ibid.* 112–131.

Indonesia Serikat No. 125 Tahun 1950, serta tercantum dalam Lembaran Negara No. 18 di tahun yang sama. Sebagaimana ditunjukkan oleh The Liang Gie<sup>4</sup>, bahwa pembentukan tata pemerintahan baru Jakarta ini dan berstatus Kotapraja Jakarta Raya, adalah kelanjutan dari tata pemerintahan di ere Pre-Federal menurut Staatsblad No. 178 Tahun 1948, serta konsekuensi lebih lanjut dari keputusan Konperensi Meja Bundar 1949. Secara administratif, Kecamatan Pasar Minggu dibatasi oleh Kali Kerukut dan Kebayoran (batas barat), Sungai Ciliwung dan Pasar Rebo (batas Timur, Kecamatan Mampang Prapatan (batas utara), dan daerah Bogor (batas selatan).<sup>5</sup>

Tentu saja tidak semua wilayah yang diatur dalam Staatsblad 178 Tahun 1948 atau yang tergabung dalam *Gewest Batavia en Ommelanden*, atau disebut juga Distrik Federal Jakarta diakomodasi dalam Keputusan Presiden No. 125 Tahun 1950 tersebut di atas. Hanya, Onderdistrik Cengkareng, Kebon Jeruk, Kebayoran Ilir, Kebayoran Udik, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Pasar Rebo, Pulo Gadung, dan Kepulauan Seribu (*Onderdistrict Duiẏend-Einlanden*) yang digabungkan ke dalam Kota Jakarta (atau *Stadsgemeente* Batavia dahulu). Sementara itu, Distrik Tenggerangg Udik, Distrik Depok, dan beberapa distrik serta onderdistrik yang lain menjadi wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia yang beribu kota di Jogjakarta. Konsekuensi dari penataan wilayah ini, maka *Gewest Batavia en Ommelanden* yang terdiri atas *Stadsgemeente Batavia*, *Residentie Ommelanden van Batavia*, dan *Onderdistrict Duiẏend-Einlanden* (Kepulauan Seribu) menjadi hilang. Pada tanggal 31 Maret 1950, Gubernur Distrik Federal Jakarta atau Gubernur *Gewest Batavia en Ommelanden* meletakkan jabatan dan menyerahkan kekuasaan pemerintahannya seluas wilayah menurut Keputusan Presiden No. 125 tahun 1950 di atas, kepada WaliKota Jakarta (waktu itu Suwirjo).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> The Liang Gie, *op-cit.*, hlm. 131–141.

<sup>5</sup> *Majalah Kotapradja* 1953, hlm. 35.

<sup>6</sup> The Liang Gie, *op-cit.*, hlm. 128–129 dan 138.

Akibat pemekaran ini, luas Kotapraja Jakarta menjadi 530 km persegi atau tiga kali lebih luas wilayah *Stadsgemeente Batavia*. Dinamika kewilayahan kotapraja Jakarta yang setaraf dengan provinsi itu, semakin kompleks. Jakarta merupakan tata pemerintahan yang bersifat kekotaan karena pada dasarnya ia adalah wilayah kota. Tetapi akibat Keputusan Presiden di atas, wilayah Jakarta juga terdiri atas—istilah yang dipakai secara resmi pada 1950–1965—wilayah perdesunan. Sebagian besar wilayahnya berupa daratan, namun ia juga mencakup pulau-pulau kecil yang berserakan di tengah laut Jawa di sebelah utara Jakarta. Untuk wilayah perdesunan atau perdesaan yang terletak di pinggiran Jakarta, penyelenggaraan pemerintahan di sana berfungsi bagaikan kabupaten (satuan administratif untuk wilayah perdesaan). The Liang Gie<sup>7</sup> pun mencatat bahwa praktik pemerintahan lebih bertumpu dan karena itu lebih terasa di wilayah perkotaan. Di pedusunan, pemerintah Kotapraja Jakarta belum terasa kehadirannya. Hal tersebut terkait dengan disain dasar kotapraja yang memang untuk daerah perkotaan, dan karena itu ia kurang lentur untuk wilayah perdesunan yang terletak di pinggiran tersebut.

Meski demikian, Pemerintah Kotapraja memiliki dinas khusus atau Jawatan Pertanian tersendiri, dengan nama resmi Dinas Pertanian Rakyat (perhatikan konsep rakyat yang tertera dalam dinas ini). Dinas inilah yang menjalankan kebijakan resmi serta melakukan inovasi demi meningkatkan hasil pertanian di Jakarta, suatu kebijakan yang menguat setelah era Walikota Samsurijal (1950–1953).<sup>8</sup> Dari sudut dekolonisasi, adanya kebijakan resmi pemerintah kota yang ditujukan kepada penduduk pribumi merupakan kemajuan

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>8</sup> Sebelumnya, para era Suwirjo, konsentrasi program tertuju di wilayah pusat kota, khususnya untuk menata persoalan tanah. Banyak tanah yang dihuni secara liar, berisi gubuk-gubuk yang dibangun pada era Jepang dan masa revolusi. Sebagian besar persoalan tanah terkait dengan migrasi masuk yang deras pada dua era itu karena para migran menganggap di kota mereka dapat hidup lebih layak. Lihat Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta, *Karya Jaya*, hlm. 13–50 dan Pemerintah Kotapradja Djakarta, *Djakarta Raja*.

tersendiri, karena merupakan akomodasi formal terhadap situasi sosial ekonomi pertanian yang telah digeluti penduduk setempat sejak lama. Kecamatan Pasar Minggu pun, yang memiliki luas 40 km<sup>2</sup> (4.000 ha) dan telah dikenal sebagai penghasil jeruk siam, jambu ketulok, pisang, dukuh, sawo, dan susu sapi pada tahun 1951, coba dikembangkan oleh pemerintah Jakarta. Akomodasi formal yang lain juga dilakukan oleh Jawatan Pertanian Rakyat. Pengembangan buah-buahan setempat disebarkan melalui kebun percobaan buah-buahan yang berada di empat lokasi.<sup>9</sup>

Sebuah laporan Dinas Pertanian Rakyat Kotapraja Jakarta Raya pada tahun 1957 memperlihatkan bahwa seluas 13.222 ha (25%) dari 53.000 ha luas Jakarta adalah kebun buah-buahan dan sayur-sayuran. Lengkapnya peruntukan lahan non-pertanian adalah seluas 14.460 ha. Sementara tanah pertanian sendiri seluas 33.422 ha, terdiri atas 18.861 ha sawah, 1.339 ha tegalan, 1.410 kebun karet, 355 kebun kelapa. Selain itu, terdapat juga 1.800 ha hutan pantai dan 1.500 ha merupakan empang ikan air payau. Menurut Majalah Kotapraja, dengan asumsi penurunan luas lahan pertanian sekitar 0,5% per tahun maka lahan buah-buahan menghasilkan 25.000 ton buah-buahan (pada tahun 1953), 20.000 ton (1954), 19.000 ton (1955), dan 17.000 ton (pada tahun 1956).<sup>10</sup> Jadi, produksi pertanian di Jakarta pada masa itu, masih relatif memadai. Tahun 1952 Kewedanaan Kramat Jati sendiri (dimana Pasar Minggu ber-naung) merupakan wilayah yang memiliki tanah darat terluas meski dari segi luas sawah berada di bawah Kewedanaan Matraman dan Penjaringan (lihat Tabel 5.1).

---

<sup>9</sup> Lihat *Majalah Kotapradja* No. 2 Tahun ke-2, Juli 1951, hlm. 18–19 dan *Majalah Kotapradja* No. 24 Tahun ke-3, 31 April 1953, hlm. 16–17.

<sup>10</sup> Jakarta pun masih menghasilkan padi dan palawidja. Tahun 1953 dihasilkan 41.500 ton padi, 44.700 ton (1954), 48.000 ton (1955), dan 53.000 (1956). Pada tahun 1953 dihasilkan 60.000 ton palawidja, 10.3000 ton (1954), 10.900 ton (1955), dan 10.600 ton (1956). *Majalah Kotapradja* 1957, hlm. 21–22.

**Tabel 5.1** Luas lahan pertanian tiap Kewedanaan di Jakarta tahun 1952

Kewedanaan	Tanah Darat (ha)	Sawah (ha)
Gambir	3.462	311
Penjaringan	984	4.109
Tanjung Priok	889	2.050
Matraman	6.195	6.432
Kebayoran	4.879	2.578
Kramat Jati	10.276	3.556

Sumber: *Majalah Kotapradja* No. 5 Tahun ke-3, 15 Nopember 1952, hlm. 20.

Dalam kaitan ini, Dinas Pertanian Rakyat telah coba mengembangkan penanaman padi sawah dan palawija lainnya dalam kurun 1953–1957 di 16 desa. Desa Regunan dijadikan sebagai *pilot project* pengembangan kacang tanah Jenis C pada tahun 1953 dan 1954.<sup>11</sup> Dalam kurun 1943–1957, Dinas Pertanian Rakyat juga melaporkan bahwa mereka telah meremajakan kebun-kebun lama seluas kurang lebih 5.700 hektar. Peremajaan kebun seluas itu telah berhasil mengganti kurang lebih 4,5 juta pohon buah-buahan (terdiri atas pohon durian, pohon rambutan, pohon jeruk besar, pohon jeruk siam, pohon sawo, pohon jambu, salak, dan lain sebagainya), dengan hasil kurang lebih 17.000 ton setahun. Tetapi Dinas Pertanian Rakyat juga melaporkan bahwa untuk merawat kebun buah-buahan tersebut lebih intensif adalah tugas Jawatan Pertanian Rakyat. Pada sisi lain, kebun buah-buahan telah banyak beralih fungsi. Banyak industri yang mulai dibangun di pinggiran kota.<sup>12</sup>

Seiring dengan meningkatnya status kotapraja Jakarta menjadi daerah otonom setingkat provinsi pada 9 Oktober 1957, maka Dinas Pertanian Rakyat membutuhkan pegawai baru. Pada masa kotapraja sampai tahun 1957, Dinas Pertanian Rakyat hanya memiliki 38 orang pegawai termasuk kepala dinas dan 11 orang tenaga administrasi. Pada era setingkat provinsi, dibutuhkan 410 pegawai,

<sup>11</sup> *Majalah Kotapradja* 1957, hlm. 21–22.

<sup>12</sup> *Majalah Pertanian* 1957, hlm. 27–29.

300 pegawai teknik dan 100 pegawai administrasi. Keseluruhan pegawai ini akan dibagi dalam tiga lingkup kerja, yakni lingkup kerja setingkat kabupaten, lingkup kerja setingkat kewedanaan, dan lingkup kerja setingkat kecamatan.<sup>13</sup>

Meski menghadapi kesulitan dalam hal dana dan sumber daya manusia, pada tahun 1957, Dinas Pertanian Jakarta ini memiliki seorang Mantri Pertanian untuk setiap kecamatan yang memiliki areal pertanian yang luas. Kurang lebih setiap Mantri Pertanian ini harus melayani sekitar 15.000 orang petani. Jadi dapat dibayangkan betapa repotnya Mantri Pertanian. Ia harus memberikan pelayanan terhadap sejumlah besar petani dengan areal kecamatan yang luas, dengan sarana transportasi sangat terbatas pula. Dinas juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat banyak, di antaranya adalah kursus tani desa. Kursus ini dilakukan selama setahun, diikuti oleh laki-laki dan perempuan setiap dua minggu sekali. Sementara materinya disesuaikan dengan kebutuhan pertanian setempat, dan diberikan oleh ahli pertanian keluaran kursus guru tani, petani yang berpengalaman, maupun pegawai dinas sendiri. Dalam kurun 1951-1957 telah diselenggarakan 96 kursus tani desa (KTD) dengan 2000 peserta. Pada tahun 1957 diselenggarakan 21 KTD dengan 423 peserta. Sedangkan 63 KTD, dengan pemberian ijazah kepada 703 peserta, diselenggarakan antara tahun 1951-1956.<sup>14</sup>

Menurut laporan Dinas Pertanian Kotapraja Jakarta ini, penyelenggaraan kursus tani desa di atas baru memenuhi 60% permintaan masyarakat. Dinas tidak bisa memenuhi seluruh permintaan ini karena terbatasnya tenaga dan dana. Oleh karena itu, di wilayah yang lain yang tidak dapat dibentuk KTD, Dinas melakukan kegiatan satu dari empat kegiatan berikut.

- (1) Obrolan sore. Kegiatan tak resmi ini diadakan setiap seminggu sekali dengan tempat pertemuan dan pesertanya bersifat tidak

---

<sup>13</sup> *Majalah Pertanian* 1957, hlm. 27-29.

<sup>14</sup> *Majalah Kotapradja* 1957, hlm. 18.

tetap. Topik biasanya tergantung dari peserta. Petugas jawatan tidak memberikan materi secara sistematis, namun hanya memberikan konsultasi berdasarkan topik yang diajukan peserta. Selama 1951–1957 telah diselenggarakan kurang lebih 2000 obrolan sore dengan 32.000 peserta.<sup>15</sup>

- (2) Kursus Pemuda Tani (KPT), kurang lebih serupa dengan *nomin dojo* pada era Jepang, yang baru ada satu di Klender. KPT merupakan latihan kerja yang lebih mendalam dan sistematis selama 4 tahun. Kursus ini berbentuk teori dan praktek selama 2 hari setiap minggu. Para peserta diutamakan adalah anak-anak petani keluaran Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun yang memang berminat untuk melanjutkan pertanian orang tuanya. Tahun 1957, telah diselenggarakan KPT dengan 16 peserta.
- (3) Pengetahuan pertanian juga diberikan di Sekolah Rakyat sejak tahun 1954. Sebanyak 30 SR telah coba diberikan pengetahuan pertanian bagi siswa kelas 4, 5, dan 6 dalam sebagai pengganti pelajaran lokal-praktik dengan jumlah 23.000 siswa.
- (4) Dibentuk pula Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD), yang merupakan pusat penyuluhan dan pendidikan pertanian. Tahun 1957, baru ada satu BPMD di Klender yang ditujukan untuk meningkatkan pertanian di Kecamatan Pulo Gadung. BPMD di Klender ini memiliki dua lahan yang dipergunakan untuk praktik pertanian.<sup>16</sup>

Selain itu, Dinas Pertanian juga melaporkan bahwa terdapat perbaikan pengairan sawah seluas 11.000 ha dari 19.000 ha sawah di Jakarta. Hal tersebut merupakan hasil perbaikan beberapa puluh dam dan ratusan kilometer saluran oleh gotong royong masyarakat dan Dinas Pertanian. Juga terdapat program peningkatkan penggunaan bibit unggul padi dan penggunaan pupuk organik, seperti kompos dan pupuk kandang.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Majalah Kotapradja* 1957, hlm. 18.

<sup>16</sup> *Majalah Kotapradja* 1957, hlm. 2-29, 18, dan 33.

<sup>17</sup> *Majalah Kotapradja* 1957, hlm. 33.

Data hasil pertanian, khususnya buah-buahan menunjukkan pengurangan sejak tahun 1953, atau diasumsikan lahan pertanian turun sekitar 0,5% setiap tahunnya. Tahun 1956 sendiri tercatat adanya 19,036 ha sawah dan 26.685 ha tanah kering atau darat. Selebihnya lahan tersebut dipergunakan untuk non-pertanian. Pada tahun ini pula tercatat terjadi konversi lahan pertanian sekitar 634,5 ha ke non-pertanian (lihat Tabel 5.2).

**Tabel 5.2** Konversi Lahan Pertanian di Jakarta Tahun 1957 (dalam Hektare)

Kecamatan	Luas	Peruntukan asal	Dipergunakan untuk
<b>Pusat Kota</b>			
Krukut	200	Sawah	Cabang kota Tanjung Grogol
Salemba	41	Sawah dan darat	Perkampungan Mahasiswa dan industri
Senen	18	Sawah dan darat	Cabang kota perkampungan
Matraman	45	Sawah dan darat	Tangsi polisi, industri dan permukiman
Jati Petamburan	45	Sawah dan darat	Rumah sakit Sin Ming Hui dan penampungan rakyat terlantar
Tanah Abang	10	Darat	Perumahan dan asrama polisi
<b>Pinggiran Kota</b>			
Tanjung Priok	150	Sawah dan darat	Perumahan dan industri
Cengkareng	10	Sawah dan darat	Bangunan kompleks imigari dan perindustian
Pulo Gadung	30	Sawah dan darat	Tangsi polisi
Kebayoran	84,5	Sawah dan darat	Rumah sakit anak-anak, garasi bus PPD, dan kompleks perumahan Departemen Kehakiman

Diolah dari *Majalah Kotapradja* 1956, hlm. 28

## 2. EKSPERIMEN ADMINISTRATIF PERMUKIMAN

Konsekuensi dari Keputusan Presiden No. 125 Tahun 1950 di atas adalah perubahan nama resmi satuan wilayah dari onderdistrik menjadi kecamatan dan distrik menjadi kewedanaan. Wilayah Pasar

Minggu sendiri berstatus kecamatan (Kecamatan Pasar Minggu dengan luas kurang lebih 45 kilometer persegi), berada di bawah Kewedanaan Kramat Jati, termasuk wilayah Jakarta Selatan, dan terdiri atas 10 kelurahan (lihat Tabel 5.3).<sup>18</sup> Beberapa desa dan permukiman lain yang pada zaman Jepang masuk wilayah Pasar Minggu, pada awal tahun 1950-an telah menjadi satu kecamatan sendiri: misalnya Kecamatan Mampang Prapatan. Tampak pula bahwa terjadi penyeragaman sistem permukiman di Pasar Minggu. Seluruhnya berstatus kelurahan. Tidak ada lagi wilayah setara kelurahan yang berstatus *wijk*, kecamatan, dan kemandoran. Dapatlah dikatakan bahwa fenomena penyeragaman di atas merupakan salah satu bentuk dekolonisasi pinggiran kota.

Di bawah kelurahan, ialah kemandoran. Pada tahun 1953, Kecamatan Pasar Minggu yang terdiri atas 11 kelurahan, memiliki 44 kemandoran. Dalam kaitan ini, dapat diungkapkan bahwa struktur kepemimpinan kelurahan ini masih bertumpu pada elit lama, khususnya para jago atau jawara yang biasanya merupakan orang kaya setempat. Pada awal tahun 1950-an, misalnya, seorang haji memenangkan pemilihan lurah di Kecamatan Pasar Minggu. Jadi, kendati bernama kelurahan, sejatinya satuan administratif pada masa itu adalah desa. Lurah dipilih secara terbuka melalui pemilihan langsung. Oleh karena itu, kecakapan administratif dan manajerial tidak menjadi ukuran utama. Yang terpenting, mereka memperoleh suara terbanyak dalam sistem pemilihan terbuka tersebut. Umumnya mereka yang terpilih karena dikenal atau memiliki reputasi yang baik. Ciri lain para pemimpin kelurahan tersebut, orang kaya, bergelar haji, dan dari kalangan jawara atau jago.

---

<sup>18</sup> Tahun 1958, secara resmi wilayah terkecil bernama kelurahan. Tetapi sebelumnya masih bernama desa, terdiri atas 11 Desa dan kemudian Desa Cilandak berpindah di bawah Kecamatan Mampang Prapatan. Kesebelas desa tersebut ialah (1) Desa Cilandak, (2) Desa Srengseng Sawah, (3) Desa Ragunan, (4) Desa Jatipadang, (5) Desa Ciganjur, (6) Desa Pasar Minggu, (7) Desa Kalibata Lenteng Agung, (8) Desa Lenteng Agung, (9) Desa Pejaten, (10) Desa Jagakarsa, dan (11) Desa Tanjung Barat. Lihat *Majalah Kotapradja* No. 7-8 Tahun ke-3, 30 Desember 1952, hlm. 8-13.

**Tabel 5.3** Struktur Administratif Pemerintahan Pasar Minggu Tahun 1953

Kelurahan	Jumlah Kemandoran	Lurah 1953	Lurah 1957
Kalibata Lenteng Agung	4	Abdulrasip	Abdul Rasif
Pejaten	4	Haji Hanapi	H. Hanapi
Pasar Minggu	4	Bontong	Bontong
Tanjung Barat	4	H. Mudmar	H. Mudemar
Lenteng Agung	4	Raiman	Raiman
Srengseng Sawah	4	Asmit	Asmit
Jagakarsa	4	Utud	Utud
Ciganjur	4	Nasim	Noman
Cilandak	4	Machrup	Makrup
Ragunan	4	Nawih	Nawih
Jatipadang	4	A. Wahab	Wahab

Diolah dari *Majalah Kotapradja* 1953, hlm. 35 dan The Liang Gie, *op-cit.*, hlm. 144–148.

Pada sisi lain, data di atas juga menunjukkan bahwa pergantian elite formal lokal berjalan lambat. Dalam kurun empat tahun tidak ada pergantian seorang lurah pun, padahal camat Pasar Minggu sendiri telah berganti. Tahun 1957, Camat K. Puradinata telah digantikan oleh Camat R. Muchjudin. Sementara itu, dalam kurun 4 tahun (1953–1957) hanya terdapat satu nama yang berbeda, dan mungkin tidak menunjukkan adanya alih kepemimpinan. Secara formal, Nasim adalah wakil lurah Ciganjur. Dalam artikel sejenis memoar, Camat Puradinata tidak menyebutkan siapa nama lurah Ciganjur. Karena itu, boleh jadi, lurahnya adalah Noman.<sup>19</sup>

Dapat dipahami, bila Pemerintah Kotapraja Jakarta berhasrat meningkatkan kemampuan administratif dan manajerial para lurah, yang memang bukan ukuran utama mereka. Program ini bertumpu pada kesadaran bahwa suatu kota besar Indonesia, apalagi yang menyandang status sebagai ibu kota negara, haruslah memiliki manajer komunitas yang cakap. Lurah, yang banyak berfungsi sebagai

<sup>19</sup> *Majalah Kotapradja* 1953, hlm. 35.

pemimpin komunitas lewat sistem patronase, selama ini tidak memiliki kecakapan yang dibutuhkan tadi.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Kotapraja mendesain Pasar Minggu sebagai pusat pelatihan para lurah, dan sesungguhnya pelatihan ini menandai era penyeragaman pemerintahan lokal di Jakarta, tidak saja dalam pengertian ruang lingkup kewenangan dan hirarki, melainkan juga kemampuan para pelakunya. Pada tanggal 1 April hingga 14 April 1953 atau selama dua minggu, telah diselenggarakan kursus lurah di pasar Minggu yang diikuti oleh 30 peserta. Kursus diselenggarakan dan di situ pula peserta diinapkan, yakni di Gedung Latihan Pertanian Djawatan Pertanian Pasar Minggu. Demikian pula, kursus yang sama juga diselenggarakan untuk angkatan kedua yang diikuti oleh 29 lurah. Pelatihan ini dibuka oleh Residen Suratno dan ditutup pada 2 Juli 1953. Sedangkan angkatan ke-3 diselenggarakan pada 8 Juli 1953 di desa Pondok Jati.<sup>20</sup>

Sejatinya, eksperimen administratif di atas hanya berimplikasi di tataran formal, dan tidak mengubah struktur sosial setempat meski Walikota Sudiro telah membentuk rukun tetangga (RT) dan rukun kampung (RK) [yang kemudian diubah menjadi RW, Rukun Warga] pada 20 Mei 1954. RT merupakan sistem ketetangaan yang dibentuk atas dasar 10 hingga 20 rumah tangga, sedangkan

<sup>20</sup> *Majalah Kotapradja* No. 18–19 Tahun ke-3, 13 Juni 1953, hlm. 16–17. Untuk menunjukkan betapa secara formal struktur administrasi permukiman telah seragam pada awal 1950-an, dapat dibandingkan dengan Kecamatan Mampang Prapatan, kecamatan yang memiliki perbatasan langsung dengan Pasar Minggu. Mei 1952, Camat Moh. Dahlan (Camat Mampang Prapatan) melaporkan bahwa Kecamatan Mampang Prapatan, dengan luas 2.134 ha, memiliki penduduk 35.232 jiwa (34.574 orang Indonesia, 444 Tionghoa, 191 Arab, dan 23 Eropa). Kecamatan ini terdiri atas 10 kelurahan dan 33 kemandoran. Kelurahan Kuningan memiliki 6 kemandoran dengan H. Sanusi sebagai lurahnya. Kelurahan Mampang Prapatan memiliki 4 kemandoran, dengan lurah Matun. Kelurahan Mampang Tegalparang, 3 kemandoran, lurah Abdulgani. Kelurahan Bangka 3 kemandoran, Lurah Rais. Kelurahan Kalibata Durentiga, 4 kemandoran, Lurah Saimin. Kelurahan Pancoran, 3 kemandoran, Lurah Hamim. Kelurahan Cikoko, 3 kemandoran, Lurah Hasyim. Kelurahan Pangedegan, 2 kemandoran, dan Lurah Nasti. Kelurahan Kampung Dalam, 2 kemandoran, dan Lurah Abdul Chair. Kelurahan Cililitan Rawajati, 3 kemandoran, lurah H. Moh. Nasir. Lihat *Majalah Kotapradja* No. 7–8, 30 Desember 1952, hlm. 8–13.

Kampung, yang merupakan satu komunitas pada saat itu juga dibentuk sistem kemasyarakatan yang tidak lain adalah gabungan beberapa RT.<sup>21</sup>

Pembentukan RT dan RW dilakukan setelah terlebih dahulu Walikota Sudiro mengumpulkan 3.000 orang pemuka masyarakat untuk membicarakan tentang semacam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi komunitas ini. Demi kepraktisan, keputusan rapat besar yang dilakukan selama tiga hari ini kemudian dirumuskan ke dalam bentuk buku saku dan dirancang sebagai petunjuk teknik bagi para ketua RT dan RK.<sup>22</sup>

RT dan RK merupakan satu-satunya lembaga kemasyarakatan yang ada dalam satu teritori permukiman, dan tidak ada lagi lembaga lain yang serupa. Keduanya merupakan milik seluruh penduduk yang tinggal dalam areal teritori, berwatak netral dalam arti tidak berafiliasi ke partai tertentu. Watak netral ini sengaja dirancang demi tumbuhnya ikatan kebersamaan dalam permukiman tersebut. Dalam kaitan ini, walaupun secara formal RT dan RK bukan bagian dari struktur pemerintahan resmi, atau "...tidak boleh menganggap dirinya sebagai instansi Pemerintah...", namun pemerintah senyatanya berharap banyak. Dalam biografinya, Walikota Sudiro yang menggagas keberadaan kedua organisasi komunitas ini mengatakan bahwa "... RT dan RK membantu pimpinan instansi-instansi Pemerintah di bawah, yaitu Lurah dan Kepala Kampung ..."<sup>23</sup>

RT dan RK pun diharapkan mampu meningkatkan solidaritas sosial setempat, "...mempertinggi martabat anggauta-anggautanya dalam bidang ekonomi dan sosial, mempertinggi pengetahuan umum dikalangan anggauta, menudju terlaksananya tiap-tiap penduduk dapat membatja dan menulis; menudju terlaksananya tata tertib dan keamanan, membantu Pemerintah guna pembangunan masjarakat dan penjempurnaan segala usaha Negara" (Pasal 10 Keputusan Walikota Sudiro). Pada pasal 3 Keputusan Walikota

<sup>21</sup> *Majalah Kotapradja* 1954, hlm. 18–19.

<sup>22</sup> Soebagijo I.N., *Sudiro: Pejuang Tanpa Henti*, Jakarta: Gunung Agung, 1981: hlm.253.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Sudiro juga mengatur posisi kedua lembaga ini sebagai “... organisasi masyarakat, yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah, tetapi bukan tingkatan atau alat pemerintahan”.<sup>24</sup>

### C. INDONESIANISASI KEBUN PERCOBAAN BUAH-BUAHAN

Di awal zaman kemerdekaan, kebun percobaan buah-buahan mengalami reorientasi baru, dan hal ini menandakan adanya proses dekolonisasi dalam bidang ini. Sebenarnya sejak tahun 1945, implementasi reorientasi tersebut telah mulai dirintis, namun tidak dapat berjalan karena terhalang perang kemerdekaan.

“... Plan Kasimo yang dilahirkan pada tahun 1947 dan rentjana kerja Djawatan Pertanian Rakjat yang disimpulkan pada konperensi Djawatan di Madiun pada tahun 1948 untuk membangun pertanian dalam arti yang luas mengenai petani dan pertaniannya, kandas oleh karena aksi<sup>2</sup> politisionel Belanda ke 1 dan ke II.

Dari pihak Belanda pada tahun 1949 ditijptakan Plan Wicaksono yang lebih menitik-beratkan soal<sup>2</sup> teknis. Djuga plan ini tidak dapat dilaksanakan dengan lantjar.”<sup>25</sup>

Sejak tahun 1950, dekolonisasi Kebun Percobaan Pasar Minggu ditandai oleh proses berikut. Pertama, secara perlahan peran orang Indonesia meningkat, bahkan menjadi pimpinan puncak lembaga tersebut. Dari sudut pendidikan, sebagian besar tenaga orang Indonesia merupakan lulusan *Middelbare Landbouwschol* (sekolah menengah pertanian) di Bogor, dan hanya seorang yang berpendidikan sarjana pertanian lulusan perguruan tinggi di Negeri Belanda. Meski rata-rata merupakan lulusan pendidikan menengah pertanian, tetapi dari segi kemampuan teknis mereka dapat dikatakan sebagai orang yang benar-benar ahli. Moh. Mahfoedi misalnya, merupakan lulusan pendidikan menengah pertanian Belanda yang menguasai

---

<sup>24</sup> *Majalah Kotapradja* 1954, hlm. 18–19.

<sup>25</sup> Soebar Hadiwinoto, “Usaha<sup>2</sup> dan Langkah<sup>2</sup> Djaw. Pertanian Rakjat Selama 1945–1955”, dalam *Pertanian* No. 7 Tahun ke-6 1955, hlm. 2.

detail bibit buah-buahan, dan salah satu perintis Indonesianisasi kebun percobaan buah-buahan ini. Begitu pula dengan Harsono Hardjohutomo, yang kelak menjadi pimpinan Pusat Jawatan Pertanian Rakyat Bagian Teknologi Makanan.<sup>26</sup>

Majalah *Pertanian* edisi 1952 (halaman 88–94) menggambarkan Harsono sebagai peneliti teknologi makanan yang tekun dan memiliki prestasi besar dalam bidang ini. Harsono berhasil mempublikasikan hasil temuannya yang berjudul “ubi djalar sebagai makanan utama”. Penelitian ini merupakan perintah Sekretaris Jenderal Kementarian Pertanian, dan Harsono mengerjakan riset ini “... dengan semangat jang besar, [dan]... mentjurahkan segenap tenaga dan fikirannya terhadap perintah jang penting itu...”. Padahal ruang kerjanya hanyalah bekas dapur dengan luas 3x4 meter, dan alat paling modern hanya satu mikroskop biasa. Atas prestasinya itu, tatkala Jawatan Pertanian mampu membangun laboratorium yang lebih modern, kepala jawatan Pasar Minggu menyerahkannya kepada Harsono berdasarkan surat tertanggal 25 November 1953 bernomor 6660/112/um.

Harsono merupakan tipikal aset sumber daya manusia cemerlang pada era awal kemerdekaan yang mampu merambah reputasi keilmuan di tingkat internasional. Beberapa hasil risetnya dipublikasikan dalam temu ilmiah tingkat internasional. Tercatat misalnya, ia dua kali menjadi wakil resmi dalam konferensi internasional. Ia pernah menjadi wakil Indonesia dalam *Third Nutrition Conference* dari FAO dan WHO di Bandung pada bulan Juni 1953. Penunjukannya itu bahkan dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 106 tertanggal 12 Juni 1953. Ia juga menjadi wakil Indonesia dalam sidang *Indo Pasific Fisheries Council* pada Mei 1957 di Bandung. Dua kali melakukan studi komparatif di Australia dan Amerika Serikat atas perintah Perdana Menteri Republik Indonesia. Ketika berkunjung ke Amerika Serikat, ia memperoleh kesempatan

<sup>26</sup> Lihat *Pandji Pustaka* No. 38 Tahun ke-5 1927, hlm. 610–623; *Pertanian* No. 4 Tahun ke-7 1951, hlm. 12–19; Wawancara dengan Ibu Nani, pensiunan peneliti Lembaga Hortikultura Pasar Minggu, 4 November 2005.

an untuk melakukan riset penurunan titik membeku dan minyak kelapa di Universitas Georgia di bawah bimbingan Prof. Banwat. Sementara, tiga orang asisten Harsono di laboratorium teknologi pangan, yakni Soemartono, Poernomo, dan Santoso, dikirim belajar di Universitas Teknologi Sidney Australia selama tiga tahun dengan beasiswa dari Colombo Plan.

Dengan prestasi yang sangat baik ini, wajar bila banyak pihak yang berkunjung ke Pasar Minggu. Banyak kolega peneliti teknologi pangan yang berkunjung ke lembaga ini, seperti dari Jerman dan Amerika Serikat. Staf pemerintah daerah, siswa sekolah menengah, dan mahasiswa pertanian dari Universitas Gajah Mada banyak yang berpraktik lapangan di Pasar Minggu. Begitu pula, peneliti Pasar Minggu banyak pula yang diminta mengajar teknologi makanan di lembaga pendidikan bergengsi dalam negeri.

Kedua, orientasinya pun bergeser. Pada era Hindia Belanda, tujuan pengembangan buah-buahan ialah menjadikannya komoditas untuk ekspor atau pasar dalam negeri. Upaya memajukan pribumi relatif diabaikan. Pada era kemerdekaan, orientasi yang disebut terakhir menguat. Kata rakyat yang disandingkan sebagai predikat pusat penelitian di Pasar Minggu menjadi simbol era baru, dan menyiratkan suatu orientasi yang kuat terhadap tujuan kemerdekaan, sekurang-kurangnya pada tingkat simbolis. Dalam bahasa memaor Camat Pasar Minggu, Puradianata “Kecamatan Pasar Minggu adalah daerah yang dikenal masyarakat, daerah buah-buahan dan juga Pasar Minggu sebagai daerah kunjungan rakyat dari Jakarta karena di dalamnya ada Kebon Pertanian Rakyat, ..., dan Sekolah Lembaga Makanan Rakyat”.<sup>27</sup>

Kuatnya orientasi kerakyatan ini dapat diacu pada Kesimpulan Konferensi Pertanian 28 April–3 Mei 1954.

“Sebagai diketahui, mentaliteit rakjat tani sesudah perang telah berobah sama sekali. Djikalau mereka itu dahulu sukar dige-rakan auto-activiteitnja, sekarang mereka berdjiwa dinamis dan menundjukan kegiatan kesegala djurusan, untuk memperbaiki

---

<sup>27</sup> *Majalah Kotapradja* 1953, hlm. 35.

nasibnja. ...[M]aka rentjana menambah produksi, akan lebih tjepat didjalankan ... [untuk] mencapai... tingkat kehidupan jang lajak menurut ukuran ... Indonesia jang tinggi. Hal ini mungkin, karena dengan perubahan mentaliteit tadi, dapat dimobilisir dan dilaksanakan semua pengalaman dan pengetahuan jang telah ada, sedang sumber<sup>2</sup> kemungkinan baru berupa pengalaman negeri<sup>2</sup> jang telah maju dapat pula dipergunakan. Agar tertjapai semuanya itu, diperlukan adanya pimpinan jang tegas, plan jang rapi, dan penjelenggaraan jang systematis. Perlu ditegaskan bahwa rakjat jang harus melaksanakan kemadjuannya sendiri. Pemerintah hanja memimpin dan membantu sekedarnja. ... Usaha pertanian ... berarti usaha jang membawa pendapatan jang tinggi pula bagi petani... jang membawa manfa'at kepada negara umumnja dan kepada masjarakat tani khususnja".<sup>28</sup>

Kinerja pegawai Jawatan Pertanian juga memperoleh arah baru:

"Djikalau dalam zaman dahulu pegawai-pegawai bekerdja sebagai setengah otomatis sadja, sekarang didalam kemerdekaan harus merubah sikapnja itu dan ikut bertanggung djawab atas pekerdjaan jang dipertjajakan kepada mereka. Setiap orang hendaknja ikut mendajung-perahu kepantai tudjuan, supaja dengan demikian dapat ditjapai maksud kita bersama itu.

Lain dari pada itu, djikalau kita hanja berhadapan dengan golongan tersendiri-sendiri atau golongan-golongan jang ketijil. (Misalnja *kleinlandbouwers*), kini soalnya sangat berlainan, sekarang jang dihadapi ialah kebun buah-buahan sadja, sekarang kita harus berhubungan dengan seluruh rakjat jang berjumlah 70 djuta itu. Umpamanja dalam soal konserven, dahulu kita berhadapan dengan beberapa pabrik sadja, kini perhatian harus ditudjukan kepada tjara penjelenggaraan pasar dan soal lain-lainnja dari beratus-ratus pengawetan dari rakjat seluruhnja. Teranglah kiranja betapa luas pekerdjaan jang dibebankan kepada Perkebunan Rakjat itu".<sup>29</sup>

Ketiga, struktur Jawatan Pertanian Rakyat di Pasar Minggu disesuaikan dengan orientasi barunya di atas. Ruang lingkup kerja kebun percobaan ini ditingkatkan. Wilayah kerjanya bersifat nasional.

<sup>28</sup> AJ Siswosoebroto, "Kesimpulan dari Konperensi Dinas Kementrian Pertanian pada Tanggal 28 April s.d 3 Mei 1954 di Djakarta", dalam *Pertanian*, 1954, hlm. 23. Lihat juga *Pertanian* No. 11 Tahun ke-9 1958, hlm. 53-63.

<sup>29</sup> *Pertanian* No. 3 Tahun ke-7 1951, hlm. 2.

Karena itu, kantor pusat lembaga ini dipindahkan dari Bogor ke Pasar Minggu pada Tahun 1951 takala dipimpin oleh Trisumunandar. Secara lebih spesifik, Mahfoedi<sup>30</sup> dalam satu artikelnya yang berjudul *Pekerdjaan di Balai Penyelidikan Perkebunan* ditujukan untuk perbaikan penanaman pekarangan. Orientasi ini berdasarkan kenyataan bahwa sebagian besar perkebunan buah-buahan di Indonesia dilakukan di pekarangan. Jadi, penyelidikan tersebut diarahkan untuk:

“... [P]erbaikan dan perluasan matjamnja tanaman daerah-daerah kering dan untuk daerah-daerah pegunungan jang tak begitu banjak memberi kemungkinan bagi penanaman pekarangan. Selanjutnja dibutuhkan pula tjara<sup>2</sup> memperbanjak jang tak begitu mahal. Untuk pekarangan perdagangan dapatlah sjarat-sjaratnya dipertinggi. Salah satu usaha ke arah itu jang sekarang masih diselidiki ialah perbanjakan djeruk siem dan mangga dengan bidji dan tjara-tjara okulasi jang memungkinkan okulasi-okulasi itu lebih lekas dapat dijual”.<sup>31</sup>

Dalam kaitan ini, kebun buah-buahan milik pemerintah yang tersebar di pelbagai tempat dalam wilayah Pasar Minggu dirancang untuk mempertahankan koleksi tanaman perkebunan, sekaligus sebagai sarana untuk memperluas dan mencari jenis-jenis lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ada empat kebun Pasar Minggu yang digunakan untuk tujuan tadi. (1) Kebun Rawah Minyak digunakan untuk mengembangkan jambu biji dan pisang, (2) kebun Jatipadang untuk pengembangan kawinan jeruk (*taxopeus*), (3) kebun Ragunan untuk pengembangan jeruk besar, sawo, rambutan, macam-macam jeruk manis dan jeruk keprok, *grapefruits*, dan pelbagai pohon buah-buahan yang lain, dan (4) kebun Kampung Kandang untuk pengembangan alpukat.

Di samping itu, kebun-kebun buah-buahan di atas juga digunakan untuk mengembangkan jenis jeruk unggulan (lihat Tabel 5.4). Kebun-kebun tersebut juga dijadikan sebagai *pilot project* penggunaan

<sup>30</sup> Moh. Mahfoedi, “Pekerdjaan di Balai Penyelidikan Perkebunan”. Dalam *Pertanian* 4 (7), 1951, hlm. 12–19.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 15.

mesin-mesin dalam pengembangan kebun buah-buahan, serta inovasi teknik penanaman buah-buahan. Untuk menjalankan tugas itu, Jawatan Perkebunan Rakyat Pasar Minggu memiliki kelembagaan sebagaimana terlihat dalam Gambar 5.1.

Jawatan pertanian Rakyat Pasar Minggu juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan bertani, khususnya untuk para Mantri Pertanian, melalui berbagai bentuk pelatihan. Pelatihan ini tidak saja ditujukan bagi seluruh wilayah pinggiran Jakarta yang masih bercorak pedesaan, melainkan juga untuk seluruh Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan ini, pada tahun 1951 misalnya, telah diadakan pelatihan yang ke-4. Masing-masing provinsi mengirimkan empat tenaga penyuluh pertanian untuk dididik.<sup>32</sup> Tahun 1956, diselenggarakan kursus foto dan sinematografi selama tiga bulan. Kursus yang sama kembali diselenggarakan selama sebulan pada tahun 1957.<sup>33</sup> Pada 17 Oktober 1956 dibangun asrama dan pusat penyelenggaraan pelatihan yang dinamakan Pusat Latihan Perkebunan dan Kesejahteraan Keluarga. Dari momen peresmian gedung ini tertera informasi berikut:

**Tabel 5.4** Pengembangan Bibit Unggul Jeruk di Pasar Minggu

Kabun	Digunakan untuk
Kebun Jatipadang	Percobaan pangkal pohon dan jenis-jenis jeruk Pembangan teknik pemupukan jeruk siem
Kebun Tanjung Barat	Pengembangan dan penyelidikan jeruk siem, jeruk jepun, jeruk tejakula, dan jeruk kara.
Kebun Rawa Minyak	Tanaman macam-macam; pengembangan dan penyelidikan jeruk manis dan jeruk keprok
Kebun Ragunan	Penyelidikan dan pengembangan tanaman <i>marsh seedless</i>
Kebun Kampung Kandang	Tanaman jeruk siem dan jeruk besar

Diolah dari Mahfoedi, loc-cit., hlm. 16–18.

<sup>32</sup> *Majalah Kotapradja* No. 7–8, 30 Desember 1952, hlm. 8–13.

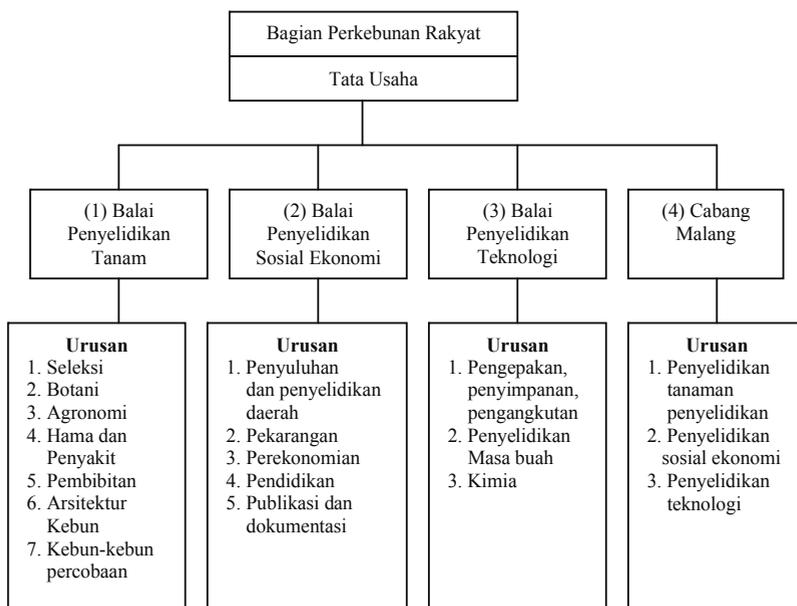
<sup>33</sup> Lihat *Pertanian* No. 11–12 Tahun ke-8 1957, hlm. 476–487.

“Pusat Latihan Perkebunan dan Kesedjahteraan Keluarga

Batu pertama diletakan pada tanggal 17  
Oktober 1956 oleh Nj. Gunung Iskandar.

Perentjana dan Penyelenggara  
FA. Taruma

Bagan Struktur Jawatan Perkebunan Rakyat Pasar Minggu



Keterangan:

1. Mempelajari segala sesuatu yang bersangkutan dengan tanaman buah-buahan, sayuran, bunga-bungan dan pemeliharaan lebah.
2. Memperbaiki situasi sosial ekonomi perkebunan rakyat, khususnya memberikan penerangan di sekitar cara-cara perkebunan modern.
3. Mempelajari teknologi dalam rangka meningkatkan perkebunan rakyat.
4. Mengkoordinir semua penyelidikan di pelbagai kebun percobaan di Jawa Timur (sebanyak 12 kebun).<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Diolah dari *Pertanian* No.10 Tahun ke-9 1958, hlm. 488; *Majalah Kotapradja* 15, 25 Maret 1952, hlm. 12; *Majalah Kotapradja* No. 8-9, 10 November 1951, hlm. 24-25.

Seringnya gedung Jawatan Pertanian Rakyat dijadikan tempat pelatihan di atas menandai upaya pejabat setempat untuk mengurangi dualisme fisik antara jawatan yang bercitra modern dengan masyarakat setempat. Sekurang-kurangnya terdapat tiga upaya untuk membentuk citra kerakyatan lembaga ini dalam proses dekolonisasi di Pasar Minggu. Pertama, pameran, kedua penjualan bibit buah-buahan, dan ketiga penyelenggaraan pelatihan yang khusus diperuntukan bagi pemuda-pemudi penduduk asli Kecamatan Pasar Minggu.

Pada dasawarsa 1950-an, beberapa kali diselenggarakan pameran pertanian, khususnya buah-buahan di areal kebun pertanian Pasar Minggu. Pada 8-10 Maret 1952 diselenggarakan pameran buah-buahan hasil kebun rakyat. Pada 25 Maret 1952 diselenggarakan kampanye penerangan pertama yang berisikan (1) segala macam buah-buahan hasil perkebunan rakyat tani, (2) segala macam sayur-sayuran, (3) segala macam bunga-bunga, (4) cara-cara dan hasil pengawetan dari hasil-hasil perkebunan dan pertanian, (5) alat-alat pertanian dan perkebunan dalam rangka modernisasi dan mekanisasi pertanian, (6) pameran obat-obatan kimia untuk pemberantasan penyakit dan pemberantas rumput-rumput, dan (7) pameran bahan-bahan dari dan untuk pekerjaan misalnya ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi perah, dan lain sebagainya. Seorang wartawan majalah kotapradja melaporkan pengamatannya dengan nada kagum: "... Di kebon Percobaan Pasar Minggu, terdapat ... pohon lebih pendek dan bercabang lebih rendah. Misalnya pohon-pohon rambutan yang sedang berbuah tampaknya seperti pohon yang masih muda".<sup>35</sup> Apresiasi senada juga diperlihatkan oleh Pek Hem Liang,<sup>36</sup> Husin,<sup>37</sup> dan Effendi,<sup>38</sup> tiga pelajar sekolah menengah

---

<sup>35</sup> *Majalah Kotapradja* No.15, 25 Maret 1952, hlm. 12.

<sup>36</sup> Pek Hem Liang, "Pertanian dan Pembangunan Negara", dalam *Pertanian* No.5 Tahun ke-6 1955, hlm. 2-3.

<sup>37</sup> Moh Husin, "Pertanian dan Pembangunan Negara". dalam *Pertanian* No.4 Tahun ke-6 1955, hlm. 2-3.

<sup>38</sup> Ziwar Effendi, "Kesan2 dari Pekan Pertanian Pasar Minggu". dalam *Pertanian* No.6 Tahun ke-6 1955, hlm. 2-4.

yang memenangkan lomba mengarang untuk memperingati Pekan Pertanian Pasar Minggu, Maret 1954.

Enam bulan sebelum pembukaan pekan pertanian di Pasar Minggu (Maret 1954) diadakan perlombaan merawat kebun dan perlombaan buah-buahan untuk petani setempat. Untuk perlombaan merawat kebun terdiri atas kebun yang belum menghasilkan buah dan kebun yang telah menghasilkan buah. Pemenang kategori pertama secara berurutan adalah petani yang berasal dari Kelurahan Pasar Minggu, Kelurahan Tanjung Barat, dan Kelurahan Pejaten, sedangkan pemenang kategori kedua berasal dari Kelurahan Cilandak, Kelurahan Tanjung Barat, dan Kelurahan Cilandak. Demikian pula perlombaan buah-buahan yang terdiri atas empat kategori, sebagian besar dimenangkan oleh petani dari Kecamatan Pasar Minggu bagian utara. Hanya untuk kategori jeruk dengan rawatan khusus, biaya besar, dan tanah subur dimenangkan petani selatan Pasar Minggu, yakni petani Jagakarsa. Hadiah bagi para pemenang diberikan oleh Ibu Hatta (istri wakil presiden).<sup>39</sup>

Kantor Perkebunan Rakyat Pasar Minggu pun secara sengaja menjual bibit hasil pengembangan mereka secara lebih murah—bersubsidi. Bahkan kantor ini pun menyediakan layanan pengiriman buah-buahan bila ada yang memesan. Bagan 2 (Lampiran) memperlihatkan adanya kenaikan harga bibit buah-buahan yang sebelumnya dijual di bawah harga produksi. Bagan 3 (Lampiran) memperlihatkan tata laksana pemesanan dan pengiriman bibit ke konsumen, dengan dilampiri daftar harga bibit buah-buahan terkait. Sedangkan bagan 4 (Lampiran) menunjukkan adanya ketentuannya istimewa untuk angkutan buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Kenaikan harga bibit buah-buahan diumumkan kembali di dalam Majalah *Pertanian* No. 6 Tahun 1954, halaman 27–30.<sup>40</sup> Sementara, informasi jarak bertanam dan pola ketinggian tanaman buah-buahan

---

<sup>39</sup> Lihat *Pertanian* No. 4 Tahun ke-4 1951, hlm. 1–7.

<sup>40</sup> Lihat juga *Pertanian* No. 9 Tahun ke-2 1954, sampul belakang; *Pertanian* No. 1 Tahun ke-1 1953, hlm. 3.

didiseminasikan dalam Majalah *Pertanian* No.6 Tahun 1958, halaman 307–309.

Kantor Perkebunan Rakyat pun menyediakan lahan untuk sarana pendidikan. Tanah perkebunan buah seluas 6.000 meter persegi milik lembaga pemerintah di Ragunan dihibakan untuk gedung Sekolah Rakyat pertama di wilayah Pasar Minggu. Gedung sekolah rakyat yang digali untuk pertama kali pada Agustus 1952 dan secara keseluruhan berbiaya Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kebetulan terletak di depan Kantor Perkebunan Rakyat. Sekolah rakyat ini memiliki 6 ruang, ditambah ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, kamar penjaga, dan sumber air. Setelah digunakan pada 4 Februari 1953, sejumlah 245 siswa Sekolah Rakyat Pejaten pindah ke gedung baru sehingga jumlahnya menjadi 633 siswa.<sup>41</sup>

Selain itu dalam rangka mengurangi kesenjangan warisan kolonial di atas, Kantor Perkebunan Rakyat juga menyelenggarakan kursus pertanian modern praktis bagi pemuda-pemudi Pasar Minggu yang dinamakan program Pondok Bakti. Program yang menggunakan sistem asrama ini bertumpu pada sistem pendidikan sepanjang hari. Program ini dirancang agar peserta didiknya memiliki keterampilan yang memadai untuk membantu pekerjaan sehari-hari orang tua mereka sehingga dapat meringankan beban orang tuanya.<sup>42</sup>]

---

<sup>41</sup> *Majalah Kotapradja* No. 10–11 1953, hlm. 22.

<sup>42</sup> Abdul Manap, “Pondok Bakti”, dalam *Pertanian* 6 (8), 1957a, hlm. 112–122.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

## BAB VI

# Era Jaya Buah-Buahan

“Pepaya, mangga, pisang, jambu  
Dibawa dari Pasar Minggu  
Di sini banyak penjualnya  
Di sana banyak pembelinya”  
(Bing Slamet 1962)

Penggalan syair lagu yang diciptakan oleh Bing Slamet pada tahun 1962 di atas, tidak lain merupakan rekaman sosial tentang jayanya Kecamatan Pasar Minggu sebagai penghasil buah-buahan, dan sampai saat ini pun masih dikenang sebagai nostalgia masa lalu oleh sebagian penduduk Jakarta, utamanya penduduk Kecamatan Pasar Minggu sendiri.<sup>1</sup> Bab ini menguraikan proses meluasnya pertanian buah era 1950–1966 di Kecamatan Pasar Minggu sebagai strategi peningkatan kesejahteraan sebagian besar petani akibat rusaknya sistem irigasi di sana. Pada sudut lain, proses tersebut menandai semakin menguatnya peran petani buah lokal dibandingkan perkebunan buah-buahan milik pemerintah. Gejala ini terkait dengan makin mengecilnya hasil perkebunan buah-buahan milik pemerintah, karena arealnya di selatan Pasar Minggu justru dijadikan markas Yon Zipur dan kompleks permukiman untuk satuan TNI Angkatan Darat ini.

---

<sup>1</sup> Tahun 1989, Kecamatan Pasar Minggu dipecah dua menjadi Kecamatan Pasar Minggu di bagian utara, dan Kecamatan Jagakarsa di bagian selatan. Dengan demikian, berakhirilah reputasi Pasar Minggu sebagai salah satu kecamatan terluas di Jakarta sebelum dimekarkan. Lihat Abdul Aziz, *Pengusuran Mengakibatkan Terjadinya Migrasi Lokal di Jakarta 1966–1977*. Skripsi Sarjana Sejarah, Depok, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2002.

Untuk sebagian, proses meluasnya pertanian buah difasilitasi oleh kebijakan modernisasi pertanian baik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pemerintah Kotapraja Jakarta maupun Kantor Perkebunan Rakyat Pasar Minggu. Suatu geliat sosial ekonomi pun tumbuh di sana dalam bingkai tata sosial masyarakat pinggiran Jakarta yang masih bercorak desa. Geliat tersebut terus berlanjut dan menemukan titik perubahan manakala Pasar Minggu dirancang sebagai tempat permukiman untuk penduduk Jakarta demi melayani kebutuhan pusat kota pada tahun 1970-an.

## A. STRUKTUR KEPENDUDUKAN PASAR MINGGU

Selama 19 tahun (1953–1972), jumlah penduduk Kecamatan Pasar Minggu hanya naik 2,35 lipat dengan kepadatan penduduk 12 per hektare menjadi 27 orang setiap hektarenya (lihat Tabel 6.1). Penduduk non-pribumi berjumlah 646 orang (1,4%) dari 48,029 jumlah penduduk yang tercatat secara resmi pada tahun 1953. Orang Cina menempati posisi terbanyak (0,9% atau 416 orang) dibandingkan dengan Orang Arab (225 atau 0,5%), apalagi dengan Orang Eropa (5 orang atau 0,01%). Keberadaan Orang Cina tersebut, menandakan bahwa dinamika perdagangan lokal cukup hidup di Kecamatan Pasar Minggu, meski wilayah ini masih berkategori pedesaan. Akan tetapi, akibat pembatasan kegiatan usaha orang Cina di tingkat lokal tahun 1959, proporsi penduduk Cina menurun menjadi 0,3% (235 orang) pada tahun 1961. Kekosongan tersebut rupanya diisi oleh orang India dan Pakistan dan juga orang Arab, yang pada tahun itu masing-masing berjumlah 6 orang (0,008%) dan 13 orang (0,02%).<sup>2</sup>

Tahun 1961, 85,3% (62,032 jiwa) penduduk Pasar Minggu adalah orang Betawi atau penduduk asli.<sup>3</sup> Proporsi penduduk asli

---

<sup>2</sup> *Majalah Kotapraja* No. 6 1959; Sensus Penduduk Oktober 1961, Tabel 8 dan 9.

<sup>3</sup> Indikasi lain untuk menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Pasar Minggu adalah Betawi adalah dengan melihat komposisi agama seperti tertera dalam Sensus Penduduk Oktober 1961, Tabel 13. Non muslim—yang tentu saja bukan penduduk asli atau Betawi Pinggir—berjumlah 2,5%, terdiri atas 1,1% (813) beragama Budha/Hindu,

di Pasar Minggu ini relatif lebih banyak daripada Kecamatan Pulo Gadung (81,9%), Kecamatan Pasar Rebo (78,5%), Kecamatan Mampang Prapatan (76,2%), apalagi dengan Kecamatan Kebayoran Lama (78,5%). Hanya Kecamatan Cengkareng (88,6%), Kecamatan Pulau Seribu (86,9%), dan Kecamatan Kebon Jeruk (96,2%) yang proporsi penduduk aslinya melebihi Kecamatan Pasar Minggu, 14,7% lainnya adalah pendatang. Jadi, dibandingkan dengan wilayah pinggiran lainnya, tingkat migrasi masuk ke Pasar Minggu dapat dikatakan sedang. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan wilayah pusat kota seperti Sawah Besar (44,8%), Matraman (48,9%), Salemba (47,1%), dan Senen (48,1%), migrasi masuk ke Pasar Minggu jauh lebih sedikit.<sup>4</sup>

**Tabel 6.1** Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Pasar Minggu 1953–1972

Tahun	Jumlah	Kepadatan/hektare
1953	48.029	12
1959	62.596	15
1961	72.693	18
1970	106.639	26
1972	112.817	27

Luas Pasar Minggu 41,56 km<sup>2</sup>

Diolah dari Majalah Kotapradja No. 6 1959; Sensus Penduduk Djakarta Raja Oktober 1961; Jakarta dalam Angka 1970, hlm. 10; dan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, Jakarta Membangun, hlm. 65.

Sebagian migrasi masuk ke Pasar Minggu tersebut terkait dengan adanya penggusuran di wilayah lain, baik ketika digusurnya penduduk asli untuk kota satelit Kebayoran maupun karena adanya penggusuran untuk proyek-proyek pembangunan mercusuar (seperti pembangunan kompleks olahraga Senayan dan pembangunan jalan di bilangan Kuningan dan Sudirman).<sup>5</sup> Harian *Merdeka* 11 Januari

0,5 (391) Protestan, 0,5% (351) beragama Katolik, dan 0,4 (275) tidak diketahui. Sementara, penduduk Pasar Minggu yang beragama Islam sebesar 97,5% (70,863).

<sup>4</sup> Sensus Penduduk Oktober 1961, Tabel 19 dan 20.

<sup>5</sup> Farabi Fakhri, *Membayangkan Ibukota di Bawah Soekarno*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005; Siswantari, *Pembangunan Kota Baru Kebayoran sebagai Kawasan Pemukiman Penduduk*

1960—sebagaimana ditulis Gunawan<sup>6</sup>—melaporkan bahwa menurut kepala panitia pemindahan, yakni Letnan Kolonel Aj Kusno dan Mayor Sutikno, sampai tahun 1960 sejumlah 940 keluarga atau 4,114 jiwa dipindahkan ke Pasar Minggu. Untuk sementara, mereka ditampung di kompleks penampungan yang secara darurat dibangun di wilayah ini. Pemindahan yang selesai Februari 1960 ini membutuhkan truk 40 buah setiap harinya. Dua puluh lima persen penduduk yang ditampung akan dipindahkan secara permanen ke lahan yang baru dibebaskan.

Dijumpai pula migrasi masuk-sukarela ke Pasar Minggu yang terkait dengan membaiknya infrastruktur transportasi. Jalan raya yang menghubungkan Pasar Minggu dengan pusat kota relatif baik untuk ukuran saat itu. Apalagi, Kecamatan Pasar Minggu pun terhubung oleh jalur kereta listrik

Keberadaan jaringan kereta listrik tersebut membuat areal sekitar stasiun Lenteng Agung dan perhentian Tanjung Barat menjadi strategis. Bahkan pada awal tahun 1960-an, telah bermukim para komuter di sekitar stasiun Lenteng Agung yang memilih tinggal di sana karena mudahnya akses transportasi kereta listrik. Posisi tempat tinggal mereka yang relatif strategis itu memudahkan mereka berkomutasi ke pusat kota untuk bekerja. Mereka berangkat untuk bekerja pada pagi hari dengan menggunakan kereta listrik. Pulang di sore hari juga menggunakan mode transportasi publik ini.<sup>7</sup>

---

(1948-1953). Depok: Skripsi Sarjana Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1989. Lihat juga Abdul Aziz, *op-cit.*, bab 3.

<sup>6</sup> Restu Gunawan, “Banjir di Tengah Kota: Konflik Negara dan Masyarakat dalam Penguasaan Lahan di Jakarta 1930–1970-an, makalah disampaikan dalam lokakarya hasil penelitian *Indonesia Across Orders: the Reorganization of Indonesian Society 1930–1960*, kerja sama antara Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) dan *Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie* (NIOD, Belanda), pada 28 Maret 2006 di Ciater Subang, hlm. 30.

<sup>7</sup> Soeboer Bhoedisantosa, “Djakarkarsa: Desa Kebun Buah-buahan Dekat Djakarta”. Dalam Koentjaraningrat (Penghimpun). *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*. Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1962, hlm. 97 dan 99.

Jumlah angkatan kerja (berusia 10 tahun ke atas) di Pasar Minggu pada tahun 1961 mencapai 50,9% atau 45,266 jiwa (sementara Jakarta 49,6%). Dari jumlah angkatan kerja sebanyak itu, 44,2% (20,101 dari 45,266) adalah angkatan kerja yang memiliki pekerjaan (lihat Tabel 6.2). Dengan kata lain, meluasnya pertanian buah di Pasar Minggu relatif mampu menyerap jumlah angkatan kerja yang tengah tumbuh. Baik temuan riset Bhoedisantosa<sup>8</sup> maupun hasil sensus 1961 menunjukkan bahwa sangat sedikit penduduk Kecamatan Pasar Minggu yang bekerja di sektor nonpertanian. Tabel 31 Sensus Penduduk DKI Jakarta Oktober 1961 misalnya, menyiratkan demikian, karena hanya 0,46% atau 210 penduduk Pasar Minggu yang hidup dari pensiun. Atau, hanya 52 rumah tangga dengan 530 anggotanya yang bekerja di sektor nonpertanian.<sup>9</sup> Dapat dipastikan bahwa mereka yang bekerja di sektor nonpertanian tadi adalah pendatang.

Kesimpulan ini bersesuaian dengan fakta bahwa proporsi jumlah kepemilikan ternak di Pasar Minggu adalah terbesar di Jakarta. Sensus Maret 1961 misalnya, mencatat bahwa penduduk Pasar Minggu memiliki 164 ternak besar, 2,860 sapi, dan 457 kerbau. Kepemilikan sapi dan itik ayam di Pasar Minggu kedua terbesar setelah Mampang Prapatan (5,022 ekor sapi) dan Kecamatan Matraman (37,918 ekor ayam-itik). Sementara tingkat kepemilikan kambing dan domba adalah terbesar untuk seluruh Jakarta.<sup>10</sup>

Sensus Oktober 1961 juga menginformasikan tingkat pendidikan angkatan kerja di Kecamatan Pasar Minggu. Sebanyak 60,1% (27,228) tidak bersekolah, 20,9% (9,462) sekolah rakyat tiga tahun, 14,3% (6,459) bersekolah rakyat 6 tahun, 3,3% (1,477)

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Dalam sensus Maret 1961 diungkapkan bahwa yang dimakud rumah tangga ialah “... satu atau beberapa orang yang mendiami bersama-sama seluruh bangunan atau sebagian saja dan pada umumnya makan bersama dari satu dapur”. Lihat Sensus Penduduk 1961 DKI Jakarta, Lampiran 1.

<sup>10</sup> Sensus Penduduk Maret 1961 DKI Jakarta, Tabel 5 Hasil Pendaftaran Rumah-Tangga.

**Tabel 6.2** Komposisi Umur Penduduk Kecamatan Pasar Minggu tahun 1961

Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
0-14	34.794	47,9
15-24	13.772	19,0
25-44	18.376	25,3
45-64	4.841	6,6
65 ke atas	889	1,2
Tidak diketahui	21	0,0
Jumlah	72.693	100

Diolah dari Sensus Penduduk 1961, Tabel 3

bersekolah lanjutan pertama, 0,9% (404) sekolah lanjutan atas, 0,2% (81) akademi dan perguruan tinggi, dan 0,3% (155) tidak diketahui.<sup>11</sup>

Sebagian besar angkatan kerja yang tidak bersekolah tersebut adalah penduduk asli atau orang Betawi. Jumlah sarana pendidikan dasar yang sangat terbatas dan kebutuhan yang tinggi untuk mempekerjakan anaknya agar membantu orang tuanya di lahan pertanian merupakan dua faktor yang membuat tingkat pendidikan penduduk asli Pasar Minggu tergolong rendah. Apresiasi yang rendah terhadap pendidikan model Barat ini juga terkait dengan tidak berfungsinya pendidikan sebagai sarana mobilitas vertikal bagi anak-anak Betawi pinggiran begitu mereka lulus. Mereka tetap saja menjadi petani buah karena pendidikan lanjutan terdekat hanya ada di Manggarai, lokasi yang cukup jauh—karena sarana transportasi yang buruk saat itu—sehingga membutuhkan biaya yang relatif besar.

Hanya terdapat dua sekolah dasar bermasa studi tiga tahun di wilayah Pasar Minggu pada saat penyerahan kedaulatan. Satu Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat yang didirikan di sekitar stasiun Lenteng Agung pada tahun 1924<sup>12</sup>, dan yang satu lagi terdapat di Ragunan yang berdiri pada tahun 1927. Gedung Sekolah Rakyat

<sup>11</sup> Sensus Penduduk Oktober 1961, Tabel 23.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 1 Oktober 2005.

Ragunan, misalnya, hanya memiliki tiga kelas, berdiri di atas tanah seluas 600m<sup>2</sup>, dengan tenaga pengajar berasal dari daerah Jawa Tengah dan Pasundan.<sup>13</sup>

Dapat dibayangkan betapa sedikitnya anak Betawi pinggiran yang mengenyam pendidikan dasar ini. Sebagai contoh, menurut catatan Partjinunianti, hanya terdapat 15–20 anak laki-laki Ragunan yang mengenyam pendidikan dasar di sekolah ini pada masa pendudukan Jepang, dan tidak ada seorang pun anak perempuan penduduk asli yang bersekolah.<sup>14</sup> Jumlah anak yang bersekolah dasar ini tentu jauh lebih sedikit bagi mereka yang tinggal di pelosok. Jarak antara rumah dengan Sekolah Rakyat ini begitu jauh untuk ditempuh dengan jalan kaki.

Pada umumnya, orang Betawi—termasuk Betawi pinggir—engggan menyekolahkan anaknya ke sekolah umum yang didirikan Belanda. Hal tersebut terkait dengan strategi mempertahankan identitas budaya mereka yang amat bertumpu pada nilai-nilai agama Islam. Meski sejak zaman VOC, pemerintah telah menanamkan sistem kolonial dengan intensif di wilayah pinggir Batavia, orang Betawi sekuat tenaga mempertahankan identitas kulturalnya itu agar tetap mandiri. Ibarat ikan tetap tidak asin meski berada di tengah lautan yang asin, mereka pun coba mempertahankan pola hidupnya agar tidak terinfiltrasi oleh gaya hidup Belanda. Mereka takut bila anaknya mengenyam pendidikan Belanda, meski hanya pendidikan dasar, moral dan perilaku mereka seperti orang Belanda yang justru dijauhi oleh budaya orang Betawi setempat yang amat lekat dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, mereka pun mengembangkan sistem pendidikan alternatif secara mandiri, yang kita kenal dengan madrasah. Pada lembaga pendidikan terakhir disebut inilah anak Betawi banyak bersekolah.

---

<sup>13</sup> Endang Partjinunianti, *Pola Sosialisasi Anak dalam Keluarga Orang Betawi di Desa Ragunan*. TESIS Pasca Sarjana Ilmu Sosial Universitas Indonesia. 1984, hlm. 62.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 64.

Mengenai pandangan tentang pendidikan yang didirikan Belanda, seorang tua penduduk Ragunan mengungkapkan nasihat pada anaknya, sebagaimana dikutip oleh Partjinunianti<sup>15</sup>.

“Entar kalu lu pada sekolah, lu dijadiin serdadu, terus lu dibawa ke tempat nyang jauh banget kagak bisa ketemu lagi ama emak, babe dan saudara-sudara lu.”

Selain hanya berjumlah dua, kondisi bangunan sekolah rakyat peninggalan zaman Belanda ini sangat buruk. Bahkan pada zaman Jepang, Sekolah Rakyat Ragunan sengaja dirobohkan. Akan tetapi, karena tidak adanya bahan bangunan yang layak, maka bangunan baru Sekolah Rakyat bermasa studi tiga tahun ini kondisinya lebih buruk lagi. Mengenai kondisi bangunan sekolah rakyat ini, Partjinunianti yang mengumpulkan data melalui wawancara penduduk Ragunan yang sudah tua menulis:

“Pada masa penjajahan Jepang, keadaannya [bangunan sekolah rakyat—Pen.] semakin parah,... Bahan bangunan yang digunakan sebagai pengganti bangunan terdahulu yang diruntuhkan, lebih buruk yang terdiri dari tiang bambu, dinding bilik dan beratap daun rumbia. Tidak ada sebuah pakupun dipergunakan untuk merekatkannya, kecuali hanya tali yang terbuat dari daun rumbia pula. Kondisi bangunan seperti ini makin lama makin tidak dapat menahan turunnya air hujan, bertiupnya angin dan panas teriknya matahari sehingga cepat rapuh dan dimakan rayap, dan tidak dapat menanggung keselamatan anak-anak yang ingin belajar di gedung sekolah tersebut. Melihat hal ini, atas pengakuan salah seorang..., ia bersama beberapa kawannya telah dengan sengaja merobohkan bangunan tersebut dan segera melaporkan perbuatannya kepada kepala sekolah pada waktu itu.”<sup>16</sup>

Pada tahun 1951, Sekolah Rakyat ini (yang sekarang menjadi Sekolah Dasar Negeri Ragunan) dibangun kembali. Tanah sekolah rakyat ini diperluas menjadi 3.000 m<sup>2</sup>, dan merupakan pemberian seorang pegawai departemen pertanian yang bernama Soenardjo.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 62–63.

Sambil menunggu bangunan sekolah selesai dipugar, para siswanya belajar di rumah-rumah penduduk yang khusus disewa untuk kepentingan ini. Pada 17 Agustus 1952, barulah gedung Sekolah Rakyat Ragunan ini dapat digunakan

Gedung Sekolah Rakyat yang lebih representatif, baru dibangun pada 4 Februari 1953 di Pejaten. Sekolah Rakyat ini terletak di depan kantor perkebunan Pasar Minggu, seluas 6.000 meter persegi. Sekolah rakyat ini memiliki enam ruang, ditambah ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, kamar penjaga, dan sumber air. Biaya untuk pembangunannya itu adalah Rp250.000, dan digali untuk pertama kali pada Agustus 1952. Setelah digunakan pada 4 Februari 1953, sejumlah 245 siswa Sekolah Rakyat Pejaten pindah ke gedung baru, sehingga jumlahnya menjadi 633 siswa.<sup>17</sup>

Sekalipun pada tahun 1953 wilayah Pasar Minggu baru memiliki tiga Sekolah Rakyat, tetapi pendidikan perintis telah didirikan sebelum tahun itu. Sejumlah 16 buah sekolah perintis dibangun di wilayah Pasar Minggu dan mampu menampung 870 murid. Tetap saja minat pendidikan di kalangan remaja Pasar Minggu pada tahun 1953 relatif rendah. Dari peserta kegiatan pendidikan yang diikuti oleh 500 anak didik, hanya 39 orang yang memperoleh ijazah.<sup>18</sup>

Lagi-lagi minat bersekolah yang rendah terkait dengan fakta sangat dibutuhkannya anak-anak usia sekolah mereka untuk membantu mengolah dan merawat kebun buah milik orang tuanya. Lagi pula tidak ada harapan mobilitas vertikal bila anak mereka lulus sekolah tiga tahun, dari kelas satu hingga kelas tiga ini. Bila ingin melanjutkan pendidikan dasar, mereka harus bersekolah di Manggarai, tempat paling dekat dari Ragunan, dan itu artinya membutuhkan uang kontan yang cukup besar.

Riwayat hidup Pak Maan kiranya dapat menjadi ilustrasi betapa terdapatnya pelbagai faktor sosial ekonomi bahkan budaya yang

---

<sup>17</sup> *Majalah Kotapradja* No. 10–11, 15 Pebruari 1953, hlm. 22.

<sup>18</sup> *Majalah Kotapradja* No. 1 Tahun ke-3 1952, hlm. 19 dan *Majalah Kotapradja* No. 10–11 1953, hlm. 22.

membuat rata-rata petani buah Pasar Minggu berpendidikan rendah. Sejak usia remaja, Pak Maan diwajibkan membantu orang tua dan paman-pamannya untuk mengolah kebun buah, memetik buah ketika panen, dan membantu memikulnya untuk dipasarkan ke pasar buah-buahan di areal stasiun Pasar Minggu. Begitu sibuknya, sehingga Maan remaja tak sempat mengenyam pendidikan sekalipun pendidikan dasar. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan petani buah Pasar Minggu juga terkait dengan anggapan para orang tua mereka—sebagaimana dituturkan oleh Pak Maan—bahwa sekolah itu hanya menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga saja. Dalam benak para orang tua, tenaga anak-anak akan jauh lebih bermanfaat bila seluruh waktunya digunakan untuk membantu pekerjaan di kebun buah.<sup>19</sup>

Dengan demikian, tampak sekolah tidak memainkan fungsi sebagai pengalih mata pencaharian antara orang tua dan anaknya. Rata-rata mata pencaharian atau pekerjaan sang anak adalah warisan para orang tuanya. Sebagai petani buah misalnya, tidak saja sang anak diwariskan sebidang tanah untuk menjalankan profesinya itu, tetapi keterampilan bertani buah sesungguhnya juga ditransmisikan melalui keluarga oleh para orang tuanya masing-masing. Dalam situasi seperti ini, bersekolah tidak memiliki fungsi secara sosial, sebagai pengalih mata pencaharian. Mobilitas vertikal hanya dapat dilakukan bila si anak dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ke Manggarai atau ke kota, suatu kemampuan sosial ekonomi yang sangat jarang dimiliki oleh penduduk Pasar Minggu saat itu. Dapat dipahami bila apresiasi petani buah Pasar Minggu pada tahun 1950 hingga 1960-an hanya menempatkan bersekolah sebagai pelengkap keterampilan bertani buah. Bersekolah berarti hanya membutuhkan keterampilan membaca dan menulis huruf latin serta berhitung, suatu keterampilan modern yang memang dibutuhkan dalam bertani buah apalagi bila menjadi pedagang dalam bidang buah-buahan.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pak Maan, 27 Agustus 2005.

Dapat dipahami bila dijumpai statistik bahwa meski angkatan kerja yang tidak bersekolah mencapai 27,228, tetapi 77,8% (21,173) di antaranya dapat membaca huruf latin. Hanya 22,2% (6,055 saja) yang tidak dapat membaca. 53,6% (21,173) dari usia produktif di atas dapat membaca huruf latin, 68,9% (14,212) adalah laki-laki. Hanya 36,9% (6,961) perempuan yang pandai membaca.<sup>20</sup>

Tampak jelas bahwa bias gender amat nyata dalam memberikan kesempatan berpendidikan di dalam keluarga. Jumlah dua kali lipat laki-laki yang dapat membaca huruf latin daripada perempuan cukup memberikan bukti bahwa kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi anak laki-laki jauh lebih besar daripada anak perempuan. Bias gender juga sangat tampak dari kenyataan bahwa 32,7% (14,787) angkatan kerja perempuan berkulat di wilayah domestik, mengurus rumah tangga.<sup>21</sup> Bagi penduduk Betawi setempat, pembagian kerja antara angkatan kerja laki-laki dan perempuan cukup tegas. Anak laki-lakilah yang dipersiapkan menjadi petani buah, sementara anak perempuan dididik agar menjadi ibu rumah tangga yang baik, dalam rangka menopang pekerjaan calon suaminya kelak sebagai petani buah.

Anak perempuan di Ragunan misalnya, hanya diperbolehkan belajar mengaji. Keluar rumah adalah suatu hal yang tabu pada saat itu di Ragunan. Fokus sosialisasi anak perempuan pada saat itu ialah agar anak perempuannya itu mahir dalam segala macam pekerjaan rumah tangga, khususnya melalui pengajaran dari ibunya sendiri. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, anak perempuan pun tidak diperbolehkan berbelanja kebutuhan dapur. Berbelanja adalah urusan laki-laki, dan dianggap bagian dari proses pulang pasar (tatkala kepala keluarga tersebut menjual hasil kebunnya ke pasar).<sup>22</sup>

Walaupun pola sosialisasi anak perempuan ditujukan sebagai penopang pekerjaan calon suaminya kelak (khususnya sebagai petani

---

<sup>20</sup> Sensus Penduduk Oktober 1961, Tabel 29.

<sup>21</sup> Sensus Penduduk Oktober 1961, Tabel 31

<sup>22</sup> Partjinunianti, *op-cit.* hlm. 63–64.

buah), data peserta pendidikan dasar hasil Sensus 1961 menunjukkan gejala meningkat. Dari 9,319 anak usia sekolah (7–13 tahun) yang mengikuti pendidikan dasar atau Sekolah Rakyat, 61,4% (4,274 jiwa) adalah anak-anak perempuan. Sementara, 70,9% (5,045) adalah anak laki-laki.<sup>23</sup> Data ini memperlihatkan bahwa kesempatan mengenyam pendidikan dasar bagi anak perempuan jauh lebih meningkat.

## B. MELUASNYA PERTANIAN BUAH

Meluasnya pertanian buah dapat dilihat sebagai strategi bertahan hidup (*survive*) petani setempat akibat rusaknya sistem irigasi lokal (lihat kembali bab empat), dan faktor lainnya seperti serangan hama epidemik terhadap padi di wilayah selatan Kecamatan Pasar Minggu pada tahun 1950-an.<sup>24</sup> Mereka pun mudah mempraktikkan sistem pertanian buah karena difasilitasi oleh adanya teladan hidup, baik dari para petani buah di utara Pasar Minggu yang telah melakukan komersialisasi buah-buahan sejak awal abad ke-20, teladan hidup yang dilakukan oleh Kebun Percobaan dan Kantor Perkebunan Rakyat Pasar Minggu, maupun teladan hidup petani buah di Desa Jagakarsa dan Desa Tanjung Barat (dua desa yang hampir seluruh penduduknya bermata pencaharian petani buah).

---

<sup>23</sup> Sensus Penduduk Oktober 1961, Tabel 26

<sup>24</sup> Lihat Emiria Sirman, *Perubahan Mata Pencabarian Petani Buah-buahan akibat Pembangunan STTN di Kampung Cimpedak Kelurahan Srengseng Sawah*. Jakarta: Skripsi Sarjana Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1986, tidak dipublikasikan. Lihat juga Afandi, *Perkampungan Budaya Betawi sebagai Representasi Identitas Kebetanian*. Depok: Tesis Magister Program Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005. Bila meminjam gagasan Berger dan Thomas Luckmann, sesungguhnya alih jenis pertanian ini sebagai salah satu strategi bertahan hidup ini dituntun oleh sistem pengetahuan sehari-hari yang berfungsi bagaikan resep praktis untuk keluar dari kesulitan hidup. Struktur pengetahuan praktis kepetanian tersebut menyediakan spektrum pilihan bertindak agar petani setempat dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan hidupnya. Lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books, 1966, hlm. 19–34. Lihat juga James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1981.

Dengan pelbagai bentuk teladan hidup di atas, struktur pengetahuan petani buah dengan mudah menyebar. Struktur pengetahuan di atas berkisar tentang jenis buah-buahan yang laku dijual dan mudah dipelihara, dan jenis buah-buahan yang kurang laku dijual, harganya murah, dan sulit pula dipelihara. Struktur pengetahuan itu juga menyediakan teknik bertani buah konvensional, kemahiran bertani tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi yang kadangkala dibumbui oleh penetrasi sistem bertani modern. Ia juga menyediakan teknik menjual buah-buahan di pasar, bahkan teknik menjual buah langsung ke konsumen sebagai pedagang buah keliling, di samping berisikan standar harga menetapkan penjualan buah yang selalu mengacu kepada harga beras (*barga bijang*).<sup>25</sup>

Bila dianggap Desa Jagakarsa relatif dapat mewakili pola kepemilikan tanah di Kecamatan Pasar Minggu pada tahun 1960-an, kiranya temuan Bhoedisantosa dapat dijadikan acuan untuk memperkirakan struktur kepemilikan lahan di wilayah ini. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar petani di Pasar Minggu berlahan di bawah satu hektare, dan lebih besar lagi petani buah yang berlahan di bawah seperempat hektar.<sup>26</sup> Meski sejumlah besar petani menggarap komoditas buah-buahan tersebut di lahan yang terbatas, namun menurut perhitungan Boedhisantosa, upaya tersebut memberikan penghasilan lebih banyak daripada ditanami padi-sawah. Oleh karena penghasilannya yang meningkat tersebut, gejala pembelian tanah oleh petani setempat relatif banyak dan merupakan proses

---

<sup>25</sup> Boedhisantosa, *op-cit.*, hlm. 99.

<sup>26</sup> Dari sejumlah 851 petani pemilik Desa Jakagakasa yang diteliti oleh Bhoedisantosa pada tahun 1960, 61,9% (527 orang) adalah petani buah yang memiliki luas tanah di bawah 1 ha. Mereka ini terdiri atas petani buah berlahan di bawah seperempat hektar (35,6% atau 303 orang), dan petani berlahan di bawah setengah hektare (26,3% atau 224 orang). Selebihnya (38,1%) adalah petani buah berlahan di atas satu hektare. Mereka terdiri atas petani berlahan 1 ha (21,7% atau sejumlah 185 orang), berlahan kurang lebih 2 ha (12,1% atau 103 petani), petani berlahan 3 ha (27 orang atau 3,17%), dan hanya 9 (1,1%) petani yang memiliki tanah lebih dari 3 ha. Lihat Boedhisantosa, *Ibid.*, hlm. 98.

akumulasi kekayaan untuk menambah luas lahan yang telah mereka peroleh dari para orang tua mereka.

Akibat pembelian tanah yang bertahap di atas, pola kepemilikan tanah di Pasar Minggu bersifat menyebar. Biasanya para petani buah memiliki petak tanah yang satu dengan lainnya berjauhan. Petani berlahan sempit dan petani tak bertanah pada umumnya bekerja untuk petani lain yang memiliki lahan luas. Untuk mencukupi penghasilan mereka, ada juga di antara mereka yang menjadi pedagang buah di pasar-pasar Kota Jakarta. Bhoedisantosa bahkan menjumpai fenomena pembelian tanah di Jagakarsa oleh orang Jakarta pada tahun 1960.<sup>27</sup>

Seperti halnya di Desa Jagakarsa, pada umumnya pola pengolahan tanaman buah petani Kecamatan Pasar Minggu bersifat konvensional dan sederhana. Mereka menggunakan cangkul untuk membalikan dan menggemburkan tanah, serta belincong dan linggis untuk menggali tanah yang kering dan keras. Penyuburan tanah dilakukan dengan menggunakan pupuk kandang atau sampah tumbuhan yang telah dibusukan. Petani buah Pasar Minggu sangat jarang menggunakan pupuk buatan-modern. Di samping harganya mahal, pupuk jenis ini sulit diperoleh.

Petani buah Pasar Minggu membagi buah-buahan dalam dua kategori. Pertama, buah-buahan yang laku dijual, harganya relatif tinggi, dan mudah merawatnya. Pepaya (*gracia papaya*), jambu batu (*psidium guajava*), rambutan (*mephelium lappaceum*), durian (*zibethinus*), dan kedondong (*spondias dulcis*) merupakan tipe buah yang pertama. Kedua, adalah buah-buahan yang dianggap sebagai penghasilan tambahan dan karena itu kurang sekali diperhatikan dan dirawat.

“... mangga kebembem (*Mangifera odorata*) jang banjak tumbuh setjara liar di-kebun<sup>2</sup>; nangka (*Artocarpus integra*) dengan buahnja jang dapat dibuat sajur<sup>2</sup> maupun dimasak sebagai buah jang lezat rasanja; nangka belanda atau sirsak (*Anona muricata*) dengan buahnja jang banyak didjual ke-pabrik<sup>2</sup> limun dikota; belimbing (*Averrhoa carambola*), manggis (*Carcimia mangostana*),

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 99.

duku (*Lansium domesticum*) dan duwet (*Eugenia cumini*) .... ada juga pohon buah<sup>2</sup>an jang kurang atau tidak disukai oleh para petani, jaitu pohon pisang (*Musa paradisiacal*), jang setiap kali berbuah harus ditebang dan memakan banjak tempat. Ada juga jang memelihara pohon salak (*Sallacca edulis*) tetapi tidak begitu banjak, sebab dianggap mengganggu pemandangan kebun jang memerlukan pengawasan; sedangkan sawo (*Manilbara kaniki*), tidak diperlihara baik, karena memetikny susah, sehingga membutuhkan tenaga khusus, padahal harga pasarannja tidak amat menguntungkan”.<sup>28</sup>

Di samping dipengaruhi oleh mekanisme penawaran, dan pengaruh fakta bahwa buah-buahan bukanlah kebutuhan primer dalam susunan makanan masyakat Indonesia, para petani buah-buahan di Pasar Minggu menetapkan harga buah-buahan dengan mengacu pada apa yang disebut sebagai *harga bijang*, mekanisme penetapan harga yang berpatokan kepada harga beras. Menurut Boedhisantosa, harga *bijang* inilah yang amat menentukan naikturunnya harga buah-buahan.<sup>29</sup>

Mekanisme penawaran dan permintaan, sungguhpun juga berpengaruh, tetapi tidaklah signifikan. Lantaran petani buah Pasar Minggu tidak memiliki sistem pengawetan buah agar tahan lama, maka tatkala panen, buah-buahan tersebut langsung dijualnya ke para tengkulak atau ke pasar agar tidak membusuk. Tentu saja banjirnya buah-buahan tersebut membuat harga buah menjadi turun. Sebaliknya, tatkala pasokan buah-buahan sedikit (masa sebelum dan sesudah penen atau pada waktu hasil panennya tidak banyak) harga buah-buahan relatif naik. Pada sisi lain, jumlah permintaan terhadap buah-buahan di pasar relatif tetap. Bukankah konsumsi buah-buahan tidak termasuk kebutuhan pokok dalam susunan makanan masyarakat Indonesia?<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>30</sup> Oey Sioe Tjoan, “Usaha untuk Memajukan Perkebunan Rakyat Dilihat dari Sudut Perdagangan”. dalam *Pertanian* No. 9 Tahun ke-9 1953, hlm. 24–28.

Rupanya bermata pencaharian sebagai petani buah, menuntut pola kerja yang keras dan disiplin waktu yang tinggi, apalagi bila yang bersangkutan membawa sendiri komoditas buah-buahnya itu ke pasar di Jakarta. Bagi para petani yang tidak menjual buah-buahnya sendiri ke pasar, kegiatan bertani dimulai pukul 8.00 pagi. Kegiatan tersebut diawali dengan mengolah tanah agar dapat ditanami pohon baru, memberi pupuk, membereskan tanaman, dan kadang kala juga memetik buah-buahan yang telah masak dan layak jual. Kegiatan tersebut berakhir menjelang sholat zuhur. Usai sholat dan makan siang, mereka segera menyiapkan buah-buahan yang telah dipetik itu agar layak jual, dilanjutkan beristirahat hingga pukul 15.00. Setelah sholat ashar, mereka kemudian kembali ke kebun untuk memetik buah-buahan yang telah masak, membereskannya dalam keranjang atau mengikatnya menurut konvensi sistem penjualan yang berlaku di tempat tersebut. Sebagian dari mereka bahkan menjualnya pada sore itu atau jauh malam kepada tengkulak desa yang biasanya telah berkeliling untuk membeli buah-buahan dari petani.<sup>31</sup>

Majalah *Kotapradja* memperkirakan bahwa Kewedanaan Kramat Jati (di mana Kecamatan Pasar Minggu berada) dan Keboyan memiliki kurang lebih 40.000 pohon mangga, 50.000 pohon nangka, 50.000 pohon jeruk, 3.000 pohon pepaya, 50.000 pohon jambu, dan 60.000 pohon rambutan.<sup>32</sup> Di antara buah-buahan yang masuk ke Jakarta melalui kereta api kurang lebih berjumlah 24 juta kg, 16 juta

<sup>31</sup> Boedhisantosa, *op-cit.*, hlm. 101; wawancara dengan Pak Maan, 27 Agustus 2005. Pola kerja keras tersebut terus berlanjut hingga para petani tidak dapat bertanam buah-buahan pada awal tahun 1990-an. Demikianlah tatkala Sirman, *Op. Cit.*, melakukan penelitian tentang pola aktivitas sehari-hari petani buah di Kampung Cipedak, pola kegiatan rutin yang digambarkan Bhoedisantosa di atas masih ia jumpai. Demikian pula, pola kegiatan sehari-hari yang relatif sama juga dijumpai oleh Susatyo ketika ia melakukan penelitian serupa di Condet. Lihat Didik Wedyo Susatyo, *Petani Buah: Suatu Kajian tentang Pola Penghasilan dan Pembelanjaan Petani Buah di Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur*, Depok: Skripsi Sarjana Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1989, hlm. 74–89. Pola kerja keras petani buah ini tertata menurut jadwal sholat lima waktu, dan hal tersebut dapat menepis anggapan negatif selama ini bahkan stereotip jelek bahwa orang Betawi adalah pemalas.

<sup>32</sup> *Majalah Kotapradja* No. 16 1952, hlm. 8.

kg di antaranya dipasok dari Kabayoran dan Kramat jati. Perhitungan pasokan dari dua sentra buah-buah-buahan hanya yang dihitung lewat jalur transportasi kereta api. Tentu saja pada tingkat kenyataan, jumlah ini jauh lebih besar. Karena, sejumlah tertentu buah-buahan dari Kewedanaan Kabayoran dan Kewedanaan Kramat Jati dikirim ke pusat kota melalui truk, sepeda, delman, dan gerobak.

*Kotapradja* pun mengkalkulasikan menaikinya kebutuhan buah yang terkait dengan peningkatan jumlah penduduk Jakarta. Tatkala penduduk Jakarta masih berjumlah 350.000 jiwa, ia membutuhkan pasokan buah-buahan sebanyak 27 juta kg pertahunnya. Jadi, secara perorangan setiap orang mengonsumsi satu kilogram buah-buahan. Pada tahun 1952, tatkala penduduk Jakarta telah mencapai 2,5 juta jiwa, tentu konsumsi buah-buahan lebih banyak lagi.<sup>33</sup> Pada sisi lain, produksi buah-buahan di wilayah selatan Jakarta tersendat-sendat. Kurang terpeliharanya pohon buah-buahan dan banyaknya pohon buah-buahan yang ditebang di zaman Jepang ditenggarai sebagai faktor yang mengurangi jumlah produksinya. Di samping itu, tatkala areal seluas 800 ha di Kebayoran dikonversi untuk perumahan, diperkirakan 28.000 pohon yang mampu menghasilkan 15 ton setahunnya juga musnah.

Sumber nafkah yang lain yang dominan di Kecamatan Pasar Minggu adalah industri susu. Pasar Minggu berfungsi sebagai pemasok sebagian kebutuhan susu penduduk Jakarta, selain Kecamatan Mampang Prapatan (sekitar 2.000 liter susu dikirim ke pusat kota dari Mampang Prapatan). Secara keseluruhan, industri susu sapi

<sup>33</sup> Argumentasi yang dikembangkan oleh penulis artikel ini tampaknya hanya bertumpu semata pada perhitungan demografis. Boleh jadi, jumlah 350.000 penduduk Batavia memang membutuhkan 27 juta kg buah-buahan pertahun. Tetapi belum tentu 2,5 juta penduduk Jakarta (pasca kemerdekaan) membutuhkan berapa kali lipat secara logik dari konsumsi awal tadi. Analisis ini tidak memperhitungkan daya beli dan pola makan konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa orang Belanda mengonsumsi buah-buahan sebagai bagian integral dari pola makannya. Sementara, buah-buahan hanya tambahan dalam struktur makanan orang Indonesia. Karena itu, dapat diperkirakan bahwa meski jumlah konsumsi buah-buahan relatif membesar, tetapi tidak sebesar seperti yang digambarkan penulis artikel dalam Majalah *Kotapradja* tersebut. Lihat *Majalah Kotapradja* No. 16 1952, hlm. 8.

rakyat ini memasok tiga juta liter susu, dari lima juta liter konsumsi susu yang dibutuhkan penduduk Jakarta pada tahun 1952. Tabel 6.3 dan 6.4 di bawah menunjukkan pasokan susu sapi perah dari pihak orang Indonesia terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi susu sapi di Jakarta.<sup>34</sup>

Menurut laporan Majalah *Kotapradja*, standar kehidupan pengusaha susu di Pasar Minggu relatif makmur. Sembari memperoleh pendapatan dari susu yang mereka jual ke pusat kota secara sederhana dengan menggunakan kaleng-kaleng bekas minyak tanah dan botol-botol bekas bir, kotoran sapi digunakan pula untuk mempersubur kebun buah-buahan milik pengusaha susu tersebut. Ternyata, sistem pemeliharaan sapi juga dipersepsi sebagai simpanan atau tabungan. Sapi merupakan bentuk tabungan terbaik pada tahun 1950-an, mengingat kala itu wilayah Kecamatan Pasar Minggu bukanlah daerah aman.<sup>35</sup>



Sumber: *Majalah Mingguan Djaja* 1960, sampul belakang.

**Gambar 6.1** Petani buah sedang menunggu kereta di Stasiun Pasar Minggu untuk dipasarkan ke Jakarta tahun 1960.

<sup>34</sup> *Majalah Kotapradja* No.1 Tahun ke-3 1952, hlm. 6 dan *Majalah Kotapradja* No.19–20 1952, hlm. 30.

<sup>35</sup> *Majalah Kotapradja* No.1 Tahun ke-3 1952, hlm. 6.

**Tabel 6.3** Jumlah Perusahaan Susu di Jakarta dan sekitarnya 1925–1950

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sapi	Hasil Susu Setiap Hari (lt)	Pasokan dari Bandung, Bogor, dan Sukabumi/ dalam sehari (lt)
1925	52	830	-	-
1929	85	1.231	-	-
1934	100	1.647	+-4.370	+500
1941	175	2.360	+-11.000	-
1949	200	2.530	+-7.722	-
1950	195	2.675	+-9.203	+800
1951	194	2.717	+-9.187	+2000

Diolah dari *Majalah Kotapradja* No.3 Tahun ke-3 1952, hlm. 16.

**Tabel 6.4** Kepemilikan Perusahaan Susu di Jakarta

Tahun	Eropa	Asia	Indonesia	Jumlah
1934	28	13	85	110
1941	-	23	147	175
1952	-	14	172	186

Diolah dari *Majalah Kotapradja* No.3 Tahun ke-3 1952, hlm. 16.

Bila penduduk Desa Jagakarsa beralih pekerjaan lantaran tiadanya pasokan air akibat hancurnya sistem irigasi lokal, maka proses alih pekerjaan bagi penduduk Kampung Cipadak lebih kompleks lagi. Sebagian petani Cipadak masih tetap bersawah-padi meski sistem irigasinya rusak (dikenal sebagai *sawah balong*). Tatkala terjadi serangan burung, tikus, dan hama lainnya secara epidemik pada pertengahan 1950-an, barulah para petani Kampung Cipadak secara serempak beralih menjadi petani buah. Sawah pun mereka ubah menjadi kebun buah. Untuk itu, mereka belajar segala hal yang berkaitan dengan sistem pengetahuan bertani buah kepada petani buah di Desa Jagakarsa dan Desa Tanjung Barat, yang terletak tidak jauh dari kampung mereka. Bibitnya pun mereka beli dengan harga murah dari Kebun Percobaan Pasar Minggu.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Emilia Sirman, *op-cit.*, hlm. 37–43.

Akhir tahun 1950-an, pasokan air lebih menyusut. Debit air danau Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong yang terletak selatan Pasar Minggu dan berfungsi menyimpan dan menyuplai air secara alamiah, menyusut tajam. Akibat berkurangnya debit air tersebut, sawah di bagian hilir menjadi kering. Menurut hasil wawancara dengan Pak Risin (November 2005) dan investigasi yang dilakukan oleh penduduk Setu Babakan<sup>37</sup>, perubahan fungsi alamiah kedua danau tersebut terkait dengan perluasan kantor dan permukiman tentara Zeni Angkatan Darat.

Keberadaan tentara Zeni Angkatan Darat atau penduduk setempat menyebutnya Yon Zipur ini merupakan upaya pemulihan ketertiban akibat merajelelanya gerombolan Banteng Merah dan para kriminal-jagoan sebelum tahun 1954. Banteng Merah adalah milisi lokal yang berintikan jawara setempat dan terbentuk pada masa perjuangan kemerdekaan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Cribb<sup>38</sup>, bahwa para jawara walaupun sering melakukan tindak kriminal merupakan salah satu pilar perjuangan kemerdekaan.<sup>39</sup> Tujuan Banteng Merah adalah menyediakan kebutuhan pangan bagi para anggotanya dengan cara mengambil harta penduduk lainnya yang terbilang berada.<sup>40</sup> Jadi, keresahan sosial di atas merupakan akibat tindak kriminal dan kekerasan Banteng Merah yang dilakukan secara terorganisir.

Usai gangguan Banteng Merah, para jawara-kriminal secara individual beraksi. Yang paling terkenal adalah jagoan Si Manyar, yang menurut Pak Risin (wawancara November 2005) dan Pak Maad (wawancara Oktober 2005), berasal dari Kampung Kalimati,

---

<sup>37</sup> *Prosiding Rembuk Warga Setu Babakan*, Bogor: Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Institut Pertanian Bogor, 2003.

<sup>38</sup> Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945–1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.

<sup>39</sup> Amurwani Dwi L., “Jago dan Jagoan di Simpang Jalan: Kriminalitas di Jakarta 1930-1960”, makalah dipresentasikan dalam *Lokakarya Hasil Penelitian Indonesia Across Orders: the Reorganization of Indonesian Society* di Padang, 3–5 Agustus 2005, hlm. 5–13.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 1 Oktober 2005.

Kelapa Dua (sekarang areal markas Brimob), yang dikenal sebagai kampungnya para maling. Penduduk Kecamatan Minggu bagian selatan tahu siapa para jagoan itu. Penduduk yang berpapasan dengan mereka akan serba salah. Bertanya kena tampar, tidak bertanya juga kena tampar. Sering kali peristiwa tersebut terjadi di kampungnya, bahkan di depan rumahnya sendiri.<sup>41</sup> November 1950, lembaga Desa Putera milik misionaris Protestan yang bergerak di bidang penyantunan anak terlantar dan terletak di Desa Srengseng, dirampok. Desa Putera menderita kerugian sebesar Rp20.000. Lebih dari itu, pimpinannya yang orang Belanda mendapat luka bacokan di kepalanya.<sup>42</sup>

Begitu tidak amannya wilayah selatan Pasar Minggu sehingga penduduk kampung pun tidak mampu menjaga keamanannya sendiri di wilayahnya itu. Lurah secara sengaja tidur di kebun secara berpindah-pindah demi menghindari perampokan dari para jagoan. Harian *Merdeka* tanggal 11 Maret 1953—sebagaimana dikutip Amurwani<sup>43</sup>—melaporkan bahwa gerombolan perampok telah membakar habis lebih kurang 13 rumah di antaranya berlokasi di Tanjung Barat. Setelah itu gerombolan yang sama juga merampok rumah-rumah penduduk di desa Pondok Cina.

Maka, kehadiran Yon Zipur ibarat membawa berkah. Keamanan pun semakin membaik, apalagi setelah tentara mendirikan markas militer di bekas areal perkebunan buah-buahan di wilayah Srengseng Sawah. Secara periodik, kesatuan tentara ini melakukan patroli keamanan ke seluruh pelosok Srengseng dan wilayah selatan Pasar Minggu ini. Pada saat bersamaan, polisi pun melakukan operasi

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 1 Oktober 2005 dan Pak Haji Mada (1 Oktober 2005).

<sup>42</sup> Lihat *Majalah Kotapradja* No. 8–9 1950.

<sup>43</sup> Amuwani Dwi L., “Lu Jual Gua Beli: Jago dan Jagoan Kriminalitas di Jakarta 1930–1960”, makalah disampaikan dalam lokakarya hasil penelitian “*Indonesia Across Orders: Reorganization of Indonesian Society 1930-1960*”, kerja sama antara Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) dan *Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie* (NIOD, Belanda), pada 28 Maret 2006 di Ciater Subang, hlm. 42.

pemulihan keamanan di wilayah bagian barat, khususnya di Desa Ciganjur. Sebagaimana ditulis Amurwani<sup>44</sup>, Harian *Merdeka* tertanggal 11 Maret 1953 melaporkan telah adanya tembak menembak selama 20 menit yang sangat sengit antara polisi dengan gerombolan penjahat yang menamakan dirinya Bambu Runcing di Desa Ciganjur. Tembak menembak ini terjadi setelah sebelumnya polisi mengepung sebuah rumah lantaran diberitahukan tempat persembunyian mereka oleh penduduk setempat. Beberapa orang dari pihak gerombolan tertembak mati. Setelah diperiksa, ternyata yang tewas adalah kepala-kepala rampok ulung yang biasa beroperasi di Pasar Minggu, Tanjung Barat, dan Pondok Cina.

Setelah situasi lebih aman, tentara pun tak kunjung pergi dari areal perkebunan buah ini. Bahkan untuk kepentingan latihan militer dalam rangka membebaskan Irian Barat, kesatuan tentara ini membutuhkan areal yang lebih luas. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tidak hanya kantor yang dibangun untuk menopang latihan ini, tetapi mulai tahun 1960 kesatuan tentara Zeni ini bahkan membangun asrama sebagai tempat tinggal prajurit dan keluarganya. Akibatnya, secara *de facto*, era perkebunan buah di Srengseng tinggal kenangan, berganti menjadi kompleks militer kesatuan Zeni Angkatan Darat.

Kemudian, dengan legitimasi darurat militer, penetrasi Angkatan Darat terhadap kehidupan sosial ekonomi di wilayah Kecamatan Pasar Minggu semakin menaik, dan hal tersebut semakin membuat markas dan permukiman kesatuan Yon Zipur di Srengseng Sawah semakin mapan. Tahun 1960 misalnya, angkatan darat menyelenggarakan latihan kerja Taruna Tani di Kebun Percobaan Rakyat Pasar Minggu. Untuk menunjukkan betapa serius tentara Angkatan Darat ini membantu mengelola perkebunan buah ini, bahkan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Gatot Soebroto berkunjung langsung sambil memberikan arahan (lihat Gambar 6.2). Perhatikan penggunaan kata “taruna” dalam kegiatan pelatihan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*



Sumber: Cover *Pertanian* 10 (11) 1960. Majalah *Pertanian* edisi ini terbit atas izin Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya No. 276 Tahun 1960 tanggal 1 November 1960.

**Gambar 6.2** Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Gatot Soebroto (tidak kelihatan) sedang memberikan “wejangan” terhadap para Taruna Tani di areal pembibitan Pusat Perkebunan Rakyat Pasar Minggu.

pertanian tersebut, yang menandakan peserta latihan tersebut seolah-olah berada dalam akademi militer.<sup>45</sup>

Jadi, menguatnya dominasi gerombolan Banteng Merah, merajalelanya para jagoan-kriminal, dan munculnya pangkalan militer yang dapat mengakhiri ketidakamanan di pinggiran Jakarta pada pertengahan tahun 1950-an, merupakan sebagian konteks yang dapat menyediakan jawaban atas pertanyaan: mengapa sistem pertanian buah semakin meluas di Pasar Minggu setelah era kemerdekaan.

---

<sup>45</sup> Lihat *Pertanian* No. 10 Tahun ke-11 1960.

## C. MONETISASI DAN INDIVIDUALISASI PETANI BUAH

Semakin banyaknya jumlah petani buah sebagaimana diuraikan di muka, menandakan semakin banyaknya jumlah uang yang beredar di Kecamatan Pasar Minggu, dan akhirnya menguatkan sistem ekonomi uang di wilayah ini. Setiap petani buah harus menjual hasil kebunnya setiap hari agar bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, maupun papannya. Maka, arus kepemilikan uang kontan yang relatif besar di kalangan petani buah ini bertalian erat dengan makin cepatnya keluar masuk barang nonpertanian di wilayah ini. Jadi, penghasilan petani buah yang lebih besar daripada bila mereka bertani sawah dengan luas lahan yang sama,<sup>46</sup> semakin membuat dinamika sosial ekonomi setempat lebih bergeliat ketimbang bila mereka berkulat sebagai petani sawah. Gejala dinamika sosial ekonomi ini akhirnya berimplikasi pada hal-hal berikut.

*Pertama*, munculnya organisasi ekonomi petani buah setempat. Pada tanggal 6 Maret 1953 dibentuk Getap (Gabungan Ekonomi Tani Pancoran) yang dipimpin oleh Moh. Jassin. Getap berhasil mengadakan pameran buah-buahan yang diikuti oleh 300 pengusaha tani. Getap pun berhasil mendirikan koperasi dan menghimpun 20 ha untuk ditanam buah-buahan. Usaha komersil pertanian buah-buahan tersebut bermodalkan seratus dua puluh lima ribu rupiah. Kala dilaporkan, usaha ini menargetkan panen jeruk siam sebesar 70 ton, nanas 30 ton, dan pepaya 10 ton.<sup>47</sup>

*Kedua*, lantaran para petani buah harus menjual hasil kebunnya setiap hari, maka kebutuhan akan sarana jalan yang lebih baik semakin meningkat. Tentu saja jalan yang dimaksud bukanlah jalan beraspal. Akan tetapi, keberadaan jalan tanah lebih memudahkan pengiriman hasil kebunnya itu yang diangkut melalui sistem pikulan ke pasar lokal (baik di sekitar Stasiun Lenteng Agung maupun di

---

<sup>46</sup> Boedhisantosa, *op-cit.*, hlm. 98; lihat juga Koentjaraningrat, *Ciracas dan Cilangkap, opcit.*, hlm. 355–456.

<sup>47</sup> *Majalah Kotapradja* No. 13 Tahun ke-3 1953, hlm. 19.

stasiun Pasar Minggu) daripada jalan setapak. Pada 14 April 1953 misalnya, dilaporkan telah diperbaiki jalan desa sepanjang 5 km dan pembangunan jalan baru sepanjang 166 meter di Kecamatan Pasar Minggu. Secara gotong royong, penduduk Desa Ciganjur juga telah memperbaiki jalan desa sepanjang 200 meter pada tahun 1952. Bahkan pada tahun 1952 jalan tembus dari Mampang Prapatan ke Pasar Minggu sejauh 5 km dibangun secara gotong royong. Pembangunan jalan tembus ini dibantu oleh tentara dan anggota polisi.<sup>48</sup>

Pola pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pasar Minggu yang bertumpu pada pelibatan sepenuhnya unsur masyarakat di atas, sesungguhnya merupakan kompensasi atas ketidakmampuan Pemerintah Jakarta untuk menyediakan infrastruktur fisik secara utuh. Bahkan, pada tahun 1950, pemerintah sering mengadakan lomba gotong royong untuk mempergiat keterlibatan masyarakat lokal dalam pengadaan sarana jalan. Dalam kaitan ini, pemerintah Jakarta menghadihkan cangkul, yang merupakan simbol struktur sosial ekonomi yang dominan (yakni pertanian buah) di wilayah Kecamatan Pasar Minggu pada saat itu.

*Ketiga*, semakin banyaknya penduduk Kecamatan Pasar Minggu yang menjadi petani buah membuat hilir mudik orang dan barang dari dan ke wilayah relatif tinggi (lihat Tabel 6.6 dan 6.7). Stasiun Pasar Minggu pun berfungsi sebagai pusat pertumbuhan sosial ekonomi lokal yang utama, disusul Stasiun Lenteng Agung, kemudian Perhentian Tanjung Barat. Tabel 6.6 memperlihatkan betapa stasiun Pasar Minggu menempati urutan pertama dalam jumlah hilir mudik penumpang untuk kategori stasiun yang berlokasi di pinggir Jakarta, disusul Stasiun Lenteng Agung, dan terakhir adalah Perhentian Tanjung Barat (sedangkan stasiun lain yang hilir mudik orangnya lebih tinggi dari Pasar Minggu adalah Stasiun Depok yang berada di luar wilayah administrasi Jakarta). Data ini menunjukkan bahwa keberadaan petani buah telah mendorong meningkatnya mobilitas

---

<sup>48</sup> Majalah Kotapradja No. 1 Tahun ke-3 1952, hal. 19 dan Majalah Kotapradja No. 6 Tahun ke-3 1952, hlm. 23.

penduduk horizontal, karena para petani buah secara harian harus menjual dan mendistribusikan buah-buahnya itu kepada konsumen, yang sebagian besarnya ada di Jakarta, melalui gerbong barang yang berada dalam satu rangkaian dengan kereta listrik.

**Tabel 6.5** Perlombaan Gotong Royong Tahun 1952

No.	Desa	Jumlah Hadiah Pacul yang Diperoleh
1.	Pasar Minggu	12
2.	Tanjung Barat	11
3.	Srengseng	11
4.	Ciganjur	11
5.	Jagakarsa	11
6.	Ragunan	11
7.	Cilandak	11
8.	Pejaten	11
9.	Kaliabang	10
10.	Jati Padang	10
11.	Lenteng Agung	5

Diolah dari *Majalah Kotapradja* No. 6 Tahun ke-3 1952, hlm. 23.

Tabel 6.7 juga makin mengukuhkan temuan di atas. Sirkulasi barang yang masuk ke tiga stasiun yang ada di Kecamatan Pasar Minggu menandakan tingginya kebutuhan harian penduduk, suatu gejala yang tumbuh akibat menaikinya daya beli penduduk setempat, lantaran merasuknya sistem uang dalam wilayah ini. Maka, pasar pun makin hidup di sekitar stasiun. Jumlah pedagang di pasar Stasiun Lenteng Agung, misalnya, semakin beragam baik dari segi komoditas yang dijual maupun dari segi etnisitas para penjualnya. Pada tahun 1945, hanya ada seorang pedagang sayur-mayur yang berjualan di Pasar sekitar stasiun Lenteng Agung. Bahkan pada masa pemerintahan Belanda telah berjualan seorang pedagang kelontong etnis Cina di pasar Stasiun Lenteng Agung. Tahun 1950-an, tatkala Desa Jagakarsa tumbuh sebagai penghasil buah-buahan, terdapat empat pedagang Cina, enam orang pedagang sayur mayur penduduk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

**Tabel 6.6** Sirkulasi Penumpang dari dan ke tiap-tiap Stasiun Tahun 1958–1960 (dalam Ton)

Stasiun/ Perhentian	1958		1959		1960	
	Penumpang Berangkat	Penumpang Datang	Penumpang Berangkat	Penumpang Datang	Penumpang Berangkat	Penumpang Datang
Jakarta	4.545.803	5.195.115	4.723.454	5.554.199	5.798.749	7.861.153
Sawah Besar	665.690	715.858	749.319	688.089	930.862	826.049
Pintu Air	495.235	377.644	523.791	427.721	553.236	506.835
Gambir	2.016.269	2.293.347	2.188.080	2.440.828	2.066.228	2.102.232
Gondangdia	740.603	890.159	559.612	696.511	596.107	611.290
Cikini	189.762	44.914	228.542	52.454	36.377	32.869
Pegangsaan	473.506	151.777	479.721	137.994	569.327	108.457
Manggarai	2.562.602	2.705.488	2.868.656	3.084.933	3.000.076	2.792.507
Duren Kalibata	105.094	78.932	104.880	73.616	121.064	105.076
Pasar Minggu	354.696	409.129	337.412	359.378	408.097	387.385
Tanjung Barat	15.706	1.882	17.428	1.999	30.442	12.398
Lenteng Agung	186.267	130.904	205.863	144.526	253.788	188.425
Pondok Cina	94.723	59.559	79.067	53.046	78.772	48.717
Depok	625.492	684.736	639.785	761.136	751.597	823.434
Pondok Terong	13.692	-	9.946	-	7.573	-
Citayam	166.532	108.025	146.146	118.776	156.591	136.446
Bojong Gede	140.347	106.536	143.753	93.291	138.829	84.503
Cilebut	121.064	71.307	100.887	51.439	102.017	45.804
Kebon Pedes	8.432	6.101	6.139	4.287	6.838	1.416
Bogor	1.611.623	1.617.475	1.732.634	1.697.780	1.856.730	1.869.281

Diolah dari Ihtisar Angkutan Penumpang dan Barang-barang Kereta Api 1960, hlm. 73–74.

setempat, dan seorang pedagang beretnis Jawa, yang berjualan di pasar Stasiun Lenteng Agung tersebut. Pedagang Cina tersebut adalah Baba Teklong dan Baba Kwangan (berjualan pakaian) serta Baba Piang dan Baba Joe (berjualan kebutuhan dapur, utamanya beras). Belakangan, Baba Joe dijadikan sebagai salah satu nama jalan lokal di Kecamatan Jagakarsa.

Bahkan Pak Risin mengenang tingginya perputaran uang yang beredar di sekitar Stasiun Lenteng Agung sebagai akibat transaksi buah-buahan, telah membuat dirinya lebih sejahtera. Ia berjualan sayur-mayur dan lauk pauk seperti ikan di pasar yang terletak di

arah barat Stasiun Lenteng Agung. Tahun 1957, Pak Risin muda berjualan sayur dengan bermodalkan Rp125, yang kemudian ia tambah dengan pinjaman sebesar Rp300,- dari seorang tentara yang akan dikirim ke Sulawesi untuk memadamkan pemberontakan Permesta. Pinjaman tersebut dapat ia lunasi ketika tentara tadi kembali ke Lenteng Agung. Dalam kurun sepuluh tahun menjadi pedagang di stasiun Lenteng Agung, ia berhasil membeli dua bidang tanah, yang keduanya dibangun rumah untuk tempat tinggal keluarganya. Kadangkala bila Pak Risin jenuh, lapaknya (tempat jualan di pasar) ia pinjamkan kepada kerabatnya. Ia sendiri berkebuduhan buah, dan kembali berdagang manakala gairah berjualannya kembali.<sup>49</sup>

Tahun 1963 terjadi serangan hama ulat bulu epidemik terhadap kebun jambu batu milik penduduk Desa Tanjung Barat yang merupakan komoditas unggulan penduduk desa ini. Apa yang menarik di sini bukan pada serangan ulat bulunya, tetapi pada cerita rakyat yang berkembang dibalik epidemik ulat tersebut. Menurut Pak Risin<sup>50</sup> dan Pak Maan (penduduk Kampung Kandang)<sup>51</sup>, epidemik ulat tersebut terjadi setelah seorang petani jambu sukses menolak mentah-mentah permintaan seorang nenek tua yang ingin sekali makan jambu klutuk. Jadi, epidemik tersebut dipersepsi oleh penduduk setempat sebagai kutukan Tuhan atas keserakahan yang timbul saat jayanya buah-buahan di wilayah ini. Lepas dari benartidaknya cerita tersebut, yang jelas, meluasnya pertanian buah telah mendorong menguatnya sistem ekonomi uang sehingga berujung pada proses individualisasi di kalangan para petani buah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), pada 26 September 1964 telah pula dilakukan redistribusi tanah di Pasar Minggu. Proses redistribusi tanah seluas 37 ha di Pasar Minggu ini dilakukan secara hampir bersamaan dengan redistribusi tanah di Pasar Rebo (22 ha, 25 September 1964,

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Pak Risin, November 2005.

<sup>50</sup> Wawancara November 2005.

<sup>51</sup> Wawancara Oktober 2005.

upacaranya dilakukan di Bambu Apus) dan di Pulo Gadung (13 ha, 27 September 1964). Tanah seluas 72 ha yang didistribusikan kepada 262 penggarap selain bertujuan melaksanakan UU PA juga memiliki tujuan lain sebagai berikut.<sup>52</sup>

- (1) Upacara redistribusi di Pasar Minggu bertempat di Desa Ragunan. Redistribusi ini diberikan dengan persyaratan bahwa kepemilikan tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Petani tersebut harus meningkatkan produksi tanah yang telah diberikan itu.
- (3) Hal lain—sesuai dengan topik riset ini—ialah status tanah tersebut adalah hak pakai. Status tanah ini merupakan inovasi panitia landreform untuk tidak lagi memberikan hak milik. “Hak... diberikan berupa: ‘hak guna bangunan’ untuk tanah perumahan dan bangunan-bangunan penting dan ‘hak pakai’ untuk tanah-tanah pertanian. [Kedua status tanah ini diberikan] ... demi memudahkan pembangunan, peremajaan dan perluasan kota.” Hal ini diberikan agar “... bermacam-macam proyek besar... [untuk] pembangunan ibukota dapat berjalan”. Pada tahun 1964 ini, tanah pertanian berjumlah 27%, sementara 63% adalah tanah perkotaan.

Lebih jauh Soemarno<sup>53</sup> memaknai kebijakan redistribusi tanah sebagai upaya untuk menutupi masa lalu sebagai areal yang dimiliki oleh para tuan tanah. Landreform pun dimaknai terkait dengan revolusi. “... Landreform adalah satu hasil yang gemilang dalam revolusi kita. Pelaksanaannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya adalah mutlak sebab Revolusi Indonesia tanpa Landreform adalah “revolusi istana”, kata Henk Ngantung, Gubernur Jakarta waktu itu.

Meski proses dekolonisasi telah mentransformasikan wilayah Pasar Minggu, namun gejala kontinuitas masih berlangsung. Sebuah yayasan, yang pada era kolonial bernama *Krankzinnigen Geschicht*,

---

<sup>52</sup> Herman Soemarno, “Redistribusi Tanah!”, dalam *Mingguan Djaja* No. 141 Tahun ke-3, 3 Oktober, 1964, hlm. 6 dan 7.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 7.

dan di masa kemerdekaan berganti nama menjadi Desa Putera, dapat terus melangsungkan kegiatannya. Yayasan ini milik dan dikelola oleh orang Belanda, dan tidak terusik meski pada awal tahun 1950-an milisi Banteng Merah dan jagoan kriminal merajalela dan eksodus Orang Belanda dari Indonesia. Yayasan ini berlokasi di Desa Srengseng Sawah. Secara populer ia dinamakan Desa Putera, merupakan yayasan sosial-keagamaan untuk penderita sakit ingatan atau gila.

Pada zaman federal, ketika Jakarta dibawah NICA, lembaga ini digunakan oleh perkumpulan Pantekosta untuk merawat dan mendidik anak terlantar, yang pada November 1951, berjumlah 250 orang. Mereka memperoleh makan, pakaian, dan tempat tinggal secara cuma-cuma. Selain itu, Desa Putera ini juga memiliki Sekolah Rakyat, Sekolah Guru (SGB), dan kursus yang diikuti oleh 100 orang. Kursus terakhir ini juga dilengkapi dengan sistem praktik lapangan pertanian, peternakan, dan olah raga.

Sementara itu, di Lenteng Agung, pada tahun 1950 terdapat rumah sakit kusta. Rumah sakit yang dipimpin oleh Dr. Bunyamin ini menampung 209 penderita kusta, 39 di antaranya adalah wanita. Jumlah ini hanya sedikit dari penderita kusta di Jakarta (yakni 1.500 orang), sedangkan penderita kusta seluruh Indonesia diperkirakan berjumlah 75.000 orang.

**Tabel 6.7** Sirkulasi Barang dari dan ke tiap-tiap Stasiun Tahun 1958–1960 (dalam Ton)

Stasiun/ Perhentian	Barang 1958		Barang 1959		Barang 1960	
	Dikirim	Diterima	Dikirim	Diterima	Dikirim	Diterima
Jakarta						
Jakarta Gudang	51.453	117.137	48.923	84.376	82.838	140.505
Sawah Besar						
Pintu Air						
Gambir		4.061			18	14
Gondangdia						
Cikini						

Stasiun/ Perhentian	Barang 1958		Barang 1959		Barang 1960	
	Dikirim	Diterima	Dikirim	Diterima	Dikirim	Diterima
Salemba	262	50.740	292	44.930	606	57.533
Manggarai	10.993	89.349	32.912	79.890	32.660	99.288
Duren Kalibata	70	2.776	-	1.516	512	6.726
Pasar Minggu	242	12.268	289	14.780	898	21.893
Tanjung Barat						
Lenteng Agung	20	489	192	874	82	860
Pondok Cina	1.457	171	995	81	2.306	130
Depok	1.365	577	2.330	471	2.633	469
Pondok Terong	182	40	810	30	880	-
Citayam	3.052	21	4.162	-	4.556	-
Bojong Gede	5.670	60	4.385	50	4.006	189
Cilebut				10		
Kebon Pedes						
Bogor	34.756	49.121	30.948	51.770	28.537	59.679

Diolah dari Ihtisar Angkutan Penumpang dan Barang-barang Kereta Api 1960, hlm. 73–74.

## D. ERA BARU

Bila bertumpu pada temuan etnografis Boedhisantosa<sup>54</sup>, dapat disimpulkan bahwa struktur sosial Kecamatan Pasar Minggu bercorak desa sungguhpun secara formal ia termasuk wilayah Jakarta. Pengakuan resmi pun diperlihatkan oleh Pemerintah Jakarta. Peta resmi Pemerintah Jakarta tahun 1965, misalnya, mendefinisikan Kecamatan Pasar Minggu sebagai “pedusunan”. Dalam peta resminya itu, dilukiskan bahwa terdapat dua tahap pembangunan fisik di Kecamatan Pasar Minggu, yakni pembangunan fisik sebelum tahun 1945 dan pembangunan fisik antara 1945–1965, dua tahap pembangunan yang tetap saja berada di sekitar Stasiun Pasar Minggu.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Boedhisantosa, *Op. Cit.*

<sup>55</sup> Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta, *Jakarta Membangun*, hlm. 16, 23, 24; dan Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta, *Some Data about Djakarta*, hlm. 8.

Sementara itu, peta resmi Pemerintah Jakarta yang dipublikasikan tahun 1972 menempatkan sebagian kawasan Pasar Minggu (khususnya di sekitar stasiun) sebagai penyangga Jakarta dalam bidang permukiman, meski bagian selatan dari kecamatan ini tetap difungsikan sebagai wilayah “pedusunan”. Perubahan fungsi penyangga sebagian wilayah Kecamatan Pasar Minggu—dari pemasok buah-buahan ke penyangga permukiman—merupakan konsekuensi bergesernya fungsi Jakarta terhadap sistem pembagian kerja internasional, menyusul diberlakukannya kebijakan liberalisasi ekonomi Orde Baru pada tahun 1968. Jakarta yang pada sistem pembagian kerja internasional lama berfungsi sebagai pemasok komoditas ekstraktif (termasuk buah-buahan) untuk pasar global, berubah fungsinya. Mengikuti Jakarta, wilayah kecamatan Pasar Minggu pun—yang sejak tahun 1921 dirancang sebagai penghasil buah-buahan—juga mengikuti perubahan fungsi kota utama Indonesia ini seiring dengan penataan ulang tata hubungan pusat-pinggiran di Jakarta. Maka, tatkala Jakarta memiliki fungsi baru sebagai areal untuk produksi manufaktur, sebagian wilayah Pasar Minggu pun dirancang untuk menjadi penyangga pusat kota oleh Gubernur Ali Sadikin.<sup>56</sup>

Dalam kaitan ini, terdapat semacam diskontinuitas kebijakan wilayah atas Pasar Minggu setelah Jakarta terlibat secara intensif terhadap sistem pembagian kerja internasional yang baru di atas. Maka, sebagian wilayah Pasar Minggu sebelah utara pun dijadikan sebagai penyangga permukiman untuk kebutuhan pusat kota. Paralelisme historis seolah-olah berulang. Tata sosial ekonomi Kecamatan Pasar Minggu yang telah mapan akibat tingginya produksi buah-buahan, harus ditata ulang mengikuti perubahan dalam konteks yang lebih luas. Jadi, dalam kebijakan pemerintah kota sungguhpun pinggiran kota seperti Pasar Minggu memiliki dinamikanya yang khas, ia tidak dilihatnya sebagai sebuah entitas wilayah tersendiri yang terus

---

<sup>56</sup> Lihat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, *Jakarta Membangun*; dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, *Some Data about Djakarta*. Abeyasekere, *Op. Cit.*, hlm. 215–246.

berlanjut dan diakomodasi dalam kebijakan wilayah pemerintah Jakarta. Dengan perkataan lain, pembangunan pemerintah untuk Pasar Minggu tidak dirancang untuk memenuhi apa yang ada di Pasar Minggu sebagai sebuah entitas wilayah. Tetapi senantiasa dirancang sebagai pendamping pusat kota, dan melengkapi fungsi Jakarta secara keseluruhan.

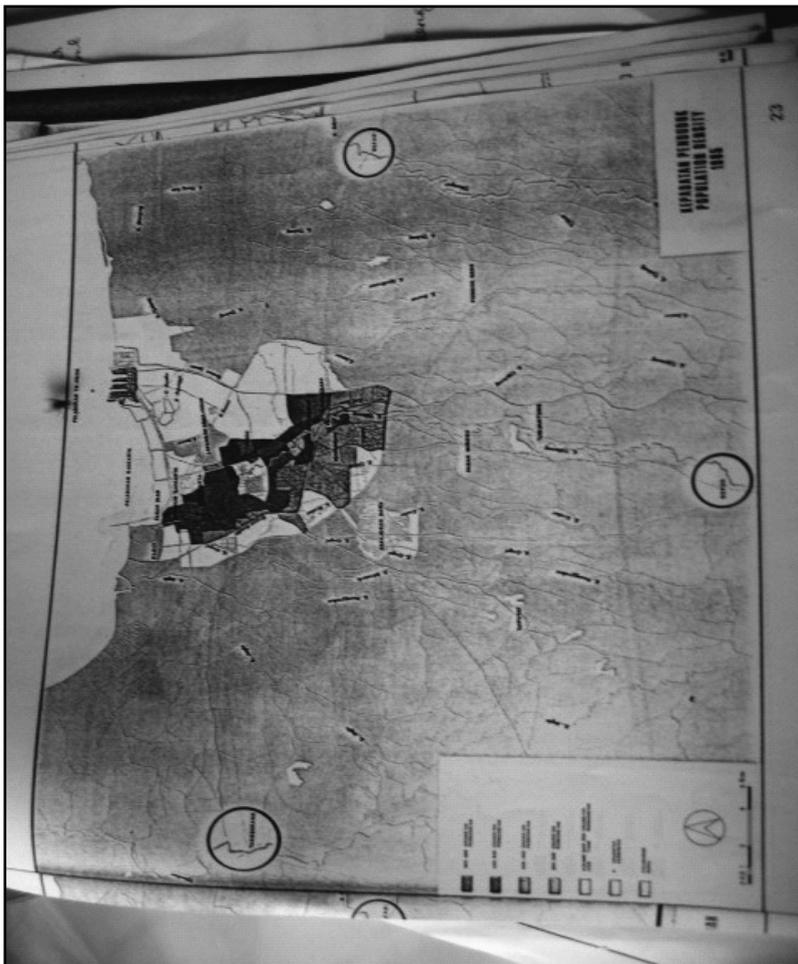
Meski terdapat kebijakan diskontinuitas di atas, sampai tahun 1971 (lihat Tabel 6.8) jumlah kebun buah-buahan justru makin meluas. Luas kebun buah naik 1,7 kali lipat dalam kurun lima tahun (1966–1971), yang diikuti oleh melonjaknya produksi buah-buahan sampai 3,8 kali lipat. Adalah di luar lingkup penelitian ini untuk mengungkap gejala melonjaknya produksi buah-buahan meski kebijakan terhadap wilayah pinggiran Jakarta berubah. Namun, satu hal dapat dinyatakan, bahwa melonjaknya produksi buah-buahan dalam kurun tersebut lantaran liberalisasi ekonomi di atas belum berpenetrasi secara mendalam terhadap wilayah pinggiran Jakarta. Justru dari segi konsumen, liberalisasi ekonomi ternyata telah meningkatkan pangsa pasar buah-buahan.<sup>57</sup>

**Tabel 6.8** Produksi Pertanian di Jakarta 1966–1971

Tahun	Tanaman Kebutuhan Pokok		Sayur-mayur		Buah-buahan	
	Luas areal (ha)	Produksi	Luas areal (ha)	Produksi	Luas areal (ha)	Produksi
1966	36819	211654	-	-	5065	43.821
1967	33399	190473	22003	193205	7162	63.050
1968	36274	156809	26551	240975	5004	82.261
1969	27717	109013	22541	202433	5977	106.894
1970	19714	82530	28291	233315	8729	164.129
1971	19811	89917	26629	202418		

Sumber: Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta, *Jakarta Membangun*, hlm. 82.

<sup>57</sup> Lihat Gumilr Rusliwa Somantri, *Migration within City: A Study of Socioeconomic Processes and Intra-City Migration in Jakarta*, Breitenbach: Saarbruecken and Port Laudea, 2000.



Sumber: Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta 1972a: 23.

**Gambar 6.2** Posisi Kecamatan Pasar Minggu dalam Peta Resmi Jakarta 1965

Buku ini tidak diperjualbelikan.

## BAB VII

### Penutup

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab 1, penelitian ini berupaya menelusuri dinamika petani buah sebagai pemasok pasar buah, khususnya di Batavia (Jakarta) dalam kurun yang berlainan (*across orders*) antara 1921–1966. Secara lebih khusus, dinamika petani buah dalam kurun yang berlainan ini dipertalikan dengan meluasnya ruang gerak (*public sphere*) petani Pasar Minggu, dari awal abad ke-20 hingga awal pemerintahan Gubernur Jakarta Ali Sadikin atau sebelum liberalisasi ekonomi Orde Baru. Pada sisi lain, konsep perluasan ruang gerak petani Pasar Minggu yang digunakan dalam riset ini juga memiliki pertalian dengan proses semakin terintegrasinya secara lebih mendalam wilayah Pasar Minggu terhadap sistem Kota Batavia, melalui apa yang disebut oleh Smith sebagai gejala periferalisasi.<sup>1</sup> Pada akhirnya, ruang gerak yang semakin meluas itu merupakan kondisi sosial yang memungkinkan muncul dan menguatnya komersialisasi buah-buahan di wilayah ini. Atau, juga dapat dikatakan bahwa ruang gerak petani yang semakin leluasa itulah yang memungkinkan mereka melakukan respons positif terhadap meningkatnya permintaan akan komoditas pertanian ini (pasar buah), baik pada dekade pertama abad ke-20 maupun saat terjadi dekolonisasi Jakarta pada tahun 1950 hingga 1960-an.

---

<sup>1</sup> David A. Smith, *Third World Cities in Global Perspective: The Political Economy of Uneven Urbanization*. Colorado: Westview Pres, 1996, hlm. 19.

Pada awal abad ke-20, pasar buah telah menguat di Kota Batavia. Gejala sosial ekonomi ini merupakan dampak semakin berkembangnya struktur ekonomi dan demografis Batavia, karena pihak swasta diperbolehkan secara leluasa berusaha di Hindia Belanda pascaliberalisasi ekonomi 1870.<sup>2</sup> Jumlah penduduk Batavia pun meningkat tajam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3 (Jumlah penduduk Batavia 1900–1930, hlm. 34) dan Tabel 3.4 (Komposisi penduduk Kota Batavia tahun 1920 dan 1930, hlm. 45). Jumlah penduduk kota ini meningkat 3,75 kali, antara tahun 1900–1930, menjadi 435,184 jiwa. Demikian pula dengan komposisi etnis di Batavia dan Meester Cornelis antara tahun 1920 hingga 1930. Tampak bahwa jumlah penduduk pribumi maupun Eropa di kedua wilayah administratif di atas—yang pada tahun 1935 disatukan itu—meningkat. Secara lebih khusus, jumlah penduduk Eropa di Batavia yang semakin meningkat itu memiliki arti tersendiri sebagai faktor pendorong tumbuhnya pasar buah di Batavia. Mereka adalah strata teratas di Batavia yang tentu saja memiliki daya beli relatif tinggi. Mereka pun sangat membutuhkan buah-buahan karena fungsinya sebagai pelengkap pola makan mereka (*dessert*). Inilah potensi pasar yang direspons secara memadai oleh para petani, khususnya di belahan utara Pasar Minggu.

Para petani di utara Pasar Minggu dapat melakukan respons tersebut karena ruang gerak mereka relatif lebih leluasa. Hal tersebut bertalian dengan dibelinya hampir seluruh tanah partikular di wilayah ini hingga berstatuskan tanah gubernemen, bahkan pembelian tanah partikular tersebut (misalnya tanah partikular Raganan yang dibeli tahun 1906) melampaui program yang sama yang digulirkan Pemerintah antara tahun 1912–1930.<sup>3</sup> Petani setempat pun beralih, dari petani penggarap menjadi petani pemilik lahan.

---

<sup>2</sup> Bob Hering, *M. H. Thamrin: Membangun Nasionalisme Indonesia*. Terjemahan Harsono Sutejo. Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hlm. 1–20; dan Susan Abeyasekere, *Jakarta: A History*. Revised Edition. Oxford: Oxford University Press, 1989, hlm. 88–91.

<sup>3</sup> Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, *Pimpinan Jakarta Sepanjang Tiga Abad*, hlm. 162 dan 186; Arsip Nasional Republik Indonesia,

Mereka pun dapat lepas dari beban harian tanah partikular yang menghimpit, seperti cukai tanaman dan kerja-kerja bakti tanpa upah demi kepentingan tuan tanah. Bahkan di bekas areal tanah partikular tersebut kemudian dibangun sistem pemerintahan desa, yang dalam banyak hal mampu membangun sistem kemasyarakatan lokal dari, oleh, dan untuk mereka sendiri.

Lepas dari tanah partikular, tidak berarti seluruh penduduk wilayah Pasar Minggu beralih sumber mata pencaharian mereka ke pertanian buah-buahan. Penduduk selatan Pasar Minggu tetap menempatkan buah-buahan sebagai nafkah sekunder, sebagai pelengkap sumber pertanian sawah-padi yang mereka geluti, sungguh pun gejala komersialisasi buah-buahan telah muncul di wilayah ini.<sup>4</sup> Hanya petani di utara Pasar Minggu yang menempatkan hasil penjualan buah-buahan menjadi sumber utama mata pencaharian mereka.<sup>5</sup>

Terlebih lagi, wilayah Pasar Minggu relatif terintegrasi dengan sistem Kota Batavia, dapat dijangkau dengan berjalan kaki, dan karena itu wilayah ini ditetapkan menjadi salah satu pasar dalam sistem hari-pasar di Batavia dan sekitarnya pada 8 Desember 1801.<sup>6</sup> Penetapan ini juga menjadi pertanda bahwa sejak awal abad ke-19, wilayah Pasar Minggu telah terintegrasi ke dalam sistem Kota Batavia. Pasar yang harus dibuka setiap hari Minggu ini (karena itu kemudian dikenal dengan nama Pasar Minggu) berfungsi mendampingi pasar lainnya yang dibuka setiap hari Senin (Pasar

---

*Memori Serah Jabatan 1931–1940*, hlm. cxxii, cxxxviii dan cxi; Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memori Serah Jabatan 1921–1930* xxxi.

<sup>4</sup> Soeboer Boedhisantosa, “Djakarkasa: Desa Kebun Buah-buahan Dekat Djakarta”. Dalam Koentjaraningrat (Penghimpun). *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*. Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1962, hal *Ibid*, hlm. 96. Wawancara dengan Pak Risin, 2 September 2005.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Haji Sarmada, November 2005.

<sup>6</sup> Lihat Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemerintah DKI Jakarta, *Sejarah Pimpinan Jakarta Sepanjang Tiga Abad*, hlm. 110 dan 167.

Senen), pasar yang dibuka setiap hari Rabu (Pasar Rebo), dan pasar yang dibuka setiap hari Jumat (Pasar Jumat).

Tahun 1830 dibangun jaringan jalan yang menghubungkan wilayah ini dengan Batavia. Bahkan 1873, jaringan kereta uap pun melewati wilayah ini, dan semua itu membuat integrasi wilayah Pasar Minggu terhadap Batavia makin intensif, berfungsi sebagai pemasok komoditas pertanian, khususnya buah-buahan. Inilah faktor lain yang turut mendorong komersialisasi buah-buahan di wilayah Pasar Minggu.

Menjumpai makin meluasnya praktik pertanian buah oleh petani pribumi setempat, dan betapa buah-buahan telah menjadi komoditas seperti komoditas perkebunan lain (karena relatif tingginya permintaan jenis tanaman ini), maka pemerintah pun melibatkan diri, menjadi salah satu pelaku pemasok untuk pasar buah yang sedang tumbuh. Pada 1 April 1921, pemerintah mendirikan Kebun Percobaan Buah-buahan yang dirancang untuk menghasilkan bibit buah-buahan unggul, sekaligus menandai langkah pemerintah Hindia Belanda untuk mengomersialisasikan buah-buahan secara sistematis, dan merupakan pelembagaan kegiatan ekonomi yang jauh sebelumnya telah dilakukan oleh penduduk setempat.

Pada sisi lain, pemerintah pun memperoleh “warisan” areal perkebunan semasa tanah partikular. Gayung pun bersambut. Sebagian bibit berkualitas hasil penelitian Kebun Percobaan yang diperkirakan memiliki nilai jual tinggi, dibudidayakan sendiri oleh pemerintah.<sup>7</sup> Hasil olah tani yang menggunakan sistem pertanian modern ini, menjadikan pemerintah berperan sebagai pemasok buah-buahan berskala besar, dan pada saat yang sama, membuat pemasok buah-buahan semakin beragam, selain petani buah pribumi dan pekebun bangsa Eropa (*kleinlandbouwers*).

Ketiga pemasok buah-buahan ini memiliki dinamikanya sendiri yang satu sama lain tidak bertalian, meski dalam satu kesempatan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pak Risin. Lihat juga Lampiran 2, Peta Onderdistrik Pasar Minggu tahun 1938.

dapat saja ketiganya berperan saling melengkapi. Bagaimana mengonfirmasikan tesisnya Boeke,<sup>8</sup> sistem perkebunan buah-buahan pemerintah kontras dengan pola kebun petani pribumi. Perkebunan pemerintah menggunakan sistem pertanian modern: dari bibit unggul, cara bertanam, hingga pola perawatan. Sementara itu, pola bertani petani setempat menggunakan cara konvensional (sebagai tanaman pekarangan atau halaman rumah; dan rendahnya kualitas bertani pribumi), dan hal ini membuat tingkat produktivitas buah-buahan mereka relatif rendah.<sup>9</sup>

Demikian pula dalam hal pemasaran, cara yang digunakan dua pelaku penghasil buah-buahan relatif berbeda. Buah-buahan hasil perkebunan pemerintah dikirimkan dalam jumlah besar melalui kereta. Sementara petani buah hanya mengirimkan hasil olah taninya itu dengan kereta, manakala mereka menjual buah-buahan yang berharga tinggi saja. Justru, sebagian besar memilih berjalan kaki berjam-jam sambil memikul menuju pelbagai pasar di Batavia, seperti pasar Boplo dan pasar Palmeriam. Ada juga petani buah yang tidak bertindak sebagai pedagang, dan biasanya mereka menjualnya ke pedagang buah-buahan yang mangkal di pasar stasiun, baik di Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Lenteng Agung, maupun Perhentian Tanjung Barat. Pedagang buah inilah yang memasarkan hasil pembelannya itu ke Batavia, baik naik kereta maupun berjalan kaki.

Akan tetapi, tatkala permintaan (*demand*) terhadap buah-buahan meningkat, sementara perkebunan pemerintah (*landboun*) di Pasar Minggu tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, biasanya pihak *landboun* membeli buah-buahan dari petani pribumi dan pengusaha kebun buah orang Belanda (*kleinlandbouwers*), demi memenuhi jumlah permintaan tersebut. Dilaporkan, akibat praktik instan ini, sejumlah konsumen mengeluhkan buah-buahan yang mereka beli. Buah-buahan berkualitas sering bercampur dengan buah yang lebih

<sup>8</sup> J.H. Boeke, "Dualism in Colonial Societies". Dalam Hans-Dieter Evers (editors). *Sociology of South-East Asia: Readings on Social Change and Development*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1980, hlm. 26–37.

<sup>9</sup> *Perekonomian Ra'jat* No. 9 Tahun ke-1 1934, hlm. 67.

rendah kualitasnya. Harganya pun menjadi tidak menentu, dan hal ini sungguh merugikan pedagang buah.<sup>10</sup>

Juga dijumpai sumbangan Kebun Percobaan ini terhadap inovasi bibit unggul (yakni bibit jambu klutuk yang kemudian dikenal sebagai jambu klutuk sukun, dan kelak tahun 1960-an merupakan salah satu komoditas unggulan di Pasar Minggu).<sup>11</sup> Selain itu, ditawarkan pula—sebagaimana ditulis dalam *Pandji Poestaka* 7 Tahun ke-5 yang terbit tanggal 25 Januari 1927, hlm. 99–100 tentang—manfaat keberadaan kebun bibit yang menggunakan ilmu pertanian modern dan lulusan sekolah pertanian *Middelbare Landbouwschool* di atas, terhadap kemungkinan meningkatnya kualitas kebun petani pribumi dengan biaya murah.<sup>12</sup>

Pada era Jepang, perkebunan buah milik pemerintah (*landbouw*) mati suri. Pemerintah Jepang tidak memandang penting budidaya buah-buahan karena dianggap tidak bertalian dengan upaya pemenangan perang dengan Sekutu. Perkebunan buah di Pasar Minggu ditelantarkan, bahkan sebagian pohon-pohonnya justru ditebang untuk kayu bakar. Pemerintah Pendudukan Jepang pun mendorong petani setempat untuk mengolah lahan perkebunan, seolah-olah milik mereka sendiri. Pada sudut lain, *kleinlandbouwers* pun mengalami nasib yang sama dengan perkebunan pemerintah (*landbouw*). Dua penghasil dan pemasok buah pun menjadi hilang dari orbit sistem pasar buah-buahan di Batavia (yang kemudian secara resmi diganti menjadi Jakarta). Pada era ini, petani buah pribumi tampil sebagai satu-satunya penghasil buah-buahan sekaligus pemasok untuk pasar Jakarta.

Tampilnya petani buah sebagai kelompok sosial yang berperan sebagai penghasil buah-buahan di pasar Jakarta menandakan pasang

---

<sup>10</sup> Untuk lengkapnya, lihat majalah *Pandji Pustaka* No. 59 1933, hlm. 912–913 dan *Perekonomian Ra'yat* No. 12 Tahun ke-1 1939, hlm. 90; *Perekonomian Ra'yat* No. 6 Tahun ke-1 1939, hlm. 41–42; dan *Pandji Pustaka* No. 8 1937.

<sup>11</sup> Sudjud, 1953 “Riwayat Djambu-Klutuk-Sukun (Djambu Bidji) (Seedles Guava) di Kebun Pembibitan Buah-buahan Tohudan (Solo)”, *Pertanian 10–12 (12)*: 57–59.

<sup>12</sup> Lihat juga *Pandji Pustaka* No. 54 Tahun ke-11 1933, hlm. 986.

naik peran kelompok sosial ini pada fase pertama (1942–1943) pendudukan Jepang. Situasi sosial ekonomi fase pertama pendudukan Jepang ini tidak terlalu berbeda dengan fase terakhir kolonialisme Belanda di Indonesia.<sup>13</sup> Demikian pula dengan pasar buah, keberadaannya juga tidak jauh berbeda dengan situasi yang sama di era terakhir Hindia Belanda. Oleh karena itu, sungguhpun orang Eropa sebagai konsumen buah hilang dari orbit pasar buah, tetapi hilangnya kelompok sosial ini berbanding lurus dengan matinya pasokan dari *landbouw* dan *kleinlandbouwers*. Dengan demikian, tingkat permintaan buah-buahan menunjukkan gejala yang seimbang dengan tingkat penawaran. Buah-buahan pun tetap bernilai komoditas. Komersialisasi buah-buahan tetap berlanjut karena mekanisme pasar buah tetap berdenyut. Petani buah yang merupakan satu-satunya kelompok sosial penghasil dan pemasok komoditas ini menjadi pemasok tunggal untuk pasar buah minus konsumen orang Eropa.

Sekalipun sulit diperoleh data statistik yang relevan, dan seolah-olah mengonfirmasikan tesisnya Kurasawa,<sup>14</sup> fase ini merupakan awal pasang naik peran petani buah di pinggiran Jakarta, utamanya petani buah di Pasar Minggu. Sebagai contoh dialami oleh penduduk Rawajati yang sumber mata pencahariannya lebih beragam dan karena itu struktur sosial ekonomi *wijk* ini lebih dinamik (lihat kembali Bab Empat hlm. 63–64). Sebagian penduduk *wijk* Rawajati yang berlahan sempit dan tidak memiliki pohon buah dengan jumlah yang memadai, menyiasatinya dengan menjadi pemborong buah-buahan dan menjajakannya ke kampung-kampung di Jakarta. Begitu pula, sebagian yang lain telah membuat rumah sewaan untuk menambah pendapatan mereka. Walau demikian, ada pula sebagian penduduk *wijk* ini yang dapat dikatakan mempunyai, bila yang bersangkutan memiliki 10 pohon sawo. Ia bahkan bisa disebut lebih

---

<sup>13</sup> Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara: Bagian Dua*. Jakarta: Teplok Press, 2000, hlm. 300–301.

<sup>14</sup> Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942–1945*. Alih bahasa Hermawan Sulistyo. Jakarta: Grasindo, 1993.

berpunya lagi manakala memiliki pohon kelapa, singkong, rambutan, atau nangka.<sup>15</sup>

Situasi ini berubah total tatkala Jepang mulai terdesak oleh Sekutu pada tahun 1943. Pasang naik produksi, komersialisasi, dan perdagangan buah di wilayah Pasar Minggu yang dilakukan oleh petani setempat pun mulai terseok-seok. Komersialisasi dan perdagangan buah pun bagaikan mati suri setelah Pemerintah Jepang melakukan mobilisasi segenap sumber daya manusia dan ekonomi di wilayah ini. Sistem irigasi tidak terawat dan kemudian rusak. Cukai padi amat berat. Tenaga produktif diangkut untuk romusha. Eksploitasi sumber daya keultra batas ini dilakukan melalui pemerintah desa dan *tonarigumi*, organisasi yang sengaja dibentuk pemerintah di tingkat komunitas. Lebih dari itu, eksploitasi tersebut juga telah menghancurkan sendi-sendi harmoni sosial masyarakat Pasar Minggu. *Tonarigumi* misalnya, yang oleh kepala desa diwajibkan masing-masing merekrut 10 orang romusha, tidak segan-segan memukul bila yang bersangkutan tidak bersedia menjadi pekerja paksa ini. Maka saling curiga pun meningkat, antara penduduk biasa dan aparat, maupun antar sesama tetangga sendiri. Situasi yang serba sulit ini akhirnya membuat gairah bertani sawah dan berkebun buah anjlok. Orientasi sekaligus strategi bertaninya hanya untuk bertahan hidup.<sup>16</sup>

Bagi penduduk Lenteng Agung, situasi ini tidak pula bertambah baik ketika pada September 1942, tanah partikulir Lenteng Agung, satu-satunya tanah partikulir yang ada di Pasar Minggu *Son*, dihapus dan diubah menjadi tanah negara melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1942. Begitu pula ketika pada tahun 1944 status Lenteng

---

<sup>15</sup> Tan Malaka *op-cit.*, hlm. 296–297 dan 301.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Pak Risin, 1 September 2005. Bahkan dalam wawancara tersebut, Pak Risin menyatakan bahwa pada saat itu “kepala ikan lebih berharga dari pada kepala manusia”. Meski demikian, dalam situasi serba sulit di akhir pendudukan Jepang ini, ada saja petani di selatan Pasar Minggu yang tetap dapat menjual buah-buahnya, khususnya ke Pasar Pelmeriam (Jatinegara) dan Pasar Senen Jakarta dan masih ada pula penjual buah-buahan di kereta, meski jumlahnya sangat terbatas.

Agung meningkat menjadi desa (Desa Lenteng Agung) kondisi petani setempat tak pula beranjak membaik. Cukai hasil tananam dan kerja bakti ala tanah partikular tetap dilanjutkan. Perubahan ini hanya mengganti majikannya saja, dari tuan tanah ke Pemerintah Jepang sendiri melalui *Siryooti Kanrikoosya*.<sup>17</sup>

Situasi budi daya dan perdagangan buah-buahan juga tidak beranjak jauh tatkala gejolak revolusi kemerdekaan di wilayah Pasar Minggu terjadi. Pasar buah-buahan di stasiun tidak berfungsi. Situasi ini tidak memungkinkan para pedagang membeli buah-buahan. Juga tidak ada alat angkut untuk mengirimkan buah-buahan ke Jakarta. Kereta listrik tidak beroperasi. Demikian pula, memikul buah-buahan dan menjajakannya juga sulit dilakukan karena seringnya terjadi pertempuran antara pihak NICA dan pihak Republik.

Selain itu, sebagian penduduk juga tidak berkonsentrasi dalam budi daya buah-buahan karena terlibat dalam perang kemerdekaan. Sebagian penduduk Desa Jagakarsa, misalnya menjadi anggota Laskar Banteng Merah, laskar yang berafiliasi ke komunis, dan menguasai secara *de facto* pelosok selatan Pasar Minggu. Selain itu, penduduk Pasar Minggu pun banyak yang menjadi laskar Haji Darip yang memilih lokasi perjuangannya di daerah Klender, wilayah Timur Jakarta.<sup>18</sup>

Setelah wilayah Pasar Minggu jatuh ke tangan NICA, apalagi setelah mereka mampu mengonsolidasikan kekuasaan sehingga terbentuk ketertiban sosial (*social orders*) secara relatif, komersialisasi dan perdagangan buah-buahan kembali bergeliat meski belum sepuh seperti sebelum perang, karena dalam suasana revolusi, pangsa pasar buah-buahan sangat kecil. Pasar buah sekitar Stasiun Pasar Minggu mulai hidup, menerima dengan jumlah terbatas penjualan

---

<sup>17</sup> *Kan Po* No 2 Tahun ke-1, September 1942, hlm. 9; dan *Kan Po* Nomor Istimewa, Maret 1943: 27; *Kan Po* 12 Tahun ke-2, Februari 1943, hlm. 3–5; dan *Pandji Pustaka* No. 48 1943, hlm. 173.

<sup>18</sup> Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990, hlm. 20, 96 dan 81–82; dan Wawancara dengan Pak Risin, 1 Oktober 2005.

buah-buahan dengan sistem pikulan dari pelosok. Demikian pula, jaringan kereta listrik Jakarta-Bogor beroperasi kembali, dan sejumlah terbatas buah-buahan dikirim ke Jakarta melalui sistem angkutan massal ini.

Tak banyak yang dilakukan oleh sebagian petani buah Pasar Minggu ketika masa penen. Tatkala pohon rambutan, dukuh, dan durian berbuah, mereka membiarkan saja lantaran nyaris tak bermakna sebagai komoditas, meski ada saja petani yang berusaha memasarkan hasil buah-buahannya itu ke Stasiun Pasar Minggu. Kampung Kandang misalnya, walaupun jaraknya tidak jauh dari Stasiun Pasar Minggu, tetapi hanya sedikit penduduknya mengusahakan buah-buahan sebagai sumber mata pencahariannya. Ini berbeda dengan kampung yang langsung berdekatan dengan Stasiun Pasar Minggu, seperti Kampung Jawa. Kampung-kampung ini masih dapat berfungsi sebagai pemasok buah-buahan.

Jadi, meski pada penghujung era revolusi atau masih diliputi suasana tidak menentu, namun secara umum peran petani buah lebih meningkat. Hal tersebut amat bertalian dengan fakta bahwa hanya merekalah yang berperan sebagai penghasil dan pemasok tunggal, meski permintaan terhadap buah sendiri cenderung tidak meningkat. Belakangan, tatkala situasi wilayah Pasar Minggu di akhir tahun 1950-an telah benar-benar aman, petani buah Pasar Minggu memasuki era kejayaan, suatu proses sosial ekonomi panjang yang potensinya telah terbentuk di era peralihan ini.

Pada 24 Maret 1950, secara formal-administratif dan dengan berstatus kecamatan di bawah Kewedanaan Kramat Jati, Pasar Minggu menjadi wilayah Jakarta melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.125 Tahun 1950. Sistem pertanian buah pun berkembang seiring dengan perubahan administratif dan transisi sosial pasca penyerahan kedaulatan. Keresahan sosial yang menandai proses transisi pada paruh pertama dekade 1950-an, membuat pertanian buah berkembang secara merangkak. Sungguh pun menghadapi situasi tidak menentu, dan lantaran tidak ada pilihan lain berhubung hancurnya sistem irigasi di wilayah ini akibat

tidak dirawat sejak pendudukan Jepang, sebagian penduduk setempat telah ada yang beralih menjadi petani buah bahkan sebagiannya juga telah bertindak sebagai pedagang buah sendiri.

Pada sisi lain, gejala yang langsung terkait dengan menaikinya pasar buah ialah dekolonisasi Jakarta. Jakarta era kolonial—meminjam istilah Samsuridjal, Walikota kedua Jakarta—adalah “*westerse enclave*”.<sup>19</sup> Pribumi adalah warga kelas dua. Maka, jumlah penduduk pribumi di kota ini meningkat, dan menaik lagi di tahun 1950-an, karena tidak amannya situasi pinggiran Jakarta akibat merajalelanya bekas laskar yang berperilaku kriminal dan para jagoan-kriminal. Dalam kaitan ini, dapat ditunjukkan bahwa menaikinya kebutuhan buah ternyata memiliki pertalian dengan meningkatnya jumlah penduduk Jakarta. Tatkala penduduk Jakarta masih berjumlah 350.000 jiwa, ia membutuhkan pasokan buah-buahan sebanyak 27 juta kg per tahunnya. Pada tahun 1952, tatkala penduduk Jakarta telah mencapai 2,5 juta jiwa, tentu konsumsi buah-buahan lebih banyak lagi.<sup>20</sup>

Konteks meningkatnya permintaan buah-buahan inilah yang merupakan salah satu faktor penarik meluasnya pertanian buah di Kecamatan Pasar Minggu. Akan tetapi, sampai tahun 1955, permintaan ini baru direspons secara utuh oleh petani buah di utara Pasar Minggu. Petani selatan Pasar Minggu baru merangkak menjadi petani buah. Peralihan jenis pertanian ini terhambat oleh merajalelanya bekas laskar perang kemerdekaan dan para jagoan-kriminal sebagaimana telah diuraikan di muka.

Maka Pemerintah Kotapradja Jakarta pun kemudian bertindak, apalagi situasi tersebut dibutuhkan demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Satuan angkatan darat kemudian diterjunkan di wilayah rawan seperti Srengseng Sawah dan Jagakarsa. Untuk memudahkan operasi keamanan ini, dibangunlah markas untuk kesatuan tersebut di areal *landbouw*. Dari

---

<sup>19</sup> Pemerintah Kotapradja Djakarta, *Djakarta Raja*, hlm. 6.

<sup>20</sup> *Majalah Kotapradja* No. 16 1952, hlm. 8.

markas inilah, operasi pemulihan keamanan dilakukan baik terhadap Laskar Banteng Merah maupun terhadap jagoan-kriminal seperti Si Manyar.<sup>21</sup>

Rupanya kehadiran markas kesatuan Zeni Angkatan Darat di wilayah selatan menandai babak baru meluasnya pertanian buah penduduk di wilayah ini. Kesatuan darat ini tidak hengkang begitu mereka berhasil melakukan operasi pemulihan ketertiban. Mereka justru makin kuat menetap setelah darurat militer, terlebih lagi tat-kala dilakukan latihan perang untuk persiapan perebutan Irian Barat. Sejak tahun 1960, selain digunakan untuk markas operasi pemulihan keamanan dan latihan perang, areal *landbouw* juga digunakan untuk asrama dan kompleks perumahan kesatuan Angkatan Darat ini.

Ini adalah awal dari proses selanjutnya yang berujung tidak berproduksinya perkebunan buah (*landbouw*) di selatan Pasar Minggu. Apalagi setelah dibangun kompleks perumahan untuk kesatuan Angkatan Darat ini, hal tersebut menyumbang pada menyempitnya luas Situ Mangga Bolong dan debit airnya pun menyusut. Semua itu semakin menyulitkan pertanian sawah di wilayah ini. Akhirnya, petani setempat beralih secara massal menjadi penghasil buah-buahan.<sup>22</sup>

Untuk beberapa hal, peralihan ke pertanian buah secara massal ini memperoleh fasilitasi dari Dinas Pertanian Rakyat Pemerintah Kotapraja Jakarta dan Kebun Percobaan Rakyat Pasar Minggu. Kedua lembaga modern yang menyandingkan terminologi rakyat pada namanya itu, menggelar pelbagai program dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian penduduk setempat. Dari

---

<sup>21</sup> Lihat *Prosiding Rembuk Warga Setu Babakan*, hlm. 4; dan *Pertanian No. 10 Tahun ke-11 1960*. Bahkan pada tahun 1975, ketika sebagian areal *landbouw* yang berbatasan dengan Depok dibebaskan untuk lahan kampus Universitas Indonesia (UI), pihak UI harus bertikai terlebih dahulu dengan Kesatuan Zeni Angkatan Darat ini. Hanya dengan jaminan dari Jenderal M. Yusuf, Panglima ABRI saat itu, proses alih kepemilikan lahan berjalan lancar. Kesatuan angkatan darat ini kemudian tidak mengutak-atik masalah lahan ini kembali. Lihat Antony Z. Abidin, Ikrar N. Bhakti, dan Dedy N. Hidayat, *Mabar: Pejuang, Pendidik, dan Pejuang Pendidik*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997.

<sup>22</sup> Bhoedisantosa, *Op. Cit.*, hlm. 98–100.

sudut dekolonisasi, adanya kebijakan resmi kedua lembaga yang ditujukan kepada penduduk pribumi ini merupakan antitesis kebijakan *Gemeente* Batavia yang cenderung mengabaikan rakyat pribumi, dan wujud akomodasi formal terhadap situasi sosial ekonomi pertanian yang telah digeluti penduduk setempat sejak lama. Sementara itu, dari sudut penduduk sendiri, program tersebut merupakan teladan hidup bagi praktik pertanian buah modern meski diserap secara terbatas, sekedar melengkapi sistem pertanian buah konvensional yang mereka terima dari generasi sebelumnya. Petani setempat pun dapat memperoleh bibit buah unggul dari Kebun Percobaan Pasar Minggu dengan harga murah karena disubsidi pemerintah.

Adalah sesama petani buah yang lebih berfungsi sebagai teladan hidup, dan faktor ini yang membuat sistem pengetahuan pertanian buah konvensional tadi dengan mudah menyebar. Struktur pengetahuan konvensional berkisar tentang jenis buah-buahan yang laku dijual dan mudah dipelihara, dan jenis buah-buahan yang kurang laku dijual, harganya murah, dan sulit pula dipelihara.

Struktur pengetahuan bertani tradisional yang kadangkala dibumbui oleh penetrasi sistem bertani modern di atas, juga menyediakan teknik menjual buah-buahan di pasar, yakni mengacu kepada apa yang disebut sebagai *barga bijang*, mekanisme penetapan harga yang berpatokan kepada harga beras. Pada sisi lain, munculnya pola *barga bijang* ini terkait-erat dengan fakta bahwa buah-buahan bukanlah kebutuhan primer dalam susunan makanan masyarakat Indonesia. Lantaran itu, buah-buahan harus dijual terlebih dahulu untuk kemudian dibeli beras. Buah-buahan adalah langkah awal untuk memperoleh beras.

Rupanya pula, pekerjaan sebagai petani buah menuntut pola kerja yang keras dan disiplin waktu yang tinggi, apalagi bila yang bersangkutan membawa sendiri komoditas buah-buahnya itu ke pasar di Jakarta. Hal ini kiranya dapat menepis anggapan bahwa orang Betawi (khususnya pinggir) memiliki etos kerja rendah.

Memasuki tahun 1960-an, pertanian buah telah menjadi sumber mata pencaharian yang digeluti oleh hampir seluruh penduduk asli Pasar Minggu. Penghasilan petani buah pun lebih besar daripada bila mereka bertani sawah dengan luas lahan yang sama. Proses monetisasi pun semakin intensif, dan proses ini berujung pada menguatnya gejala individualisasi. Gejala terakhir ini amat tampak dari cerita dari mulut ke mulut yang dianggap oleh penduduk Pasar Minggu sebagai penyebab wabah ulat bulu di Desa Tanjung Barat, sebagaimana telah diungkap pada bab enam, hlm. 161–162 laporan ini.

Era jaya petani buah terus berlanjut dan menyusut tajam setelah penetrasi liberalisasi ekonomi Orde Baru juga terasa di wilayah ini. Liberalisasi ekonomi merupakan kebijakan yang mengubah struktur ekonomi Indonesia. Dominasi pertanian digeser oleh sektor industri. Dalam kaitan ini, Pasar Minggu yang secara resmi didefinisikan sebagai wilayah perdesunan tidak dirancang untuk mempertahankan pertanian buah-buahan yang sudah meluas dan mengakar tersebut dan tidak dilihat sebagai entitas wilayah tersendiri, melainkan dirancang untuk mendampingi pusat kota. Tahun 1966 misalnya, Pemerintah Ali Sadikin memindahkan kebun binatang dari pusat kota (Cikini) ke Ragunan. Areal untuk kebun binatang yang jauh lebih luas daripada kebun binatang Cikini (peninggalan Pemerintah Hindia Belanda) berlokasi di *landbouw* Ragunan. Jadi, setelah kebun buah tadi dijadikan kebun binatang, habis pula fungsi *landbouw* ini sebagai penghasil dan pemasok bagi pasar buah yang tumbuh sejak awal abad ke-20. Begitu pula dengan kebun buah (*landbouw*) Jatipadang yang juga milik pemerintah, juga dialihfungsikan pada pertengahan tahun 1970-an menjadi perumahan pegawai negeri sipil Departemen Pertanian. Dengan beralihfungsinya kebun Jatipadang, tamat sudah riwayat kebun buah milik pemerintah di utara Pasar Minggu.<sup>23</sup> Dengan demikian, produksi buah-buahan di wilayah ini pun amat mengandalkan kebun dan

---

<sup>23</sup> Pola yang sama juga terjadi pada kebun buah milik pemerintah (*landbouw*) di Tanjung Barat. Awal tahun 1990-an, kebun buah tersebut menjadi kompleks perumahan mewah

pekarangan penduduk setempat yang luasnya kian menyusut karena beralihfungsi menjadi lahan perumahan.

Maka sungguhpun pada tahun 1970-an, Pasar Minggu masih dikenal sebagai penghasil buah-buahan, peran tersebut sebenarnya dimainkan oleh selatannya (dan pada tahun 1989 menjadi kecamatan tersendiri, Kecamatan Jagakarsa). Kecuali kebun buah (*landbouw*) Kampung Kandang (yang pada tahun 1980-an diubah menjadi pemakaman umum), produksi buah-buahan di wilayah Selatan ini juga mengandalkan pekarangan dan kebun penduduk. Adalah di luar lingkup laporan ini, untuk menyusuri produksi buah-buahan pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Namun, sekadar mengungkap, bahwa luas kebun milik penduduk setempat kian menyusut, karena banyak dibeli oleh para pendatang untuk kemudian dibangun rumah tempat mereka tinggal. Kebun buah yang masih tersisa dan kini masih dapat dijumpai yang luasnya tidak seberapa, merupakan sisi *blessing in disguise*. Kebun buah tersebut adalah milik orang kaya Jakarta dalam rangka investasi tanah di pinggirannya. Untuk pengolahan dan perawatan sehari-harinya, kebun tadi diserahkan kepada penduduk asli yang tinggal dekat kebun tersebut, yang kadangkala merupakan pemilik semula. Hasil kebunnya itu biasanya diberikan kepada pengolah lahan, sebagai kompensasi balas jasa karena mereka telah mengolah dan merawat investasinya di atas.<sup>24</sup>

Studi ini diharapkan dapat menambah khazanah tentang sejarah pinggirannya kota (khususnya yang menggunakan pendekatan sosial ekonomi) yang sampai saat ini cenderung diabaikan dalam historiografi Indonesia. Studi ini pun diharapkan dapat mengisi historiografi kota yang lebih terfokus pada pusat kota, dan karena itu ia lebih tepat untuk disebut sebagai sejarah pusat kota. Padahal, penulisan sejarah tentang pinggirannya kota memiliki kekhasannya tersendiri. Dengan kata lain, deskripsi tentang pinggirannya kota akan lebih tajam dan bermakna bila tidak dilihat sebagai entitas yang mandiri melainkan dipertalikan dengan pusat kota, sebagaimana ditunjukkan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Pak Riih, Juli 2004.

oleh laporan ini. Pusat kota dikonseptualisasikan memiliki pengaruh yang kuat terhadap dinamika penduduk pinggiran kota. Pinggiran kota pun ditempatkan sebagai penyangga atau pemasok penduduk pusat kota.

Juga sebagaimana ditunjukkan oleh laporan ini, pendekatan riset yang mempertalikan dinamika lokal terhadap konteks yang lebih luas, atau bagaimana dampak sosial ekonomi periferalisasi suatu masyarakat (terhadap perubahan sistem pembagian kerja kapitalisme internasional), dapat mengungkap proses bertumbuh, pasang naik, bahkan pasang surut sistem pertanian buah di wilayah pinggiran kota. Bahwa gejala komersialisasi buah-buahan yang dilakukan petani Pasar Minggu pada awal abad ke-20, terkait dengan tumbuhnya pasar komoditas pertanian ini, khususnya di Batavia. Petani pinggiran pun dapat mendiferensiasikan jenis pertaniannya hingga menjadi pemasok hasil pertanian yang telah bernilai komoditas. Pada sisi lain, tumbuhnya pasar buah terkait dengan berkembangnya kota-kota Hindia Belanda, khususnya Batavia. Secara lebih khusus, jumlah penduduk Batavia yang meningkat pada peralihan abad ke-20, utamanya semakin naiknya jumlah lapis atas kota kolonial (orang Eropa) yang memiliki daya beli tinggi dan kebutuhan buah-buahan yang besar (pola makan *dessert*), dapat dilihat sebagai fondasi sosial bagi bertumbuhnya pasar buah di Batavia. Pada sisi lain, dinamika kependudukan Batavia sendiri dapat ditelusuri sebagai dampak sosial ekonomi dari gejala liberalisasi ekonomi, atau fenomena konsekuensi periferalisasi terhadap pembagian kerja internasional lama.<sup>25</sup>

Pada akhirnya, menyempitnya pertanian buah di Pasar Minggu juga dapat dijelaskan dengan pendekatan di atas. Menyempitnya luas lahan kebun milik pemerintah maupun milik penduduk di Kecamatan Pasar Minggu dan kemudian beralih fungsi, dilihat sebagai konsekuensi pinggiran kota yang dirancang untuk menyangga pusat

<sup>25</sup> Mengenai konsep pembagian kerja internasional lama maupun baru lihat Norman J. Glickman, "Cities and the International Division of Labor", dalam Michael Peter Smith dan Joe R. Feagin (eds.), *The Capitalist City*. Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1993.

kota, setelah Jakarta mengalami periferalisasi dalam sistem pembagian kerja internasional baru. Kebun milik pemerintah beralih menjadi pemakaman umum, tempat rekreasi, dan perumahan pegawai negeri Departemen Pertanian. Begitu pula kebun milik penduduk setempat beralih fungsi setelah dibeli oleh para pendatang, yang ingin bermukim di pinggiran kota tetapi tetap dapat berkomutasi ke pusat kota.[]

Buku ini tidak diperjualbelikan.

# Daftar Pustaka

## Buku

- Abdullah, Taufik. 1986. “Ke Arah Sejarah Penulisan Nasional di Tingkat Lokal” dalam Taufik Abdullah (editor), *Sejarah Lokal di Indonesia*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 310–323.
- Abeyasekera, Susan. 1989. *Jakarta: A History*. Revised Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Abidin, Antony Z., Ikrar N. Bhakti, dan Dedy N. Hidayat. 1997. *Mahar: Pejuang, Pendidik, dan Pejuang Pendidik*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Afandi. 2005. *Perkampungan Budaya Betawi sebagai Representasi Identitas Kebetavian*. Depok: Tesis Megister Program Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unveritas Indonesia.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1980. *Memori Serah Jabatan 1931–1940 Jawa Barat (1)*. Arsip Nasional Republik Indonesia Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 11. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- . 1976. *Memori Serah Jabatan 1921–1930 (Jawa Barat)*. Arsip Nasional Republik Indonesia Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 8. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin. 2004. *Key Concepts in Post-Colonial Studies*. London: Routledge.
- Aziz, Abdul. 2002. *Pengusuran Mengakibatkan Terjadinya Migrasi Lokal di Jakarta 1966–1977*. Skripsi Sarjana Sejarah. Depok: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2004. *Dua Abad Penelitian Pertanian di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pertanian.

- Berger, Peter L dan Thomas Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Blussé, Leonard. 1986. *Strange Company: Chinese Settlers, Mestizo Women, and the Dutch in VOC Batavia*. Dordrecht-Holland: Foris Publications
- Boedhisantosa, Soeboer. 1962. “Djakarsa: Desa Kebun Buah-buahan Dekat Djakarta” dalam Koentjaraningrat (Penghimpun), *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*. Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Boeke J.H. 1980. “Dualism in Colonial Societies” dalam Hans-Dieter Evers (editors), *Sociology of South-East Asia: Readings on Social Change and Development*. Kuala Lumpur: Oxford University Press: 26–37.
- Castles, Lance. 1967. “The Ethnic Profile of Djakarta” dalam Indonesia Vol 1 (April). Itacha: Modern Indonesian Project Cornell University.
- Cribb, Robert Bridson. 1990. *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945–1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Danasasmita, Saleh. 1983. *Sejarah Bogor: Bagian I*. Bogor: Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Bogor.
- Dieter, Evers-Hans dan Rudiger Korff. 2000. *Southeast Asia Urbanism: The Meaning and Power of Social Space*. Hamburg: LIT Verlag
- Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemerintah DKI Jakarta. 2002. *Sejarah Pimpinan Jakarta Sepanjang Tiga Abad 1620–1942*. Jakarta.
- Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi DKI Jakarta. 2003. *Jakarta Kota Joang*. Jakarta.
- Dwi L, Amurwani. 2005. “Jago dan Jagoan di Simpang Jalan: Kriminalitas di Jakarta 1930–1960”. *Makalah Lokakarya Hasil Penelitian Indonesia Across Orders: Reorganization of Indonesian Society*, Padang; 3–5 Agustus 2005.
- . 2006. “Lu Jual Gua Beli: Jago dan Jagoan Kriminalitas di Jakarta 1930-1960”. *Makalah* lokakarya hasil penelitian “Indonesia Across Orders: Reorganization of Indonesian Society 1930-1960”. Kerja sama antara Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) dan Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD, Belanda). Ciater Subang; 28 Maret 2006.
- Fakih, Farabi. 2005. *Membayangkan Ibukota di Bawah Soekarno*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Garnadi, Attilia. 1953. "Pekarangan sebagai Faktor Produksi dan Fungsi Sosial Pekarangan", *Pertanian* No. 10 Tahun ke-8, 1953.
- Gie, The Liang. 1958. *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta*. Djakarta: Kota Pradja Djakarta Raja.
- Glickman, Norman J. 1993. "Cities and the International Division of Labor" dalam Michael Peter Smith dan Joe R. Feagin (eds.). *The Capitalist City*. Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- Grijns, Kees. 2000. "Jabotabek place names" dalam Kees Grijns and Peter J. M. Nas. *Jakarta: Socio-Cultural Essays*. Leiden: KITLV Press.
- Gunawan, Restu. 2006. "Banjir di Tengah Kota: Konflik Negara dan Masyarakat dalam Penguasaan Lahan di Jakarta 1930–1970-an". *Makalah lokakarya hasil penelitian Indonesia Across Orders: the Reorganization of Indonesian Society 1930–1960*. Kerja sama antara Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) dan Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD, Belanda), Ciater Subang; 28 Maret 2006.
- Haris, Tawaludin. 1995. *Jakarta Masa Hindia Belanda*. Laporan Penelitian Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Hatmawan, Adhitya. 2002. *Perkembangan Transportasi Kereta Api di Jakarta 1870–1925*. Skripsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Hering, Bob. 2003. *M. H. Thamrin: Membangun Nasionalisme Indonesia*. Terjemahan Harsono Sutejo. Jakarta: Hasta Mitra.
- Heuken. 1997. *Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.
- Heuken, Adolf dan Grace Pamungkas. 2001. *'Kota Taman' Pertama di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- I.N., Soebagijo. 1981. *Sudiro: Pejuang Tanpa Henti*. Jakarta: Gunung Agung.
- Johan, Irmawati M. 1992. *Kota Jakarta Tahun 1950-1980*. Laporan Penelitian Fakultas Sastra UI.
- Kardiman, Iman. 2000. *Atlas DKI Jakarta: Area Perwilayah Kecamatan*. Jakarta: Mascot Media Nusantara.
- Koentjaraningrat. 1975. "Masyarakat Desa di Selatan Jakarta". *Masyarakat Indonesia*, Seri Monografi No.1. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1984. "Ciracas dan Cilangkap, Dua Desa di Pasar Rebo, Selatan Jakarta" dalam Koentjaraningrat (editor). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942–1945*. Alih bahasa Hermawan Sulistiyo. Jakarta: Grasindo.
- Legge, J.D. 1961. *Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A Study in Local Government 1950-1960*. New York: Cornell University Press.
- Mahfoedi, Moh. 1951. “Pekerdjaan di Balai Penjelidikan Perkebunan”, *Pertanian* No.4 Tahun ke-7, 1951, hlm. 12–19.
- Malaka, Tan. 2000. *Dari Penjara ke Penjara*. Bagian Dua. Jakarta: Teplok Press.
- Marzali, Amri. 1989. “Development and Urbanization in Condet”, *Berita Antropologi* No.45. Depok: Jurusan Antropologi FISIP UI.
- Mas’oed, Mochtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Nas, Peter J. M. dan Kees Grijns. 2000. “A Sample of Current Socio-Historical Research” dalam Kees Grijns and Peter J. M. Nas. *Jakarta: Socio-Cultural Essays*. Leiden: KITLV Press.
- Partijunianti, Endang. 1984. *Pola Sosialisasi Anak dalam Keluarga Orang Betawi di Desa Ragunan*. Tesis Pasca Sarjana Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Pemerintah Kotapradja Djakarta. 1953, *Djakarta Raja*. Djakarta: Van Dorp.
- Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta. 1972. *Jakarta Membangun*. Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota.
- \_\_\_\_\_. 1972, *Some Data about Djakarta*. Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota.
- Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta. 1977. *Karya Jaya: Kenang-kenangan Kepala Daerah Jakarta 1945–1966*. Jakarta.
- Prosiding Rembuk Warga Setu Babakan. 2003. Bogor: Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Institut Pertanian Bogor.
- Raben, Remco. 2000. “Round about Batavia: Ethnicity and Authority in the Ommelanden 1650–1800” dalam Kees Grijns and Peter J. M. Nas. *Jakarta: Socio-Cultural Essays*. Leiden: KITLV Press.
- Sagimun M.D. 1980. *Jakarta: dari Tepian Air ke Kota Proklamasi*, Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta.
- Sahab, Alwi. 2005. “Mudik di Jalan Daendels”, *Republika*, 13 November 2005, hlm.15.
- Sahab, Yasmin. 2000. “Betawi Aristocrat” dalam Koes Grijns and Peter J. M. Nas. *Jakarta: Socio-Cultural Essays*. Leiden: KITLV Press.

- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Sirman, Emiria. 1986. *Perubahan Mata Pencabarian Petani Buah-buahan akibat Pembangunan STTN di Kampung Cimpedak Kelurahan Srengseng Sawah*. Jakarta: Skripsi Sarjana Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tidak dipublikasikan.
- Siswantari. 1989. *Pembangunan Kota Baru Kebayoran sebagai Kawasan Pemukiman Penduduk (1948–1953)*. Depok: Skripsi Sarjana Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Smith, David A. 1996. *Third World Cities in Global Perspective: The Political Economy of Uneven Urbanization*. Colorado: Westview Pres.
- Soesanto, Soetopo. 1971. *Djakarta Raja pada 'Masa Pemerintah Nasional Kota' 17 Agustus 1945–21 Djuli 1947*. Jakarta: Skripsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Somantri, Gumilr Rusliwa. 2000. *Migration within City: A Study of Socioeconomic Processes and Intra-City Migration in Jakarta*. Breitenbach: Saarbruecken and Port Laudea.
- Sopandi, Andi. et.al. 2005. *Profil Budaya Masyarakat di Kota Bekasi*. Bekasi: Dinas Pariwisata Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi
- Steiner, Kurt. 1965. *Local Government in Japan*, Cornell: Cornell University Press.
- Surjomihardjo, Abdurahman. 1977. *Pemekaran Kota Jakarta*, Jakarta: Jambatan.
- Suryana, Asep. 2003. "Transformasi Masyarakat Kota Depok: Dari Pembagian Kerja Internasional Menuju Suburbanisasi Jakarta", *Jurnal Sosiologi Masyarakat* No. 12, Depok: Lab Sosio FISIP UI.
- \_\_\_\_\_. 2004. "Transformasi Sosial Pribumi Depok Tahun 1930-1960", *Jurnal Masyarakat dan Budaya* No.2. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1998. "Dari Batutulis hingga Plaza: Tatanan dan Konfigurasi Simbolik Kota Bogor", *Jurnal Masyarakat* No 7.
- \_\_\_\_\_. 2006. "Bagai di Simpang Jalan: Perubahan Strategi Pembangunan dan Transformasi Sosial Ekonomi Komunitas Baduy-Luar, Banten Selatan". *Jurnal Komunitas* No.2. Jakarta: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
- Susatyo, Didik Wedyo. 1989. *Petani Buah: Suatu Kajian tentang Pola Penghasilan dan Pembelanjaan Petani Buah di Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur*. Depok: Skripsi Sarjana Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

- Tjandrasasmita, Leirissa, dan Nana Nurliana. 2000. *Sejarah Perkembangan Kota Jakarta*. Jakarta: Dinas Museum dan Pemugaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta.
- Utrecht, Elien. 2006. *Melintasi Dua Jaman: Kenangan tentang Indonesia Sebelum dan Sesudah Perang*. Penerjemah Ahmad Sunjayadi. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Verslag over die Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indie over Het Jaar 1911. 1914. Batavia: Drukkerij Papyrus.
- Wulandari, Prita. 1987. *Kerusuhan Tambun 3 April 1869*. Skripsi Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indoensia. Tidak diterbitkan.

## Artikel

- “Beberapa Persoalan Djakarta”. 1963. *Mingguan Djaja* No.74 Tahun II. 22 Juni.
- “Departemen Stroe “Sarinah”: Toko Eceran yang Menjual Segala Rupa Barang”. 1963. *Mingguan Djaja* No. 65 Tahun II. 20 April.
- Djajaningrat, Puspo Harsono. 1961. “Masalah Perumahan di Djakarta Raya”, *Mingguan Djaja* No. 14. 21 November.
- Effendi, Ziwar. 1955. “Kesan2 dari Pekan Pertanian Pasar Minggu”, *Pertanian* 6 (6): 2–4.
- Garnadi, Attila. 1953. “Pekarangan sebagai Faktor Produksi dan Fungsi Sosial Pekarangan”, *Pertanian* 10 (8):16–23.
- Go, B.G. 1970. “Modernisasi Pertanian Indonesia”. *Pertanian* 7–8 (19): 9–13.
- Hadiwinoto, Soebar. 1955 “Usaha2 dan Langkah2 Djaw. Pertanian Rakjat Selama 1945–1955”, *Pertanian* 7 (6): 2–7.
- Hasyim, Anang. 1952. “Kecamatan Mampang Prapatan dan Daerahnya”, *Kotapradja* No.19–20, 15 Mei.
- Husin, Moh. 1955. “Pertanian dan Pembangunan Negara”, *Pertanian* 4 (6): 2–3.
- “Kecamatan Pasar Minggu”. 1953, *Kotapradja*.
- Liang, Pek Hem. 1955. “Pertanian dan Pembangunan Negara”, *Pertanian* 5 (6): 2–3.
- Mahfoedi, Moh. 1951. “Pekerdjaan di Balai Penjelidikan Perkebunan”, *Pertanian* 4 (7): 12–19.
- Manap, Abd. 1957a. “Pondok Bakti”, *Pertanian* 6 (8): 112–122.

- \_\_\_\_\_. 1957b. “Pasar Minggu Meramaikan 1 April”, *Pertanian* 6 (8): 123–131
- “Pasar Senen 1 3/4 Abad yang Lampau”. 1963, *Mingguan Djaja* No. 74, 22 Juni.
- “Senen: Sekarang dan Hari Nanti”. 1964, *Mingguan Djaja* No. 201, 27 November.
- Seorang Pembantu (nama samaran). 1963. “Pasar Senen Satu Sepertiga Abad yang Lalu”, *Mingguan Djaja* No. 74, 22 Juni: 30–35.
- Shahab, Alwi. 2005. “Mudik di Jalan Daendels”, *Republika*, 13 November: 15.
- Siok, Oey An. 1964. “Proyek Cempaka Putih: Sebuah Proyek Perumahan untuk Masyarakat yang Dibangun dengan Funds dan Forces Masyarakat”, *Mingguan Djaja* No. 129: 11 Juli.
- Siswosoebroto A.J. 1954. “Kesimpulan dari Konperensi Dinas Kementerian Pertanian pada Tanggal 28 April s.d 3 Mei 1954 di Djakarta”, *Pertanian*: 23–25.
- Soemarno, Herman. 1964. “Redistribusi Tanah!”, *Mingguan Djaja* No. 141 tahun ke-3, 3 Oktober.
- Sudjud. 1953. “Riwayat Djambu-Klutuk-Sukun (Djambu Bidji) (Seedles Guava) di Kebun Pembibitan Buah-buahan Tohudan (Solo)”, *Pertanian* 10–12 (12): 57–59.
- Sujino. 1955. “Kedudukan Minyak Sereh di Pasar Dunia Sesudah Perang Dunia II Sampai Permulaan tahun 1954”, *Pertanian* 1 (6): 24–30.
- Tjoan, Oey Sioe. 1953. “Usaha untuk Memajukan Perkebunan Rakyat Dilihat dari Sudut Perdagangan”, *Pertanian* 9 (9): 24–28.
- Wartawan “Djaja”. 1963. “Pemantjangan Tiang Pertama Departemen Store “Sarinah”: Bukan Proyek Mewah-mewahan, tapi Vital sebagai Alat Distribusi dan Penjaga Harga, Kata Presiden”, *Mingguan Djaja* No. 65 (2): 20 April.
- WS, Erna. 1963. “Tjikini akan Diremajakan menjadi Daerah Usaha”, *Mingguan Djaja* No. 128.

## **Wawancara**

- 27/07/2005. Pak Maan, 73 tahun, Penduduk Kampung Kandang, Pasar Minggu.
- 5/09/2005. Haji Mada, 73 tahun, Penduduk Asli Kukusan Depok.

- 1/09/2005. Nani, 65 tahun, Pensiunan Kantor Perkebunan Rakyat Pasar Minggu, Tinggal di Pasar Minggu.
- 4/11/2005. Nani, 65 tahun, Pensiunan Kantor Perkebunan Rakyat Pasar Minggu, Tinggal di Pasar Minggu.
- 11/2005. Haji Sarmada, 74 tahun, Sesepuh Kampung Jawa Pasar Minggu.
- 2/09/2005. Pak Risin, 73 tahun, Penduduk Srengseng, Jagakarsa.
- 1/10/2005. Pak Risin, 73 tahun, Penduduk Srengseng, Jagakarsa.
- 11/2005. Pak Risin, 73 tahun, Penduduk Srengseng, Jagakarsa.
- 11/2004. Engkong Riih, 80 tahun, Sesepuh Setu Babakan, Jagakarsa.

## **Majalah**

*Kotapradja* tahun 1951–1959

*Mingguan Djaja* 1960–1966

*Sensus Penduduk* Oktober 1961.

*Sensus Penduduk* Maret 1961.

*Pertanian* 1950–1970

*Pandji Pustaka* 1927–1943

*Perekonomian Ra'yat* 1934–1939

*Kan Po* 1942–1954

# Lampiran 1: Kenaikan Tarif Bibit Kantor Perkebunan Rakyat Pasar Minggu

## BAGAN 1

<b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>
<b>PUSAT DJAWATAN PERTANIAN RAKJAT KANTOR PERKEBUNAN RAKJAT PASAR MINGGU</b>
Pasarminggu, 2 Agustus 1954 No. 2704/PR/4011.8,--
<b>PENGUMUMAN</b>
Dengan ini dipermaklumkan sebagai berikut:
Sampai sekarang pendjualan bibit pohon buah <sup>2</sup> an oleh Kebun Pembibitan Pasarminggu dilakukan dibawah harga produksi.
Mengingat keadaan keuangan Negara pada dewasa ini, maka kami terpaksa menaikkan harga bibit tersebut.
Mulai tanggal 1 Agustus 1954, harga bibit <sup>2</sup> mendjadi sebagai berikut:
1. Untuk oculatie semua djenis djeruk dengan semua djenis rambutan Rp. 5,--(lima rupiah) per pohon, franco Pasarminggu.
2. Untuk lain <sup>2</sup> bibit pohon buah <sup>2</sup> an Rp3,--(tiga rupiah) per pohon, franco Pasarminggu.
3. Demikian djuga harga oculatie bunga mawar dari Kebun Pertjobaan Tjipanas mendjadi Rp3,-- per pohon, franco Pasarminggu.
Kepala Kantor Perkebunan Rakjat

Disalin dari *Pertanian* 8 (2) 1954: cover belakang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

## BAGAN 2

**KANTOR PERKEBUNAN RAKJAT  
KEBUN PERTJABAAN PASARMINGGU  
(TILP. DJN: 407-408 PES 7)**

***PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENGIRIMAN BIBIT  
POHON BUAH-BUAHAN DAN DAFTAR SEMENTARA  
HARGA BIBIT-BIBIT***

### PEMESANAN

Pengiriman bibit2 dijalankan menurut nomor urut dari pesanan dan dimasa persediaan belum mentjukupi, diatur menurut kebutuhan.

Pesanan hendaklah diliwatkan Djawatan Pertanian Rakjat jang bersangkutan, dan djika dikehendaki oleh Djawatan tersebut akan kami atur liwat Djawatan Pertanian Rakjat

### HARGA

Harga okulasi, tumbuhan, tjangkokan, tunas dan stek ditetapkan R. 2,50 tiap batang. Harga kaju okulasi R. 0,15 tiap manik, belum termasuk ongkos-ongkos pengepakan.

### PENGIRIMAN

Pengiriman sedapat mungkin dijalankan menurut permintaan dari para pemesan.

Sebelum dapat mengirinkan dengan rembours segala pengiriman dengan kereta api dijalankan sebagai ongefrankeerd bestelgoed atau setjara wagonlading (ongefrankeerd). Pengiriman dengan kapal-kapal dan Pos dijalankan franco.

Untuk menutup ongkos-ongkos pengiriman tersebut, maka untuk sementara, semua pesanan disertai pembayaran pandjaran 50% dari harga bibit pohon buah-buahan jang dipesan.

Setelah uang pandjaran tersebut kami terima, pesanan baru kami tjatat dalam buku

Djika pesanan dibatalkan, uang pandjaran tersebut akan segera kami kembalikan.

Djika tidak disertai permintaan istimewa, bibit tumbuh-tumbuhan dikirimkan selaku kerandjangan, ketjuali bibit djeruk jang biasanya dikirimkan djuga sebagai stump.

Segala kerusakan dan kematian sebagai akibat dari pengiriman ditanggung oleh jang memasan.

Pengurus Kebun Pertjabaan Pasarminggu

Disalin dari *Pertanian* 6 1951: 30

Keterangan: setelah pengumuman ini, Kebun Percobaan Pasar Minggu juga melampirkan harga bibit pohon buah-buahan sebanyak 43 jenis yang dimiliki.

### BAGAN 3

#### PENTING

Mulai tanggal 1 Agustus 1953 diadakan tarif istimewa untuk pengangkutan sayuran/buah2 segar yang dikirim sebagai kiriman hantaran (*bestelgoed*) sebagai berikut:

#### TARIF ISTIMEWA UNTUK ANGKUTAN BUAH2AN DAN SAJURAN SEGAR

1. Tarif ini berlaku untuk kiriman buah2an dan sayur2an hasil dalam Negeri.
2. Tiap2 potong (collo) tidak boleh melebihi 40 kg.
3. Pengangkutan dilakukan menurut peraturan2 pengangkutan kiriman hantaran dengan sjarat
  - a. Bea harus dibayar dahulu.
  - b. Pengangkutan dengan kereta api tjepat/expres tidak selalu dapat diselenggarakan.

4. Tarif a.	DJARAK	TIAP2 10 kg
	1-50 km	Rp1,--
	51-100 km	Rp1,50.--
	101-150 km	Rp2,--
	151-200 km	Rp2,50.--
	201-250 km	Rp3,--
	251-300 km	Rp3,50.--
	301-400 km	Rp4,50.--
	401-500 km	Rp5,50.--
	501-600 km	Rp6,50.--
	601-700 km	Rp7,50.--
	701-1.000 km	Rp10,--
	1.001-1.250 km	Rp12,50.--
	1.251-1.500 km	Rp15,--

- b. Untuk kiriman2 yang melalui Urusan Tambangan-Merak-Pandjang tarif menurut sub a harus ditambah dengan Rp1,-- bea tambangan untuk tiap2 10 kg.

5. Bea paling sedikit Rp4,--tiap2 kiriman, sudah termasuk beaja menjampaikan "berita kiriman datang".
6. Apabila dalam kiriman ini kedapatan barang2 lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 1 dari tarif ini, maka berlaku pasal 13 ayat 1 dan 2 dari **sjarat Pengangkutan** sepenuhnya.

A.n. Kepala Kantor Perkebunan Rakyat  
Ahli Pertanian Kl. I  
Ttd.

(H. HARDJOHUTOMO)

## PASAR MINGGU TEMPO DOELOE Dinamika Sosial Ekonomi Petani Buah 1921-1966

Pasar Minggu di masa lalu dikenal sebagai penghasil buah utama untuk penduduk Jakarta. Bahkan telah menjadi memori kolektif masyarakat Jakarta terutama terlihat dalam lirik-lirik lagu yang menggambarkan berbagai aspek dinamika kehidupan pertanian buah di Pasar Minggu kala itu. Buku ini menceritakan kembali dunia yang hilang (*the lost world*) tentang Pasar Minggu sebagai area penghasil buah-buahan ternama di masa silam.

Didekati secara kongjungtur, buku ini mendeskripsikan secara historis tentang tumbuh, berjaya, dan hilangnya sistem pertanian buah di Pasar Minggu. Gerak kunjungtur itu tidak hanya dilihat sebagai produk pelaku-pelaku besar semisal Pemerintah (dari Kolonial hingga awal Orde Baru). Akan tetapi, juga kehidupan dan penghidupan petani buah orang Betawi atau orang-orang yang tinggal di sekitarnya yang telah berkontribusi besar terhadap tumbuh, berjaya, dan hilangnya sistem pertanian buah-buahan tersebut.

Sebagai sebuah rekaman historis, buku ini dipandang penting untuk memahami dunia sosial ekonomi yang hilang, dengan segala penyebab dan berbagai implikasinya. Bermanfaat pula untuk melihat pertalian antara pinggiran Jakarta yang kala itu masih bercorak perdesaan, dengan pusat kotanya. Juga, bagaimana pertanian buah tersebut melintasi zaman (Kolonial Belanda, Pendudukan Jepang, Revolusi Kemerdekaan hingga terbentuknya Masyarakat Indonesia Baru Pasca Kemerdekaan).

### Biodata Penulis

Asep Suryana, lahir di Tasikmalaya 3 April 1971 adalah Staf Pengajar Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (2005-sekarang), dan pengajar paruh waktu di Prasetiya Mulya *Business School*. Sebelumnya, pernah mengajar di FISIP-UI (1997-2005). Menempuh jenjang pendidikan dari SD hingga SMA di Tasikmalaya. Ia juga sempat menjalani pendidikan Madrasah Diniyah Awalyah di sore hari ketika di SD dan SMP. Setelah lulus SMA Negeri 2 Tasikmalaya, ia menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik-UI (1997), dan S2 pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Pascasarjana UI (2007). Ia adalah salah satu peserta terbaik program Pelatihan dan Penelitian *Indonesia Across Orders: the Reorganization of Indonesian Society 1930-1960* yang diselenggarakan oleh PMB-LIPI bekerja sama dengan NIOD Belanda. Sejak tahun 1994 hingga sekarang telah melakukan berbagai kegiatan penelitian dan menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah serta mengikuti berbagai pertemuan ilmiah.



Buku Obor

#### Distributor:

Yayasan Obor Indonesia  
Jl. Pajnu No. 10 Jakarta 10230  
Telp. (021) 319 26978, 392 0114  
Faks. (021) 319 24466  
E-mail: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)

LIPI Press



ISBN